



**BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang :** a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kesejahteraan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran.

- Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun

5234) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun

- 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 1);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2024 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau, yakni sebagai berikut :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. neraca;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Buku I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :
 - a. buku I terdiri atas :
 1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. buku II terdiri atas :
 2. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 3. Lampiran III : Laporan operasional;
 4. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
 5. Lampiran V : Neraca;
 6. Lampiran VI : Laporan arus kas;
 7. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
 8. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;

9. Lampiran IX	: Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
10. Lampiran X	: Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
11. Lampiran XI	: Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
12. Lampiran XII	: Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
13. Lampiran XIII	: Daftar rekapitulasi aset tetap;
14. Lampiran XIV	: Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
15. Lampiran XV	: Daftar rekapitulasi aset lainnya;
16. Lampiran XVI	: Daftar dana cadangan daerah;
17. Lampiran XVII	: Daftar kewajiban jangka pendek;
18. Lampiran XVIII	: Daftar kewajiban jangka panjang;
19. Lampiran XIX	: Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
20. Lampiran XX	: Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas :
Lampiran XX.1	: Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
Lampiran XX.2	: Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a merupakan sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 2.057.359.021.735,74
b. Belanja dan Transfer	Rp. 2.186.767.247.053,52
Surplus/Defisit	Rp. (129.408.225.317,78)
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 162.393.001.085,04
- Pengeluaran	Rp. 0,00
Pembiayaan Netto	Rp. 162.393.001.085,04
SiLPA Tahun Berkenaan	Rp. 32.984.775.767,26

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 124.267.101.138,26 (Seratus dua puluh empat milyar dua ratus enam puluh tujuh juta seratus satu ribu seratus tiga puluh delapan rupiah dua puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	2.181.626.122.874,00
2. Realisasi	Rp.	2.057.359.021.735,74
Selisih Kurang	Rp.	(124.267.101.138,26)

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp. 391.858.875.820,48 (tiga ratus sembilan puluh satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah empat puluh delapan sen) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja Setelah Perubahan	Rp.	2.578.626.122.874,00
2. Realisasi	Rp.	2.186.767.247.053,52
Selisih Kurang	Rp.	391.858.875.820,48

c. Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah (Rp. 267.591.774.682,22) (Dua ratus enam puluh tujuh milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah dua puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut :

1. Defisit Setelah Perubahan	Rp.	(397.000.000.000,00)
2. Realisasi (defisit)	Rp.	(129.408.225.317,78)
Selisih Kurang	Rp.	(267.591.774.682,22)

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 234.606.998.914,96 (dua ratus tiga puluh empat milyar enam ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah sembilan puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pembiayaan	Rp.	397.000.000.000,00
2. Realisasi Penerimaan Pembiayaan	Rp.	162.393.001.085,04
Selisih Lebih	Rp.	234.606.998.914,96

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
2. Realisasi Pengeluaran Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Lebih	Rp.	0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan netto sejumlah Rp. 234.606.998.914,96 (dua ratus tiga puluh empat milyar enam ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah sembilan puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pembiayaan Netto	Rp.	397.000.000.000,00
2. Realisasi Pembiayaan Netto	Rp.	162.393.001.085,04
Selisih Lebih	Rp.	234.606.998.914,96

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b merupakan sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	162.263.868.113,04
Penggunaan SAL Sebagai		
b. Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	162.263.868.113,04
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan		
c. Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp.	32.984.775.767,26
Koreksi Kesalahan Tahun		
d. Sebelumnya	Rp.	0,00
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	32.984.775.767,26

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c merupakan sebagai berikut :

a. Jumlah Pendapatan-LO	Rp.	2.076.855.032.644,32
b. Jumlah Beban-LO	Rp.	2.204.415.593.068,72
c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional-LO	Rp.	(127.560.560.424,40)
d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional-LO	Rp.	(988.127.931,78)
e. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp.	(128.548.688.356,18)
f. Surplus/Defisit-LO	Rp.	(129.706.673.512,18)

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d merupakan sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp.	3.835.119.352.944,80
b. Surplus - LO	Rp.	(129.706.673.512,18)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp.	(1.198.418.640,38)
d. Ekuitas Akhir	Rp.	3.704.214.260.792,24

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e merupakan sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.	3.794.599.779.136,84
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	90.385.518.344,60
c. Jumlah Ekuitas	Rp.	3.704.214.260.792,24

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f merupakan sebagai berikut :

a. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp.	106.977.046.786,65
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	Rp.	(236.422.169.817,43)
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp.	129.132.972,00

d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	Rp.	(7.416.527,52)
e. Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Periode Berjalan	Rp.	(129.323.406.586,30)
f. Saldo Awal Kas (BUD), Kas di FKTP & Kas Dana BOS	Rp.	162.304.262.284,56
g. Saldo Akhir Kas (BUD), Kas di FKTP & kas dana BOS	Rp.	32.980.855.698,26
h. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	11.825.864,00
i. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	133.501,00
j. Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Rp.	0,00
k. Saldo Akhir Kas Lainnya	Rp.	0,00
l. Saldo Akhir Kas	Rp.	32.992.815.063,26

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dijabarkan dalam Peraturan Bupati.


Pasal 11

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 14 Agustus 2025
BUPATI INDRAGIRI HILIR,

HERMAN

Diundangkan di Tembilahan
Pada tanggal 14 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,


TANTAWI JAUHARI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025 NOMOR 4
11.26.A/2025

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

Uraian	2024	2023
Saldo Anggaran Lebih Awal	162.263.868.113,04	170.093.406.045,47
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	162.263.868.113,04	170.093.406.045,47
Subtotal	0,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	32.984.775.767,26	162.263.868.113,04
Subtotal	32.984.775.767,26	162.263.868.113,04
Saldo Anggaran Lebih Akhir	32.984.775.767,26	162.263.868.113,04

BUPATI INDRAGIRI HILIR



HERMAN

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	59.759.521.136,00	50.053.620.642,00	9.705.900.494,00	16,24
Pendapatan Retribusi Daerah	3.752.681.349,66	4.113.779.708,00	(361.098.358,34)	(9,62)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.967.609.930,00	14.112.352.048,00	(3.144.742.118,00)	(28,67)
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	152.443.477.256,52	131.764.246.283,83	20.679.230.972,69	13,57
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	226.923.289.672,18	200.043.998.681,83	26.879.290.990,35	11,85
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil Pajak	71.475.765.000,00	86.824.086.000,00	(15.348.321.000,00)	(21,47)
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	176.563.746.000,00	260.374.481.000,00	(83.810.735.000,00)	(47,47)
Dana Alokasi Umum	919.817.829.148,00	925.026.162.597,00	(5.208.333.449,00)	(0,57)
Dana Alokasi Khusus	310.083.135.457,00	320.731.403.822,00	(10.648.268.365,00)	(3,43)
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1.477.940.475.605,00	1.592.956.133.419,00	(115.015.657.814,00)	(7,78)
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
Dana Penyesuaian	186.238.341.500,00	192.085.204.000,00	(5.846.862.500,00)	(3,14)
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	186.238.341.500,00	192.085.204.000,00	(5.846.862.500,00)	(3,14)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	137.476.373.766,49	139.321.233.947,65	(1.844.860.181,16)	(1,34)
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	137.476.373.766,49	139.321.233.947,65	(1.844.860.181,16)	(1,34)
BANTUAN KEUANGAN				
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	6.506.703.000,00	15.587.916.000,00	(9.081.213.000,00)	(139,57)
Jumlah Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan	6.506.703.000,00	15.587.916.000,00	(9.081.213.000,00)	(139,57)
Jumlah Pendapatan Transfer	1.808.161.893.871,49	1.939.950.487.366,65	(131.788.593.495,16)	(7,29)
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah	41.769.849.100,65	10.865.821.490,58	30.904.027.610,07	73,99
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	41.769.849.100,65	10.865.821.490,58	30.904.027.610,07	73,99
JUMLAH PENDAPATAN	2.076.855.032.644,32	2.150.860.307.539,06	(74.005.274.894,74)	(3,56)
BEBAN				
Beban Pegawai	869.312.151.244,72	783.911.726.812,31	85.400.424.432,41	9,82
Beban Persediaan	95.882.967.138,05	168.833.727.602,64	(72.950.760.464,59)	(76,08)
Beban Jasa	444.612.315.030,27	396.389.519.696,27	48.222.795.334,00	10,85
Beban Pemeliharaan	26.951.728.374,06	33.510.223.299,72	(6.558.494.925,66)	(24,33)
Beban Perjalanan Dinas	126.590.329.483,50	144.977.473.403,00	(18.387.143.919,50)	(14,52)
Beban Subsidi	259.876.000,00	0,00	259.876.000,00	100,00
Beban Hibah	110.962.245.385,99	74.674.482.099,76	36.287.763.286,23	32,70
Beban Bantuan Sosial	299.000.000,00	500.126.230,00	(201.126.230,00)	(67,27)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	213.365.850.298,08	222.329.807.792,82	(8.963.957.494,74)	(4,20)
Beban Penyisihan	10.324.362.606,05	14.673.018.200,48	(4.348.655.594,43)	(42,12)
Beban Transfer	305.854.767.508,00	312.437.346.475,00	(6.582.578.967,00)	(2,15)
Beban Lain-lain	0,00	5.568.061.700,00	(5.568.061.700,00)	0,00
JUMLAH BEBAN	2.204.415.593.068,72	2.157.805.513.312,00	46.610.079.756,72	2,11
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	(127.560.560.424,40)	(6.945.205.772,94)	(120.615.354.651,46)	94,56
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
Defisit Penjualan Aset Non lancar	(1.078.960.903,78)	(3.810.809.920,99)	2.731.849.017,21	(253,19)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	90.832.972,00	1.497.977.094,90	(1.407.144.122,90)	(1.549,16)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(988.127.931,78)	(2.312.832.826,09)	1.324.704.894,31	(134,06)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(128.548.688.356,18)	(9.258.038.599,03)	(119.290.649.757,15)	92,80
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	1.157.985.156,00	183.454.962,00	974.530.194,00	84,16
POS LUAR BIASA	(1.157.985.156,00)	(183.454.962,00)	(974.530.194,00)	84,16
SURPLUS/DEFISIT-LO	(129.706.673.512,18)	(9.441.493.561,03)	(120.265.179.951,15)	92,72

BUPATI INDRAGIRI HILIR



HERMAN

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pajak Daerah	46.982.737.674,00	48.326.458.632,00
Penerimaan Retribusi Daerah	4.450.367.583,00	4.073.009.708,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.967.609.930,00	14.112.352.048,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	143.766.690.430,74	126.317.904.132,77
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	84.294.507.000,00	83.168.162.473,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	239.685.693.000,00	214.404.530.490,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	919.817.829.148,00	925.026.162.597,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	310.083.135.457,00	320.731.403.822,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	186.238.341.500,00	192.085.204.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	104.063.293.300,00	151.951.510.090,00
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah	6.506.703.000,00	15.587.916.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	2.056.856.908.022,74	2.095.784.613.992,77
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	854.797.200.588,72	785.061.183.209,31
Pembayaran Barang	676.548.786.597,38	736.412.520.191,32
Pembayaran Subsidi	259.876.000,00	0,00
Pembayaran Hibah	110.962.245.385,99	71.486.038.456,29
Pembayaran Bantuan Sosial	299.000.000,00	500.126.230,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	305.854.767.508,00	307.190.473.500,00
Pembayaran Tak Terduga	1.157.985.156,00	183.454.962,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	0,00	4.747.545.725,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	0,00	499.327.250,00
Jumlah Arus Keluar Kas	1.949.879.861.236,09	1.906.080.669.523,92
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	106.977.046.786,65	189.703.944.468,85
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Penjualan Aset Tetap	465.216.000,00	1.296.800.500,00

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Jumlah Arus masuk Kas	465.216.000,00	1.296.800.500,00
Arus Keluar Kas		
Perolehan Peralatan dan Mesin	53.172.618.238,21	59.841.785.825,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	52.866.220.044,23	57.555.551.158,70
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	125.646.558.484,99	76.405.708.976,58
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.167.368.150,00	5.281.348.935,00
Perolehan Aset lainnya	34.620.900,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	236.887.385.817,43	199.084.394.895,28
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(236.422.169.817,43)	(197.787.594.395,28)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	129.132.972,00	254.111.994,00
Jumlah Arus Masuk Kas	129.132.972,00	254.111.994,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	129.132.972,00	254.111.994,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	106.737.775.166,43	107.355.060.268,25
Penerimaan Sisa UP	2.102.302,88	393.270.662,00
Jumlah Arus Masuk Kas	106.739.877.469,31	107.748.330.930,25
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	106.747.160.495,83	107.419.609.044,25
Sisa Tahun 2023 yang Sudah Dibayarkan	133.501,00	2.102.302,88
Jumlah Arus Keluar Kas	106.747.293.996,83	107.421.711.347,13
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(7.416.527,52)	326.619.583,12
Kenaikan/Penurunan Kas	(129.323.406.586,30)	(7.502.918.349,31)
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di FKTP & Kas Dana BOS	162.304.262.284,56	169.807.180.633,87
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di FKTP & Kas Dana BOS	32.980.855.698,26	162.304.262.284,56
Kas di Bendahara Penerimaan	11.825.864,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	133.501,00	2.102.302,88
Saldo Akhir Kas Lainnya	0,00	767.500,00
Saldo Akhir Kas	32.992.815.063,26	162.307.132.087,44

BUPATI INDRAGIRI HILIR



HERMAN

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

Uraian	2024	2023
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	18.553.366.165,26	145.496.714.182,35
Kas di Bendahara Pengeluaran	133.501,00	2.102.302,88
Kas di Bendahara Penerimaan	11.825.864,00	0,00
Kas di BLUD	7.926.431.114,35	8.927.235.456,31
Kas Dana Kapitasi Pada FKTP	0,00	27.736.156,00
Kas Dana Bos	162.164.684,00	649.925.638,90
Kas Lainnya	389.162.542,65	7.203.418.351,00
Kas Dana BOK Puskesmas	5.949.731.192,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	149.226.687.827,00	136.819.451.098,00
Piutang Retribusi Daerah	11.909.718.952,20	11.915.968.952,20
Piutang Lain-lain PAD yang sah	50.550.973.568,08	42.123.703.721,52
Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	48.612.769.020,00	15.276.068.898,19
Penyisihan Piutang	(155.093.764.332,48)	(145.273.264.976,15)
Beban Dibayar dimuka	2.238.583.276,67	2.719.355.262,17
Persediaan	30.448.791.344,91	32.237.897.187,08
Jumlah Aset Lancar	170.886.574.719,64	258.126.312.230,45

Uraian	2024	2023
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen		
Investasi Non Permanen Lainnya	209.051.055,00	247.351.055,00
Jumlah Investasi Non Permanen	209.051.055,00	247.351.055,00
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	107.584.310.299,33	108.507.205.945,96
Jumlah Investasi Permanen	107.584.310.299,33	108.507.205.945,96
Jumlah Investasi Jangka Panjang	107.793.361.354,33	108.754.557.000,96
ASET TETAP		
Tanah	549.826.273.096,10	536.045.134.306,10
Peralatan dan Mesin	1.049.254.786.209,34	991.439.091.790,33
Gedung dan Bangunan	1.850.658.469.830,20	1.740.713.897.617,74
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.857.291.468.337,25	2.708.553.692.673,29
Aset Tetap Lainnya	13.637.546.843,51	14.589.136.193,51
Konstruksi Dalam Pengerjaan	440.834.940.117,35	463.270.249.082,20
Akumulasi Penyusutan	(3.337.565.979.040,71)	(3.119.955.288.476,79)
Jumlah Aset Tetap	3.423.937.505.393,04	3.334.655.913.186,39
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran	716.350.000,00	1.106.950.000,00
Tuntutan Ganti Rugi	1.387.336.979,92	1.535.099.766,92
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	14.006.135.056,00	14.006.135.056,00
Aset Tak Berwujud	4.106.608.100,00	4.066.987.200,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(3.144.010.300,00)	(2.910.686.660,00)
Aset Lain-lain	69.250.779.833,91	68.712.279.833,91
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.659.138.000,00	81.599.827.000,00

Uraian	2024	2023
Jumlah Aset Lainnya	91.982.337.669,83	168.116.592.196,83
JUMLAH ASET	3.794.599.779.136,84	3.869.653.374.614,62
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	8.039.296,00	17.823.125,00
Pendapatan Diterima Dimuka	809.041.833,34	146.332.500,00
Utang Belanja	88.036.612.607,09	32.677.189.180,91
Utang Jangka Pendek Lainnya	1.531.824.608,17	1.692.676.863,91
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	90.385.518.344,60	34.534.021.669,82
JUMLAH KEWAJIBAN	90.385.518.344,60	34.534.021.669,82
EKUITAS		
Ekuitas	3.704.214.260.792,24	3.835.119.352.944,80
Jumlah Ekuitas	3.704.214.260.792,24	3.835.119.352.944,80
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.794.599.779.136,84	3.869.653.374.614,62

BUPATI INDRAGIRI HILIR



HERMAN

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

Uraian	2024	2023
Ekuitas Awal	3.835.119.352.944,80	3.865.465.880.925,72
Surplus/Defisit - LO	(129.706.673.512,18)	(9.441.493.561,03)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	(1.198.418.640,38)	(20.905.034.419,89)
Koreksi Tambah/Kurang Dampak Kumulatif		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	(141.850.000,00)
Koreksi Pencatatan Aset Lancar	(369.000,40)	0,00
Koreksi Pencatatan Aset Tetap	155.569.300,00	(2.986.676.706,53)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset	(1.455.940.492,54)	(181.754.121,62)
Koreksi Akumulasi Amortisasi	(9.914.800,00)	0,00
Koreksi Lain-lain	751.821,00	14.629.670,30
Koreksi Utang	131.375.748,74	(66.779.722,00)
Koreksi Investasi	0,00	(18.354.125.720,41)
Koreksi Piutang	(150.364.200,18)	752.147.447,00
Koreksi Aset Lain-Lain	130.472.983,00	59.374.733,37
Ekuitas Akhir	3.704.214.260.792,24	3.835.119.352.944,80

BUPATI INDRAGIRI HILIR


HERMAN



BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintahan Laporan Keuangan ini meliputi:

1.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp2.057.359.021.735,74 dari anggaran sebesar Rp2.181.626.122.874,00 berupa Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp206.669.519.330,74 dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp233.222.088.268,00. Pendapatan Transfer Rp1.850.689.502.405,00 dari anggaran sebesar Rp1.948.404.034.606,00 dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp2.186.767.247.053,52 dari rencana Belanja dan Transfer sebesar Rp2.578.626.122.874,00. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp162.393.001.085,04 dari anggaran sebesar Rp397.000.000.000,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00.

1.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyediakan informasi mengenai saldo anggaran lebih awal, mutasi perubahan saldo anggaran lebih, dan saldo anggaran lebih akhir suatu entitas pelaporan. Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp162.263.868.113,04 dan Realisasi Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp162.263.868.113,04. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun 2024 sebesar Rp32.984.775.767,26. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp0,00 sehingga Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp32.984.775.767,26.

1.3 NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp3.794.599.779.136,84 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp170.886.574.719,64, Aset Tetap (netto) sebesar Rp3.423.937.505.393,04, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp107.793.361.354,33 dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp91.982.337.669,83. Nilai Kewajiban Rp90.385.518.344,60 dan Ekuitas tahun 2024 sebesar Rp3.704.214.260.792,24.

1.4 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.076.855.032.644,32 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp2.204.415.593.068,72 sehingga terdapat Surplus Kegiatan Operasional minus sebesar Rp127.560.560.424,40 dan Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Defisit Rp1.157.985.156,00 yang bersumber dari Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sehingga entitas mengalami Surplus/Defisit-LO minus sebesar Rp129.706.673.512,18.



1.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas merupakan laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp106.977.046.786,65, arus kas bersih dari aktivitas investasi minus sebesar Rp236.422.169.817,43, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan/pembiayaan sebesar Rp129.132.972,00, arus kas bersih dari aktivitas transitoris/non anggaran minus sebesar Rp7.416.527,52 sehingga kenaikan/penurunan kas minus sebesar Rp129.323.406.586,30.

1.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp3.835.119.352.944,80 ditambah Surplus/Defisit-LO minus sebesar Rp129.706.673.512,18 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi minus sebesar Rp1.198.418.640,38 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.704.214.260.792,24.

1.7 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

1.7.1 Sekilas Tentang Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaga Negara Nomor 2754).

Pemerintah Indragiri Hilir terletak di bagian Selatan Provinsi Riau dengan luas wilayah 18.812,97 km², terdiri dari daratan 11.605,97 km² dan perairan 7.207 km² (perairan umum 889 km² dan laut 6.318 km²), dengan batas-batas wilayah adalah sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, sebelah Selatan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Indragiri Hilir berkedudukan di Tembilahan. Kabupaten Indragiri Hilir dipimpin oleh seorang Bupati dan Wakil Bupati. Di dalam melaksanakan tugasnya terdapat 51 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari 6 Badan, 22 Dinas, 2 Sekretariat, 20 Kecamatan dan Inspektorat yang menjalankan roda Pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada :

Bupati : HERMAN
Wakil : YULIANTINI

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Format Laporan Keuangan mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Bagan Akun



Standar Pemerintah Daerah. Periode pelaporan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran 2024. Laporan keuangan ini terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Lapoan Keuangan (CaLK)

1.7.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang di bidang keuangan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara, Gubernur/Bupati/ Walikota menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Dalam hal ini Laporan Keuangan Pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan merupakan Laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum Laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan; dan
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Agar informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan dapat dipahami secara benar oleh para pembacanya, untuk menghindari kesalahpahaman, harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Oleh karena itu, penyajian Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar Laporan Keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan.

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian dari Laporan Keuangan, disusun berdasarkan Laporan Realisasi APBD dengan memuat penjelasan pos-pos Laporan



Realisasi Anggaran, Neraca dan Arus Kas, memuat informasi pelaksanaan APBD dan BLUD Tahun 2024 yang meliputi:

- Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target;
- Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan;
- Kebijakan akuntansi yang penting;
- Penjelasan pos-pos Laporan keuangan; dan
- Pengungkapan pos-pos Laporan keuangan yang menggunakan basis akrual dan informasi tambahan lainnya.

1.7.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan didasarkan pada:

- Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
- Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
- Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir; dan
- Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

1.7.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
BAB III	: IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
BAB IV	: KEBIJAKAN AKUNTANSI



BAB V	: PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
5.1	: LAPORAN REALISASI ANGGARAN
5.2	: LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
5.3	: NERACA
5.4	: LAPORAN OPERASIONAL
5.5	: LAPORAN ARUS KAS
5.6	: LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAB VI	: PENJELASAN ATAS INFORMASI KEUANGAN
BAB VII	: PENUTUP



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Kebijakan ekonomi menggambarkan antara tujuan utama pembangunan dengan capaian indikator yang dituju dan bagaimana antar komponen saling terkait, baik kebijakan ekonomi pusat maupun daerah. Kebijakan ekonomi daerah menggambarkan hubungan antara tujuan utama pembangunan daerah dengan capaian indikator makro ekonomi daerah dan bagaimana antar komponen saling mempengaruhi. Penghitungan statistik neraca nasional mengikuti buku petunjuk yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dikenal sebagai Sistem Neraca Nasional (SNN). SNN adalah rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep definisi klasifikasi dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator tertentu seperti Produk Domestik Bruto (PDRB). Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi PBB yang tertuang dalam Sistem Neraca Nasional 2008 (SNA 2008).

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirincikan menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial; dan jasa lainnya. PDB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDB menurut pengeluaran dirinci menjadi tujuh komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga pengeluaran konsumsi LNPR pengeluaran konsumsi pemerintah pembentukan modal tetap bruto perubahan inventori ekspor barang dan jasa dan impor barang dan jasa. Berdasarkan penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku PDRB Kabupaten Indragiri Hilir menurut harga berlaku pada tahun 2024 adalah 94.985,06 miliar rupiah. Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor pertanian perikanan dan kehutanan yaitu sebesar 46,06 persen diikuti oleh sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan masing-masing 25,55 persen dan 14,91 persen.

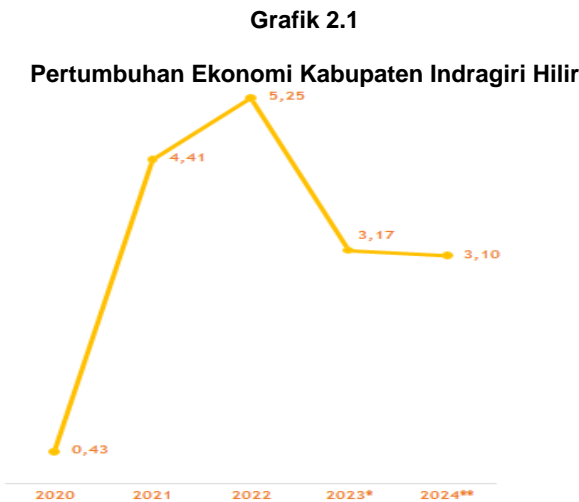
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan



dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 tanggal 14 Juni 1965 dengan ibukotanya Tembilahan. Pada tahun 2005 Wilayah Administrasi Pemerintahan daerah ini terdiri dari 20 Kecamatan, 18 Kelurahan dan 174 desa.

Pada tahun 2011, jumlah kelurahan dan desa di Kabupaten Indragiri Hilir mengalami penambahan karena adanya pemekaran desa yaitu menjadi 203 desa dan 33 kelurahan. Penambahan jumlah desa dan kelurahan ini disebabkan karena adanya pemekaran sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4, 5, dan 6 Tahun 2011. Perda Nomor 4 mengatur mengenai perubahan status dari desa menjadi kelurahan. Jumlah desa yang berubah status sebanyak 4 desa. Perda Nomor 5 mengatur tentang pembentukan kelurahan baru karena adanya pemekaran kelurahan. Perda Nomor 6 mengatur tentang pembentukan desa baru karena adanya pemekaran desa. Pada tahun 2014 terdapat perubahan status kembali dari desa menjadi kelurahan. Jumlah desa berkurang menjadi 197 desa, sedangkan kelurahan bertambah menjadi 39 kelurahan.

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu instrumen untuk menilai hasil pembangunan. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat dari kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahunnya, PDRB Kabupaten Indragiri Hilir dihitung berdasarkan Atas Dasar Harga yang Berlaku (ADHB). Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2021 mengalami percepatan sebesar 4,41%, pada tahun 2022 mengalami percepatan sebesar 5,25% sedangkan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 3,17% dan pada tahun 2024 mengalami penurunan 3,10%.



Sumber : bps.go.id

Selama periode 2020 – 2024, kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Indragiri Hilir terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, diikuti industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, dan konstruksi. Lapangan usaha pertanian memberikan kontribusi terbesar pada dengan tren kontribusinya meningkat yaitu dari 46,77% pada tahun 2020 menjadi 47,53% pada tahun 2021, kemudian kembali mengalami penurunan sebesar 46,25% pada 2022 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023 yaitu sebesar 46,67 dan menurun sedikit pada tahun 2024 yaitu 46,06. Meski kontribusi lapangan usaha pertanian cenderung menurun pada tahun 2024 namun kontribusi pertanian yang besar telah meyakinkan semua pihak bahwa Pertanian adalah sektor unggulan di Kabupaten Indragiri Hilir. Penurunan kontribusi lapangan usaha pertanian yang seharusnya diimbangi dengan meningkatnya tren kontribusi industri pengolahan. Kontribusi industri pengolahan



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

berfluktuatif meningkat yaitu dari 24,09% pada tahun 2023 meningkat menjadi 25,55% pada tahun 2024. Kondisi ini menggambarkan telah mulai terjadi kemajuan dalam transformasi ekonomi di Kabupaten Indragiri Hilir dari pertanian ke industri. Pada tabel 2.1 ini merupakan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di kabupaten Indragiri hilir dari tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Indragiri Hilir (Persen), 2020-2024

	Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022	2023*	2024**
	1	2	3	4	5	6
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	46,77	47,53	46,25	46,67	46,06
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	0,83	1,11	2,21	1,83	1,14
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	24,06	24,64	25,12	24,09	25,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi/Construction	5,88	5,77	5,75	6,75	6,5
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	16,11	14,99	14,94	14,79	14,91
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	0,93	0,9	0,93	1,02	1,06
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	0,38	0,39	0,4	0,43	0,44
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	0,65	0,62	0,58	0,58	0,57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	0,58	0,56	0,56	0,56	0,52
L	Real Estat/Real Estate Activities	0,86	0,79	0,76	0,77	0,75
M,N	Jasa Perusahaan/Business ActivitiesAdministrasi Pemerintahan,Pertahanan, dan Jaminan	0	0	0	0	0
O	Sosial Wajib/PublicAdministration and Defence;Compulsory Social Security	1,66	1,49	1,33	1,3	1,32



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022	2023*	2024**
	1	2	3	4	5	6
P	Jasa Pendidikan/EducationJasa Kesehatan dan Kegiatan	0,62	0,57	0,53	0,53	0,51
Q	Sosial/Human Health and SocialWork Activities	0,18	0,18	0,16	0,18	0,2
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	0,42	0,39	0,4	0,43	0,42
	Produk Domestik Regional					
	Bruto/Gross Regional	100	100	100	100	100
	Domestic Product					

Sumber: bps.go.id

2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan kesehatan pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak. IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standarisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. Capaian manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam dalam hal pembangunan manusia.

- 1. Sangat tinggi : $IPM \geq 80$;
- 2. Tinggi : $70 \leq IPM < 80$;
- 3. Sedang : $60 \leq IPM < 70$;
- 4. Rendah : $IPM < 60$.

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tahun 2024 sebesar 3,52 persen. Pertumbuhan ekonomi terbesar berada di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai masing-masing 4,61 dan 5,02 persen. Sedangkan Kabupaten Indragiri Hilir mengalami penurunan sebesar 2,25 persen dibanding tahun 2023 yaitu 3,10 persen.

Tabel 2.2

Indeks Pembangunan manusia dikabupaten Indragiri Hilir 2020-2024

Tahun Year	UHH ¹ Life Expectancy	HLS/EYS ²	RLS/MYS ³	Pengeluaran per Kapita Per Capita Expenditure	IPM/HDI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2020	72,03	11,91	7,23	9.954	68,43



Tahun Year	UHH ¹ Life Expectancy	HLS/EYS ²	RLS/MYS ³	Pengeluaran per Kapita Per Capita Expenditure	IPM/HDI
2021	72,11	11,93	7,24	9.945	68,49
2022	72,19	12,19	7,26	10.234	69,12
2023	72,27	12,20	7,31	10.659	69,64
2024	72,39	12,21	7,32	11.050	70,07

Sumber : bps.go.id

2.1.3 Garis Kemiskinan (GK)

Garis kemiskinan (GK) merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minumum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita perhari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Persentase penduduk miskin menggambarkan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah indeks yang menjelaskan sejauh mana kehilangan pencapaian pembangunan dalam tiga aspek pembangunan manusia (kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi) sebagai akibat adanya ketimpangan gender. Ukuran Kemiskinan sebagai berikut :

- a. *Head Count Index* (HCI-P0) adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
- b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- c. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada tahun 2024 garis kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Rp 629.570 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 41,05 (000) orang. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,02 persen dari tahun 2023 yaitu 5,66 persen pada tahun 2024 dan 5,64 pada tahun 2023.



Tabel 2.3

Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Indragiri Hilir

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) <i>Poverty Line</i> (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) <i>Number of Poor People</i> (thousand)	Persentase Penduduk Miskin <i>Percentage of Poor People</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	315.988	56,82	7,99
2017	368.134	55,40	7,70
2018	435.202	51,42	7,05
2019	450.728	48,29	6,54
2020	495.305	44,29	5,93
2021	518.283	44,61	6,18
2022	568.879	43,22	5,98
2023	597.122	40,86	5,64
2024	629.570	41,05	5,66

Sumber:bps.go.id

2.2 Mandatory Spending

Mandatory spending adalah kewajiban pemerintah untuk membiayai program dan kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan dasar. *Mandatory spending* diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* adalah: mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, mendorong kinerja sektor tertentu, memenuhi amanat UUD 1945. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2024 yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dalam APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2024 Rp2.578.626.122.874,00 atau 32% dari total belanja daerah, telah memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen).

Table 2.4

Belanja *Mandatory Spending* Bidang pendidikan 2024

Dalam Rupiah

No		Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi	Persen
1.	a.	Belanja pada Dinas Pendidikan:	782.055.692.439,00	666.201.165.542,86	85,19
		1) Belanja Operasi:	718.017.016.193,00	601.451.024.135,33	83,77
		a. belanja pegawai;	597.021.556.389,00	501.518.796.482,00	84,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

No		Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi	Persen
		b. belanja barang dan jasa;	93.998.979.804,00	81.062.831.625,72	86,24
		c. belanja hibah;	26.369.480.000,00	18.869.396.027,61	71,56
		d. belanja bantuan sosial.	627.000.000,00	0,00	0,00
		2) Belanja Modal;	64.038.676.246,00	64.750.141.407,53	101,11
	b.	Urusan Bidang Kebudayaan dan Bidang Kepemudaaan dan Olahraga:	30.277.189.681,00	22.537.927.412,00	74,44
		1) Belanja Operasi:	21.773.113.381,00	15.617.763.662,00	71,73
		a. belanja pegawai;	4.601.242.555,00	3.820.595.996,00	83,03
		b. belanja barang dan jasa;	13.431.970.826,00	8.770.981.216,00	65,30
		c. belanja hibah;	3.739.900.000,00	3.026.186.450,00	80,92
		d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00	0,00
		2) Belanja Modal;	8.504.076.300,00	6.920.163.750,00	81,37
	c.	Urusan Bidang Perpustakaan:	5.143.441.606,00	4.013.745.676,00	78,04
		1) Belanja Operasi:	5.025.582.581,00	3.920.854.237,00	78,02
		a. belanja pegawai;	2.766.381.606,00	2.187.025.586,00	79,06
		b. belanja barang dan jasa;	2.259.200.975,00	1.733.828.651,00	76,75
		c. belanja hibah;	0,00	0,00	0,00
		d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00	0,00
		2) Belanja Modal;	117.859.025,00	92.891.439,00	78,82
	d.	Belanja diluar Dinas Pendidikan, urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:	1.722.000.000,00	1.644.000.000,00	95,47
		1) Belanja Transfer:			
		Belanja bantuan keuangan	0,00	0,00	0,00
		2) Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat pada SKPD Sekretariat Daeah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00
		3) Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial pada SKPD Sekretariat Daerah	222.000.000,00	144.000.000,00	64,86
2.		Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan	819.198.323.726,00	694.396.838.630,86	84,77



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

No	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi	Persen
	(a+b+c+d+e)			
3.	Total Belanja Daerah	2.578.626.122.874,00	2.186.769.725.861,92	84,80
4.	Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Belanja Daerah	32%		

b. Alokasi Belanja Insfrastruktur Pelayanan Publik

Jumlah alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik dalam APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2024 Rp 468.880.571.341,00 atau 18,31% dari total belanja daerah.

Tabel 2.5
Belanja *Mandatory Spending* Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik Tahun 2024

Dalam Rupiah

No	Komponen Perhitungan	Jumlah dalam APBD 2024	Realisasi	Persentase Realisasi
1	a) Belanja Modal	305.275.432.900,00	236.887.385.817,43	77,60
	1) Peralatan dan Mesin	58.140.385.353,00	53.172.618.238,21	91,46
	2) Bangunan dan Gedung	70.871.705.158,00	52.866.220.044,23	74,59
	3) Jalan, jaringan dan irigasi	172.135.521.389,00	125.646.558.484,99	72,99
	4) Aset tetap lainnya	4.052.821.000,00	5.167.368.150,00	127,50
	5) Aset lainnya	75.000.000,00	34.620.900,00	46,16
	b) Belanja pemeliharaan	40.219.429.816,00	27.439.300.011,49	68,22
2	a) Belanja Hibah	123.385.708.625,00	110.980.245.740,99	89,95
	b) Belanja Bantuan Sosial	3.563.702.075,00	299.000.000,00	
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	468.880.571.341,00	375.306.931.569,91	80,04
Persentase Belanja Infrastruktur		18,31%		

c. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp 18.161.716.629,00 atau 0,70% dari total belanja daerah dalam APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran.



Tabel 2.6
Belanja *Mandatory Spending* Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2024

Dalam Rupiah			
NO	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Pegawai	9.146.443.893,00	7.163.079.519,00
2	Belanja Barang dan Jasa	8.324.582.594,00	5.378.281.850,27
3	Belanja Modal	690.690.142,00	592.062.000,00
	Total Belanja	18.161.716.629,00	13.133.423.369,27
4	Total Belanja Daerah	2.578.626.122.874,00	2.186.769.725.861,92
5	Rasio anggaran pembinaan dan pengawasan (%)	0,70%	0,60%

- d. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah
- Alokasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan ASN sebesar Rp1.972.860.495,00 atau 0,08% dari total belanja daerah dalam APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2024.

Tabel 2.7
Belanja *Mandatory Spending* Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah 2024

Dalam Rupiah			
NO	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi
1	Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.511.437.295 ,00	955.756.914,00
2	Subkegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	461.423.200,00	256.809.934,00
3	Subkegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	596,700,000,00	274.679.098,00
4	Subkegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,399,919,750,00	957.804.418,00
5	Total Anggaran Pendidikan dan Pelatihan ASN	1.972.860.495,00	274.679.098,00
6	Total Belanja Daerah	2.578.626.122.874,00	
7	Rasio anggaran pendidikan dan pelatihan (%)	0,08%	



e. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Dana Desa

Alokasi Dana Desa Daerah untuk desa di Kabupaten Indragiri Hilir.

- 1. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa Untuk Pagu Rp 7.815.000.000,00 tidak terealisasi.
- 2. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk pagu Rp 183.427.863.000,00 terealisasi 100%.
- 3. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa untuk pagu 122.556.183.400,00 terealisasi 99,89%

Tabel 2.8

Belanja *Mandatory Spending* Alokasi Dana Desa Tahun 2024

Dalam Rupiah

No	Komponen Perhitungan	Jumlah dalam APBD 2024	Realisasi	Persentase Realisasi
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	7.815.000.000,00	0,00	0,00%
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	183.427.863.000,00	183.427.863.000,00	100,00%
3	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	122.556.183.400,00	122.426.904.508,00	99,89%
Total		313.799.046.400,00	305.854.767.508,00	97,47%

2.4 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang menyangkut kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan yang terintegrasi dalam satu dokumen APBD. Kebijakan pengelolaan keuangan yang terintegrasi dalam APBD merupakan kebijakan yang strategis dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah. Kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir meliputi kebijakan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

2.4.1 Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam mengurangi ketimpangan horizontal dan vertikal guna mewujudkan pemerataan layanan dan kesejahteraan, dilakukan redesain pengelolaan transfer ke daerah untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong perbaikan kualitas belanja yang efisien dan efektif, melalui Transfer ke Daerah (TKD) yang berbasis kinerja. Disamping itu, dalam rangka akselerasi pembangunan, daerah dapat melakukan pembiayaan utang daerah dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal. Dalam pilar pertama ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mendorong *creative and sustainable financing* berbasis kerjasama melalui skema Sinergi Pendanaan. Pilar kedua merupakan penguatan *local taxing power* dengan tetap menjaga perekonomian dan kemudahan berusaha di daerah dengan cara menurunkan *administration* dan *compliance cost*, memperluas basis pajak, dan harmonisasi dengan peraturan perundangan lain. Untuk meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih efisien, produktif dan akuntabel, dalam pilar ketiga ini dilakukan



dengan cara meningkatkan kualitas penganggaran belanja daerah, meningkatkan kualitas pengalokasian belanja daerah, dan meningkatkan kualitas SDM dan pengawasan internal. Dalam pilar keempat, yaitu harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk mencapai tujuan nasional, dilakukan dengan cara penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah, penetapan batas kumulatif defisit dan pembiayaan utang APBD, pengendalian dalam kondisi darurat, dan sinergi bagan akun standar. Keuangan negara merupakan konsolidasi antara APBN dan APBD, sehingga perlu didukung dengan sistem informasi yang dapat melakukan konsolidasi keuangan Pusat dan Daerah dan sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif dengan membangun sistem informasi konsolidasi kebijakan fiskal nasional berbasis interkoneksi dan interoperabilitas. Secara umum anggaran pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Indragiri Hilir masih bertumpu pada dana perimbangan (sampai dengan tahun 2020). Kenyataan ini membuat Pemerintah Kabupaten masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya, sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan dalam APBD benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang ditempuh dalam mencapai target tersebut serta dasar hukum penerimaannya.

Komponen pendapatan daerah pada tahun 2024-2026 ditargetkan naik pertahun sampai dengan tahun 2026 yang didorong oleh peningkatan PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan yang sah. Jika dilihat pada seluruh komponen pendapatan daerah, komponen pendapatan asli daerah yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Masing-masing pendapatan akan ditargetkan naik khususnya dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 sebesar 2% sampai dengan 15%, dimana total pendapatan asli daerah tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 200 miliar dan akan terus naik sampai dengan tahun 2026 menjadi Rp. 255 miliar. Kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan.

Kondisi ini didukung oleh kebijakan pemulihan berbagai sektor ekonomi sehingga memberikan dampak positif kepada proporsi dana transfer yang akan disalurkan ke daerah. Di samping itu juga dilakukan penguatan kebijakan untuk melakukan Ekstensifikasi dan Intensifikasi serta perbaikan manajemen sumber pendapatan yang ada. Ekstensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan pengelolaan sumber penerimaan baru serta penjaringan Wajib Pajak (WP)/Wajib Retribusi baru. Pengelolaan sumber penerimaan baru terutama untuk lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Intensifikasi pajak meliputi validitas data pajak potensi pajak daerah, peningkatan sosialisasi perpajakan, peningkatan operasi (SIDAK), penegakan sanksi hukum, peningkatan pengawasan dan pembinaan aparat, penagihan terhadap penunggak daerah, dan pemberian hadiah wajib. Target peningkatan pajak daerah ditentukan dengan asumsi bahwa seluruh potensi-potensi pajak yang hilang dapat dapat dipungut.

Adapun rincian Anggaran pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.9
Anggaran Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

Dalam Rupiah	
Uraian	Anggaran 2024
PENDAPATAN	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	
Pendapatan Pajak Daerah	62.505.000.000,00
Pendapatan Retribusi Daerah	3.406.300.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Uraian	Anggaran 2024
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.660.733.802,00
Lain-lain PAD yang sah	150.650.054.466,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	233.222.088.268,00
PENDAPATAN TRANSFER	
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	
Dana Bagi Hasil Pajak	71.475.682.000,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	170.904.608.000,00
Dana Alokasi Umum	1.021.515.931.000,00
Dana Alokasi Khusus	350.376.563.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1.614.272.784.000,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA	
Dana Penyesuaian	191.163.118.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	191.163.118.000,00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	129.736.132.606,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00
Pendapatan Bantuan Keuangan	13.232.000.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	142.968.132.606,00
Jumlah Pendapatan Transfer	1.948.404.034.606,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	
Pendapatan Hibah	0,00
Lain lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	2.181.626.122.874,00

2.4.2 Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terkait dengan pengelolaan belanja daerah adalah mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta asas kepatutan dan kewajaran dalam penggunaan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat menjamin seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



Kebijakan pengalokasian belanja daerah memprioritaskan pada belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai (gaji dan tunjangan), belanja transfer, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pada periode ini Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir akan menggunakan prinsip *money follow* program dalam mengalokasikan pagu indikatif belanja langsung OPD yang artinya program dan kegiatan strategis menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran terlebih dahulu.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, maka pagu indikatif bagi belanja langsung setiap OPD, di susun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap OPD, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Perencanaan pagu indikatif belanja langsung OPD diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efektif dan efisien.

Adapun rincian Anggaran Belanja Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.10
Anggaran Belanja Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

Dalam Rupiah

Uraian	Anggaran 2024
BELANJA	
BELANJA OPERASI	
Belanja Pegawai	1.005.993.162.987,00
Belanja Barang dan Jasa	818.509.330.658,00
Belanja Subsidi	339.150.000,00
Belanja Hibah	123.385.708.625,00
Bantuan Sosial	3.563.702.075,00
Jumlah Belanja Operasi	1.951.791.054.345,00
BELANJA MODAL	
Belanja Tanah	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	58.140.385.353,00
Belanja Gedung dan Bangunan	70.871.705.158,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	172.135.521.389,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	4.052.821.000,00
Belanja Aset Lainnya	75.000.000,00
Jumlah Belanja Modal	305.275.432.900,00
BELANJA TAK TERDUGA	
Belanja Tak Terduga	2.669.459.229,00
Jumlah Belanja Tak Terduga	2.669.459.229,00
JUMLAH BELANJA	2.259.735.946.474,00



Uraian	Anggaran 2024
TRANSFER	
TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN	
Bagi Hasil Pajak ke Desa	4.734.657.198,00
Bagi Hasil Retribusi ke Desa	356.472.802,00
Belanja Bantuan Keuangan	313.799.046.400,00
Jumlah Transfer	318.890.176.400,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.578.626.122.874,00

Sedangkan arah kebijakan belanja daerah pada tahun 2024, meliputi:

- 1) Penggunaan belanja yang mendorong peningkatan perekonomian daerah;
- 2) Penambahan belanja pegawai sebagai akibat dari kebijakan rencana rekrutmen tenaga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan rekrutmen CPNS;
- 3) Penggunaan prinsip selektif, efektif, efisien, patut dan wajar dalam penyusunan rencana anggaran;
- 4) Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana peraturan perundang-undangan;
- 5) Upaya akomodasi usulan masyarakat melalui musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD dengan memperhatikan prioritas pembangunan, kewenangan dan kapasitas anggaran yang adil dan transparan; dan
- 6) Dukungan terhadap prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

2.4.3 Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan daerah dan Belanja Daerah dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, penyertaan modal dan transfer ke Dana Cadangan.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal. Kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

- a. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan surplus maka akan dilakukan pemberdayaan kas sebagai investasi jangka pendek dalam bentuk deposito sehingga akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pendapatan bunga deposito;
- b. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan defisit maka akan dilakukan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya untuk menutup defisit. Untuk menutup defisit maka akan dilakukan rasionalisasi belanja program dan kegiatan yang diusulkan oleh OPD;
- c. Pada anggaran Tahun 2023 perlu dipersiapkan dana cadangan untuk persiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.



Penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal. Pembiayaan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 ditunjukkan pada Tabel 2.11 dibawah ini :

Tabel 2.11

Anggaran Pembiayaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

Uraian	Anggaran 2024
PEMBIAYAAN	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
Penggunaan SILPA	397.000.000.000,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	397.000.000.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	397.000.000.000,00



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Berdasarkan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang menjelaskan ruang lingkup aturan dalam Paragraf 21 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menerapkan penganggaran berbasis AkruaI secara lebih luas pada tahun 2024. Artinya, angka-angka yang telah ditetapkan dalam APBD selain mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan kas, juga mencatat jumlah hutang dan piutang. Basis akruaI mendukung penggunaan anggaran sebagai teknik pengendalian. Melalui mekanisme rekening kas umum daerah dan ada juga yang tidak melalui rekening kas daerah sebagai contoh, penganggaran pendapatan dan belanja dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang pelaksanaannya langsung dikelola oleh masing-masing sekolah negeri di Kabupaten Indragiri Hilir tanpa melalui rekening kas umum daerah.

Dari sisi pembiayaan, APBD tahun 2024 juga telah berpedoman pada Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 03 tentang Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/ Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang menjelaskan ruang lingkup aturan dalam Paragraf 52 PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menganggarkan pendapatan sebesar Rp2.181.626.122.874,00 dan terealisasi sebesar Rp2.057.359.021.735,74 atau sebesar Rp94,30%. Dibandingkan dengan tahun 2023 pendapatan mengalami penurunan sebesar Rp39.722.392.757,03 atau sebesar 1,89%. Penurunan Realisasi pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan Target Pendapatan Daerah yang ditetapkan Tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2023 yakni sebesar + 6%, sedangkan dari sisi penerimaan sedikit mengalami penurunan dalam hal ketercapaian secara persentase.
2. Kondisi penurunan ini disebabkan antara lain Penyaluran DBH Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2024 dan Penyaluran DBH Pusat yang belum secara keseluruhan disalurkan hingga akhir Tahun 2024.
3. Hal ini juga dipengaruhi dari sector penerimaan Pajak Daerah (BPHTB) Tahun 2024 yang turun hingga mencapai 174,73%, hal ini dibandingkan tahun 2023 dikarenakan dampak kenaikan target BPHTB Tahun 2024 dibanding dengan target BPHTB Tahun 2023 dengan rasio kenaikan 73,19%.
4. Kondisi ini tidak menjadi pengaruh upaya pembangunan daerah dengan terus mengoptimalkan pendapatan daerah, diantaranya penggalan potensi daerah dan melakukan perhitungan riil atas potensi daerah dimaksud.



Tabel 3.1
Laporan Realisasi Pendapatan

URAIAN	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pendapatan Pajak Daerah	62.505.000.000,00	46.982.737.674,00	75,17
Pendapatan Retribusi Daerah	3.406.300.000,00	4.462.190.683,00	130,34
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.660.733.802,00	10.967.609.930,00	65,83
Lain-lain PAD yang sah	150.650.054.466,00	144.256.981.043,74	95,77
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	233.222.088.268,00	206.669.519.330,74	88,61
PENDAPATAN TRANSFER			
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN			
Dana Bagi Hasil Pajak	71.475.682.000,00	84.294.507.000,00	117,93
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	170.904.608.000,00	239.685.693.000,00	140,25
Dana Alokasi Umum	1.021.515.931.000,00	919.817.829.148,00	90,04
Dana Alokasi Khusus	350.376.563.000,00	310.083.135.457,00	88,51
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1.614.272.784.000,00	1.553.881.164.605,00	96,26
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA			
Dana Penyesuaian	191.163.118.000,00	186.238.341.500,00	97,42
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	191.163.118.000,00	186.238.341.500,00	97,42
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	129.736.132.606,00	104.063.293.300,00	80,21
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Bantuan Keuangan	13.232.000.000,00	6.506.703.000,00	49,17
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	142.968.132.606,00	110.569.996.300,00	77,34
Jumlah Pendapatan Transfer	1.948.404.034.606,00	1.850.689.502.405,00	94,99
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
Lain lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	2.181.626.122.874,00	2.057.359.021.735,74	94,30

3.1.1 REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2024

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 menunjukkan adanya Kenaikan yaitu Rp12.540.275.309,97. Dengan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 6,05%. Dengan demikian, ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah pada pemerintah pusat dirasakan sangat besar yaitu sebesar 89,96% sedangkan terhadap pemerintah Provinsi sebesar 53,51%.

Komposisi Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi, Bagi Laba Usaha Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah sebagaimana yang tertera dalam tabel di atas. Dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah ini yang paling besar penerimaannya adalah dari Pendapatan Lain-lain PAD yang sah, Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah.



Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan Tahun 2024 sebesar Rp1.553.881.164.605,00 yaitu:

Tabel 3.2

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

(Dalam Rupiah)	
Uraian	Realisasi
Dana Bagi Hasil Pajak	84.294.507.000,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	239.685.693.000,00
Dana Alokasi Umum	919.817.829.148,00
Dana Alokasi Khusus	310.083.135.457,00
Jumlah	1.553.881.164.605,00

Dengan demikian, kontribusi masing-masing sumber penerimaan dari dana perimbangan cukup besar terhadap APBD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, utamanya terhadap Dana Alokasi Umum. Untuk itu diharapkan Pemerintah Pusat mempertimbangkan kembali besarnya Dana Alokasi Khusus untuk Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Besarnya Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 adalah Rp919.817.829.148,00 yang dialokasikan untuk pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil. Hal ini menggambarkan pula bahwa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir belum maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat karena kebutuhan untuk pembayaran gaji dan aparatur tidak mungkin dikurangi karena sifatnya *given*.

3.1.2 REALISASI BELANJA TAHUN 2024

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
BELANJA			
BELANJA OPERASI			
Belanja Pegawai	1.005.993.162.987,00	854.797.200.588,72	84,97
Belanja Barang dan Jasa	818.509.330.658,00	676.548.786.597,38	82,66
Belanja Subsidi	339.150.000,00	259.876.000,00	0,00
Belanja Hibah	123.385.708.625,00	110.962.245.385,99	89,93
Bantuan Sosial	3.563.702.075,00	299.000.000,00	8,39
Jumlah Belanja Operasi	1.951.791.054.345,00	1.642.867.108.572,09	84,17
BELANJA MODAL			
Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	58.140.385.353,00	53.172.618.238,21	91,46
Belanja Gedung dan Bangunan	70.871.705.158,00	52.866.220.044,23	74,59
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	172.135.521.389,00	125.646.558.484,99	72,99
Belanja Aset Tetap Lainnya	4.052.821.000,00	5.167.368.150,00	127,5
Belanja Aset Lainnya	75.000.000,00	34.620.900,00	46,16
Jumlah Belanja Modal	305.275.432.900,00	236.887.385.817,43	77,6
BELANJA TAK TERDUGA			
Belanja Tak Terduga	2.669.459.229,00	1.157.985.156,00	43,38



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
Jumlah Belanja Tak Terduga	2.669.459.229,00	1.157.985.156,00	43,38
JUMLAH BELANJA	2.259.735.946.474,00	1.880.912.479.545,52	83,24
TRANSFER			
TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN			
Bagi Hasil Pajak ke Desa	4.734.657.198,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Retribusi ke Desa	356.472.802,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	313.799.046.400,00	305.854.767.508,00	97,47
Jumlah Transfer	318.890.176.400,00	305.854.767.508,00	95,91
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.578.626.122.874,00	2.186.767.247.053,52	84,80

Pada tahun anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menganggarkan belanja dan transfer sebesar Rp2.578.626.122.874,00 dan terealisasi sebesar Rp2.186.767.247.053,52 atau sebesar Rp84,80%. Adapun beberapa penyebab tidak terserapnya realisasi belanja pada Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

- 1. Terjadinya keterlambatan proses pelelangan;
- 2. Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan tidak mencapai 100% karena perpanjangan waktu;
- 3. Adanya kegiatan yang tidak selesai dilaksanakan baik dikarenakan *force majeure* maupun kelalaian rekanan sehingga dana tidak dapat di cairkan; dan
- 4. Terbatasnya personil pada beberapa SKPD dalam melaksanakan kegiatan.

3.1.3 REALISASI PEMBIAYAAN TAHUN 2024

Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
Penggunaan SILPA	397.000.000.000,00	162.263.868.113,04	40,87
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0,00	129.132.972,00	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	397.000.000.000,00	162.393.001.085,04	40,91
PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	397.000.000.000,00	162.393.001.085,04	40,91



3.2 HAMBATAN DAN STRATEGI YANG ADA DILAKUKAN DALAM PENCAPAIAN TARGET

3.2.1 Hambatan yang Ada dalam Pencapaian Target

Hambatan-hambatan yang di hadapi oleh pemerintah daerah terkait serapan APBD Tahun Anggaran 2024 yaitu disebabkan keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan kegiatan fisik dilaksanakan dipenghujung tahun, sementara kondisi alam Kabupaten Indragiri Hilir mengalami banjir serta pasang surut yang menghambat pelaksanaan pekerjaan. Selain itu rendahnya serapan anggaran disebabkan ketidakpastian kondisi keuangan daerah sehingga SKPD menunda melaksanakan kegiatan.

3.2.2 Strategi yang Ada Dilakukan dalam Pencapaian Target

Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ada beberapa upaya dan langkah yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, antara lain sebagai berikut:

- a. Penataan kelembagaan, kebijakan, dan regulasi sebagai dasar hukum pemungutan di antaranya dengan melakukan penyesuaian terhadap tarif pemungutan;
- b. Optimalisasi penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk pengelolaan pendapatan daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan dan pengawasan yang optimal kepada masyarakat ;
- c. Pemberian *Reward* dan *Punishment* ;
- d. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah;
- e. Meningkatkan pelayanan dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi melalui sosialisasi pajak daerah kepada WP dengan memanfaatkan media massa, media cetak, dan tatap muka;
- f. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak Daerah;
- g. Melakukan analisa terhadap potensi pendapatan melalui kerjasama dengan pratisi dan akademisi;
- h. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
- i. Meningkatkan peran dan fungsi UPTD penghasil PAD;
- j. Penguatan kelembagaan BUMD dalam mengembangkan potensi usaha;
- k. Mengupayakan penambahan Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah dan Dana Bagi Hasil;
- l. Menggali sumber-sumber pendapatan alternatif lainnya; dan
- m. Kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sedangkan strategi yang dilakukan dalam mengupayakan belanja daerah yaitu dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efektif dan efisien antara lain melalui:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- b. Belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan;



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

- c. Mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat;
- d. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
- e. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah yaitu :
 - 1) Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok fungsi SKPD; dan
 - 2) Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan SKPD dan program/kegiatan prioritas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
- f. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kabupaten Indragiri Hilir, termasuk investasi bidang pendidikan, keuangan persewaan & jasa perusahaan, perdagangan, hotel & restoran.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi dan pelaporan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Prinsip Akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

4. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui *trend* posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

4.1 Entitas Akuntansi / Pelaporan Keuangan Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir disusun dan disajikan dengan basis akrual. Laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah daerah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan. Laporan keuangan yang dihasilkan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.1.1 Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan dalam rupiah penuh disusun berdasarkan basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan serta untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.

4.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah;



2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
3. menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

4.2 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas

Tujuan kebijakan Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Laporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.2.1 Definisi

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Penetapan Kebijakan ini dengan pengertian:

1. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir meliputi rencana pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
5. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
6. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
7. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan pengeluaran dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
8. Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
9. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.



4.2.2 Struktur dan Isi Laporan Realisasi Anggaran

1. Laporan Realisasi Anggaran ditingkat entitas akuntansi SKPD/ berdasarkan dokumen anggaran SKPD (DPA-SKPD) menurut Permendagri No 77 Tahun 2020, terdiri dari pos-pos berikut:
 - a) Pendapatan Asli Daerah;
 - b) Belanja Operasi;
 - c) Belanja Modal; dan
 - d) Surplus/Defisit.
2. Laporan Realisasi Anggaran ditingkat entitas akuntansi PPKD berdasarkan dokumen anggaran PPKD (DPA-SKPD) menurut Permendagri No 77 Tahun 2020, terdiri dari pos-pos berikut:
 - a) Pendapatan Asli Daerah;
 - b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan;
 - c) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya;
 - d) Pendapatan Transfer Antar Daerah;
 - e) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
 - f) Belanja Operasi;
 - g) Belanja Modal;
 - h) Belanja Tak Terduga;
 - i) Belanja Transfer;
 - j) Surplus/Defisit;
 - k) Penerimaan Pembiayaan;
 - l) Pengeluaran Pembiayaan;
 - m) Pembiayaan *Netto*; dan
 - n) SILPA.
3. Laporan Realisasi Anggaran ditingkat entitas akuntansi Pelaporan/Pemda (Laporan Realisasi APBD) berdasarkan Permendagri No 77 Tahun 2020, terdiri dari pos-pos berikut:
 - a) Pendapatan Asli Daerah;
 - b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan;
 - c) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya;
 - d) Pendapatan Transfer Antar Daerah;
 - e) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
 - f) Belanja Operasi;
 - g) Belanja Modal;
 - h) Belanja Tak Terduga;
 - i) Belanja Transfer;
 - j) Surplus/Defisit;
 - k) Penerimaan Pembiayaan;
 - l) Pengeluaran Pembiayaan;
 - m) Pembiayaan *Netto*; dan
 - n) SILPA.

4.2.3 Akuntansi Anggaran

Akuntansi anggaran dapat dilaksanakan dengan cara langsung mensaldokan/membukukan jumlah anggaran pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan pada masing-masing saldo buku besar pos anggaran tanpa melakukan proses estimasi atas pendapatan dan penerimaan pembiayaan serta otorisasi kredit anggaran (*allotment*) atas belanja dan pengeluaran pembiayaan.

4.2.4 Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi



pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Satuan kerja Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanjanya. Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatan BLU tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas Negara/Kas Daerah. Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan.

4.2.5 Akuntansi Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga. Klasifikasi belanja menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah, kota/kabupaten administratif, dinas, dan lembaga teknis daerah. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4.2.6 Akuntansi Surplus/Defisit-LRA

Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/defisit-LRA. Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

4.2.7 Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

4.3 Laporan Arus Kas

Tujuan kebijakan laporan arus kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.

4.3.1 Definisi

1. Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.
2. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi.



3. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
4. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.
5. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.
6. Aktivitas non anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan pemerintah daerah
7. Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, beban dan pembiayaan pemerintah daerah.

4.3.2 Penyajian Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi kecuali bunga dikapitalisasikan akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi.

Dalam hal Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir masih membukukan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas berdasarkan akun pelaksanaan anggaran maka laporan arus kas dapat disajikan dengan mengacu pada akun-akun pelaksanaan anggaran tersebut.

4.3.3 Pelaporan Arus Kas Dari Aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan, dan Transitoris

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara metode langsung yaitu dengan mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menggunakan metode langsung karena penggunaannya memiliki beberapa keuntungan antara lain sebagai berikut:

- a) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas di masa yang akan datang;
- b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
- c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

4.3.4 Pengungkapan Lainnya

Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.



4.4 Laporan Operasional

Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

4.4.1 Definisi

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
3. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
4. Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
5. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
6. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan.

4.4.2 Struktur dan Isi Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

4.5 Laporan Perubahan Ekuitas

Tujuan pelaporan Laporan Perubahan Ekuitas adalah memberikan informasi tentang ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan yang mendasar dan ekuitas akhir suatu entitas pelaporan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

4.5.1 Definisi

1. Ekuitas awal adalah saldo ekuitas akhir tahun pelaporan sebelumnya.
2. Surplus/ defisit – LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
3. Koreksi-koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/ pos yang tersaji dalam laporan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
4. Ekuitas akhir adalah saldo ekuitas yang diperoleh dari hasil proses saldo ekuitas awal ditambah/ dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar.



4.5.2 Struktur Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos:

1. Ekuitas awal.
2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan.
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode- periode sebelumnya; dan
 - b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
4. Ekuitas akhir.

4.6 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4.6.1 Definisi

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau *social* di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber- sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

4.6.2 Struktur Neraca

Struktur dan isi Neraca di tingkat entitas akuntansi SKPD terdiri dari pos-pos berikut:

- a) Kas di Bendahara Penerimaan;
- b) Kas di Bendahara Pengeluaran;
- c) Kas di BLUD;
- d) Piutang Pajak Daerah;
- e) Piutang Retribusi Daerah;
- f) Piutang BLUD;
- g) Piutang Lain-Lain (tidak termasuk piutang dana perimbangan);
- h) Penyisihan Piutang;
- i) Persediaan;
- j) Aset Tetap;
- k) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap;
- l) Aset Lainnya;
- m) Properti Investasi;
- n) Kewajiban jangka Pendek; dan
- o) Ekuitas.

Pada Kebijakan Akuntansi pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2025 telah menyajikan Properti Investasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 mengatur tentang PSAP 17 Properti Investasi. Yang mulai efektif berlaku tanggal 2 Januari 2025.



4.7 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Tujuan kebijakan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas dan ketaatan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah memberikan informasi tentang saldo anggaran lebih awal, mutasi perubahan saldo anggaran lebih, dan saldo anggaran lebih akhir secara komparatif dengan periode sebelumnya.

4.7.1 Definisi

1. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.
2. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
3. Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
4. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.
5. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

4.7.2 Struktur Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a) Saldo Anggaran Lebih awal;
- b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
- e) Lain-lain; dan
- f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

4.8 Akuntansi Pendapatan-LRA Berbasis Kas

Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan-LRA berbasis kas yang selanjutnya disebut dengan pendapatan-LRA adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan-LRA dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi pendapatan-LRA mencakup definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pendapatan-LRA.

4.8.1 Definisi

1. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.



4.8.2 Pengakuan Pendapatan LRA

1. Pendapatan-LRA diakui pada saat:
 - a) Diterima pada Rekening Kas Umum Daerah; dan
 - b) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima oleh SKPD.
2. Pengakuan pendapatan ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya.
3. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan- LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
4. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

4.8.3 Penyajian Dan Pengungkapan

1. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas.
2. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain:
 - a) Penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c) Penerimaan daerah yang belum divalidasi karena masih terdapat di rekening *escrow*;
 - d) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA; dan
 - e) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.9 Akuntansi Belanja

Tujuan kebijakan akuntansi belanja adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas belanja dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan belanja.

4.9.1 Definisi

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
2. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
3. Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
4. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai aset tetap dan perolehan jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
5. Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
6. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.



- 7. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
- 8. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud serta *overhaul*/renovasi yang memenuhi kualifikasi kapitalisasi sebagai aset tetap. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan asetsampai aset tersebut siap digunakan.
- 9. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
- 10. Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan pengeluaran anggaran dalam bentuk bantuan uang kepada Pemerintah lainnya yang digunakan untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

4.9.2 Pengakuan Belanja

- 1. Belanja diakui pada saat:
 - a) Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
 - b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran (SPJ) tersebut disahkan oleh PA/KPA; dan
 - c) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum dan kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- 2. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan *Audited* terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA dan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO.

4.9.3 Perlakuan Akuntansi Atas Belanja Barang Dan Belanja Modal/Aset Tetap

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a) Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (duabelas) bulan;
- b) Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
- c) Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/ diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- d) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskandalam Kebijakan Akuntansi Aset tetap. sebagai berikut:

Tabel 4.1 Kapitalisasi Aset Tetap

KODE AKUN				URAIAN	JUMLAH HARGA/SATUAN
1	3	1		TANAH	
1	3	1	1	PERALATAN DAN MESIN	
1	3	2		Alat Besar	1.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

KODE AKUN				URAIAN	JUMLAH HARGA/SATUAN
1	3	2	1	Alat Angkutan	1.000.000,00
1	3	2	2	Alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000,00
1	3	2	3	Alat Pertanian	500.000,00
1	3	2	4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000,00
1	3	2	5	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	500.000,00
1	3	2	6	Alat Kedokteran dan Kesehatan	500.000,00
1	3	2	7	Alat Laboratorium	500.000,00
1	3	2	8	Alat Persenjataan	500.000,00
1	3	2	9	Komputer	500.000,00
1	3	2	10	Alat Eksplorasi	500.000,00
1	3	2	11	Alat Produksi, Pengolahan danPemurnian	500.000,00
1	3	2	12	Alat Bantu Eksplorasi	500.000,00
1	3	2	13	Alat Keselamatan Kerja	500.000,00
1	3	2	14	Alat Peraga	500.000,00
1	3	2	15	Peralatan Proses/Produksi	500.000,00
1	3	2	16	Rambu-Rambu	500.000,00
1	3	2	17	Peralatan Olah Raga	500.000,00
1	3	3		GEDUNG DAN BANGUNAN	
1	3	3	1	Bangunan Gedung	10.000.000,00
1	3	3	2	Monumen	10.000.000,00
1	3	3	3	Bangunan Menara	10.000.000,00
1	3	3	4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	10.000.000,00
1	3	4		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
1	3	4	1	Jalan dan Jembatan	10.000.000,00
1	3	4	2	Bangunan Air	10.000.000,00
1	3	4	3	Instalasi	10.000.000,00
1	3	4	4	Jaringan	10.000.000,00
1	3	5		ASET TETAP LAINNYA	
1	3	5	1	Bahan Perpustakaan	100.000,00
1	3	5	2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	500.000,00
1	3	5	3	Hewan	500.000,00
1	3	5	4	Biota Perairan	500.000,00
1	3	5	5	Tanaman	500.000,00
1	3	5	6	Barang Koleksi Non Budaya	500.000,00
1	3	6		ASET TETAP DALAM RENOVASI	10.000.000,00
1	3	7		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	10.000.000,00

4.9.4 Penyajian dan Pengungkapan

1. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a) Belanja Operasi;



- b) Belanja Modal;
 - c) Belanja Tak Terduga; dan
 - d) Transfer.
- dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Jika terdapat realisasi anggaran belanja modal yang tidak memenuhi kriteria belanja modal, maka diungkapkan dalam CALK dan diakui sebagai beban operasional tahun berjalan.
 3. Jika terdapat realisasi anggaran belanja barang dan jasa yang asetnya memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi sebagai aset tetap dicatat sebagai aset tetap, diungkapkan dalam CALK dan tidak diakui sebagai beban operasional.

4.10 Akuntansi Transfer

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan dan pengungkapannya.

4.10.1 Definisi

1. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
2. Transfer masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
3. Transfer keluar (LRA) adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
4. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
5. Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

4.10.2 Pengakuan Transfer

1. Transfer masuk diakui pada saat terjadinya penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Transfer masuk pada laporan realisasi anggaran (LRA) disajikan dalam kelompok pendapatan transfer.
3. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diakui sebagai piutang transfer.

4.10.3 Pengungkapan

1. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
 - b) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya;
 - c) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi



Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional; dan
d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
 - b) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
 - c) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional; dan
 - d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.11 Akuntansi Pembiayaan

Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan. Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pengakuan, dan pengukuran serta pengungkapan pembiayaan.

4.11.1 Definisi

1. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akanditerima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang akan dibayar kembali di masa yang akan datang, atau merupakan penerimaan Rekening Kas Umum Daerah atas pengeluaran pembiayaan di masa lalu, juga termasuk penerimaan Rekening Kas Umum Daerah dari SiLPA. Penerimaan pembiayaan antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, hasil privatisasi perusahaan daerah/hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan/transfer dari dana cadangan.
3. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali di masa yang akan datang, atau merupakan pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah atas penerimaan pembiayaan di masa lalu. Pengeluaran pembiayaan antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, pembayaran kembali pokok pinjaman/utang dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan/transfer ke dana cadangan.
4. Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

4.11.2 Pengungkapan

1. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan, antara lain:
 - a) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/ pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir; dan



c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.12 Akuntansi Pendapatan-LO Berbasis Akrua

Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan-LO berbasis akrual adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan-LO dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

4.12.1 Definisi

- Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan Hibah adalah pendapatan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikatserta tidak secara terus-menerus.
- Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Pendapatan Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

4.12.2 Klasifikasi Pendapatan-LO

Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Klasifikasi Pendapatan

Nama	Jenis	Rincian
Pendapatan LO	1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	a. Pendapatan Pajak Daerah – LO
		b. Pendapatan Retribusi Daerah – LO
		c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO
		d. Lain-lain PAD Yang Sah - LO
	2. Pendapatan Transfer – LO	a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO
		b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO
		c. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO
		d. Bantuan Keuangan - LO
	3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	a. Pendapatan Hibah - LO
		b. Dana Darurat - LO



Nama	Jenis	Rincian
		c. Pendapatan Lainnya - LO
	4.Surplus Non Operasional – LO	a. Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO
		b. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO
		c. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
	5. Pendapatan Luar Biasa – LO	a. Pendapatan Luar Biasa - LO

4.12.3 Pengakuan Pendapatan-LO Berbaris Akrua

- 1. Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait; dan
 - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- 2. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- 3. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

4.12.4 Pengukuran Pendapatan-LO

- 1. Pendapatan-LO secara umum dicatat:
 - a. Sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau SKPD/SKRD atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan; dan
 - b. Sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.
- 2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- 3. Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh, pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.

4.12.5 Penyajian dan Pengungkapan

- 1. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
- 2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:
 - a. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - d. Dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.13 Akuntansi Beban

Tujuan kebijakan akuntansi beban adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas beban



dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

4.13.1 Definisi

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. Beban Hibah adalah beban Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
3. Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
4. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir kepada suatu entitas pelaporan lain (misalnya Bantuan Keuangan ke Partai Politik) yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
5. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
6. Subsidi adalah beban Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.
7. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
8. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
9. Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
10. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

4.13.2 Pengakuan Beban

1. Beban diakui pada saat:
 - a) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
 - b) Terjadinya konsumsi aset.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

 - i. Pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban (Contohnya pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah); dan/atau
 - ii. Konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (Contohnya penggunaan persediaan).



- c) Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).
3. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya setelah laporan keuangan *audited* terbit, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
4. Pengeluaran yang terjadi akibat pembelian barang yang tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap diakui sebagai beban barang.

4.13.3 Pengukuran

1. Koreksi dan Pengembalian Beban Pegawai

Koreksi beban pegawai yang terjadi pada periode yang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya setelah laporan keuangan *audited* terbit, koreksi beban pegawai dibukukan sebagai pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

2. Koreksi dan Pengembalian Beban Barang dan Jasa

Penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

3. Koreksi dan Pengembalian Beban Bunga Utang

Penerimaan kembali beban bunga yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bunga pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah laporan keuangan *audited* terbit, koreksi penerima kembali beban bunga dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pengurangan pada akun ekuitas.

4. Koreksi dan Pengembalian Beban Subsidi

Penerimaan kembali beban subsidi yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban subsidi pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah laporan keuangan *audited* terbit, koreksi penerimaan kembali beban subsidi dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pengurangan pada akun ekuitas.

5. Koreksi dan Pengembalian Beban Hibah



Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bantuan sosial pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/ penerimaan kembali beban bantuan sosial dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

6. Koreksi dan Pengembalian Beban Lain-Lain

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban lain-lain pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/ penerimaan kembali beban lain-lain dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

7. Koreksi dan Pengembalian Beban Transfer

Penerimaan kembali dan koreksi beban transfer yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban transfer pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban transfer dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

4.13.4 Penyajian dan Pengungkapan

1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO).
2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
3. Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban.
4. Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi.
5. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.14 Akuntansi Kas dan Setara Kas

Tujuan kebijakan akuntansi kas setara kas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk kas dan setara dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

4.14.1 Definisi

1. Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dikonversi menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek dan kebutuhan lainnya.
2. Kas Transitoris adalah penerimaan kas dan pengeluaran kas non anggaran yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah, antara lain penerimaan kas dalam bentuk jaminan pekerjaan pihak ketiga dan kas penerimaan jaminan bongkar reklame.
3. Kas lainnya adalah saldo kas atas: Dana Hibah BOS yang masih ada di rekening bank Bendahara BOS hingga tanggal neraca; uang jaminan (retensi) yang disetorkan oleh pihak ketiga sebagai bentuk jaminan pemeliharaan atau perbaikan atas suatu pekerjaan yang mereka lakukan; dan Saldo pemotongan dan pemungutan pajak atau PFK yang dilakukan oleh Kuasa BUD ataupun Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke Kas Negara atau pihak terkait.



4. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan.
5. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan, meliputi Sisa Pengisian Kas dan Potongan PFK di Bendahara Pengeluaran.
6. Kas dan Setara Kas di BLUD merupakan kas yang berasal dari dana operasional BLUD, meliputi Kas BLUD, Setara Kas BLUD, Potongan PFK di BLUD, Uang Muka Pelayanan BLUD dan Uang Titipan BLUD.
7. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Setara Kas BLUD merupakan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah yang berada di BLUD.

4.14.2 Pengakuan

1. Pengakuan kas dan setara kas secara umum jika memenuhi kriteria:
 - a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan;
 - b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas dan/atau setara kas telah berpindah ke Pemerintah daerah.
2. Saldo kas di Kas Daerah akan bertambah apabila terdapat aliran kas masuk ke RKUD yang antara lain berasal dari:
 - a. Penyetoran kas pendapatan asli daerah dari Bendahara Penerimaan;
 - b. Penyetoran pengembalian sisa pengisian kas dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. Penerimaan pendapatan daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - d. Penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang, pencairan dana cadangan, penerimaan kembali dana bergulir; dan
 - e. Penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.
3. Saldo kas di Kas Daerah akan berkurang apabila terdapat aliran kas keluar dari RKUD yang antara lain berasal dari:
 - a. Transfer uang persediaan ke rekening bendahara pengeluaran;
 - b. Belanja daerah, antara lain pembayaran belanja gaji, barang dan jasa, belanja modal, belanja bagi hasil, belanja bantuan sosial dan belanja hibah;
 - c. Pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah dan pemberian pinjaman, pembentukan dana cadangan, pemberian dana bergulir; dan
 - d. Pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.
4. Saldo kas di Bendahara Penerimaan dapat terdiri dari kas tunai dan kas di rekening penerimaan. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan bertambah apabila terdapat uang masuk dari penerimaan pendapatan umumnya dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah, dan saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan berkurang apabila terdapat uang keluar yang di transfer ke RKUD.
5. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran akan bertambah apabila terdapat aliran uang masuk yang antara lain berasal dari:
 - a. Transfer uang persediaan/UP/GU/TU dan/atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran dari RKUD;
 - b. Penerimaan uang pengembalian belanja;
 - c. Penerimaan jasa giro; dan



- d. Penerimaan uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran.
6. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran akan berkurang apabila terdapat aliran uang keluar yang antara lain berasal dari:
 - a. Belanja daerah yang telah di-SPJ-kan;
 - b. Penyetoran uang pengembalian belanja/UP/GU/TU dan/atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran; dan
 - c. Penyetoran uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran ke Rekening Kas Umum Negara/RKUN.
7. Kas setara kas diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau ke penguasaannya berpindah oleh Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Badan Layanan Umum Daerah, dan Bendahara Bantuan Operasi Sekolah (BOS).

4.14.3 Penyajian dan Pengungkapan

1. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
2. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris pada Laporan Arus Kas.
3. Kas di kas daerah sekurang-kurangnya harus mengungkapkan saldo kas di rekening penampungan. Saldo rekening penampungan merupakan jumlah belanja yang sudah dipertanggungjawabkan namun belum dilakukan pemindahbukuan ke rekening pihak ketiga (*outstanding check*). Kas BLUD mengungkapkan jumlah dana operasional BLUD yang telah digunakan namun belum dapat disajikan ke dalam Laporan Realisasi Anggaran karena belum dilakukan pengesahan ke BUD.
4. Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Rincian kas dan setara kas;
 - b. Kebijakan manajemen setara kas; dan
 - c. Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.15 Akuntansi Piutang

Tujuan kebijakan akuntansi piutang adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk piutang dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

4.15.1 Definisi

1. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
2. Piutang retribusi adalah imbalan yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang diberikan, misalnya retribusi kesehatan dan izin trayek.
3. Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan.
4. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
5. Nilai realisasi bersih (*Net Realizable Value*) piutang adalah jumlah bersih piutang yang diperkirakan dapat ditagih. Piutang disajikan dalam laporan sebesar nilai realisasi bersih.



4.15.2 Klasifikasi Piutang

Timbulnya piutang di lingkungan pemerintahan pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Piutang Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Klasifikasi Piutang

1. Piutang	a. Piutang Pendapatan	1) Piutang Pajak Daerah
		2) Piutang Retribusi
		3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
		4) Piutang Lain-lain PAD yang Sah
		5) Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
		6) Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
		7) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
		8) Piutang Pendapatan Lainnya
	b. Piutang Lainnya	1) Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
		2) Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
		3) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
		4) Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
		5) Beban Dibayar di Muka
		6) Piutang Lain-Lain

4.15.3 Pengakuan Piutang

Piutang pemerintah daerah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah daerah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian daerah serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

4.15.4 Pengukuran Piutang

Secara umum, pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKPD/SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayarsampai dengan akhir tahun berjalan.

4.15.5 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

1. Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
3. Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor.
4. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.



Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.

5. Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
 - a. kualitas lancar;
 - b. kualitas kurang lancar;
 - c. kualitas diragukan; dan
 - d. kualitas macet.

4.15.6 Pemberhentian Pengakuan

1. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapusbukuan (*write-off*) dan penghapustagihan (*writedown*).
2. Prosedur hapus tagih piutang Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dirancang sebagai prosedur yang taat hukum, selaras dengan semangat pembangunan perbendaharaan yang sehat, diaplikasikan dengan penuh ketelitian, berbasis *Good Corporate Governance* (GCG), dengan dokumen penghapusan yang formal, transparan dan akuntabel, dan berdampak positif bagi pemerintah.

4.15.7 Penyajian dan Pengungkapan Piutang

1. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang sekurang-kurang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa :
 - a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - b) Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;
 - c) Penjelasan atas penyelesaian piutang, misalnya informasi mengenai piutang TP/TGR yang masih dalam proses penyelesaian baik secara damai maupun pengadilan;
 - d) Jaminan atau sita jaminan jika ada; dan
 - e) Informasi lainnya yang dianggap penting.
2. Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
3. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

4.16 Akuntansi Persediaan

Tujuan kebijakan akuntansi persediaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

4.16.1 Definisi

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

2. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
 - a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
 - b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
3. Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Barang yang memiliki kriteria barang “pecah belah” seperti gelas dan piring tidak diperlakukan sebagai persediaan pakai habis, tetapi dicatat sebagai barang ekstra komptabel dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak.
5. Barang berupa tirai/gorden/*vertical blind*/sejenis yang peruntukannya dimaksudkan untuk pencadangan penggantian yang rusak (untuk pemeliharaan) dicatat sebagai persediaan. Sedangkan pengadaan baru barang berupa tirai/gorden/*vertical blind*/sejenis yang memenuhi batas kapitalisasi diperlakukan sebagai aset tetap.
6. Barang berupa *flashdisk*/usb/sejenis yang belum digunakan diperlakukan sebagai persediaan pakai habis, dengan pertimbangan bahwa barang tersebut relatif mudah rusak/hilang.
7. Tumbuhan/tanaman hias yang dicadangkan untuk penggantian atas pemeliharaan taman yang rusak diperlakukan sebagai persediaan.

4.16.2 Pengakuan Persediaan

1. Persediaan diakui pada saat:
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
 - b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

4.16.3 Pengukuran Persediaan

1. Persediaan disajikan sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan persediaan jika potongan tersebut tercantum dalam bukti pembelian, jika tidak tercantum diakui sebagai pendapatan; dan
 - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

4.16.4 Penyajian dan Pengungkapan Persediaan

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2. Laporan keuangan mengungkapkan:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan



- barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak/usang/tidak layak pakai/sejenisnya.
3. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional. SKPD mencatat persediaan dengan metode perpetual. Pengukuran pemakaian persediaan dengan metode perpetual dilakukan dengan pendekatan FIFO yaitu dihitung berdasarkan catatan jumlah unit dipakai dikali nilai rupiah per unit. Pengukuran pemakaian atas persediaan yang sifatnya tidak material seperti alat tulis kantor (ATK) dapat dilakukan dengan pendekatan saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan dengan harga pembelian terakhir. SKPD yang menggunakan metode perpetual, melakukan pencocokan dengan perhitungan fisik (*stock opname*). Apabila jumlah unit persediaan antara metode perpetual tidak sama dengan hasil perhitungan fisik maka diunggulkan pelaporan atas persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*). Perbedaan jumlah unit persediaan digunakan sebagai dasar penyesuaian nilai persediaan dan diakui sebagai beban, serta sebab perbedaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya berdasarkan hasil verifikasi/ pengecekan/inventarisasi yang dituangkan dalam Berita Acara *stock opname*, disajikan sebagai beban persediaan dan dilaporkan dalam laporan operasional serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.17 Akuntansi Investasi

Tujuan kebijakan akuntansi investasi adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

4.17.1 Definisi

1. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dan merupakan kelompok aset lancar.
3. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset non lancar. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen.
4. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
5. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
6. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
7. Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

4.17.2 Maksud dan Tujuan Investasi Pemerintah Daerah

1. Investasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
2. Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya meliputi:
 - a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;



- b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
 3. Investasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
 - b. Meningkatkan pendapatan daerah; dan
 - c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.17.3 Bentuk Investasi

1. Bentuk investasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir meliputi
 - a. Investasi surat berharga; dan/atau
 - b. Investasi langsung.
2. Investasi surat berharga dilakukan dengan cara:
 - a. Pembelian saham; dan/atau
 - b. Pembelian surat utang.
3. Investasi langsung meliputi:
 - a. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir; dan/atau
 - b. Pemberian pinjaman.

4.17.4 Pengakuan Investasi

1. Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkatkepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul; dan
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.
2. Pengakuan Inventasi jangka panjang non permanen dana bergulir memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan negara/daerah;
 - b. Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan;
 - c. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
 - d. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir); dan
 - e. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir.

4.17.5 Pengukuran Investasi

1. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga



transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

2. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
3. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
4. Investasi non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
5. Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
6. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
7. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

4.17.6 Metode Penilaian Investasi

1. Investasi jangka panjang permanen dinilai dengan dua metode, yaitu:
 - a. Metode Biaya
Metode biaya diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan pemerintah kurang dari 20%, atau kepemilikan lebih dari 20% tetapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan.
 - b. Metode Ekuitas
Metode ekuitas diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan lebih dari 50%, kepemilikan pemerintah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.
2. Investasi jangka panjang non permanen dinilai dengan dua metode, yaitu:
 - a. Metode Biaya
Pada metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan, baik pada saat investasi awal maupun pencatatan selanjutnya. Biaya perolehan meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
 - b. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*)
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan diterapkan untuk Investasi non permanen berupa dana bergulir. Secara periodik, harus dilakukan penyesuaian terhadap investasi non permanen sehingga nilai investasi yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh dengan melakukan penatausahaan investasi sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah investasi yang tidak dapat tertagih/terrealisasi, investasi yang diragukan dapat tertagih/terrealisasi, dan investasi yang dapat tertagih/terrealisasi.

4.17.7 Pengungkapan Investasi

1. Hal-hal lain yang diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berkaitan dengan investasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, antara lain:



- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- f. Perubahan pos investasi; dan
- g. Penghapusbukuan investasi permanen dan non permanen.

4.18 Akuntansi Aset Tetap

Tujuan kebijakan akuntansi aset tetap adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap. Masalah utama akuntansi untuk aset tetap adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying amount*) aset tetap.

4.18.1 Definisi

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
3. Masa manfaat adalah:
 - a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
4. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
5. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
6. Aset Tetap Renovasi adalah aset tetap yang diperoleh dari kapitalisasi biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

4.18.2 Klasifikasi Aset Tetap

1. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir adalah:
 - a. Aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah daerah lainnya, universitas, dan kontraktor; dan
 - b. Hak atas tanah.
2. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:
 - a. Tanah.
 - b. Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
 - i. alat-alat besar;
 - ii. alat-alat angkutan;
 - iii. alat-alat bengkel dan alat ukur;
 - iv. alat-alat pertanian/peternakan;
 - v. alat-alat kantor dan rumah tangga;
 - vi. alat studio dan alat komunikasi;



- vii. alat-alat kedokteran;
 - viii. alat-alat laboratorium; dan
 - ix. alat keamanan.
- c. Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:
 - i. bangunan gedung; dan
 - ii. bangunan *monument*.
- d. Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:
 - i. jalan dan jembatan;
 - ii. bangunan air/irigasi;
 - iii. instalasi; dan
 - iv. jaringan.
- e. Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:
 - i. buku dan perpustakaan;
 - ii. barang bercorak kesenian/kebudayaan;
 - iii. hewan/ternak dan tumbuhan; dan
 - iv. aset tetap-renovasi.
- f. Konstruksi dalam pengerjaan.

4.18.3 Pengakuan Aset Tetap

- Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset berwujud dan memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - a. Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
 - c. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
 - d. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset tetap sebagai berikut:

Tabel 4.4 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

KODE AKUN				URAIAN	JUMLAH HARGA/SATUAN
1	3	1		TANAH	
1	3	1	1	Tanah Persil	0,00
1	3	1	2	Tanah Non Persil	0,00
1	3	1	3	Lapangan	0,00
1	3	2		PERALATAN DAN MESIN	
1	3	2	1	Alat Besar	1.000.000,00
1	3	2	2	Alat Angkutan	1.000.000,00
1	3	2	3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000,00
1	3	2	5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000,00
1	3	2	6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	500.000,00
1	3	2	7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	500.000,00
1	3	2	8	Alat Laboratorium	500.000,00
1	3	2	9	Alat Persenjataan	500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

KODE AKUN				URAIAN	JUMLAH HARGA/SATUAN
1	3	2	10	Komputer	500.000,00
1	3	2	11	Alat Eksplorasi	500.000,00
1	3	2	12	Alat Pengeboran	500.000,00
1	3	2	13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	500.000,00
1	3	2	14	Alat Bantu Eksplorasi	500.000,00
1	3	2	15	Alat Keselamatan Kerja	500.000,00
1	3	2	16	Alat Peraga	500.000,00
1	3	2	17	Peralatan Proses/Produksi	500.000,00
1	3	2	18	Rambu-Rambu	500.000,00
1	3	2	19	Peralatan Olah Raga	500.000,00
1	3	3		GEDUNG DAN BANGUNAN	
1	3	3	1	Bangunan Gedung	10.000.000,00
1	3	3	2	Monumen	10.000.000,00
1	3	3	3	Bangunan Menara	10.000.000,00
1	3	3	4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	10.000.000,00
1	3	4		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
1	3	4	1	Jalan dan Jembatan	10.000.000,00
1	3	4	2	Bangunan Air	10.000.000,00
1	3	4	3	Instalasi	10.000.000,00
1	3	4	4	Jaringan	10.000.000,00
1	3	5		ASET TETAP LAINNYA	
1	3	5	1	Bahan Perpustakaan	100.000,00
1	3	5	2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	500.000,00
1	3	5	3	Hewan	500.000,00
1	3	5	4	Biota Perairan	500.000,00
1	3	5	5	Tanaman	500.000,00
1	3	5	6	Barang Koleksi Non Budaya	500.000,00
1	3	5	7	ASET TETAP DALAM RENOVASI	10.000.000,00

4.18.4 Pengukuran Aset Tetap

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.



- 3. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- 4. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

4.18.5 Penyusutan

- 1. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap.
- 2. Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.
- 3. Periode perhitungan penyusutan aset tetap untuk tahun buku mulai dari necara awal sampai dengan tahun 2020 dihitung dengan periode tahunan.
- 4. Periode penghitungan penyusutan aset tetap paling sedikit dilakukan per semester.
- 5. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*);
- 6. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, bahan perpustakaan, alat bercorak kebudayaan, tanda penghargaan, hewan, biota perairan, tanaman, barang koleksi non budaya, dan kontruksi dalam pengerjaan.
- 7. Berikut adalah Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap:

Tabel 4.5 Masa Manfaat Aset Tetap

Kode	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.3	ASET TETAP	
1.3.1	Tanah	Tidak disusutkan
1.3.1.01.01	Tanah Persil	Tidak disusutkan
1.3.1.01.02	Tanah Non Persil	Tidak disusutkan
1.3.1.01.03	Lapangan	Tidak disusutkan
1.3.2	Peralatan dan Mesin	
1.3.2.01	Alat Besar	
1.3.2.01	Alat-alat Besar Darat	10
1.3.2.02	Alat-alat Besar Apung	8
1.3.2.03	Alat-alat Bantu	7
1.3.2.02	Alat Angkutan	
1.3.2.02.04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1.3.2.02.05	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1.3.2.02.06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1.3.2.02.07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1.3.2.02.08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1.3.2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Kode	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.3.2.03.01	Alat Bengkel Bermesin	10
1.3.2.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1.3.2.03.03	Alat Ukur	5
1.3.2.04	Alat Pertanian	
1.3.2.04.01	Alat Pengolahan	4
1.3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1.3.2.05.01	Alat Kantor	5
1.3.2.05.02	Alat Rumah Tangga	5
1.3.2.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1.3.2.06.01	Alat Studio	5
1.3.2.06.02	Alat Komunikasi	5
1.3.2.06.03	Peralatan Pemancar	10
1.3.2.06.04	Peralatan Komunikasi dan Navigasi	15
1.3.2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1.3.2.07.01	Alat Kedokteran	5
1.3.2.07.02	Alat Kesehatan Umum	5
1.3.2.08	Alat Laboratorium	
1.3.2.08.01	Unit Alat Laboratorium	8
1.3.2.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1.3.2.08.03	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1.3.2.08.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1.3.2.08.05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1.3.2.08.06	Radiation Aplication and Non <i>Destructive Testing Laboratory</i> (BATAM)	10
1.3.2.08.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1.3.2.08.08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1.3.2.08.09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10
1.3.2.09	Alat Persenjataan	
1.3.2.09.01	Senjata Api	10
1.3.2.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	3
1.3.2.09.03	Senjata Sinar	5
1.3.2.09.04	Alat Khusus Kepolisian	4
1.3.2.10	Komputer	
1.3.2.10.01	Komputer Unit	4
1.3.2.10.02	Peralatan Komputer	4
1.3.2.11	Alat Eksplorasi	
1.3.2.11.01	Alat Eksplorasi Topografi	5



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Kode	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.3.2.11.02	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1.3.2.12	Alat Pengeboran	
1.3.2.12.01	Alat Pengeboran Mesin	5
1.3.2.12.02	Alat Pengeboran Non Mesin	5
1.3.2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
1.3.2.13.01	Sumur	10
1.3.2.13.02	Produksi	10
1.3.2.13.03	Pengolahan dan Pemurnian	15
1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi	
1.3.2.14.01	Alat Bantu Eksplorasi	10
1.3.2.14.02	Alat Bantu Produksi	10
1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja	
1.3.2.15.01	Alat Deteksi	5
1.3.2.15.02	Alat Pelindung	5
1.3.2.15.03	Alat SAR	2
1.3.2.15.04	Alat Kerja Penerbangan	10
1.3.2.16	Alat Peraga	
1.3.2.16.01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
1.3.2.17	Peralatan Proses/Produksi	
1.3.2.17.01	Unit Peralatan Proses/Produksi	5
1.3.2.18	Rambu-Rambu	
1.3.2.18.01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	50
1.3.2.18.02	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	50
1.3.2.18.03	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	50
1.3.2.19	Peralatan Olahraga	
1.3.2.19.01	Peralatan Olahraga	10
1.3.3	Gedung dan Bangunan	
1.3.3.01	Bangunan Gedung	
1.3.3.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1.3.3.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1.3.3.02	Monumen	
1.3.3.02.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1.3.3.03	Bangunan Menara	
1.3.3.03.01	Bangunan Menara Perambuan	40
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	40
1.3.3.04.01	Tugu/Tanda Batas	50
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	
1.3.4.01	Jalan dan Jembatan	



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Kode	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.3.4.01.01	Jalan	10
1.3.4.01.02	Jembatan	50
1.3.4.02	Bangunan Air	
1.3.4.02.01	Bangunan Air Irigasi	50
1.3.4.02.02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1.3.4.02.03	Bangunan Pengairan Rawa dan Polder	25
1.3.4.02.04	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1.3.4.07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1.3.4.08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1.3.4.09	Bangunan Air Kotor	40
1.3.4.03	Instalasi	
1.3.4.03.01	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1.3.4.03.02	Instalasi Air Kotor	30
1.3.4.03.03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1.3.4.03.04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1.3.4.03.05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1.3.4.03.06	Instalasi Gardu Listrik	40
1.3.4.03.07	Instalasi Pertahanan	30
1.3.4.03.08	Instalasi Gas	30
1.3.4.03.09	Instalasi Pengaman	20
1.3.4.03.10	Instalasi Lain	5
1.3.4.04	Jaringan	
1.3.4.04.01	Jaringan Air Minum	30
1.3.4.04.02	Jaringan Listrik	40
1.3.4.04.03	Jaringan Telepon	20
1.3.4.04.04	Jaringan Gas	30
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	
1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	
1.3.5.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	Tidak disusutkan
1.3.5.01.02	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	Tidak disusutkan
1.3.5.01.03	Kartografi, Naskah dan Lukisan	Tidak disusutkan
1.3.5.01.04	Musik	Tidak disusutkan
1.3.5.01.05	Karya Grafika (Graphic Material)	Tidak disusutkan
1.3.5.01.06	Three Deminsional, Artefacts and Realita	Tidak disusutkan
1.3.5.01.07	Tarscalt	Tidak disusutkan
1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Kode	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.3.5.02.01	Alat music modern/band	10
1.3.5.02.02	Alat Bercorak Kebudayaan	Tidak disusutkan
1.3.5.02.03	Tanda Penghargaan	Tidak disusutkan
1.3.5.03	Hewan	
1.3.5.03.01	Hewan Piaraan	Tidak disusutkan
1.3.5.03.02	Ternak	Tidak disusutkan
1.3.5.03.03	Hewan Lainnya	Tidak disusutkan
1.3.5.04	Biota Perairan	
1.3.5.04.01	Ikan Bersirip (<i>Pisces</i> /Ikan Bersirip)	Tidak disusutkan
1.3.5.04.02	Crustea (Udang, Rajungan, Kepiting dan sebangsanya)	Tidak disusutkan
1.3.5.04.03	Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput dan sebangsanya)	Tidak disusutkan
1.3.5.04.04	Coelenterata (Ubur-ubur dan sebangsanya)	Tidak disusutkan
1.3.5.04.05	Echinodermata (Tripang, Bulu Babi, dan sebangsanya)	Tidak disusutkan
1.3.5.04.06	Amphibia (Kodok dan sebangsanya)	Tidak disusutkan
1.3.5.04.07	Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan sebangsanya)	Tidak disusutkan
1.3.5.04.08	Mammalia (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan sebangsanya)	Tidak disusutkan
1.3.5.04.09	Algae (Rumput laut, dan Tumbuh- tumbuhan lain yang hidup di dalam air)	Tidak disusutkan
1.3.5.04.10	Biota Perairan Lainnya	Tidak disusutkan
1.3.5.05	Tanaman	
1.3.5.05.01	Tanaman	Tidak disusutkan
1.3.5.06	Barang Koleksi Non Budaya	
1.3.5.06.01	Barang Koleksi Non Budaya	Tidak disusutkan
1.3.5.08	Aset Tetap Dalam Renovasi	
1.3.5.08.01	Aset tetap Dalam Renovasi	Masa kerjasama atau masa umur ekonomis, mana yang lebih pendek
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
1.3.6.01.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tidak disusutkan

4.18.6 Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

- Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebutdikurangi akumulasi penyusutan.
- Jika suatu belanja modal/aset tetap tidak memenuhi batas kapitalisasi dicatatsebagai *extrakomtabel* dan diungkapkan dalam CaLK.
- Laporan keuangan mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagaiberikut:
 - Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); dan



- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan; Pelepasan; Mutasi aset tetap lainnya.
4. Laporan keuangan juga mengungkapkan:
 - a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
5. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut diungkapkan:
 - a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b. Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c. Jika ada, nama penilai independen;
 - d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

4.19 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tujuan kebijakan Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan dengan metode nilai historis. Masalah utama akuntansi untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah jumlah biaya yang diakui sebagai aset yang dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan. Kebijakan ini memberikan pedoman untuk: a) Identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan; b) Penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di Neraca; c) Penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi

4.19.1 Definisi Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
2. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
3. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
4. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
5. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisakurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
7. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

4.19.2 Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Suatu benda berwujud diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam



- jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
3. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
 - a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.
 4. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
 5. Pekerjaan konstruksi tertentu dinyatakan selesai direpresentasikan dengan dokumen berita acara serah terima (BAST) atau dokumen sejenis dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa.

4.19.3 Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari Neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.20 Akuntansi Dana Cadangan

Tujuan kebijakan akuntansi dana cadangan adalah untuk mengatur seluruh perlakuan akuntansi untuk dana cadangan dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

4.20.1 Definisi

1. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
2. Pengelolaan Dana Cadangan adalah penempatan Dana Cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Portofolio tersebut antara lain Deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Utang Negara (SUN), dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.
3. Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan. Pembentukan dana cadangan berarti pemindahan akun Kas menjadi bentuk Dana Cadangan.
4. Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun Dana Cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan.

4.20.2 Pengakuan Dana Cadangan

1. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.



2. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan dan diakui sebagai Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO.
5. Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
6. Pembentukan Dana Cadangan dapat diakui dengan dua cara, yaitu :
 - a. pada saat terjadi pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan berdasarkan bukti yang sah, seperti nota kredit, rekening koran dan/atau SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. pada saat penerimaan hasil bunga/dividen rekening dana cadangan.

4.20.3 Pengukuran Dana Cadangan

1. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.
2. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.
3. Penerimaan hasil bunga/dividen rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan yang bersangkutan.

4.20.4 Penyajian dan Pengungkapan Dana Cadangan

1. Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar.
2. Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang Sah sebagai Pendapatan LO dan Pendapatan LRA.
3. Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran Pembiayaan.
4. Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.
5. Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.
6. Pengungkapan informasi mengenai Dana Cadangan pada akhir periode akuntansi, meliputi:
 - a. Rincian jenis dana cadangan dan dasar hukumnya;
 - b. Nilai atau besaran pembentukan, jangka waktu, sumber pendanaan dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan untuk setiap jenis dana cadangan;
 - c. Tujuan pembentukan setiap jenis dana cadangan;
 - d. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari setiap jenis dana cadangan; dan
 - e. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.21 Aset Lainnya

Tujuan kebijakan akuntansi aset lainnya adalah untuk mengatur seluruh perlakuan akuntansi untuk aset lainnya dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

4.21.1 Definisi

1. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :
 - a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
 - b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
 - d. Aset Tidak Berwujud; dan
 - e. Aset Lain-lain.



- 2. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran. Antar lain tagihan penjualan rumah dinas, rumah susun dan kendaraan dinas.
- 3. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri atas 2 (dua) yaitu Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
- 4. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
- 5. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
- 6. Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.
- 7. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

4.21.2 Klasifikasi Aset Lainnya

Aset Lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.6 Klasifikasi Aset Lainnya

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak	Sewa
	Pinjam Pakai
	Kerjasama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah
	Bangun Serah Guna
Aset Tidak Berwujud	Lisensi dan Frenchise
	Hak Cipta
	Paten
	Aset Tidak Berwujud Lainnya
Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain

4.21.3 Pengakuan

- 1. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat :
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
 - b. Diterima atau kepemilikannya dan / atau kekuasaannya berpindah.
- 2. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang



berlaku.

4.21.4 Penyajian dan Pengungkapan Aset Lainnya

1. Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang- kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Besaran dan rincian aset lainnya;

b. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;

c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT danBTO); dan

d. Informasi lainnya yang penting.

4.21.5 Pengukuran Aset Tak Berwujud

1. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh aset tersebut hingga siap untuk digunakan.
2. Jika aset tak berwujud tidak memiliki harga perolehan yang bias ditelusuri, asset tersebut diukur dengan nilai wajarnya.
3. Terhadap aset tak berwujud dapat dilakukan amortisasi selama masa manfaatnya, kecuali untuk aset tak berwujud yang memiliki masa manfaatnya tidak terbatas (misalnya, merek dagang).
4. Metode amortisasi menggunakan metode garis lurus.
5. Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan pada tabel berikut :

Tabel 4.7 Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kode	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.5.3.01.01.01	Goodwill	40
1.5.3.01.01.02	Lisensi dan <i>Franchise</i>	10 atau menyesuaikan dengan dokumen
1.5.3.01.01.03	Hak Cipta	70
1.5.3.01.01.04	Hak Paten	10
1.5.3.01.01.05	<i>Software</i>	5
1.5.3.01.01.06	Kajian	50
1.5.3.01.01.07	Aset Tidak Berwujud yang mempunyai Nilai Sejarah/ Budaya	-
1.5.3.01.01.08	Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan	-
1.5.3.01.01.09	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Menyesuaikan dengan dokumen

4.21.6 Penghentian dan Pelepasan Aset Tak Berwujud

1. ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.
2. Pelepasan ATB di lingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Sesuai dengan PMK Nomor 96/PMK.08/2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Permendagri Nomor 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan BMN/BMD yang di dalamnya termasuk ATB dengan cara:



- a. Dijual;
- b. Dipertukarkan;
- c. D hibahkan; dan
- d. Dijadikan penyertaan modal Negara/daerah.

4.22 Akuntansi Kewajiban

Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

4.22.1 Definisi

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
2. Kewajiban kontinjensi adalah:
 - a. Kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas; atau
 - b. Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
 - i. Tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau
 - ii. Jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.
3. Tunggakan adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidakmampuan entitas membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal.
4. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
5. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
6. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

4.22.2 Pengakuan Kewajiban

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
3. Kewajiban dapat timbul dari:
 - a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
 - b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
 - c. Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (*government-related events*); dan
 - d. Kejadian yang diakui Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (*government-acknowledged events*).

4.22.3 Pengukuran Kewajiban

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
2. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kabupaten Indragiri



Hilir pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

3. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos. Paragraf berikut menguraikan penerapan nilai nominal untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan.

4.22.4 Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo

1. Untuk sekuritas utang Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (*call feature*) dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.
2. Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang berhubungan.
3. Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

4.22.5 Penyajian dan Pengungkapan

1. Utang Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.
2. Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.
3. Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.
4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.
5. Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
6. Utang Belanja pada umumnya merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar setelah barang/jasa diterima. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek. Rincian utang kepada pihak ketiga diungkapkan di CaLK.
7. Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya untuk masing-masing jenis utang diungkapkan di CaLK.

4.23 Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap

A. Reklasifikasi Aset Tetap

1. Suatu aset tetap yang dihentikan atau dihapuskan, aset tersebut belum dapat dikeluarkan dari neraca karena proses penghentian yang lebih dikenal sebagai pemindahtanganan dan penghapusan masih berlangsung. Dengan kata lain, dokumen sumber untuk melakukan penghapusbukuan belum diterbitkan. Paragraf 79 PSAP 07 mengatur bahwa aset dengan kondisi demikian harus dipindahkan dari aset tetap ke aset lainnya.



2. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
3. Pemindahan kelompok aset tetap ke aset lainnya dalam akuntansi disebut sebagai reklasifikasi aset. Reklasifikasi adalah perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar.
4. Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya adalah penetapan dari entitas yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

B. Koreksi Aset Tetap

1. Paragraf 4 PSAP 10 menyatakan bahwa:

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Koreksi meliputi koreksi sistemik dan koreksi non sistemik. Dari sisi transaksi, koreksi mencakup transaksi anggaran maupun transaksi finansial. Dari periodenya, koreksi dapat dibedakan menjadi koreksi untuk tahun berjalan, koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait belum diterbitkan, dan koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait telah diterbitkan. Termasuk dalam lingkup koreksi adalah temuan pemeriksaan yang diharuskan untuk dikoreksi.

2. Koreksi dilakukan oleh satker bersangkutan dan dilaporkan secara berjenjang, sampai dengan kantor pusat K/L atau pemerintah daerah. Kadangkala untuk mengejar waktu penyampaian laporan keuangan, koreksi dilakukan secara sentralistik di kantor pusat K/L atau pemerintah daerah, baru kemudian didistribusikan pada entitas akuntansi di bawahnya untuk melakukan penyesuaian.
3. Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun aset tetap yang bersangkutan. Koreksi aset tetap dapat dilakukan kapan saja, tidak tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan. Pada umumnya koreksi aset tetap dilakukan pada saat ditemukan kesalahan.

4.24 Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Operasi yang Tidak Dilanjutkan, Peristiwa Luar Biasa dan Peristiwa Setelah Periode Pelaporan (*Subsequent Event*)

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, akuntansi dan pelaporan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

4.24.1 Definisi

1. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
2. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
3. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
4. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
5. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.



4.24.2 Koreksi Kesalahan

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
2. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang; dan
 - b. Kesalahan yang berulang dan sistemik.
3. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
 - b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
4. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
5. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
6. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
7. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
8. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
9. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
10. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
11. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
12. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.



4.24.3 Peristiwa Luar Biasa

1. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
2. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
 - a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
 - b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

4.24.4 Peristiwa Setelah Periode Pelaporan (Subsequent Event)

1. Peristiwa setelah periode pelaporan (*Subsequent Event*) adalah peristiwa, baik yang menguntungkan (*favourable*) atau tidak menguntungkan (*unfavourable*), yang terjadi di antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Dua jenis peristiwa dapat diidentifikasi:
 - a. Peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan (peristiwa setelah periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian); dan
 - b. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah periode pelaporan (peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian).

4.25 Laporan Keuangan Konsolidasian

Kebijakan ini mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam kebijakan ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif (DPRD) sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.25.1 Definisi

1. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah badan yang dibentuk pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan umum, mengelola dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, dan tidak termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Entitas Akuntansi adalah SKPD pengguna anggaran/pengguna barang dan karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan/dikonsolidasikan pada entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Entitas akuntansi mengacu pada Keputusan Bupati yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi setiap unit/satuan kerja pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
4. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.
5. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.



4.25.2 Penyajian Laporan Keuangan

1. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
3. Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan atau tidak dilakukan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.25.3 Entitas Pelaporan

1. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:
 - a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
 - b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah daerah yang diangkat atau pejabat yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
 - d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

4.25.4 Entitas Akuntansi

1. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.
2. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut ketentuan peraturan perundangn-undangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.
3. Dengan penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah daerah dapat ditetapkan sebagai entitas pelaporan.

4.25.5 Badan Layanan Umum Daerah

1. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah badan yang dibentuk pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan daerah yang dipisahkan. Contoh BLUD adalah rumah sakit.
2. Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan Daerah yang dipisahkan, BLUD adalah entitas pelaporan.
3. Selaku penerima anggaran belanja pemerintah daerah (APBD), BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.
4. Konsolidasi laporan keuangan BLUD pada pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahnya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLUD disusun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahnya.



4.25.6 Prosedur Konsolidasi

1. Konsolidasi yang dimaksud oleh kebijakan ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik.
2. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada dibawahnya.
3. Konsolidasi dapat dilaksanakan baik dengan mengeliminasi akun-akun yang timbal balik (*reciprocal*) maupun tanpa mengeliminasinya.
4. Dalam hal konsolidasi dilakukan tanpa mengeliminasi akun-akun yang timbal-balik, maka nama-nama akun yang timbal balik, dan estimasi besaran jumlah dalam akun yang timbal balik dicantumkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) digabungkan pada lembaga teknis pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahnya.



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Pada bagian ini diuraikan penjelasan terhadap pos-pos Laporan Keuangan Pokok sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Laporan Keuangan Pokok dimaksud mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi APBD menggambarkan perbandingan antara APBD tahun 2024 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode mulai 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Laporan Perubahan SAL memberikan informasi tentang kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2024.

Laporan Operasional menyediakan Informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan – LO, Beban, dan Surplus / Defisit Operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama tahun 2024 serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2024.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan pokok yang menyajikan pos-pos berikut:

- a. Ekuitas Awal;
- b. Surplus / Defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah / mengurangi ekuitas; dan
- d. Ekuitas Akhir.

5.1.1	PENDAPATAN	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		2.181.626.122.874,00	2.057.359.021.735,74	94,30	2.097.081.414.492,77

Laporan Realisasi Anggaran merupakan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya pada satu tahun anggaran yang mencakup unsur-unsur pendapatan belanja dan pembiayaan.

Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp2.181.626.122.874,00 dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp2.057.359.021.735,74 atau 94,30% dari anggaran yang ditetapkan dan realisasi tahun 2023 sebesar Rp2.097.081.414.492,77. Pada tahun 2024, terjadi penurunan realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp39.722.392.757,03 atau 1,89% dibandingkan tahun 2023.

Penurunan Realisasi pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

1. Secara keseluruhan Target Pendapatan Daerah yang ditetapkan Tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2023 yakni sebesar + 6%, sedangkan dari sisi penerimaan sedikit mengalami penurunan dalam hal ketercapaian secara persentase.
2. Kondisi penurunan ini disebabkan antara lain Penyaluran DBH Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2024 dan Penyaluran DBH Pusat yang belum secara keseluruhan disalurkan hingga akhir Tahun 2024.
3. Hal ini juga dipengaruhi juga dari sektor oleh penerimaan Pajak Daerah (BPHTB) Tahun 2024 dibanding Tahun 2023 turun hingga mencapai 174,73%, hal ini sebagai dampak kenaikan target BPHTB Tahun 2024 dibanding dengan target BPHTB Tahun 2023 dengan rasio kenaikan 73,19%.
4. Dan kondisi ini tidak menjadi pengaruhi upaya pembangunan daerah dengan terus mengoptimalisasi pendapatan daerah, diantaranya penggalan potensi daerah dan melakukan perhitungan riil atas potensi daerah dimaksud.

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Pendapatan Asli Daerah	233.222.088.268,00	206.669.519.330,74	88,61	194.126.525.020,77
Pendapatan Transfer	1.948.404.034.606,00	1.850.689.502.405,00	94,98	1.902.954.889.472,00
	2.181.626.122.874,00	2.057.359.021.735,74	94,30	2.097.081.414.492,77

5.1.1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		233.222.088.268,00	206.669.519.330,74	88,61	194.126.525.020,77

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp233.222.088.268,00 dengan realisasi tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp206.669.519.330,74 atau 88,61% dan sebesar Rp194.126.525.020,77 dari anggaran yang ditetapkan. Pada tahun 2024, terjadi Kenaikan sebesar Rp12.542.994.309,97 atau 6,46% dari realisasi PAD tahun lalu.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah, dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Pajak Daerah	62.505.000.000,00	46.982.737.674,00	75,17	48.326.458.632,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Retribusi Daerah	3.406.300.000,00	4.462.190.683,00	131,00	4.073.009.708,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.660.733.802,00	10.967.609.930,00	65,83	14.112.352.048,00
Lain-lain PAD yang Sah	150.650.054.466,00	144.256.981.043,74	95,76	127.614.704.632,77
	233.222.088.268,00	206.669.519.330,74	88,61	194.126.525.020,77

Rincian masing-masing Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

5.1.1.1.1	PENDAPATAN PAJAK DAERAH	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		62.505.000.000,00	46.982.737.674,00	75,17	48.326.458.632,00

Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp62.505.000.000,00 dengan realisasi tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp46.982.737.674,00 atau 75,17% dari anggaran yang ditetapkan dan sebesar Rp48.326.458.632,00. Terjadi penurunan sebesar Rp1.343.720.958,00 atau 2,78% dari realisasi Pajak Daerah tahun lalu, dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pajak Hotel	670.000.000,00	953.555.095,00	142,32	882.710.576,00
Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.100.000.000,00	3.604.144.022,00	116,26	4.517.755.215,00
Pajak Hiburan	35.000.000,00	97.140.623,00	277,54	43.642.124,00
Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/ Megatron	300.000.000,00	766.856.720,00	255,62	699.244.273,00
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	28.000.000.000,00	32.293.965.690,00	115,34	30.360.189.356,00
Pajak Air Tanah	100.000.000,00	212.934.792,00	212,93	190.540.850,00
Pajak Sarang Burung Walet	500.000.000,00	192.537.383,00	38,51	213.449.043,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	34.905.900,00	0,00	46.040.400,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	10.000.000.000,00	6.640.896.726,00	66,41	5.470.506.437,00
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	19.800.000.000,00	2.185.800.723,00	11,04	5.902.380.358,00
	62.505.000.000,00	46.982.737.674,00	75,17	48.326.458.632,00

Pada Pajak Sarang Burung Walet pencapaian target pada tahun 2024 hanya 38,51 persen hal ini disebabkan oleh :

1. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk menyeter pajaknya
2. Menurunnya produktivitas sarang burung walet;
3. Sifatnya Self Assesment dimana Wajib Pajak menilai/menghitung sendiri hasil panennya, sehingga kurangnya kejujuran Wajib Pajak dalam melaporkannya dan mempengaruhi realisasi target pencapaian;
4. Sulitnya menemui/berkomunikasi dengan wajib pajak sarang burung walet.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tahun 2024 tidak teranggarkan karena pada saat perhitungan potensi dan target masih terkendala perizinan (legalitas) sesuai UU Minerba/ Pertambangan.

Pada Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pencapaian target pada tahun 2024 hanya 11,04 persen hal ini disebabkan oleh :

- 1.Saat menetapkan target itu diperkirakan ada perusahaan yang akan HGU, ada 4 perusahaan, diperkirakan 1 perusahaan realisasi BPHTB nya diatas 1 M, tetapi ternyata sampai akhir tahun HGUnya tidak terealisasi karena belum selesai pengurusan di dinas/instansi terkait terutama pusat dan provinsi dan BPN
2. Menindaklanjuti UU No. 1 Tahun 2022 dimana NPOPTKP BPHTB yang semula 60.000.000,- menjadi 80.000.000,-. Ini membuat adanya kehilangan potensi BPHTB 20.000.000 dalam setiap transaksi validasi BPHTB..
3. Menindaklanjuti Surat Edaran dari Kemendagri terkait tentang Percepatan Program Nasional untuk Sertifikat PTSL yang memberikan pengurangan 100% untuk balik nama maupun peningkatan hak sertifikat yang masuk dalam program PTSL, hilangnya potensi BPHTB yang signifikan karena pengurangannya 100% atau 0 untuk BPHTB..

5.1.1.1.2	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		3.406.300.000,00	4.462.190.683,00	131,00	4.073.009.708,00

Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp3.406.300.000,00 dengan realisasi tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp4.462.190.683,00 atau 131,00% dari anggaran yang ditetapkan dan sebesar Rp4.073.009.708,00. Terjadi Kenaikan sebesar Rp389.180.975,00 atau 9,56% dengan rincian jenis retribusi daerah sebagai berikut:

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Retribusi Jasa Umum	1.530.000.000,00	834.578.305,00	54,55	2.921.890.208,00
Retribusi Jasa Usaha	556.500.000,00	1.289.021.808,00	231,63	491.385.600,00
Retribusi Perizinan Tertentu	1.319.800.000,00	2.338.590.570,00	177,19	659.733.900,00
	3.406.300.000,00	4.462.190.683,00	131,00	4.073.009.708,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari Retribusi pelayanan kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Pengendalian Menara Telkomsel, dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dengan rincian sebagai berikut:

Retribusi Jasa Umum	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	1.530.000.000,00	834.578.305,00	54,55	2.921.890.208,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan	80.000.000,00	22.894.200,00	28,62	75.407.700,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	460.000.000,00	549.981.105,00	119,56	368.993.008,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	470.000.000,00	0,00	0,00	450.000.000,00
Retribusi Pelataran	75.000.000,00	37.920.000,00	50,56	63.200.000,00
Retribusi Los	260.000.000,00	180.188.000,00	69,30	122.989.000,00
Retribusi Kios	185.000.000,00	43.595.000,00	23,56	41.060.000,00
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	41.013.000,00
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat- Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	0,00	0,00	0,00	72.007.500,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	1.687.220.000,00

Pada pelayanan Kesehatan hanya terrealisasi 28,62 persen dikarenakan objek retribusi pada Dinas Kesehatan Tahun 2024 hanya LABKESDA. Terhitung tanggal 7 Desember 2023, 5 Puskesmas FKTP (objek retribusi) sudah menjadi BLUD

Pada Retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum tidak terrealisasi karena Sudah diberlakukannya SK Bupati Indragiri Hilir No.KPTS.241/II/HK-2023 Tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor, Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kab. Inhil.dimana Setoran Retribusi Parkir disetor Ke UPT PKB, Terminal dan Parkir.

Pada Retribusi Kios pada tahun 2024 realisasi tidak mencapai target karena adanya los yang tidak digunakan sebagai tempat berjualan terus menerus karena berjualan berkurang akibat omset daya beli masyarakat menurun dan Bangunan pasar yang rusak dimakan usia dimana los dan kios tidak dapat dipergunakan dikarenakannya bocor dan rusak berat.

Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran tidak dianggarkan kembali karena kurangnya Partisipasi Pengelola Usaha dalam Mentaati Wajib Retribusi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Dinas Telah Melakukan Himbauan.

Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya tidak dianggarkan kembali karena retribusi yang diberikan terlalu tinggi tanpa memperhitungkan jumlah potensi alat UTTP wajib tera, tarif retribusi kecil dan keterbatasan anggaran untuk melakukan kegiatan pelayanan sidang tera diseluruh pasar yang ada Kab. Indragiri Hilir serta kurangnya pengawasan/sosialisasi ke wajib tera.

Pada Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak dianggarkan kembali karena retribusi ini sudah dialihkan wewenangnya ditarik oleh pusat sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022.

Retribusi Jasa Usaha	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	556.500.000,00	1.289.021.808,00	231,63	491.385.600,00
Retribusi Penyewaan Tanah	0,00	61.800.000,00	0,00	0,00
Retribusi Penyewaan Bangunan	137.500.000,00	967.744.600,00	703,81	162.433.000,00
Retribusi Pemakaian Laboratorium	0,00	319.000,00	0,00	10.102.000,00
Retribusi Pemakaian Ruangan	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Retribusi Pemakaian Alat	0,00	28.861.000,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	110.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	12.000.000,00	1.365.500,00	11,38	4.157.300,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	150.000.000,00	217.781.708,00	145,19	201.773.300,00
Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	8.200.000,00
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	84.000.000,00	3.150.000,00	3,75	2.100.000,00

Retribusi Pemakaian Ruangan pada tahun 2024 tidak memenuhi target karena dimanfaatkan untuk operasional internal dinas terkait.

Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor tidak sesuai target dikarenakan adanya setoran pendapatan atas sewa kendaraan bermotor yang anggarannya tidak terakomodir didalam DPA.

Retribusi Pemakaian Alat pada tahun 2024 tidak terealisasi sesuai target karena nomenklatur untuk retribusi pemakaian alat tidak ada sehingga saat penginputan spj dipilih akun retribusi pemakaian laboratorium.

Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal pendapatannya tidak dianggarkan kembali karena pada tahun 2024 sudah diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1). Dan yang masih menjadi kewenangan Dinas Perhubungan hanya Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Pengendalian Lalu Lintas, kewenanga sudah pada Balai Pengelola Transportasi Darat(BPTD).

Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila tidak memenuhi target Dikarenakan kurangnya peminat yang menginap di mes inhil sehingga rendahnya pendapatan retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila.

Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan, ada beberapa hal yang membuat retribusi ini tidak sesuai target yaitu :

- 1. Induk Ikan Sudah Tua (Tidak Produktif);
- 2. Kualitas air untuk Pembenihan tidak memadai;
- 3. Alat Berat (Excavator) dalam keadaan rusak.

Retribusi Perizinan Tertentu Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Tenaga Kerja Asing dengan rincian sebagai berikut:

Retribusi Perizinan Tertentu	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	1.319.800.000,00	2.338.590.570,00	177,19	659.733.900,00
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	0,00	2.089.996.170,00	0,00	659.733.900,00
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	469.800.000,00	248.594.400,00	52,91	0,00

Adanya ketidaksesuaian Nomenklatur antara di SIPD Penganggaran dan di SIPKD Bendahara Penerima. Akun ini masuk dalam Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dengan pagu anggaran Rp.800.000.000 terealisasi sebesar Rp.2.089.996.170 atau 261,25%. Nomenklatur di SIPD Penganggaran adalah Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sedangkan pada saat penginputan di SIPKD oleh bendahara Penerima nomenklatur ini tidak tersedia. nomenklatur yang tersedia yakni Retribusi pemberian izin mendirikan bangunan, sehingga realisasinya masuk ke Retribusi pemberian izin mendirikan bangunan sebesar Rp.2.089.996.170.

Pada Retribusi Pengendalian Lalu Lintas terdapat Perda No 4 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tidak Dapat Terealisasi Karena Ruas Jalan Di Kab. Inhil Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Retribusi).

Pada Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) hanya terrealisasi 52,91% hal ini disebabkan oleh :

- 1. Bulan Januari 2024 s/d bulan April 2024 Validasi pembayaran TKA masih dibayarkan di Pusat (Jakarta) terhitung bulan Mei 2024 Validasi Pembayaran Pelayanan Penggunaan TKA sudah bisa di Aplikasi TKA Daerah karena berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2024 yang ditetapkan pada bulan April 2024
- 2. Adanya proses pemindahan pembayaran Retribusi TKA dari Pusat (PNBP) ke Daerah (Retribusi) maka terjadi keterlambatan pembayaran Retribusi di Daerah dan juga karena ada beberapa wajib retribusi yang telah melakukan pembayaran Retribusi di Jakarta (melalui PNBP), karena untuk pembuatan ijin TKA (IMTA) baru hanya dapat dilakukan terpusat di Jakarta sehingga untuk Tahun 2024 ini realisasi masih dibawah target.

5.1.1.1.3

PENDAPATAN HASIL
PENGELOLAAN KEKAYAAN
DAERAH YANG DIPISAHKAN

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
16.660.733.802,00	10.967.609.930,00	65,83	14.112.352.048,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp16.660.733.802,00 dengan realisasi tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp10.967.609.930,00 atau 65,83% dan Rp14.112.352.048,00. Terjadi Penurunan sebesar Rp3.144.742.118,00 atau 22,28%, dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.660.733.802,00	10.967.609.930,00	65,83	14.112.352.048,00
	16.660.733.802,00	10.967.609.930,00	65,83	14.112.352.048,00

Pada Pendapatan Dividen atas Penyertaan Bank Riau Kepri Syariah Modal Laba tahun buku 2023 lebih rendah dibandingkan tahun buku 2022 dan komposisi modal disetor kab inhil per des 2023 sebesar 5,62% turun dibanding per des 2022 sebesar 5,63% sehingga dividen yg diterima tahun 2024 lebih rendah dibandingkan tahun 2023 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD terdiri atas :

Keterangan	Nilai
Dividen atas Penyertaan Modal pada Bank Riau Kepri Syariah	10.774.992.662,00
Dividen atas Penyertaan Modal pada BPR Gemilang	192.617.268,00
Jumlah	10.967.609.930,00

5.1.1.1.4 LAIN-LAIN PAD YANG SAH

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
150.650.054.466,00	144.256.981.043,74	95,76	127.614.704.632,77

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp150.650.054.466,00 dengan realisasi tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp144.256.981.043,74 atau 95,76% dari anggaran yang ditetapkan dan sebesar Rp127.614.704.632,77. Terjadi Kenaikan sebesar Rp16.642.276.410,97 atau 13,04% dari realisasi tahun lalu, dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	15.750.000,00	465.216.000,00	2953,75	1.296.800.500,00
Jasa Giro	15.367.500.000,00	2.319.911.242,25	15,10	2.564.106.930,00
Pendapatan Bunga	0,00	1.213.519.877,00	0,00	687.608.571,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.900.000.000,00	990.150.574,86	34,14	1.803.554.325,65
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.000.000.000,00	1.154.165.576,19	57,71	210.353.912,33
Pendapatan Denda Pajak Daerah	100.000.000,00	66.109.599,00	66,11	76.950.618,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	151.136.329,32	0,00	5.591.114.301,38
Pendapatan dari Pengembalian	4.136.000.000,00	1.703.131.622,51	41,18	845.380.611,29
Pendapatan BLUD	126.130.804.466,00	136.193.640.222,61	107,98	113.597.043.240,12
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	941.791.623,00
	150.650.054.466,00	144.256.981.043,74	95,76	127.614.704.632,77

Jasa Giro pada tahun 2024 mengalami penurunan atau tidak terealisasi sesuai target dikarenakan terjadi keterlambatan Penerimaan Daerah baik dari Dana Transfer maupun PAD, sehingga Sisa Kas di Rekening Kas Daerah dan Kas Bendahara Pengeluaran OPD tidak besar dan proses transaksi sangat lancar sehingga penerimaan Jasa Giro juga mengalami Penurunan.

Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah tidak sesuai target dikarenakan Dikarenakan adanya pendapatan remunerasi atas penyaluran dana TDF yang anggarannya tidak terakomodir di dalam DPA.

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai target dikarenakan banyaknya pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan sesuai batas waktu kontrak.

Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa tidak sesuai target dikarenakan ada setoran atas klaim jaminan atas pengadaan barang dan jasa yang anggarannya tidak terakomodir didalam DPA.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan dari Pengembalian tidak sesuai target dikarenakan pada tahun ini telah sesuai, sehingga sedikitnya setoran atas pengembalian kelebihan pembayaran.

Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tidak dianggarkan kembali karena 3 FKTP pada tahun lalu telah menjadi BLUD.

Penerimaan Kas dana bos yang belum tercatat sebesar Rp2.719.000, dengan rincian sebagai berikut :

Nama Sekolah	Nilai
SD 39 Khairiah Mandah	60.000,00
SD 025 Sungai Asam	470.000,00
SD Negeri 28 Tempuling	100.000,00
SD 02 Concong Luar	705.000,00
SD 016 Blok L Rumbai Jaya	40.000,00
SD 019 Sungai Nyiur	520.000,00
SD 035 Tembilahan	700.000,00
SD 038 Bente Kec. Mandah	44.000,00
SD 009 Bakau Aceh	80.000,00
Jumlah	2.719.000,00

5.1.1.2	PENDAPATAN TRANSFER	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		1.948.404.034.606,00	1.850.689.502.405,00	94,98	1.902.954.889.472,00

Pendapatan Transfer Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp1.948.404.034.606,00 dengan realisasi tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.850.689.502.405,00 atau 94,98% dan Rp1.902.954.889.472,00. Pendapatan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp52.265.387.067,00 atau 2,75% dari realisasi tahun lalu dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1.614.272.784.000,00	1.553.881.164.605,00	96,26	1.543.330.259.382,00
Dana Penyesuaian	191.163.118.000,00	186.238.341.500,00	97,42	192.085.204.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi	142.968.132.606,00	110.569.996.300,00	77,34	167.539.426.090,00
	1.948.404.034.606,00	1.850.689.502.405,00	94,98	1.902.954.889.472,00

5.1.1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		1.614.272.784.000,00	1.553.881.164.605,00	96,26	1.543.330.259.382,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp1.614.272.784.000,00 dengan realisasi tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.553.881.164.605,00 atau 96,26% dan Rp1.543.330.259.382,00. Transfer Pemerintah Pusat tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp10.550.905.223,00 atau 0,68% dari realisasi tahun lalu, dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak	71.475.682.000,00	84.294.507.000,00	117,93	83.168.162.473,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	170.904.608.000,00	239.685.693.000,00	140,25	214.404.530.490,00
Dana Alokasi Umum	1.021.515.931.000,00	919.817.829.148,00	90,04	925.026.162.597,00
Dana Alokasi Khusus	350.376.563.000,00	310.083.135.457,00	88,50	320.731.403.822,00
	1.614.272.784.000,00	1.553.881.164.605,00	96,26	1.543.330.259.382,00

Rincian Pendapatan Transfer Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:

5.1.1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		71.475.682.000,00	84.294.507.000,00	117,93	83.168.162.473,00
	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	57.807.107.000,00	68.103.462.000,00	117,81	67.367.137.696,00
	DBH PPh Pasal 21	13.668.575.000,00	15.261.948.000,00	111,66	14.443.804.346,00
	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN	0,00	929.014.000,00	0,00	1.357.188.146,00
	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	83.000,00		32.285,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir juga mendapatkan Transfer Non Tunai dalam bentuk Treasury Deposit Facility (TDF) sesuai surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KM.7/2024 Tahun 2024. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dinilai oleh Kementrian Keuangan memiliki nilai kas yang tinggi. TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi daerah untuk menampung uang di BUN sebagai bentuk penyaluran nontunai, berupa penyimpanan dana overnight pada rekening TDF Pemerintah Daerah di Bank Indonesia.

Rincian penerimaan Non Tunai dalam bentuk *Treasury Deposit Facility* (TDF) dirincikan pada tabel berikut:

Uraian	Jumlah
DBH PBB	10.296.355.000,00
DBH PPh Pasal 21	2.486.626.000,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	35.761.000,00
Total	12.818.742.000,00

5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	170.904.608.000,00	239.685.693.000,00	140,25	214.404.530.490,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	66.414.794.000,00	66.612.932.000,00	100,30	75.694.624.097,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	24.073.502.000,00	0,00	16.880.738.906,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	108.111.000,00	0,00	523.316.982,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	56.327.157.000,00	99.936.563.000,00	177,42	59.826.665.006,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	7.490.901.000,00	46.617.216.000,00	622,32	56.282.433.644,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	0,00	0,00	0,00	1.550.006.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	38.334.387.000,00	0,00	0,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.337.369.000,00	2.337.369.000,00	100,00	3.646.745.855,00

1. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak telah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
2. Realisasi Dana bagi hasil tembakau (CHT) sebesar Rp239.685.693.000,00 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.
3. Realisasi Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi sebesar Rp66.612.932.000,00 sesuai dengan PeraturanMentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
4. Realisasi Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi sebesar Rp24.073.502.000,00sesuai dengan Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
5. Realisasi Bagi Hasil dari Iuran Tetap Mineral dan Batubara-Land Rent sebesar Rp108.111.000,00 sesuai dengan Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
6. Realisasi Bagi Hasil dari Iuran Mineral dan Batubara dan Iuran Eksploitasi (Royalti) sebesar Rp99.936.563.000,00 sesuai dengan Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
7. Realisasi Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Sumber Daya Hutan sebesar Rp46.617.216.000,00 sesuai dengan Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
8. Realisasi Bagi Hasil dari Perikanan sebesar Rp2.337.369.000,00 sesuai dengan Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) tidak dianggarkan kembali mengingat IIUPH merupakan pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan. Pungutan ini dilakukan sekali saat izin diberikan. Dan hingga saat ini, tidak/ belum terdapat data adanya izin baru atas terbitnya pemegang konsesi yang dapat dikenakan IIUPH di Kab. Inhil.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir juga mendapatkan Transfer Non Tunai dalam bentuk Treasury Deposit Facility (TDF) sesuai surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KM.7/2024 Tahun 2024. Hal ini dikenakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dinilai oleh Kementrian Keuangan memiliki nilai kas yang tinggi. TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi daerah untuk menampung uang di BUN sebagai bentuk penyaluran nontunai, berupa penyimpanan dana overnight pada rekening TDF Pemerintah Daerah di Bank Indonesia.

Rincian penerimaan Non Tunai dalam bentuk *Treasury Deposit Facility* (TDF) dirincikan pada tabel berikut:

Uraian	Jumlah
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	22.521.875.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	1.749.765.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- <i>Royalty</i>	43.717.517.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	791.928.000,00
	68.781.085.000,00

5.1.1.2.1.3	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		1.021.515.931.000,00	919.817.829.148,00	90,04	925.026.162.597,00
	DAU	1.021.515.931.000,00	919.817.829.148,00	90,04	925.026.162.597,00
5.1.1.2.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		56.957.661.000,00	40.813.984.596,00	71,66	53.416.611.274,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	684.353.000,00	684.277.470,00	99,99	744.538.000,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.288.350.000,00	3.288.130.000,00	99,99	3.872.060.000,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.303.209.000,00	3.303.103.500,00	100,00	1.558.679.000,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	977.345.320,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	14.792.377.000,00	0,00	0,00	3.919.946.250,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	326.096.000,00	0,00	0,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	2.209.945.000,00	1.479.379.950,00	66,94	0,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	6.876.199.890,00	0,00	13.888.621.210,00
	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	9.750.000.000,00	9.147.347.330,00	93,82	11.533.461.740,00
	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	768.659.300,00
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	21.637.580.000,00	15.146.305.999,00	70,00	15.179.630.200,00
	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	965.751.000,00	889.240.457,00	92,08	973.670.254,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB, DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB, DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB), tidak dapat dilaksanakan disebabkan redaksi atas konfirmasi penerimaan transfer yang tidak terinci mengakibatkan kesalahan dalam pengelompokkan akun saat penginputan realisasi penerimaan dana transfer tersebut.

5.1.1.2.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		293.418.902.000,00	269.269.150.861,00	91,77	267.314.792.548,00
	DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00	0,00	0,00	87.411.111.523,00
	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	0,00	0,00	4.170.000.000,00
	DAK Non Fisik-TPG PNSD	110.532.750.000,00	102.185.159.240,00	92,45	104.222.707.045,00
	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	4.691.170.000,00	4.691.170.000,00	100,00	2.454.680.227,00
	DAK Non Fisik-TKG PNSD	36.773.439.000,00	36.773.439.000,00	100,00	30.813.275.000,00
	DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	5.641.173.000,00
	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	1.878.300.000,00
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	10.159.427.000,00	7.951.249.617,00	78,26	2.820.605.757,00
	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	374.831.000,00	0,00	0,00	0,00
	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	26.478.163.000,00	18.839.037.159,00	71,15	0,00
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	6.145.915.000,00	5.058.651.014,00	82,31	2.830.340.000,00
	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00	991.718.196,00
	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	595.257.000,00	570.267.533,00	95,80	0,00
	DAK Non Fisik-BOKB-KB	0,00	0,00	0,00	24.080.881.800,00
	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	406.000.000,00	100,00	0,00
	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	518.650.000,00	502.788.161,00	96,94	0,00
	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	85.724.600.000,00	84.998.570.137,00	99,15	0,00
	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	3.670.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	5.517.000.000,00	2.758.500.000,00	50,00	0,00
	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.666.700.000,00	4.369.319.000,00	262,15	0,00
	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00	165.000.000,00	183,33	0,00
5.1.1.2.2.1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA		Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		191.163.118.000,00	186.238.341.500,00	97,42	192.085.204.000,00

Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya tahun 2024 sebesar Rp186.238.341.500,00 atau 97,42% dari anggaran yang telah ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, terjadi penurunan sebesar Rp5.846.862.500,00 atau 3,04% dari realisasi tahun lalu. Rincian penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
	191.163.118.000,00	186.238.341.500,00	97,42	192.085.204.000,00
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	2.810.478.500,00	0,00	0,00
Dana Desa	183.427.863.000,00	183.427.863.000,00	100,00	182.593.182.000,00
Insentif Fiskal	7.735.255.000,00	0,00	0,00	9.492.022.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5.1.1.2.3.1	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		129.736.132.606,00	104.063.293.300,00	80,21	151.951.510.090,00

Realisasi pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun 2024 adalah sebesar Rp104.063.293.300,00 atau 80,21% dari anggaran yang ditetapkan. Pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp47.888.216.790,00 atau 31,52% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut:

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
1. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	23.294.517.540,00	18.827.899.585,00	80,83	24.937.182.147,00
2. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	16.046.271.077,00	15.120.434.013,00	94,23	19.041.387.569,00
3. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	56.126.814.418,00	35.129.082.313,00	62,59	74.063.349.930,00
4. Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	1.413.589.568,00	797.175.515,00	56,39	1.312.272.820,00
5. Bagi Hasil dari Pajak Rokok	32.854.940.003,00	34.188.701.874,00	104,06	32.597.317.624,00
	129.736.132.606,00	104.063.293.300,00	80,21	151.951.510.090,00

Adapun rincian dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini, dan untuk melihat rincian STS SP2D pada Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan, rincian perhitungan dan penjelasan dapat dilihat pada Lampiran 1.

Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	Tanggal	Jumlah
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) TW IV 2023	01 Februari 2024	4.015.360.868,00
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) TW. IV (DESEMBER) 2023	29 November 2024	2.470.361.432,00
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) TW. I 2024	05 April 2024	5.595.469.671,00
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) TW II TA. 2024	29 Agustus 2024	5.411.415.510,00
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) TW III 2024	20 Desember 2024	1.335.292.104,00
Jumlah		18.827.899.585,00

Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Tanggal	Jumlah
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) TW IV 2023	01 Februari 2024	1.906.998.029,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) TW I 2024	05 April 2024	3.843.074.868,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) TW II 2024	29 Agustus 2024	3.678.782.595,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) TW III 2024	20 Desember 2024	4.156.729.573,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) TW. IV (DESEMBER) 2023	29 November 2024	1.534.848.948,00
Jumlah		15.120.434.013,00

Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Tanggal	Jumlah
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) TW IV 2023	29 November 2024	123.265.226,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) TW I 2024	29 Mei 2024	14.858.454.393,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) TW II 2024	29 Agustus 2024	15.045.393.525,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) TW. IV (DESEMBER) 2023	29 November 2024	5.225.234.395,00
Jumlah		35.252.347.539,00

Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	Tanggal	Jumlah
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (AP)TW I 2024	05 April 2024	333.427.096,00
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (AP) TW II TA 2024	29 Agustus 2024	340.483.193,00
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (AP) TW IV TA 2024	29 November 2024	123.265.226,00
Jumlah		673.910.289,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

DBH PROPINSI PAJAK ROKOK	Tanggal	Jumlah
Pajak Rokok Triwulan IV (Desember) Tahun 2023	29 Mei 2024	5.213.920.846,00
Pajak Rokok Triwulan I 2024	30 Mei 2024	8.172.579.724,00
Pajak Rokok Triwulan II Tahun 2024	07 Agustus 2024	7.104.542.802,00
Pajak Rokok Triwulan III Tahun 2024	31 Oktober 2024	8.194.162.805,00
Pajak Rokok Triwulan IV 2024	27 Desember 2024	5.503.495.697,00
		34.188.701.874,00

5.1.1.2.3.2	Pendapatan Bantuan Keuangan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		13.232.000.000,00	6.506.703.000,00	49,17	15.278.770.000,00

Pendapatan Bantuan Keuangan tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp13.232.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.506.703.000,00 atau 49,17% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Adapun rincian Pendapatan Bantuan Keuangan sebagai berikut :

Jenis Penerimaan	Tanggal	Jumlah
Dana Bankeu Guru Bantu Semester I Ta.2024	05 April 2024	3.605.931.000,00
Dana Bankeu Guru Bantu Semester II Ta.2024	23 Agustus 2024	1.930.572.000,00
Dana Bankeu Rumah Layak Huni	03 Desember 2024	970.200.000,00
Jumlah		6.506.703.000,00

5.1.2	BELANJA DAN TRANSFER	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		2.578.626.122.874,00	2.186.767.247.053,52	84,80	2.105.165.064.419,20

Belanja Dan Transfer tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp2.578.626.122.874,00 dengan realisasi sebesar Rp2.186.767.247.053,52 atau 84,80% dari anggaran yang telah ditetapkan. Belanja tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp81.602.182.634,32 atau 3,88% dari realisasi belanja tahun lalu.

Total Belanja terdiri dari Belanja dan Transfer, dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja	2.259.735.946.474,00	1.880.912.479.545,52	83,24	1.792.727.717.944,20
Transfer	318.890.176.400,00	305.854.767.508,00	95,91	312.437.346.475,00
	2.578.626.122.874,00	2.186.767.247.053,52	84,80	2.105.165.064.419,20

5.1.2	BELANJA	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		2.259.735.946.474,00	1.880.912.479.545,52	83,24	1.792.727.717.944,20

Belanja Daerah tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp2.259.735.946.474,00 dengan realisasi sebesar Rp1.880.912.479.545,52 atau 83,24% dari anggaran yang telah ditetapkan. Belanja tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp88.184.761.601,32 atau 4,92% dari realisasi belanja tahun lalu.

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga, dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Operasi	1.951.791.054.345,00	1.642.867.108.572,09	84,17	1.593.459.868.086,92
Belanja Modal	305.275.432.900,00	236.887.385.817,43	77,60	199.084.394.895,28
Belanja Tak Terduga	2.669.459.229,00	1.157.985.156,00	43,38	183.454.962,00
	2.259.735.946.474,00	1.880.912.479.545,52	83,24	1.792.727.717.944,20

5.1.2.1	BELANJA OPERASI	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		1.951.791.054.345,00	1.642.867.108.572,09	84,17	1.593.459.868.086,92

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Subsidi, dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa. Realisasi Belanja Operasi pada tahun 2024 sebesar Rp1.642.867.108.572,09 dan Tahun 2023 sebesar Rp1.593.459.868.086,92, dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Pegawai	1.005.993.162.987,00	854.797.200.588,72	84,97	785.061.183.209,31



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Belanja Barang/Jasa	818.509.330.658,00	676.548.786.597,38	82,66	736.412.520.191,32
	Belanja Subsidi	339.150.000,00	259.876.000,00	76,63	0,00
	Belanja Hibah	123.385.708.625,00	110.962.245.385,99	89,93	71.486.038.456,29
	Belanja Bantuan Sosial	3.563.702.075,00	299.000.000,00	8,39	500.126.230,00
		1.951.791.054.345,00	1.642.867.108.572,09	84,17	1.593.459.868.086,92
5.1.2.1.1	BELANJA PEGAWAI	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		1.005.993.162.987,00	854.797.200.588,72	84,97	785.061.183.209,31
Realisasi Belanja Pegawai tahun 2024 sebesar Rp854.797.200.588,72 atau 84,97% dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi Belanja Pegawai tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp69.736.017.379,41 atau 8,88% dari realisasi tahun lalu.					
Rincian Belanja Pegawai tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut :					
5.1.2.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		638.174.269.960,00	527.131.180.195,00	82,60	467.910.111.789,00
		Belanja Gaji Pokok PNS	383.291.305.464,00	89,32	333.469.676.148,00
		Belanja Gaji Pokok PPPK	84.880.073.095,00	67,90	16.942.896.825,00
		Belanja Tunjangan Keluarga PNS	40.185.711.266,00	80,22	31.405.603.338,00
		Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	11.064.803.523,00	50,31	1.701.005.234,00
		Belanja Tunjangan Jabatan PNS	9.656.690.207,00	79,03	8.194.579.992,00
		Belanja Tunjangan Fungsional PNS	28.384.753.635,00	87,87	24.070.213.350,00
		Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	452.409.643,00	55,11	28.745.000,00
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.027.940.366,00	53,06	3.827.944.000,00
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.772.906.115,00	67,10	1.035.355.000,00
		Belanja Tunjangan Beras PNS	20.533.882.207,00	86,48	18.661.934.484,00
		Belanja Tunjangan Beras PPPK	7.934.800.258,00	45,70	1.228.582.480,00
		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.801.479.094,00	18,02	1.276.769.525,00
		Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.981.441,00	40,81	4.581.784,00
		Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.776.392,00	31,36	288.931,00
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	26.116.238.577,00	86,65	22.353.256.019,00
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	6.195.298.574,00	42,53	823.667.464,00
		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.442.639.108,00	48,69	684.415.383,00
		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	241.359.647,00	53,13	36.837.241,00
		Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	3.477.283.888,00	60,80	2.053.252.696,00
		Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	699.937.460,00	54,97	110.506.895,00
5.1.2.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		168.130.537.801,00	138.286.418.121,00	82,25	140.726.468.341,00
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	90.338.979.746,00	85,69	80.592.203.818,00
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	12.494.724.078,00	33,91	2.699.400.000,00
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	17.953.309.700,00	91,84	17.069.898.367,00
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	14.052.186.550,00	89,34	12.232.160.600,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	33.291.337.727,00	82,89	28.132.805.556,00		
5.1.2.1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		166.716.887.614,00	157.940.786.436,00	94,74	146.685.371.677,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	48.759.363,00
	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	260.832.614,00	116.426.247,00	44,64	137.944.486,00
	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	110.532.750.000,00	105.037.966.300,00	95,03	100.783.204.940,00
	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	36.773.439.000,00	36.201.171.400,00	98,44	30.503.812.895,00
	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	4.691.170.000,00	3.957.750.000,00	84,37	2.521.075.000,00
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.643.008.000,00	1.657.499.269,00	100,88	2.126.372.493,00
	Belanja Honorarium	12.135.688.000,00	10.334.223.220,00	85,16	10.564.202.500,00
	Belanja Tunjangan Khusus Penyelenggara PTSP Daerah	680.000.000,00	635.750.000,00	93,49	0,00
5.1.2.1.1.4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		23.908.150.162,00	22.940.383.326,00	95,95	23.005.756.426,00
	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.001.595.000,00	99,76	1.002.435.000,00
	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.561.400,00	131.329.800,00	93,43	137.694.900,00
	Belanja Tunjangan Beras DPRD	169.650.000,00	141.696.000,00	83,52	146.592.000,00
	Belanja Uang Paket DPRD	93.229.500,00	85.900.500,00	92,14	85.900.500,00
	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.452.312.750,00	99,76	1.453.530.750,00
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	130.828.425,00	103.986.750,00	79,48	124.601.400,00
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	18.011.175,00	13.245.750,00	73,54	15.894.900,00
		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		5.670.000.000,00	5.659.500.000,00	99,81	5.659.500.000,00
	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.417.500.000,00	945.000.000,00	66,67	1.417.500.000,00
	Belanja Tunjangan Reses DPRD	142.184.822,00	264.420,00	0,19	264.420,00
	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	34.020,00	13.300,00	39,09	17.950,00
	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.663.936.320,00	6.574.124.056,00	98,65	6.572.524.606,00
	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.559.500.000,00	6.409.000.000,00	97,71	6.383.000.000,00
	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	442.890.000,00	422.415.000,00	95,38	6.300.000,00
5.1.2.1.1.5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		98.317.450,00	0,00	0,00	154.655.351,00
	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	32.413.430,00	0,00	0,00	50.700.000,00
	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.889.620,00	0,00	0,00	2.730.000,00
	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	52.920.000,00	0,00	0,00	91.260.000,00
	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	2.827.500,00	0,00	0,00	2.824.380,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.000.000,00	0,00	0,00	1.830.111,00
	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	980,00	0,00	0,00	1.820,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	4.000.000,00	0,00	0,00	4.897.200,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	72.480,00	0,00	0,00	102.960,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	193.440,00	0,00	0,00	308.880,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5.1.2.1.1.6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	
		993.120.000,00	587.640.000,00	59,17	832.000.000,00	
	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	227.640.000,00	57,91	252.000.000,00	
	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	360.000.000,00	60,00	580.000.000,00	
5.1.2.1.1.7	Belanja Pegawai BLUD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	
		7.971.880.000,00	7.910.792.510,72	99,23	5.746.819.625,31	
	Belanja Pegawai BLUD	7.971.880.000,00	7.910.792.510,72	99,23	5.746.819.625,31	
	Jumlah Belanja Pegawai	1.005.993.162.987,00	854.797.200.588,72	84,97	785.061.183.209,31	
5.1.2.1.2	BELANJA BARANG DAN JASA	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	
		818.509.330.658,00	676.548.786.597,38	82,66	736.412.520.191,32	
Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2024 sebesar Rp676.548.786.597,38 atau 82,66% dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi Belanja Pegawai tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp59.863.733.593,94 atau 82,66% dari realisasi tahun lalu.						
Rincian Belanja Barang dan Jasa tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut :						
5.1.2.1.2.1	Belanja Bahan Pakai Habis	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	
		99.854.671.534,00	76.159.611.486,60	76,27	104.885.769.320,44	
		Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.264.389.680,00	663.251.558,00	52,46	706.266.977,44
		Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.750.000,00	2.750.000,00	100,00	151.188.000,00
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	14.519.081.745,00	11.895.279.808,00	81,93	15.652.839.530,00
		Belanja Bahan-Bahan Baku	37.000.000,00	37.000.000,00	100,00	1.173.377.930,00
		Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	82.300.000,00	10.260.000,00	12,47	118.033.000,00
		Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	4.890.000,00
		Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	55.000.000,00	51.100.000,00	92,91	76.237.800,00
		Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	3.500.000,00	0,00	0,00	10.220.000,00
		Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.039.112.113,00	7.711.110.532,20	85,31	7.355.991.618,00
		Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.978.146.000,00	1.751.881.846,00	88,56	1.359.395.247,00
		Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	186.664.998,00	186.345.620,00	99,83	699.695.000,00
		Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	175.000,00
		Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	15.000.000,00	14.201.000,00	94,67	39.260.000,00
		Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	5.661.000,00	5.655.000,00	0,00	0,00
		Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	3.500.000,00
		Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	2.107.320.000,00	1.941.949.319,00	92,15	1.633.894.612,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.442.497.198,00	6.664.194.989,00	89,54	7.796.677.144,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.306.884.825,00	9.406.627.402,00	70,69	11.204.135.684,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	602.731.500,00	547.970.287,00	90,91	555.406.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	91.374.365,00	45.385.600,00	49,67	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	119.893.586,00	40.399.200,00	33,70	6.751.460,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.359.192.355,00	1.208.550.693,00	88,92	961.074.683,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	188.474.135,00	150.941.356,00	80,09	62.497.760,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	246.640.230,00	168.043.880,00	68,13	499.927.430,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	984.178.700,00	861.565.660,00	87,54	699.588.750,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.598.615.503,00	1.419.182.969,00	88,78	1.345.559.622,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	7.674.388.821,00	5.375.284.202,40	70,04	6.109.031.041,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	139.783.450,00	137.988.550,00	98,72	83.285.500,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.645.611.000,00	186.452.000,00	5,11	12.745.531.585,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	393.360.000,00	378.627.159,00	96,25	459.798.505,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	98.050.000,00	98.031.000,00	99,98	112.386.300,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.724.539.100,00	9.075.133.738,00	66,12	17.223.730.566,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.450.810.800,00	6.657.740.521,00	89,36	6.972.571.270,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.648.292.630,00	1.446.442.157,00	87,75	1.555.039.050,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	51.820.000,00	6.794.000,00	13,11	12.648.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.142.797.800,00	4.171.541.576,00	81,11	3.952.687.630,00
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	92.000.000,00	91.653.100,00	99,62	169.069.650,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	18.000.000,00	0,00	0,00	8.991.000,00
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	135.000.000,00	132.750.000,00	98,33	103.680.000,00
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	274.000.000,00	270.659.000,00	98,78	14.439.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	128.875.000,00	114.864.000,00	89,13	403.143.850,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	830.585.000,00	493.497.026,00	59,42	335.130.925,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	175.750.000,00	175.743.000,00	100,00	127.631.000,00
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0,00	0,00	0,00	42.766.000,00
Belanja Pakaian Penyelamatan	90.000.000,00	89.910.000,00	99,90	0,00
Belanja Pakaian Siaga	0,00	0,00	0,00	67.873.400,00
Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	0,00	0,00	86.090.550,00
Belanja Pakaian KORPRI	0,00	0,00	0,00	60.275.000,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	1.270.275.000,00	1.199.735.250,00	94,45	985.697.091,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	199.850.000,00	193.419.748,00	96,78	86.129.200,00
Belanja Pakaian Olahraga	989.780.000,00	727.810.445,00	73,53	799.786.230,00
Belanja Pakaian Paskibraka	436.195.000,00	343.388.295,00	78,72	218.503.230,00
Belanja Pakaian Jas/Safari	0,00	0,00	0,00	32.250.000,00

5.1.2.1.2.2 Belanja Jasa Kantor	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
	209.748.437.569,00	173.770.693.602,00	82,85	188.843.656.492,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.179.128.000,00	4.109.405.500,00	57,24	6.899.571.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	14.580.950.013,00	9.850.380.000,00	67,56	15.241.855.000,00
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	164.200.000,00	147.800.000,00	90,01	70.200.000,00
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.215.600.000,00	1.034.700.000,00	85,12	1.145.550.000,00
Honorarium Rohaniwan	6.288.200.000,00	6.067.515.000,00	96,49	5.382.208.000,00
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	231.490.000,00	204.540.000,00	88,36	408.140.000,00
Honorarium Penyelenggara Ujian	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	139.650.000,00	134.850.000,00	96,56	97.800.000,00
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	579.000.000,00	544.000.000,00	93,96	510.380.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	13.020.400.000,00	6.537.353.000,00	50,21	12.828.150.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	21.640.768.000,00	19.362.994.700,00	89,47	19.512.420.299,00
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	466.202.000,00	179.753.500,00	38,56	172.586.500,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	310.800.000,00	306.300.000,00	98,55	310.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	7.861.600.000,00	7.781.750.000,00	98,98	7.329.550.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.811.700.000,00	1.782.685.000,00	98,40	1.719.462.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.890.800.000,00	1.776.800.000,00	93,97	1.668.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.254.000.000,00	1.236.000.000,00	98,56	1.021.350.000,00
Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	504.000.000,00	504.000.000,00	100,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	2.639.992.000,00	1.409.520.000,00	53,39	1.149.310.000,00
Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	28.800.000,00	28.800.000,00	100,00	16.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.102.200.000,00	1.028.250.000,00	93,29	1.121.150.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	13.907.190.000,00	12.556.189.000,00	90,29	10.704.159.000,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	9.077.050.000,00	8.306.807.375,00	91,51	10.803.026.125,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.952.357.900,00	3.704.661.000,00	93,73	2.624.450.400,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	13.079.550.000,00	11.423.116.000,00	87,34	14.216.285.300,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.095.750.000,00	8.782.264.800,00	96,55	8.208.961.500,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	7.873.500.000,00	7.507.440.000,00	95,35	5.473.637.400,00
Belanja Jasa Tenaga Caraka	208.000.000,00	158.380.000,00	76,14	114.700.000,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	2.164.050.000,00	2.021.669.000,00	93,42	2.077.987.100,00
Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	234.000.000,00	218.400.000,00	93,33	217.200.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	389.200.000,00	387.900.000,00	99,67	449.350.000,00
Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	45.000.000,00	31.778.224,00	70,62	0,00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	698.580.800,00	479.594.000,00	68,65	223.160.000,00
Belanja Jasa Tata Rias	18.400.000,00	18.385.600,00	99,92	14.290.500,00
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	3.324.000.000,00	3.164.605.000,00	95,20	2.300.665.000,00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	61.800.000,00	57.665.430,00	93,31	168.427.745,00
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	150.000.000,00	149.472.500,00	99,65	124.700.000,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	5.636.908.000,00	4.063.186.799,00	72,08	5.367.255.837,00
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	2.146.590.000,00	1.427.970.000,00	66,52	1.458.190.000,00
Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	451.120.000,00	442.218.730,00	98,03	538.025.364,00
Belanja Jasa Kalibrasi	368.448.000,00	125.869.500,00	34,16	254.971.000,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	182.526.000,00	162.652.000,00	89,11	888.000,00
Belanja Jasa Pengukuran Tanah	26.700.000,00	19.045.000,00	71,33	57.215.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	26.097.480.000,00	20.644.343.210,00	79,10	19.671.625.246,00
Belanja Jasa Operator Kapal	438.800.000,00	364.400.000,00	83,04	494.400.000,00
Belanja Tagihan Telepon	220.628.000,00	154.565.686,00	70,06	113.492.037,00
Belanja Tagihan Air	520.770.000,00	399.475.050,00	76,71	356.436.650,00
Belanja Tagihan Listrik	18.552.903.856,00	16.833.955.612,00	90,73	17.886.751.839,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.564.622.000,00	1.282.691.800,00	81,98	1.177.807.675,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.567.312.000,00	4.023.453.811,00	88,09	3.905.585.945,00
Belanja Paket/Pengiriman	123.398.000,00	39.185.522,00	31,76	202.758.359,00
Belanja Penambahan Daya	0,00	0,00	0,00	3.202.700,00
Belanja Registrasi/Keanggotaan	120.600.000,00	50.100.000,00	41,54	224.010.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.334.890.000,00	624.100.233,00	46,75	610.671.179,00
	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Medical Check Up	196.273.000,00	117.756.020,00	60,00	145.935.360,00
	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	0,00	0,00	0,00	18.980.000,00
	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	0,00	0,00	0,00	2.028.571.432,00
5.1.2.1.2.3	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		46.839.170.844,00	29.251.570.246,00	62,45	35.772.239.213,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.193.909.584,00	2.748.289.272,00	86,05	0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	40.779.933.600,00	24.727.354.550,00	60,64	31.864.318.675,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	810.600.000,00	393.604.400,00	48,56	606.194.400,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	0,00	0,00	0,00	2.920.668.808,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	985.610.160,00	727.097.122,40	73,77	127.399.601,00
	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	751.117.500,00	565.885.042,60	75,34	149.492.134,00
	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	318.000.000,00	89.339.859,00	28,09	104.165.595,00
5.1.2.1.2.4	Belanja Sewa Tanah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		0,00	0,00	0,00	52.545.000,00
	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	52.545.000,00
5.1.2.1.2.5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		12.696.463.754,00	7.529.451.777,00	59,30	8.026.397.387,75
	Belanja Sewa Alat Pengangkat	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00
	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	10.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.962.000,00	0,00	0,00	84.005.000,00
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.243.164.754,00	880.168.754,00	70,80	884.659.457,00
		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	286.900.000,00	151.133.582,00	52,68	147.750.000,00
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	22.500.000,00	12.000.000,00	53,33	26.900.000,00
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00
	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.708.670.000,00	1.151.854.500,00	67,41	1.949.499.047,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	197.695.000,00	136.400.000,00	69,00	202.500.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	5.240.900.000,00	2.487.789.400,00	47,47	602.990.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	162.640.000,00	52.526.000,00	32,30	180.759.629,75
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	564.902.000,00	418.194.000,00	74,03	282.920.001,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	209.800.000,00	108.306.641,00	51,62	107.292.398,00
Belanja Sewa Alat Laboratorium Pertanian	1.800.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	245.000.000,00	229.751.000,00	93,78	274.973.240,00
Belanja Sewa Mebel	310.680.000,00	243.655.000,00	78,43	0,00
Belanja Sewa Alat Pendingin	9.750.000,00	7.600.000,00	77,95	0,00
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.030.200.000,00	849.546.300,00	82,46	1.119.986.050,00
Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	243.700.000,00	149.300.000,00	61,26	157.800.000,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	8.000.000,00	7.994.000,00	99,93	3.500.000,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar	4.200.000,00	1.600.000,00	38,10	0,00
Belanja Sewa Peralatan Cetak	300.300.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	607.000.000,00	454.280.100,00	74,84	964.632.000,00
Belanja Sewa Alat Komunikasi Satelit	0,00	0,00	0,00	118.928.565,00
Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	774.730.000,00
Belanja Sewa System/Power Supply	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	110.000.000,00	59.800.000,00	54,36	12.000.000,00
Belanja Sewa MOB	21.600.000,00	21.600.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.386.000,00
Belanja Sewa Mekanik	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Belanja Sewa Elektronik/Electric	128.600.000,00	105.952.500,00	82,39	56.673.000,00
Belanja Sewa Elektrik	0,00	0,00	0,00	26.973.000,00
Belanja Sewa Suara	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.1.2.1.2.6 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	8.406.262.223,00	5.854.363.887,00	69,64	6.305.482.330,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	261.620.000,00	215.742.500,00	82,46	416.678.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Belanja Sewa Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.896.610.000,00	942.009.711,00	49,67	733.024.260,00
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	112.000.000,00	107.650.000,00	96,12	87.000.000,00
	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	72.257.716,00
	Belanja Sewa Taman	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	322.710.000,00	289.877.100,00	89,83	216.713.754,00
	Belanja Sewa Hotel	5.441.822.223,00	4.029.084.576,00	74,04	3.846.628.100,00
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	371.500.000,00	270.000.000,00	72,68	884.180.000,00
5.1.2.1.2.7	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00
	Belanja Sewa Jaringan dengan Media Udara	500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00
5.1.2.1.2.8	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		199.200.000,00	148.032.500,00	74,31	154.025.000,00
	Belanja Sewa Audio Visual	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	Belanja Sewa Musik Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	6.000.000,00
	Belanja Sewa Alat Musik	195.200.000,00	144.032.500,00	73,79	139.825.000,00
	Belanja Sewa Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5.1.2.1.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		16.920.889.173,00	11.678.681.308,34	69,02	14.864.974.291,82
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1.870.735.000,00	1.698.846.500,14	90,81	986.595.490,76
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	100.000.000,00	99.578.100,00	99,58	38.444.850,00
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	793.956.779,00	364.423.579,00	45,90	869.837.973,00
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	764.980.000,00	761.100.000,00	99,49	992.100.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	2.363.988.750,00	2.042.060.080,00	86,38	1.649.083.025,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	2.130.992.000,00	942.253.990,00	44,22	827.486.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	574.150.000,00	306.827.096,00	53,44	1.020.476.455,20
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	700.000.000,00	696.140.900,00	99,45	743.525.730,00
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	400.000.000,00	399.600.000,00	0,00	0,00
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.864.814.894,00	1.521.647.046,00	81,60	551.424.297,86
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.942.170.000,00	766.709.667,20	39,48	3.441.286.310,00
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	1.283.913.000,00	187.168.450,00	14,58	1.345.732.880,00
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	927.588.750,00	743.714.380,00	80,18	1.209.327.300,00
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	6.000.000,00	5.938.500,00	98,98	0,00
	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis- Jasa Survei Permukaan Tanah	800.000.000,00	795.073.020,00	99,38	798.553.980,00
	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00	0,00
	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	392.000.000,00	342.000.000,00	87,24	377.600.000,00
5.1.2.1.2.10	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		856.000.000,00	402.483.500,00	47,02	844.058.800,00
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	420.000.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	576.000.000,00	172.483.500,00	29,95	13.388.800,00
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	211.200.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	100.000.000,00	50.000.000,00	50,00	0,00
	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	0,00	0,00	0,00	199.470.000,00
5.1.2.1.2.11	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		0,00	0,00	0,00	7.484.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	7.484.000,00	
5.1.2.1.2.12	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	
		313.000.000,00	177.000.000,00	56,55	270.000.000,00	
		Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	100.000.000,00
	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	238.000.000,00	102.000.000,00	42,86	170.000.000,00	
5.1.2.1.2.13	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	
		2.132.077.181,00	1.484.244.418,00	69,61	2.756.598.523,00	
		Belanja kursus-kursus singkat/Pelatihan	864.195.000,00	468.405.000,00	54,20	1.580.514.029,00
		Belanja sosialisasi	14.700.000,00	12.000.000,00	81,63	37.630.000,00
		Belanja Bimbingan Teknis	901.292.181,00	651.949.418,00	72,33	837.564.494,00
		Belanja Diklat Kepemimpinan	351.890.000,00	351.890.000,00	100,00	300.890.000,00
5.1.2.1.2.14	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	
		58.200.000,00	51.955.908,00	89,27	0,00	
	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud- Lisensi dan Franchise	58.200.000,00	51.955.908,00	89,27	0,00	
5.1.2.1.2.15	Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	
		40.219.429.816,00	27.439.300.011,49	68,22	34.165.219.652,45	
		Belanja Pemeliharaan Tanah	361.090.000,00	327.397.926,00	90,67	577.164.887,51
		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.252.804.576,00	5.786.917.385,00	79,79	6.451.828.828,00
		Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.746.544.626,00	3.674.750.038,49	63,95	3.112.637.096,94
		Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	26.821.170.614,00	17.650.234.662,00	65,81	24.008.788.840,00
		Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	14.800.000,00
	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	37.820.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.2.1.2.16	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	
		37.820.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.2.1.2.17	Belanja Perjalanan Dinas	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	
		168.915.895.690,00	127.487.074.841,50	75,47	145.609.362.678,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	168.915.895.690,00	127.487.074.841,50	75,47	145.609.362.678,00	
5.1.2.1.2.18	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	
		12.600.915.000,00	10.831.778.700,00	85,96	12.091.492.442,00	
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.600.915.000,00	10.831.778.700,00	85,96	12.091.492.442,00	



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5.1.2.1.2.19	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		65.569.857.000,00	61.409.485.849,60	93,66	79.771.672.260,00
	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	65.569.857.000,00	61.409.485.849,60	93,66	79.771.672.260,00
5.1.2.1.2.20	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		24.795.831.898,00	18.434.454.649,00	74,34	0,00
	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	24.795.831.898,00	18.434.454.649,00	74,34	0,00
5.1.2.1.2.21	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		108.382.528.976,00	124.438.103.912,85	114,81	101.991.042.800,86
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	108.382.528.976,00	124.438.103.912,85	114,81	101.991.042.800,86
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa	818.509.330.658,00	676.548.786.597,38	82,66	736.412.520.191,32
			0,00		
5.1.2.1.3	BELANJA SUBSIDI	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		339.150.000,00	259.876.000,00	76,63	0,00

Realisasi Belanja Subsidi tahun 2024 adalah sebesar Rp259.876.000,00 atau 76,63% dari anggaran yang disediakan. Realisasi tahun 2023 sebesar Rp0,00. Belanja subsidi untuk Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Dengan Rincian Sebagai Berikut :

No	Uraian	Realisasi
1	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Tembilahan.	5.625.000,00
2	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang Telur) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Tembilahan.	1.200.000,00
3	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang Cabe,Bawang merah, dan bawang putih) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Tembilahan.	1.000.000,00
4	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan Ayam) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Tembilahan.	250.000,00
5	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Tembilahan Hulu Desa Pulau Palas.	5.575.000,00
6	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang Telur) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Tembilahan Hulu Desa Pulau Palas.	1.200.000,00
7	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang Cabe,Bawang merah, dan bawang putih) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Tembilahan Hulu Desa Pulau	750.000,00
8	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan Ayam) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Tembilahan Hulu Desa Pulau Palas.	250.000,00
9	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Tempuling Kelurahan Sungai Salak.	5.375.000,00
10	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang Telur) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Tempuling Kelurahan Sungai Salak.	1.200.000,00
11	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang Cabe,Bawang merah, dan bawang putih) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Tempuling Kelurahan Sungai	800.000,00
12	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan Ayam) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Tempuling Kelurahan Sungai Salak.	200.000,00
13	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Pelangiran.	7.050.000,00
14	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Mandah.	7.825.000,00
15	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Kemuning Kelurahan Selensen.	7.339.000,00
16	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Keritang Desa Petalongan.	5.375.000,00
17	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang Telur) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Keritang Desa Petalongan.	1.200.000,00
18	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang Cabe,Bawang merah, dan bawang putih) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Keritang Desa Petalongan.	625.000,00
19	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Kempas.	5.497.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

20	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang Telur) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Kempas.	1.026.000,00
21	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang Cabe,Bawang merah, dan bawang putih) untuk Kegiatan Pasar Murah di K Kempas Tembilahan.	750.000,00
22	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Tanah Merah Desa Tanah Merah.	8.075.000,00
23	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Kuala Indragiri.	5.167.500,00
24	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Concong.	3.185.000,00
25	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Enok.	4.545.000,00
26	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Reteh.	5.710.000,00
27	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Sungai Batang.	6.447.500,00
28	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Tembilahan Hulu.	8.075.000,00
29	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Tembilahan.	8.075.000,00
30	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Pulau Burung.	7.002.500,00
31	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Teluk Belengkong Melalui Sub Kegiatan	5.350.000,00
32	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Kateman	7.575.000,00
33	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Enok	6.330.000,00
34	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Tempuling	7.015.000,00
35	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Kempas	6.680.000,00
36	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok berupa Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Tepung) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Keritang	5.625.000,00
37	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok berupa Cabe, Bawang Putih, Bawah Merah) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Keritang	900.000,00
38	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok berupa Telur) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Keritang	1.200.000,00
39	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok berupa Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Tepung) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Kemuning	5.300.000,00
40	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok berupa Cabe, Bawang Putih, Bawah Merah) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Kemuning	800.000,00
41	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok berupa telur) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Kemuning	1.140.000,00
42	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok berupa Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Tepung) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Gaung	5.200.000,00
43	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok berupa Cabe, Bawang Putih, Bawah Merah) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Gaung	675.000,00
44	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok berupa Telur) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Gaung	1.140.000,00
45	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok berupa Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Tepung) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Batang Tuaka	4.900.000,00
46	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok berupa Cabe, Bawang Putih, Bawah Merah) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Batang Tuaka	675.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

47	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok berupa Telur) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Batang Tuaka	1.020.000,00
48	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok berupa Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Tepung) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Gaung Anak Serka	5.287.500,00
49	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok berupa Cabe, Bawang Putih, Bawah Merah) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Gaung Anak Serka	825.000,00
50	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok berupa Telur) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Gaung Anak Serkaa	1.200.000,00
51	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok berupa Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Tepung) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Batang Tuaka Desa Simpang jaya	4.675.000,00
52	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok berupa Bawang Putih, Bawah Merah) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Batang Tuaka Desa Simpang jaya	725.000,00
53	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok berupa Telur) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Enok	1.020.000,00
54	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok berupa Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Tepung,Telur, Bawang Merah, dan Bawang Putih) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Gaung Anak Serka Kelurahan Sungai Empat	4.398.000,00
55	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok berupa Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Tepung) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Sungai Batang Kelurahan Benteng	4.675.000,00
56	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok berupa Bawang Putih, Bawah Merah) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Sungai Batang Kelurahan Benteng	600.000,00
57	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok berupa Telur) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Sungai Batang Kelurahan Benteng	900.000,00
58	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok berupa Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Tepung,Telur, Bawang Merah, dan Bawang Putih) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Tanah Merah Desa Tanjung Baru	3.795.000,00
59	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok berupa Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Tepung,Telur, Bawang Merah, dan Bawang Putih) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Gaung Anak Serka Kelurahan Sungai Empat	4.398.000,00
60	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok berupa Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Tepung,Telur, Cabe Bawang Merah, dan Bawang Putih) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Tanah Merah Desa Tanjung Baru	4.755.000,00
61	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok berupa Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, dan Tepung) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Tembilahan Kelurahan Sungai Beringin	5.625.000,00
62	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok berupa Telur) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Tembilahan Kelurahan Sungai Beringin	1.200.000,00
63	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok berupa Bawang Putih, Cabe, dan Bawang Merah) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Tembilahan Kelurahan Sungai Beringin	1.000.000,00
64	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok berupa Ayam) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Tembilahan Kelurahan Sungai Beringin	250.000,00
65	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok berupa Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, dan Tepung) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Tembilahan Hulu Kelurahan Tembilahan Hulu	5.625.000,00
66	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok berupa Telur) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Tembilahan Hulu Kelurahan Tembilahan Hulu.	1.200.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

67	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok berupa Bawang Putih, Cabe, dan Bawang Merah) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Tembilahan Hulu Kelurahan Tembilahan Hulu.	1.000.000,00
68	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok berupa Ayam) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Tembilahan Hulu Kelurahan Tembilahan Hulu .	250.000,00
69	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Mandah.	7.575.000,00
70	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Kateman.	7.825.000,00
71	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Pulau Burung.	6.842.500,00
72	Dibayarkan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Swasta (penyedia/pedagang bahan kebutuhan pokok) untuk Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Teluk Belengkong.	6.310.000,00
TOTAL		259.876.000,00

5.1.2.1.4	BELANJA HIBAH	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		123.385.708.625,00	110.962.245.385,99	89,93	71.486.038.456,29

Realisasi Belanja Hibah tahun 2024 sebesar Rp110.962.245.385,99 atau 89,93% dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tahun 2024, terjadi kenaikan sebesar Rp39.476.206.929,70 atau 55,22% dari realisasi tahun lalu. Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 dan 2023 adalah sebagai berikut:

5.1.2.1.4.1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		342.000.000,00	243.057.000,00	71,07	0,00
	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	342.000.000,00	243.057.000,00	71,07	0,00

5.1.2.1.4.2	Belanja Hibah kepada BUMD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		0,00	0,00	0,00	4.600.867.113,00
	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	4.600.867.113,00

5.1.2.1.4.3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		71.486.409.625,00	71.208.420.738,38	99,61	27.449.996.253,62
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	66.142.409.625,00	65.972.132.590,00	99,74	21.003.224.856,00
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.344.000.000,00	5.236.288.148,38	97,98	6.446.771.397,62

5.1.2.1.4.4	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		10.013.094.000,00	4.777.668.617,61	47,71	14.942.717.467,67
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	905.000.000,00	655.000.000,00	72,38	400.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.108.094.000,00	4.122.668.617,61	45,26	14.542.717.467,67
5.1.2.1.4.5	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		17.917.900.000,00	15.999.195.030,00	89,29	21.334.257.622,00
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.926.000.000,00	2.576.000.000,00	88,04	8.976.741.530,00
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	14.991.900.000,00	13.423.195.030,00	89,54	12.357.516.092,00
5.1.2.1.4.6	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		650.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	650.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.1.4.7	Belanja Hibah Kepada Partai Politik	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		3.244.825.000,00	3.244.825.000,00	100,00	3.158.200.000,00
	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.244.825.000,00	3.244.825.000,00	100,00	3.158.200.000,00
5.1.2.1.4.8	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		19.731.480.000,00	15.489.079.000,00	78,50	0,00
	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	19.731.480.000,00	15.489.079.000,00	78,50	0,00
	Jumlah Belanja Hibah	123.385.708.625,00	110.962.245.385,99	89,93	71.486.038.456,29
5.1.2.1.5	BANTUAN SOSIAL	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		3.563.702.075,00	299.000.000,00	8,39	500.126.230,00
	Realisasi Bantuan Sosial tahun 2024 sebesar Rp299.000.000,00 atau 8,39% dari anggaran yang disediakan. Realisasi tahun 2023, terjadi penurunan sebesar Rp201.126.230,00 atau 40,22% dari realisasi tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:				
5.1.2.1.5.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		543.000.000,00	299.000.000,00	55,06	458.506.780,00
	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan	543.000.000,00	299.000.000,00	55,06	458.506.780,00
5.1.2.1.5.2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		91.052.075,00	0,00	0,00	41.619.450,00
	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	91.052.075,00	0,00	0,00	41.619.450,00
5.1.2.1.5.3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		2.302.650.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	2.302.650.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.1.5.4	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		627.000.000,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)		627.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
Jumlah Belanja Bantuan Sosial		3.563.702.075,00	299.000.000,00	8,39	500.126.230,00		
5.1.2.2	BELANJA MODAL	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)		
		305.275.432.900,00	236.887.385.817,43	77,60	199.084.394.895,28		
		Realisasi Belanja Modal tahun 2024 sebesar Rp236.887.385.817,43 atau sebesar 77,60% dari anggaran yang telah ditetapkan. Belanja Modal tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp37.802.990.922,15 atau 18,99%					
		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)		
Belanja Peralatan dan Mesin		58.140.385.353,00	53.172.618.238,21	91,46	59.841.785.825,00		
Belanja Gedung dan Bangunan		70.871.705.158,00	52.866.220.044,23	74,59	57.555.551.158,70		
Belanja Jalan, Irigasi dan Irigasi		172.135.521.389,00	125.646.558.484,99	72,99	76.405.708.976,58		
Belanja Aset Tetap Lainnya		4.052.821.000,00	5.167.368.150,00	127,50	5.281.348.935,00		
Belanja Modal Aset Lainnya		75.000.000,00	34.620.900,00	46,16	0,00		
		305.275.432.900,00	236.887.385.817,43	77,60	199.084.394.895,28		
5.1.2.2.1	BELANJA PERALATAN DAN MESIN	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)		
		58.140.385.353,00	53.172.618.238,21	91,46	59.841.785.825,00		
		Belanja Modal - Peralatan dan Mesin tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp53.172.618.238,21 dan Rp59.841.785.825,00 dengan rincian sebagai berikut:					
5.1.2.2.1.1	Belanja Modal Alat Besar	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)		
		0,00	0,00	0,00	7.164.340.000,00		
		Belanja Modal Grader				0,00	0,00
Belanja Modal Excavator				0,00	0,00	0,00	4.705.290.000,00
Belanja Modal Compacting Equipment				0,00	0,00	0,00	998.000.000,00
Belanja Modal Alat Pengangkat				0,00	0,00	0,00	15.050.000,00
Belanja Modal Mesin Proses				0,00	0,00	0,00	17.500.000,00
5.1.2.2.1.2	Belanja Modal Alat Bantu	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)		
		1.981.660.000,00	1.879.236.270,00	94,83	360.422.943,00		
		Belanja Modal Pompa				131.160.000,00	44.937.450,00
Belanja Modal Mesin Bor				7.000.000,00	0,00	0,00	5.749.800,00
Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan				1.843.500.000,00	1.834.298.820,00	99,50	34.509.900,00
Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering				0,00	0,00	0,00	235.705.900,00
Belanja Modal Alat Bantu Lainnya				0,00	0,00	0,00	20.886.863,00
5.1.2.2.1.3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)		
		2.652.509.300,00	619.345.000,00	23,35	5.298.213.150,00		
		Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan				639.000.000,00	0,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang				0,00	0,00	0,00	353.017.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang				1.585.500.000,00	530.100.000,00	33,43	305.000.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua				93.072.000,00	89.245.000,00	95,89	1.093.334.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	334.937.300,00	0,00	0,00	1.366.267.800,00
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	289.027.350,00
5.1.2.2.1.4	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.1.2.2.1.5	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		198.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	198.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.2.1.6	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		0,00	0,00	0,00	19.980.000,00
	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	19.980.000,00
5.1.2.2.1.7	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		25.790.000,00	1.700.000,00	6,59	79.946.640,00
	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	25.790.000,00	1.700.000,00	6,59	79.946.640,00
5.2.2.2.1.8	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		23.200.000,00	0,00	0,00	49.628.700,00
	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	0,00	0,00	0,00	2.153.400,00
	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	0,00	0,00	0,00	22.510.800,00
	Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip, dan <i>Feeting</i>	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	725.000,00
	Belanja Modal Alat Ukur Universal	23.200.000,00	0,00	0,00	23.239.500,00
5.1.2.2.1.9	Belanja Modal Alat Pertanian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		0,00	0,00	0,00	640.000,00
	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	0,00	0,00	640.000,00
5.2.2.2.1.10	Belanja Modal Alat Kantor	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		1.237.712.839,00	771.605.823,21	62,34	837.612.647,00
	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	104.776,00	104.000,00	99,26	0,00
	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	145.190.905,00	92.870.179,00	63,96	453.604.824,00
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.092.417.158,00	678.631.644,21	62,12	384.007.823,00
5.1.2.2.1.11	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		12.827.882.831,00	11.458.975.662,00	89,33	6.183.941.253,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Belanja Modal Mebel	11.202.207.106,00	10.325.214.000,00	92,17	4.305.270.000,00
	Belanja Modal Alat Pembersih	62.226.880,00	38.052.500,00	61,15	9.234.000,00
	Belanja Modal Alat Pendingin	432.879.920,00	373.065.120,00	86,18	648.559.733,00
	Belanja Modal Alat Dapur	300.485.064,00	256.864.982,00	85,48	87.572.270,00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)	788.083.861,00	465.779.060,00	59,10	747.526.250,00
	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	42.000.000,00	0,00	0,00	385.779.000,00
5.1.2.2.1.12	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		185.787.380,00	136.950.500,00	73,71	394.357.550,00
	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	26.600.000,00	26.456.200,00	99,46	110.611.450,00
	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	44.777.400,00
	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	40.957.380,00	12.907.000,00	31,51	122.299.900,00
	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	34.400.000,00	22.712.800,00	66,03	41.690.000,00
	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangannya	7.500.000,00	7.492.500,00	99,90	17.580.800,00
	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	76.330.000,00	67.382.000,00	88,28	57.398.000,00
5.1.2.2.1.13	Belanja Modal Alat Studio	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		1.432.870.021,00	1.272.892.060,00	88,84	918.875.957,00
	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	123.976.632,00	104.112.700,00	83,98	148.289.770,00
	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.197.119.592,00	1.096.340.000,00	91,58	372.063.980,00
	Belanja Modal Peralatan Cetak	46.618.797,00	7.354.860,00	15,78	16.468.000,00
	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	150.460.000,00
	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	35.155.000,00	35.084.500,00	99,80	231.594.207,00
5.1.2.2.1.14	Belanja Modal Alat Komunikasi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		57.227.126,00	43.653.000,00	76,28	4.000.000,00
	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	57.227.126,00	43.653.000,00	76,28	4.000.000,00
5.1.2.2.1.15	Belanja Modal Peralatan Pemancar	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		40.000.000,00	39.738.000,00	99,35	0,00
	Belanja Modal Sumber Tenaga	40.000.000,00	39.738.000,00	99,35	0,00
5.1.2.2.1.16	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		19.100.000,00	11.100.000,00	58,12	51.653.000,00
	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	19.100.000,00	11.100.000,00	58,12	51.653.000,00
5.1.2.2.1.17	Belanja Modal Alat Kedokteran	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		10.121.994.159,00	9.203.773.640,00	90,93	15.159.026.739,00
	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	9.797.344.159,00	8.936.973.640,00	91,22	14.693.421.239,00
	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	188.200.000,00	137.850.000,00	73,25	0,00
	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	0,00	0,00	465.605.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	136.450.000,00	128.950.000,00	94,50	0,00
5.1.2.2.1.18	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		707.096.000,00	502.900.000,00	71,12	20.000.000,00
	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	707.096.000,00	502.900.000,00	71,12	20.000.000,00
5.1.2.2.1.19	Belanja Modal Alat Laboratorium	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		10.204.400.000,00	10.167.423.970,00	99,64	4.065.040.702,00
	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	4.400.000,00	0,00	0,00	2.665.989.702,00
	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	10.200.000.000,00	10.167.423.970,00	99,68	1.378.112.500,00
	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	0,00	0,00	5.938.500,00
	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
5.1.2.2.1.20	Belanja Modal Komputer	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		3.405.003.188,00	3.013.841.641,00	88,51	7.692.123.242,00
	Belanja Modal Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	469.829.950,00
	Belanja Modal Personal Computer	1.896.956.220,00	1.785.975.010,00	94,15	4.222.186.940,00
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	586.100.000,00	395.568.980,00	67,49	1.566.288.977,00
	Belanja Modal Peralatan Mainframe	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	18.396.004,00	18.395.800,00	100,00	11.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	882.426.964,00	812.931.851,00	92,12	857.253.315,00
	Belanja Modal Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	9.176.060,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	21.124.000,00	970.000,00	4,59	554.938.000,00
5.2.2.2.1.21	Belanja Modal Alat Eksplorasi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		0,00	0,00	0,00	95.481.950,00
	Belanja Modal Elektronik/Electric	0,00	0,00	0,00	95.481.950,00
5.2.2.2.1.22	Belanja Modal Alat Pengeboran	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		0,00	0,00	0,00	84.032.000,00
	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	0,00	0,00	0,00	84.032.000,00
5.2.2.2.1.23	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		61.050.000,00	0,00	0,00	198.326.000,00
	Belanja Modal Sumur Pemboran	61.050.000,00	0,00	0,00	198.326.000,00
5.1.2.2.1.24	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		421.786.909,00	17.211.892,00	4,08	5.502.000,00
	Belanja Modal Sepatu Lapangan	421.786.909,00	17.211.892,00	4,08	5.502.000,00
5.1.2.2.1.25	Belanja Modal Rambu-Rambu	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		41.000.000,00	40.914.600,00	99,79	6.380.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	41.000.000,00	40.914.600,00	99,79	6.380.000,00	
5.1.2.2.1.26	Belanja Modal Peralatan Olahraga	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	
		0,00	0,00	0,00	106.000.000,00	
	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	106.000.000,00	
5.1.2.2.1.27	Belanja Modal Dana BOS	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	
		7.581.142.000,00	10.361.032.780,00	136,67	7.540.252.662,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.581.142.000,00	10.361.032.780,00	136,67	7.540.252.662,00	
5.1.2.2.1.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	
		4.915.173.600,00	3.630.323.400,00	73,86	3.504.508.690,00	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.915.173.600,00	3.630.323.400,00	73,86	3.504.508.690,00
		Jumlah Belanja Peralatan dan Mesin	58.140.385.353,00	53.172.618.238,21	91,46	59.841.785.825,00
5.1.2.2.2	BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	
		70.871.705.158,00	52.866.220.044,23	74,59	57.555.551.158,70	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp52.866.220.044,23 dan Rp57.555.551.158,70 dengan rincian sebagai berikut:					
5.1.2.2.2.1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	
		68.783.280.158,00	51.935.318.598,23	75,51	56.424.800.838,70	
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	25.872.847.000,00	13.360.116.991,70	51,64	18.572.723.078,89	
	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	0,00	0,00	99.460.000,00	
	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	2.665.181.158,00	2.665.172.699,00	100,00	8.719.282.749,17	
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.474.080.000,00	1.995.956.600,00	57,45	1.086.468.600,00	
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	32.264.312.000,00	29.413.997.807,53	91,17	18.465.515.024,44	
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	4.410.560.000,00	4.403.884.500,00	99,85	0,00	
	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	0,00	0,00	235.460.535,72	
	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0,00	0,00	0,00	62.959.201,48	
	Belanja Modal Bangunan Gedung Museum	0,00	0,00	0,00	747.257.745,00	
	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	0,00	0,00	314.613.211,00	
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	96.300.000,00	96.190.000,00	99,89	7.928.110.693,00	
	Belanja Modal Bangunan Parkir	0,00	0,00	0,00	191.950.000,00	
5.1.2.2.2.2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	
		0,00	0,00	0,00	244.397.018,00	



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Belanja Modal Asrama	0,00	0,00	0,00	244.397.018,00
5.1.2.2.2.3	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		0,00	0,00	0,00	59.950.000,00
	Belanja Modal Pagar	0,00	0,00	0,00	59.950.000,00
5.1.2.2.2.4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		2.088.425.000,00	930.901.446,00	44,57	826.403.302,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.088.425.000,00	930.901.446,00	44,57	826.403.302,00
	Jumlah Belanja Gedung dan Bangunan	70.871.705.158,00	52.866.220.044,23	74,59	57.555.551.158,70
5.1.2.2.3	BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		172.135.521.389,00	125.646.558.484,99	72,99	76.405.708.976,58
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp125.646.558.484,99 dan Rp76.405.708.976,58 dengan rincian sebagai berikut:				
5.2.2.2.3.1	Belanja Modal Jalan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		155.059.737.389,00	113.083.166.876,26	72,93	64.764.788.576,99
	Belanja Modal Jalan Kabupaten	127.187.053.389,00	89.243.103.923,13	70,17	38.253.738.576,99
	Belanja Modal Jalan Lainnya	27.872.684.000,00	23.840.062.953,13	85,53	26.511.050.000,00
5.2.2.2.3.2	Belanja Modal Jembatan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		8.071.500.000,00	5.115.871.441,07	63,38	2.672.731.395,77
	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	8.071.500.000,00	5.115.871.441,07	63,38	2.672.731.395,77
5.2.2.2.3.3	Belanja Modal Bangunan Air	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		8.354.284.000,00	7.144.655.767,66	85,52	8.345.765.890,82
	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	962.464.000,00	885.995.457,66	92,05	952.170.254,82
	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	7.391.820.000,00	6.258.660.310,00	84,67	7.393.595.636,00
5.1.2.2.3.4	Belanja Modal Instalasi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		30.000.000,00	0,00	0,00	471.750.000,00
	Belanja Modal Instalasi Lain	30.000.000,00	0,00	0,00	471.750.000,00
5.1.2.2.3.5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		620.000.000,00	302.864.400,00	48,85	150.673.113,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	620.000.000,00	302.864.400,00	48,85	150.673.113,00
	Jumlah Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	172.135.521.389,00	125.646.558.484,99	72,99	76.405.708.976,58
5.1.2.2.4	BELANJA ASET TETAP LAINNYA	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		4.052.821.000,00	5.167.368.150,00	127,50	5.281.348.935,00
	Belanja Modal Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp5.167.368.150,00 dan Rp5.281.348.935,00 dengan rincian sebagai berikut:				



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

		Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
		4.052.821.000,00	5.167.368.150,00	127,50	5.281.348.935,00
	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	17.000.000,00	8.889.800,00	52,29	99.397.120,00
	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	17.000.000,00	8.889.800,00	52,29	99.397.120,00
	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	130.000.000,00	109.779.000,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	130.000.000,00	109.779.000,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	19.647.000,00
	Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	0,00	0,00	0,00	19.647.000,00
	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	572.423.600,00
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	572.423.600,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.860.821.000,00	5.043.699.350,00	0,00	4.588.881.215,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.860.821.000,00	5.043.699.350,00	130,64	4.588.881.215,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	45.000.000,00	5.000.000,00	11,11	1.000.000,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	45.000.000,00	5.000.000,00	11,11	1.000.000,00
Jumlah Belanja Aset Tetap Lainnya		4.052.821.000,00	5.167.368.150,00	127,50	5.281.348.935,00
5.1.2.2.5	BELANJA ASET LAINNYA	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		75.000.000,00	34.620.900,00	46,16	0,00
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp34.620.900,00 dan Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:					
5.1.2.2.5.1	Belanja Modal Aset Lainnya	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		75.000.000,00	34.620.900,00	46,16	0,00
	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	35.000.000,00	34.620.900,00	98,92	0,00
	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Aset Lainnya	75.000.000,00	34.620.900,00	46,16	0,00
5.1.2.3	BELANJA TAK TERDUGA	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		2.669.459.229,00	1.157.985.156,00	43,38	183.454.962,00
Realisasi Belanja Tak Terduga tahun 2024 sebesar Rp1.157.985.156,00 atau 43,38% dari anggaran yang telah ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2023 realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp183.454.962,00.					
Pada Tabel dibawah ini dapat diuraikan pada belanja tak terduga kabupaten Indragiri Hilir, sebagai berikut :					



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Tanggal	Uraian	Realisasi
16 Februari 2024	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Dalam rangka Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kecamatan Kemuning,Kecamatan Tempuling, Kecamatan Pelangiran, Kecamatan Batang Tuaka, Kecamatan Gaung, Kecamatan Keritang, Kecamatan Pulau Burung, Kecamatan Tembilahan Hulu dan Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;	309.088.656,00
26 Februari 2024	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Pengembalian Bantuan Keuangan (BANKEU) Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2023;	711.696.500,00
11 Oktober 2024	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam rangka Tanggap Darurat Bencana Non Alam Kejadian Luar Biasa Malaria di Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024.	137.200.000,00
Total		1.157.985.156,00

5.1.2.4 TRANSFER

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
318.890.176.400,00	305.854.767.508,00	95,91	312.437.346.475,00

Transfer tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp318.890.176.400,00 dengan realisasi sebesar Rp305.854.767.508,00 atau 95,91% dari anggaran yang telah ditetapkan. Transfer tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp6.582.578.967,00 atau 2,11% dari realisasi Transfer tahun lalu.

Belanja Transfer merupakan pengeluaran dana bagi hasil pajak ke pemerintah desa dan bagi hasil retribusi ke pemerintah desa dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Bagi Hasil Pajak ke Desa	4.734.657.198,00	0,00	0,00	4.747.545.725,00
Bagi Hasil Retribusi ke Desa	356.472.802,00	0,00	0,00	499.327.250,00
Belanja Bantuan Keuangan	313.799.046.400,00	305.854.767.508,00	97,47	307.190.473.500,00
	318.890.176.400,00	305.854.767.508,00	95,91	312.437.346.475,00

5.1.3 BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
313.799.046.400,00	305.854.767.508,00	97,47	307.190.473.500,00

Realisasi Bantuan Keuangan tahun 2023 sebesar Rp305.854.767.508,00 atau 97,47% dari anggaran yang disediakan. Realisasi tahun 2023, terjadi kenaikan sebesar Rp1.335.705.992,00 atau 0,43% dari realisasi tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	313.799.046.400,00	305.854.767.508,00	97,47	307.190.473.500,00
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	301.890.473.500,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	7.815.000.000,00	0,00	0,00	5.300.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	183.427.863.000,00	183.427.863.000,00	100,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	122.556.183.400,00	122.426.904.508,00	99,89	0,00

Pada tabel dibawah ini terdapat tabel Rincian Alokasi Dana Tahun Anggaran 2024.

Kecamatan	Tahap I	Tahap II	SILTAP
Reteh	1.349.874.600,00	1.349.874.600,00	4.025.100.000,00
Enok	1.505.790.600,00	1.505.790.600,00	3.690.600.000,00
Kuindra	922.340.200,00	922.340.200,00	2.302.800.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Tempuling	711.909.500,00	711.909.500,00	2.050.500.000,00
Gaung Anak Serka	1.124.641.000,00	1.003.358.000,00	3.059.775.000,00
Mandah	2.489.796.400,00	2.489.796.400,00	5.647.200.000,00
Kateman	1.146.636.400,00	1.146.636.400,00	2.840.025.000,00
Keritang	2.236.945.100,00	2.225.695.100,00	7.495.800.000,00
Tanah Merah	1.382.633.300,00	1.382.633.300,00	2.880.900.000,00
Batang Tuaka	1.596.944.500,00	1.596.944.500,00	4.510.800.000,00
Gaung	2.023.580.400,00	2.023.580.400,00	5.398.134.108,00
Tembilahan Hulu	627.676.100,00	627.676.100,00	1.503.600.000,00
Kemuning	1.520.489.600,00	1.520.509.600,00	4.172.925.000,00
Pelangiran	1.740.386.300,00	1.740.386.300,00	4.917.600.000,00
Teluk Belengkong	1.393.934.700,00	1.393.934.700,00	3.816.600.000,00
Pulau Burung	1.593.937.200,00	1.593.937.200,00	4.296.900.000,00
Concong	616.186.000,00	616.186.000,00	1.653.600.000,00
Kempas	1.415.436.700,00	1.415.436.700,00	3.571.575.000,00
Sungai Batang	838.615.600,00	838.615.600,00	2.249.475.000,00
Jumlah	26.237.754.200,00	26.105.241.200,00	70.083.909.108,00

5.1.4	PEMBIAYAAN	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		397.000.000.000,00	162.393.001.085,04	40,91	170.347.518.039,47

Realisasi Pembiayaan Daerah Netto tahun 2024 sebesar Rp162.393.001.085,04 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp170.347.518.039,47 atau mengalami penurunan sebesar Rp7.954.516.954,43 atau 4,67% dari tahun sebelumnya. Rincian Pembiayaan Daerah tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	397.000.000.000,00	162.393.001.085,04	40,91	170.347.518.039,47
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	397.000.000.000,00	162.393.001.085,04	40,91	170.347.518.039,47

5.1.4.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		397.000.000.000,00	162.393.001.085,04	40,91	170.347.518.039,47

Realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2024 sebesar Rp162.393.001.085,04 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp170.347.518.039,47 atau mengalami penurunan sebesar Rp7.954.516.954,43 atau 4,67% dari tahun sebelumnya. Rincian Pembiayaan Daerah tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Penggunaan SILPA	397.000.000.000,00	162.263.868.113,04	40,87	170.093.406.045,47
Penerimaan Kembali Pemberian Pijaman Daerah	0,00	129.132.972,00	0,00	254.111.994,00
	397.000.000.000,00	162.393.001.085,04	40,91	170.347.518.039,47

5.1.4.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		0,00	0,00	0,00	0,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp0,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari tahun sebelumnya. Rincian Pembiayaan Daerah tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		0,00	32.984.775.767,26	0,00	162.263.868.113,04

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2024 dan tahun 2023 sebesar Rp32.984.775.767,26 dan Rp162.263.868.113,04.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Adapun rincian SiLPA tahun 2024 sebagai berikut:

No	Rincian SiLPA Tahun 2024	Jumlah	Uraian Rekening
1	Kas Pengembalian Sekolah SD	156.896.223,00	Kas di Kas Daerah
2	Kas Penghematan Lainnya (Silpa tidak teikat)	111.113.240,13	Kas di Kas Daerah
3	Sisa Dana Bankeu Tahun 2017	1.230.258.340,00	Kas di Kas Daerah
4	Sisa Dana Bankeu Tahun 2018	269.498.953,17	Kas di Kas Daerah
5	Sisa Dana Bankeu Tahun 2019	24.854.500,00	Kas di Kas Daerah
6	Dana Insentif Fiskal Tahun 2024 (penghargaan Kinerja)	2.810.478.500,00	Kas di Kas Daerah
7	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru (TPG)	1.096.502.400,00	Kas di Kas Daerah
8	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru (TAMSIK)	867.750.727,00	Kas di Kas Daerah
9	DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru (TKG)	998.413.370,00	Kas di Kas Daerah
10	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas, Pengawasan Obat dan Makanan	1.811.536.850,00	Kas di Kas Daerah
11	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	710.074.000,00	Kas di Kas Daerah
12	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA)	84.713.483,00	Kas di Kas Daerah
13	DAK Non Fisik Dana Fasilitas Penanaman Modal (FPM)	45.597.786,00	Kas di Kas Daerah
14	DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (KPP)	81.423.070,00	Kas di Kas Daerah
15	DAK Fisik Jalan Mendukung Konektivitas Daerah (Bertahap)	3.213.615.431,62	Kas di Kas Daerah
16	DAK Fisik Jalan - Tematik Penguatan kawasan sentra produksi Pangan (Bertahap)	4.836.022.443,00	Kas di Kas Daerah
17	DAK Fisik Penguatan kawasan sentra produksi Pangan (Sekaligus)	329.999,34	Kas di Kas Daerah
18	DAK Fisik Pertanian - Tematik Penguatan kawasan sentra produksi Pangan (Bertahap)	53.453.000,00	Kas di Kas Daerah
19	Bantuan Keuangan Provinsi - Guru Bantu	125.762.000,00	Kas di Kas Daerah
20	Penerimaan Jasa Giro Desa yang diakui Pendapatan Daerah (Tidak Terikat)	25.071.849,00	Kas di Kas Daerah
21	UYHD - Kecamatan Enok	130.600,00	Kas di Bendahara Pengeluaran
22	UYHD - Kecamatan Mandah	1,00	Kas di Bendahara Pengeluaran



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

23	UYHD - Dinas Kesehatan	2.900,00	Kas di Bendahara Pengeluaran
24	Penerimaan yang belum disetorkanke Kas Daerah - DLHK	11.723.100,00	Kas di Bendahara Penerimaan
25	Penerimaan yang belum disetorkanke Kas Daerah - BAPENDA	2.764,00	Kas di Bendahara Penerimaan
26	Penerimaan yang belum disetorkanke Kas Daerah - DISPERINDAG	100.000,00	Kas di Bendahara Penerimaan
27	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	5.949.731.192,00	Kas Dana BOK Puskesmas
28	BLUD Puskesmas Kempas Jaya	111.729.402,00	Kas di Bendahara BLUD
29	BLUD Puskesmas Sungai Salak	301.586.986,00	Kas di Bendahara BLUD
30	BLUD Puskesmas Tembilahan Hulu	70.544.368,00	Kas di Bendahara BLUD
31	BLUD Puskesmas Tembilahan Kota	220.257.423,00	Kas di Bendahara BLUD
32	BLUD Puskesmas Gajah Mada	9.621.646,00	Kas di Bendahara BLUD
33	BLUD Puskesmas Sapat	519.447,00	Kas di Bendahara BLUD
34	BLUD Puskesmas Concong Luar	3.117.481,00	Kas di Bendahara BLUD
35	BLUD Puskesmas Kuala Enok	25.757.467,00	Kas di Bendahara BLUD
36	BLUD Puskesmas Tanah Merah	277.379.312,00	Kas di Bendahara BLUD
37	BLUD Puskesmas Enok	75.904.223,00	Kas di Bendahara BLUD
38	BLUD Puskesmas Pengalihan Enok	133.054.229,00	Kas di Bendahara BLUD
39	BLUD Puskesmas Pulau Kijang	191.048.088,00	Kas di Bendahara BLUD
40	BLUD Puskesmas Benteng	176.004.105,00	Kas di Bendahara BLUD
41	BLUD Puskesmas Kotabaru	248.106.651,00	Kas di Bendahara BLUD
42	BLUD Puskesmas Pengalihan Keritang	209.077.823,00	Kas di Bendahara BLUD
43	BLUD Puskesmas Selensen	202.447.548,00	Kas di Bendahara BLUD
44	BLUD Puskesmas Sungai Piring	5.954.152,00	Kas di Bendahara BLUD
45	BLUD Puskesmas Teluk Pinang	149.223.389,00	Kas di Bendahara BLUD
46	BLUD Puskesmas Kuala Lahang	24.343.769,00	Kas di Bendahara BLUD
47	BLUD Puskesmas Mandah	219.598.667,00	Kas di Bendahara BLUD
48	BLUD Puskesmas Batang Tumu	1.876.605,00	Kas di Bendahara BLUD
49	BLUD Puskesmas Sungai Guntung	37.779.176,00	Kas di Bendahara BLUD
50	BLUD Puskesmas Pelangiran	51.029.829,00	Kas di Bendahara BLUD
51	BLUD Puskesmas Pulau Burung	2.820.505,00	Kas di Bendahara BLUD
52	BLUD Puskesmas Teluk Belengkong	10.400.234,00	Kas di Bendahara BLUD
53	BLUD Puskesmas Sungai Iliran	12.505.379,00	Kas di Bendahara BLUD
54	BLUD Puskesmas Bekawan	7.599.627,00	Kas di Bendahara BLUD
55	BLUD Puskesmas Keritang Hulu	185.354.264,00	Kas di Bendahara BLUD



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

56	BLUD Puskesmas Sungai Raya	2.579.853,00	Kas di Bendahara BLUD
57	BLUD Puskesmas Simpang Gaung	67.126.897,00	Kas di Bendahara BLUD
58	BLUD Rumah Sakit Puri Husada	1.296.193.136,33	Kas di Bendahara BLUD
59	BLUD Rumah Sakit Tengku Sulung	854.549.342,02	Kas di Bendahara BLUD
60	BLUD Rumah Sakit Raja Musa	2.141.003.313,00	Kas di Bendahara BLUD
61	BLUD UPTD DINAS PERHUBUNGAN	600.336.778,00	Kas di Bendahara BLUD
62	BOS SD	103.530.105,00	Dana Bos
63	BOS SMP	58.634.579,00	Dana Bos
64	Jasa Giro BOS SD (Tidak	5.337.236,30	Kas Lainnya
65	Jasa Giro BOS SMP (Tidak Terikat)	2.338.016,45	Kas Lainnya
66	Jasa Giro Penampung Gaji pada Dinas Kesehatan (Tidak	14.501.105,00	Kas Lainnya
67	SiLPA SD yang tidak tercatat di Aplikasi ARKAS	219.706.822,90	Kas Lainnya
68	SiLPA SMP yang tidak tercatat di Aplikasi ARKAS	139.240.066,00	Kas Lainnya
Total Silpa		32.984.775.767,26	



5.2 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat terjadi keadaan yang menyebabkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah Laporan mengenai Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya dan Saldo Anggaran Lebih Akhir. Adapun rincian perhitungan perubahan SAL tahun 2024 adalah sebagai berikut:

5.2.1	Saldo Anggaran Lebih Awal	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
		162.263.868.113,04	170.093.406.045,47
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp162.263.868.113,04 dan sebesar Rp170.093.406.045,47.			
5.2.2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
		162.263.868.113,04	170.093.406.045,47
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp162.263.868.113,04 dan sebesar Rp170.093.406.045,47.			
5.2.3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
		32.984.775.767,26	162.263.868.113,04
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.			
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp32.984.775.767,26 dan sebesar Rp162.263.868.113,04.			
5.2.4	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
		32.984.775.767,26	162.263.868.113,04
Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp32.984.775.767,26 dan sebesar Rp162.263.868.113,04. Saldo Anggaran Lebih Akhir diperoleh dari Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:			

Uraian	2024	2023
Pembiayaan Tahun Berjalan	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	32.984.775.767,26	162.263.868.113,04
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Lain-Lain	0,00	0,00
Jumlah	32.984.775.767,26	162.263.868.113,04

Adapun rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2024 sebagai berikut:

No	Rincian SiLPA Tahun 2024	Jumlah	Uraian Rekening
1	Kas Pengembaian Sekolah SD	156.896.223,00	Kas di Kas Daerah
2	Kas Penghematan Lainnya (Silpa tidak teikat)	111.113.240,13	Kas di Kas Daerah
3	Sisa Dana Bankeu Tahun 2017	1.230.258.340,00	Kas di Kas Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

4	Sisa Dana Bankeu Tahun 2018	269.498.953,17	Kas di Kas Daerah
5	Sisa Dana Bankeu Tahun 2019	24.854.500,00	Kas di Kas Daerah
6	Dana Insentif Fiskal Tahun 2024 (penghargaan Kinerja)	2.810.478.500,00	Kas di Kas Daerah
7	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru (TPG)	1.096.502.400,00	Kas di Kas Daerah
8	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru (TAMSIL)	867.750.727,00	Kas di Kas Daerah
9	DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru (TKG)	998.413.370,00	Kas di Kas Daerah
10	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas, Pengawasan Obat dan Makanan	1.811.536.850,00	Kas di Kas Daerah
11	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	710.074.000,00	Kas di Kas Daerah
12	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA)	84.713.483,00	Kas di Kas Daerah
13	DAK Non Fisik Dana Fasilitas Penanaman Modal (FPM)	45.597.786,00	Kas di Kas Daerah
14	DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (KPP)	81.423.070,00	Kas di Kas Daerah
15	DAK Fisik Jalan Mendukung Konektivitas Daerah (Bertahap)	3.213.615.431,62	Kas di Kas Daerah
16	DAK Fisik Jalan - Tematik Penguatan kawasan sentra produksi Pangan (Bertahap)	4.836.022.443,00	Kas di Kas Daerah
17	DAK Fisik Penguatan kawasan sentra produksi Pangan (Sekaligus)	329.999,34	Kas di Kas Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

18	DAK Fisik Pertanian - Tematik Penguatan kawasan sentra produksi Pangan (Bertahap)	53.453.000,00	Kas di Kas Daerah
19	Bantuan Keuangan Provinsi - Guru Bantu	125.762.000,00	Kas di Kas Daerah
20	Penerimaan Jasa Giro Desa yang diakui Pendapatan Daerah (Tidak Terikat)	25.071.849,00	Kas di Kas Daerah
21	UYHD - Kecamatan Enok	130.600,00	Kas di Bendahara Pengeluaran
22	UYHD - Kecamatan Mandah	1,00	Kas di Bendahara Pengeluaran
23	UYHD - Dinas Kesehatan	2.900,00	Kas di Bendahara Pengeluaran
24	Penerimaan yang belum disetorkanke Kas Daerah - DLHK	11.723.100,00	Kas di Bendahara Penerimaan
25	Penerimaan yang belum disetorkanke Kas Daerah - BAPENDA	2.764,00	Kas di Bendahara Penerimaan
26	Penerimaan yang belum disetorkanke Kas Daerah - DISPERINDAG	100.000,00	Kas di Bendahara Penerimaan
27	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	5.949.731.192,00	Kas Dana BOK Puskesmas
28	BLUD Puskesmas Kempas Jaya	111.729.402,00	Kas di Bendahara BLUD
29	BLUD Puskesmas Sungai Salak	301.586.986,00	Kas di Bendahara BLUD
30	BLUD Puskesmas Tembilahan Hulu	70.544.368,00	Kas di Bendahara BLUD
31	BLUD Puskesmas Tembilahan Kota	220.257.423,00	Kas di Bendahara BLUD
32	BLUD Puskesmas Gajah Mada	9.621.646,00	Kas di Bendahara BLUD
33	BLUD Puskesmas Sapat	519.447,00	Kas di Bendahara BLUD
34	BLUD Puskesmas Concong Luar	3.117.481,00	Kas di Bendahara BLUD
35	BLUD Puskesmas Kuala Enok	25.757.467,00	Kas di Bendahara BLUD
36	BLUD Puskesmas Tanah Merah	277.379.312,00	Kas di Bendahara BLUD



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

37	BLUD Puskesmas Enok	75.904.223,00	Kas di Bendahara BLUD
38	BLUD Puskesmas Pengalihan Enok	133.054.229,00	Kas di Bendahara BLUD
39	BLUD Puskesmas Pulau Kijang	191.048.088,00	Kas di Bendahara BLUD
40	BLUD Puskesmas Benteng	176.004.105,00	Kas di Bendahara BLUD
41	BLUD Puskesmas Kotabaru	248.106.651,00	Kas di Bendahara BLUD
42	BLUD Puskesmas Pengalihan Keritang	209.077.823,00	Kas di Bendahara BLUD
43	BLUD Puskesmas Selensen	202.447.548,00	Kas di Bendahara BLUD
44	BLUD Puskesmas Sungai Piring	5.954.152,00	Kas di Bendahara BLUD
45	BLUD Puskesmas Teluk Pinang	149.223.389,00	Kas di Bendahara BLUD
46	BLUD Puskesmas Kuala Lahang	24.343.769,00	Kas di Bendahara BLUD
47	BLUD Puskesmas Mandah	219.598.667,00	Kas di Bendahara BLUD
48	BLUD Puskesmas Batang Tumu	1.876.605,00	Kas di Bendahara BLUD
49	BLUD Puskesmas Sungai Guntung	37.779.176,00	Kas di Bendahara BLUD
50	BLUD Puskesmas Pelangiran	51.029.829,00	Kas di Bendahara BLUD
51	BLUD Puskesmas Pulau Burung	2.820.505,00	Kas di Bendahara BLUD
52	BLUD Puskesmas Teluk Belengkong	10.400.234,00	Kas di Bendahara BLUD
53	BLUD Puskesmas Sungai Iliran	12.505.379,00	Kas di Bendahara BLUD
54	BLUD Puskesmas Bekawan	7.599.627,00	Kas di Bendahara BLUD
55	BLUD Puskesmas Keritang Hulu	185.354.264,00	Kas di Bendahara BLUD
56	BLUD Puskesmas Sungai Raya	2.579.853,00	Kas di Bendahara BLUD
57	BLUD Puskesmas Simpang Gaung	67.126.897,00	Kas di Bendahara BLUD
58	BLUD Rumah Sakit Puri Husada	1.296.193.136,33	Kas di Bendahara BLUD
59	BLUD Rumah Sakit Tengku Sulung	854.549.342,02	Kas di Bendahara BLUD
60	BLUD Rumah Sakit Raja Musa	2.141.003.313,00	Kas di Bendahara BLUD
61	BLUD UPTD DINAS PERHUBUNGAN	600.336.778,00	Kas di Bendahara BLUD
62	BOS SD	103.530.105,00	Dana Bos
63	BOS SMP	58.634.579,00	Dana Bos



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

64	Jasa Giro BOS SD (Tidak Terikat)	5.337.236,30	Kas Lainnya
65	Jasa Giro BOS SMP (Tidak Terikat)	2.338.016,45	Kas Lainnya
66	Jasa Giro Penampung Gaji pada Dinas Kesehatan (Tidak Terikat)	14.501.105,00	Kas Lainnya
67	SiLPA SD yang tidak tercatat di Aplikasi ARKAS	219.706.822,90	Kas Lainnya
68	SiLPA SMP yang tidak tercatat di Aplikasi ARKAS	139.240.066,00	
Total Silpa		32.984.775.767,26	



5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

5.3.1	ASET	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
		3.794.599.779.136,84	3.869.653.374.614,62

Aset Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp3.794.599.779.136,84 dan Rp3.869.653.374.614,62 atau mengalami penurunan sebesar Rp-75.053.595.477,78 dibandingkan Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Aset Lancar	170.886.574.719,64	258.126.312.230,45
Investasi Jangka Panjang	107.793.361.354,33	108.754.557.000,96
Aset Tetap	3.423.937.505.393,04	3.334.655.913.186,38
Aset Lainnya	91.982.337.669,83	168.116.592.196,83
Jumlah Aset	3.794.599.779.136,84	3.869.653.374.614,62

5.3.1.1	ASET LANCAR	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
		170.886.574.719,64	258.126.312.230,45

Saldo Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp170.886.574.719,64 dan Rp258.126.312.230,45 terdiri dari Kas, Piutang, Penyisihan Piutang, Uang Muka, Beban dibayar dimuka, dan Persediaan. Dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Kas di Kas Daerah	18.553.366.165,26	145.496.714.182,35
Kas di Bendahara Pengeluaran	133.501,00	2.102.302,88
Kas di Bendahara Penerimaan	11.825.864,00	0,00
Kas di BLUD	7.926.431.114,35	8.927.235.456,31
Kas Dana Kapitasi Pada FKTP	0,00	27.736.156,00
Kas Dana BOS	162.164.684,00	649.925.638,90
Kas Lainnya	389.162.542,65	7.203.418.351,00
Kas Dana BOK Puskesmas	5.949.731.192,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	149.226.687.827,00	136.819.451.098,00
Piutang Retribusi Daerah	11.909.718.952,20	11.915.968.952,20
Piutang Lain-lain PAD yang sah	50.550.973.568,08	42.123.703.721,52
Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	48.612.769.020,00	15.276.068.898,19
Penyisihan Piutang	(155.093.764.332,48)	(145.273.264.976,15)
Beban dibayar dimuka	2.238.583.276,67	2.719.355.262,17
Persediaan	30.448.791.344,91	32.237.897.187,08
Jumlah Aset Lancar	170.886.574.719,64	258.126.312.230,45

5.3.1.1.1	KAS DI KAS DAERAH	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
		18.553.366.165,26	145.496.714.182,35

Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp18.553.366.165,26 dan Rp145.496.714.182,35. Adapun mutasi penambahan dan pengurangan kas di kas sebagai berikut:

Nama SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Badan Keuangan dan Aset Daerah	145.496.714.182,35	3.503.103.238.910,73	3.630.046.586.927,82	18.553.366.165,26
Jumlah	145.496.714.182,35	3.503.103.238.910,73	3.630.046.586.927,82	18.553.366.165,26

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp18.553.366.165,26 yang terdiri dari :

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Bank Riau Kepri Rek: 102-02-03430 (Kas Umum Daerah Kab. Inhil)	1.973.747.082,00	49.196.513.173,05
Bank Riau Kepri Rek: 102-02-01010 (Kas Daerah Kab. Inhil)	1.335.883.757,30	15.411.018.410,90
Bank Riaukepri Rek. 102-02-00620 (DAK Kab. Inhil)	15.117.973.235,96	78.673.956.405,85
Bank Riau kepri Rek. 102-02-00619 (BANKEU Provinsi)	125.762.000,00	2.215.226.192,55
Jumlah	18.553.366.075,26	145.496.714.182,35
Ditambah		
Lebih Setor Pajak Iuran Jaminan Kesehatan 1% Atas SP2D No. 06834/SP2D/2024	90,00	0,00
Jumlah	90,00	0,00
Jumlah Kas di Kas Daerah	18.553.366.165,26	145.496.714.182,35



Selisih saldo Kas Daerah Di Rekening Koran 102-02-01010 Sebesar Rp90,00 merupakan lebih setor Pajak Iuran Jaminan Kesehatan 1% Atas SP2D No.06834/SP2D/2024 Tanggal 03 Desember 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang seharusnya sebesar Rp1.312.120,00 tetapi disetor sebesar Rp1.312.210,00.

5.3.1.1.2	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
		133.501,00	2.102.302,88
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp133.501,00 dan Rp2.102.302,88. Dengan rincian sebagai berikut:			
		31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
	Kas di Bendahara Pengeluaran	133.501,00	2.102.302,88
	Jumlah	133.501,00	2.102.302,88

Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari saldo kas dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran Sekretariat/Dinas/Badan/Kecamatan yang masih harus dipertanggungjawabkan berupa sisa uang persediaan kepada Bendahara Umum Daerah sebesar Rp133.501,00. Dengan rincian sebagai berikut:

	Nama SKPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	136.101,88
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	0,00	286.200,00
	Kecamatan Enok	130.600,00	1,00
	Kecamatan Mandah	1,00	1.680.000,00
	Dinas Kesehatan	2.900,00	
	Jumlah	133.501,00	2.102.302,88

Pada tahun 2024 terdapat Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran antara lain yaitu sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Enok sebesar Rp130.600,00 dan telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 9 Januari 2025.

Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Mandah sebesar Rp1,00 merupakan sisa uang yang belum disetorkan ke Kas Bendahara Umum Daerah per 31 Desember 2024 dan telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 2 Mei 2025.

Dinas Kesehatan sebesar Rp2.900,00 merupakan sisa pengembalian belanja LS yang belum dikembalikan oleh rekanan melalui dinas kesehatan atas biaya admin pencairan SP2D dan telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 2 Mei 2025.

5.3.1.1.3	KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
		11.825.864,00	0,00
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp11.825.864,00 dan Rp0,00. Dengan rincian sebagai berikut:			
		31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
	Kas di Bendahara Penerimaan	11.825.864,00	0,00
	Jumlah	11.825.864,00	0,00

Kas di Bendahara Penerimaan terdiri dari saldo kas dalam pengelolaan Bendahara Penerimaan Sekretariat/Dinas/Badan yang masih harus dipertanggungjawabkan berupa sisa uang penerimaan kepada Bendahara Umum Daerah sebesar Rp11.825.864,00. Dengan rincian sebagai berikut:

	Nama SKPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	11.723.100,00	0,00
	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	100.000,00	0,00
	Badan Pendapatan Daerah	2.764,00	0,00
	Jumlah	11.825.864,00	0,00

Pada tahun 2024 terdapat Sisa Kas di Bendahara Penerimaan antara lain yaitu sisa Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebesar Rp11.723.100,00 merupakan penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan telah disetorkan pada tanggal 3 Januari 2025.

Sisa Kas Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp100.000,00 merupakan kekurangan penyetoran atas Retribusi LOS dan telah disetorkan pada tanggal 12 Maret 2025.

Sisa Kas di Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp2.674,00 merupakan Jasa Giro pada Kas di Bendahara dan telah disetorkan pada tanggal 13 Maret 2025.

5.3.1.1.4	KAS DI BLUD	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
		7.926.431.114,35	8.927.235.456,31
Kas di BLUD per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp7.926.431.114,35 dan Rp8.927.235.456,31 merupakan Kas di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dan Kas di BLUD Puskesmas. Dengan rincian sebagai berikut:			
		31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
	Kas di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah	4.291.745.791,35	5.527.568.885,31



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Kas di BLUD Puskesmas	3.034.348.545,00	3.399.666.571,00
Kas di BLUD Dinas Perhubungan	600.336.778,00	
Jumlah	7.926.431.114,35	8.927.235.456,31

Kas di BLUD terdapat pada RSUD Puri Husada sebesar Rp1.296.193.136,33, RSUD Tengku Sulung sebesar Rp854.549.342,02, dan RSUD Raja Musa Rp2.141.003.313,00. Kas pada BLUD terdapat di rekening penyimpanan kas di beberapa Bank dengan rincian sebagai berikut:

Nama Bank		No. Rekening	Peruntukan	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)
RSUD Puri Husada				
1	Bank BNI-Operasional	4900012345	Rekening Bendahara Penerimaan BLUD	283.055.666,00
2	Bank Syariah Mandiri KCP Tembilahan	7048121588	Rekening Bendahara Penerimaan BLUD	1.013.003.448,49
3	Bank Rakyat Indonesia (BRI)	4900056789	Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	134.012,00
4	Bank Syariah Indonesia KCP Tembilahan	7050921039	Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	9,84
Jumlah				1.296.193.136,33
RSUD Raja Musa				
1	Bank Riau Kepri Syariah	148.20.00380	Rekening Bendahara Penerimaan BLUD	889.742.240,00
2	Bank Riau Kepri Syariah	148.20.00514	Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	1.249.452.015,00
3	Kas Tunai			1.809.058,00
Jumlah				2.141.003.313,00
RSUD Tengku Sulung				
1	BRI	557301000022307	Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	853.898.225,00
2	Kas Tunai			651.117,02
Jumlah				854.549.342,02
Saldo Kas di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah				4.291.745.791,35

Kas yang terdapat pada BLUD Puskesmas merupakan sisa yang terdapat pada rekening bendahara penerimaan BLUD dan kas tunai Puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Saldo kas di rekening bendahara penerimaan BLUD dan kas tunai tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Puskesmas	No Rekening	Rekening Bank Bendahara Penerimaan BLUD	Keterangan
Puskesmas Kempas Jaya	BANK BNI 0778807087/0778836483	111.729.402,00	
Puskesmas Sungai Salak	BANK BNI 0778807247/0778836596	301.586.986,00	
Puskesmas Tembilahan Hulu	BANK BNI 0778807383/0778836700	70.544.368,00	
Puskesmas Tembilahan Kota	BANK BNI 0778807076/0778836472	220.257.423,00	
Puskesmas Gajah Mada	BANK BNI 0778807316/0778836653	9.621.646,00	
Nama Puskesmas	No Rekening	Rekening Bank Bendahara Penerimaan BLUD	Keterangan
Puskesmas Sapat	BANK BNI 0784209545/0784209590	519.447,00	
Puskesmas Concong Luar	BANK BNI 0778807258/0778836619	3.117.481,00	
Puskesmas Kuala Enok	BANK BNI 0778807372/0778836697	25.757.467,00	
Puskesmas Tanah Merah	BANK BNI 0778807112/0778836518	277.379.312,00	
Puskesmas Enok	BANK BNI 0778807236/0778836585	75.904.223,00	
Puskesmas Pengalihan Enok	BANK BNI 0778807350/0778836675	133.054.229,00	
Puskesmas Pulau Kijang	BANK BNI 0778807281/0778836631	191.048.088,00	
Puskesmas Benteng	BANK BNI 0778807178/0778836552	176.004.105,00	
Puskesmas Kotabaru	BANK BNI 0778807054/0778836461	248.106.651,00	
Puskesmas Pengalihan Keritang	BANK BNI 0778807305/0778836642	209.077.823,00	



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Puskesmas Selensen	BANK BNI 0778807123/0778836529	202.447.548,00	
Puskesmas Sungai Piring	BANK BNI 0778807214/0778836578	5.954.152,00	
Puskesmas Teluk Pinang	BANK BNI 0778807145/0778836541	149.223.389,00	
Puskesmas Kuala Lahang	BANK BNI 0778807098/0778836494	24.343.769,00	
Puskesmas Mandah	BANK BNI 0778807327/0778836664	219.598.667,00	
Puskesmas Batang Tumu	BANK BNI 0778807190/0778836563	1.876.605,00	
Puskesmas Sungai Guntung	BANK BNI 0778807270/0778836620	37.779.176,00	
Puskesmas Pelangiran	BANK BNI 0778807101/0778836507	51.029.829,00	
Puskesmas Pulau Burung	BANK BNI 0778807134/0778836530	2.820.505,00	
Puskesmas Teluk Belengkong	BANK BNI 0778807361/0778836686	10.400.234,00	
Puskesmas Bekawan	BANK BNI 1439099764/1439100034	7.599.627,00	
Puskesmas Keritang Hulu	BANK BNI 1439098499/1439098896	185.354.264,00	
Puskesmas Sungai Iliran	BANK BNI 1439099141/1439099458	12.505.379,00	
Puskesmas Sungai Raya	BANK BNI 1815184451/1815185400	2.579.853,00	
Puskesmas Simpang Gaung	BANK BNI 1815283043/1815287117	67.126.897,00	
Jumlah		3.034.348.545,00	

Pada Tahun 2024 terdapat Kas di BLUD Dinas Perhubungan sebesar Rp600.336.778,00 dengan nomor rekening Bank Riau Kepri Syariah No. 102-020-0677. Sesuai dengan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts 241/II/HK-2023 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor, Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.5	KAS DANA KAPITASI PADA FKTP	0,00	27.736.156,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP pada per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp27.736.156,00. Dengan rincian sebagai berikut:			
		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		0,00	26.755.530,00
Giro yang belum di setor ke Kas Daerah per 31 Desember 2024		0,00	980.626,00
Jumlah		0,00	27.736.156,00
		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.6	KAS DANA BOS	162.164.684,00	649.925.638,90

Kas Dana BOS merupakan kas dana BOS SD dan kas dana BOS SMP pada per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp162.164.684,00 dan Rp649.925.638,90 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Nilai	Keterangan
Dana BOS SD	103.530.105,00	Nilai Kas Dana BOS sesuai hasil konfirmasi dengan tim BOS SD sebesar Rp103.530.105,00
Dana BOS SMP	58.634.579,00	Nilai Kas Dana BOS sesuai hasil konfirmasi dengan tim BOS SMP sebesar Rp58.634.579,00
Jumlah	162.164.684,00	

Pada tahun 2023 terdapat Sekolah dasar Negeri yang tidak beroperasi lagi/tutup yaitu SDN 017 Sungai Bela, SDN 029 Sungai Perak dan SDN 030 Sungai Perak. Sisa Kas Sekolah Dasar Negeri tersebut masih berada pada Rekening Sekolah yaitu pada SDN 017 Sungai Bela sebesar Rp32.566.753,00 dan telah disetor pada tanggal 3 Maret 2025, SDN 030 Sungai Perak sebesar Rp37.452,00 dan telah disetor pada tanggal 10 Maret 2025 serta SDN 029 Sungai Perak sebesar Rp5.216.335,00 dan telah disetor pada tanggal 26 Februari 2025.

Adapun perhitungan lebih rinci kas di bendahara dana BOS dapat dilihat pada lampiran 5.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.7	KAS LAINNYA	389.162.542,65	7.203.418.351,00
Kas Lainnya per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp389.162.542,65 dan Rp7.203.418.351,00 dengan rincian sebagai berikut:			
Nama SKPD		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kecamatan Gaung		0,00	767.500,00
Kecamatan Kuala Indragiri		884.540,00	0,00
Dinas Kesehatan		1.438.313,00	7.202.650.851,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.000,00	0,00
Dinas Pendidikan	386.838.689,65	0,00
Jumlah	389.162.542,65	7.203.418.351,00

Dengan rincian sebagai berikut:

Nama SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Keterangan
Kecamatan Kuala Indragiri	884.540,00	Terdapat Utang Pajak IWP yang belum di setor per 31 Desember 2024 dan telah disetorkan pada tanggal 10 Januari 2025
Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.000,00	Pajak IWP 1% yang belum disetorkan tahun 2024 dan telah disetorkan pada tanggal 6 Februari 2025
Dinas Pendidikan	14.501.105,00	Penerimaan jasa giro atas rekening penampung gaji pada dinas pendidikan, rekening SD sebesar Rp13.337.687,00 dan rekening SMP sebesar Rp1.163.418,00
Dinas Pendidikan	752.205,65	Jasa giro Dana Bos SMP sebesar Rp0,45 dan SD sebesar Rp752.205,20 sesuai dengan penelusuran rekening koran sekolah
Dinas Pendidikan	5.715.443,00	Pajak PPh 22 sekolah SMP NEGERI 3 KEMPAS yang belum disetorkan Tahun 2024 dan telah disetorkan pada tanggal 21 Januari 2025
Dinas Pendidikan	6.923.047,10	Jasa giro dana BOS yang masih berada direkening bank sekolah SD sebesar Rp4.585.031,10 dan SMP sebesar Rp2.338.016,00
Dinas Pendidikan	358.946.888,90	Reklas Kas Dana Bos ke Kas Lainnya senilai Rp358.946.888,90 atas Silpa yang tidak tercatat pada Arkas sekolah pada Kas Dana BOS SD sebesar Rp219.706.822,90, dan Kas Dana BOS SMP sebesar Rp139.240.066,00
Dinas Kesehatan	1.438.313,00	Pajak yang belum disetorkan Puskesmas Kuala Enok Tahun 2024 dan telah disetorkan pada tanggal 21 Februari 2025 dengan rincian (PPN sebesar Rp930.435,00, PPH 22 sebesar Rp126.878,00 dan PPH 23 sebesar Rp381.000,00)
Jumlah	389.162.542,65	

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.8 KAS DANA BOK PUSKESMAS	5.949.731.192,00	0,00

Tahun 2023 kas BOK disajikan pada Kas Lainnya sedangkan Tahun 2024 Kas Dana BOK Puskesmas merupakan penambahan BAS baru sehingga muncul pada Face dan CaLK . Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp5.949.731.192,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Puskesmas	Saldo Bank	Kas Tunai/Jasa Giro	Keterangan
Kempas Jaya	416.521.496,00	0,00	
Sungai Salak	71.422.692,00	0,00	
Tembilahan Hulu	339.114.060,00	0,00	
Tembilahan Kota	132.573.578,00	0,00	
Gajah Mada	279.487.305,00	0,00	
Sapat	270.636.786,00	0,00	
Concong Luar	272.788.219,00	0,00	
Kuala Enok	278.239.015,00	0,00	
Tanah Merah	93.935.681,00	0,00	
Enok	135.868.703,00	0,00	
Pengalihan Enok	171.947.046,00	0,00	
Pulau Kijang	183.110.941,00	0,00	
Benteng	90.132.142,00	0,00	
Kotabaru	91.581.520,00	0,00	
Pengalihan Keritang	184.028.213,00	0,00	
Selensen	316.817.083,00	140.000,00	Sisa Kas yang gagal transfer bulan Desember dan telah disetorkan pada tanggal 13 Januari 2025
Sungai Piring	95.213.530,00	0,00	
Teluk Pinang	80.590.423,00	0,00	
Kuala Lahang	232.296.192,00	0,00	
Mandah	170.290.723,00	0,00	
Batang Tumu	53.593.906,00	0,00	
Sungai Guntung	170.272.980,00	0,00	
Pelangiran	674.659.121,00	0,00	
Pulau Burung	207.800.564,00	0,00	



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Teluk Belengkong	132.297.235,00	0,00	
Sungai Iiran	176.012.664,00	0,00	
Bekawan	148.646.786,00	0,00	
Keritang Hulu	154.993.365,00	0,00	
Sungai Raya	160.396.031,00	0,00	
Simpang Gaung	164.323.192,00	0,00	
Jumlah	5.949.591.192,00	140.000,00	

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.9 PIUTANG PAJAK	149.226.687.827,00	136.819.451.098,00

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp149.226.687.827,00 dan Rp136.819.631.098,00. Piutang Pajak mengalami penambahan sebesar Rp12.776.783.462,00 yang merupakan dari Piutang Pajak Bumi dan Bangunan dan pengurangan atas realisasi tahun 2024 atas realisasi diluar tahun berkenaan. Adapun rincian mutasi penambahan dan pengurangan piutang pajak sebagai berikut:

Nama SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Badan Pendapatan Daerah	136.819.451.098,00	12.776.783.462,00	369.546.733,00	149.226.687.827,00
Jumlah	136.819.451.098,00	12.776.783.462,00	369.546.733,00	149.226.687.827,00

Adapun rincian piutang pajak Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Piutang Pajak Reklame	403.229.575,00	403.229.575,00
Piutang Pajak Penerangan Jalan	705.602.850,00	705.602.850,00
Piutang Pajak Air Tanah	150.872.761,00	150.872.761,00
Piutang Pajak Sarang Burung Walet	462.865.000,00	462.865.000,00
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	147.504.117.641,00	135.096.880.912,00
Jumlah	149.226.687.827,00	136.819.451.098,00

Perhitungan lebih rinci piutang pajak Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada lampiran 6.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.10 PIUTANG RETRIBUSI DAERAH	11.909.718.952,20	11.915.968.952,20

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp11.909.718.952,20 dan Rp11.915.968.952,20. Piutang Retribusi Daerah mengalami pengurangan piutang sebesar Rp6.250.000 atas reklasifikasi piutang retribusi penyewaan tanah dan bangunan (sewa ATM Setda 2016) ke piutang lain-lain PAD yang sah.

Adapun rincian mutasi penambahan dan pengurangan piutang retribusi daerah sebagai berikut:

Nama SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Badan Pendapatan Daerah	11.595.218.952,20	0,00	0,00	11.595.218.952,20
Badan Keuangan dan Aset Daerah	320.750.000,00	0,00	6.250.000,00	314.500.000,00
Jumlah	11.915.968.952,20	0,00	6.250.000,00	11.909.718.952,20

Jumlah tunggakan Piutang Retribusi daerah per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Tahun 2009 s/d 2016)	17.627.000,00	17.627.000,00
Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair (Tahun 2009 s/d 2010)	202.787.000,00	202.787.000,00
Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan (Tahun 2009 s/d 2010)	25.550.000,00	25.550.000,00
Piutang Retribusi Izin Gangguan (Tahun 2009 s/d 2016)	11.330.606.452,20	11.330.606.452,20
Piutang Retribusi Biaya Cetak Tulis (Tahun 2009 s/d 2010)	18.648.500,00	18.648.500,00
Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Piutang dari Pengelolaan Plaza Gemilang PT. LHIU tahun 2015)	314.500.000,00	314.500.000,00
Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Sewa ATM Setda 2016)	0,00	6.250.000,00
Jumlah	11.909.718.952,20	11.915.968.952,20

Perhitungan lebih rinci Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada lampiran 6.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.11 PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH	50.550.973.568,08	42.123.703.721,52

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp50.550.973.568,08, dan sebesar Rp42.123.703.721,52. Adapun rincian mutasi penambahan dan pengurangan piutang lain-lain PAD yang sah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Nama SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
BLUD RSUD Puri Husada	10.451.986.802,00	16.193.864.501,00	10.451.986.802,00	16.193.864.501,00
BLUD RSUD Tengku Sulung	172.320.200,00	547.145.200,00	172.320.200,00	547.145.200,00
BLUD RSUD Raja Musa	959.747.500,00	1.046.870.800,00	959.747.500,00	1.046.870.800,00
BLUD Puskesmas	2.280.000,00	159.517.000,00	2.280.000,00	159.517.000,00
Badan Pendapatan Daerah	30.467.288.014,44	1.441.074.189,24	0,00	31.908.362.203,68
Badan Keuangan dan Aset Daerah	70.081.205,08	647.446.893,40	22.314.235,08	695.213.863,40
Jumlah	42.123.703.721,52	20.035.918.583,64	11.608.648.737,08	50.550.973.568,08

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Piutang BLUD	17.947.397.501,00	11.586.334.502,00
Piutang Denda Pajak	31.908.362.203,68	30.467.288.014,44
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	47.766.970,00	47.766.970,00
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	641.196.893,40	22.314.235,08
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	6.250.000,00	0,00
Jumlah	50.550.973.568,08	42.123.703.721,52

Berikut ini rincian piutang BLUD per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
Piutang Pelayanan BPJS	14.549.620.000,00	Piutang BLUD RSUD Puri Husada Tahun 2024
Piutang Obat Kronis BPJS	1.165.742.860,00	
Piutang Rujukan Pasien BPJS	26.880.000,00	
Piutang Pelayanan Covid-19	308.000.000,00	
Piutang Jaket Penyangga Tulang/ Corset	5.775.000,00	
Piutang Kantong Darah	7.200.000,00	
Piutang Alat Bantu Dengar	0,00	
Piutang BPJS Ketenagakerjaan	107.748.191,00	
Piutang Jasa Raharja	20.336.230,00	
Piutang Inhealth Mandiri	2.562.220,00	
Jumlah	16.193.864.501,00	
Piutang Pelayanan Ambulance	26.656.000,00	Piutang BLUD RSUD Tengku Sulung Tahun 2024
Piutang Pelayanan BPJS	520.489.200,00	
Jumlah	547.145.200,00	
Piutang Pelayanan BPJS	1.046.870.800,00	Piutang BLUD RSUD Raja Musa Tahun 2024
Jumlah	1.046.870.800,00	
Piutang Pelayanan BPJS	159.517.000,00	Piutang BLUD Puskesmas Tahun 2024
Jumlah	159.517.000,00	
Jumlah Piutang BLUD	17.947.397.501,00	

Berikut ini rincian piutang denda pajak per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Piutang Denda Pajak Reklame (Tahun 2015 s/d 2024)	117.803.316,00	Piutang Denda Pajak Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2024
2	Piutang Denda Pajak Penerangan Jalan (Tahun 2015 s/d 2024)	88.465.508,16	
3	Piutang Denda Pajak Air Tanah (Tahun 2015 s/d 2024)	68.822.888,16	
4	Piutang Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Tahun 2015 s/d 2024)	31.633.270.491,36	
Jumlah		31.908.362.203,68	

Berikut ini rincian Piutang Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan dan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan tahun 2014	54.016.970,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	641.196.893,40	
Jumlah	695.213.863,40	



Pada Tahun 2024 nilai Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan tahun 2014 bertambah sebesar Rp6.250.000,00 dikarenakan adanya reklas dari Piutang Retribusi penyewaan tanah dan bangunan (sewa ATM Setda 2016) yang merupakan kesalahan menjurnal SKPD dan Uraian di tahun 2017.

Perhitungan lebih rinci Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada lampiran 6.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.12 PIUTANG BAGI HASIL PAJAK PROVINSI	48.612.769.020,00	15.276.068.898,19

Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp48.612.769.020,00 dan Rp15.276.068.898,19.

Berdasarkan SK Gubernur Riau No. Kpts. 3618/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 tentang Perhitungan dan alokasi dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan Triwulan III untuk Kabupaten/Kota Se-Propinsi Riau Tahun Anggaran 2024 dan Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.3795/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang perhitungan dan alokasi dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan triwulan IV (Desember 2024) bahwa Pemerintah Provinsi Riau kurang salur kepada Kabupaten Indragiri Hilir.

Koreksi Kurang catat atas keputusan Gubernur No. Kpts. 357/V/2025 tanggal 2 Mei 2025 tentang Perhitungan dan alokasi dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan triwulan IV (Desember 2024) untuk Kabupaten/Kota Se-Propinsi Riau Tahun Anggaran 2025 dengan rincian Piutang PKB TW IV 2024 (Desember) Sebesar Rp2.742.238.384,00, Piutang PBBNKB TW IV 2024 (Desember) Sebesar Rp2.357.347.882,00, Piutang PBB-KB TW IV 2024 (Desember) Sebesar Rp4.833.049.043,00 dan Piutang PAP TW IV 2024 (Desember) Sebesar Rp117.244.824,00. Adapun rincian penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Nama SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Badan Keuangan dan Aset Daerah	15.276.068.898,19	48.612.769.020,00	15.276.068.898,19	48.612.769.020,00
Jumlah	15.276.068.898,19	48.612.769.020,00	15.276.068.898,19	48.612.769.020,00

Adapun rincian Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi sebagai berikut:

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9.277.812.842,00	6.485.722.300,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	25.920.229.606,00	5.225.234.395,00
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	583.711.210,00	123.265.226,00
Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.138.483.121,00	3.441.846.977,19
Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.742.238.384,00	
Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan BakarKendaraan Bermotor	4.833.049.043,00	
Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	117.244.814,00	
Jumlah	48.612.769.020,00	15.276.068.898,19

Perhitungan lebih rinci Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada lampiran 6.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.13 PENYISIHAN PIUTANG	(155.093.764.332,48)	(145.273.264.976,16)

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp(155.093.764.332,48) dan sebesar Rp(145.273.264.976,16).

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Penyisihan Piutang Pajak	(118.265.676.845,21)	(111.775.475.767,92)
Penyisihan Piutang Retribusi	(11.909.718.952,20)	(11.915.968.952,20)
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(24.675.304.689,96)	(21.505.439.911,54)
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	(243.063.845,11)	(76.380.344,49)
Jumlah	(155.093.764.332,48)	(145.273.264.976,15)

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.13.1 PENYISIHAN PIUTANG PAJAK	(118.265.676.845,21)	(111.775.475.767,92)

Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp(118.265.676.845,21) dan sebesar Rp(111.775.475.767,92). Adapun rincian mutasi penambahan dan pengurangan penyisihan piutang pajak sebagai berikut:

Nama SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Badan Pendapatan Daerah	(111.775.475.767,92)	(6.490.201.077,29)	0,00	(118.265.676.845,21)
Jumlah	(111.775.475.767,92)	(6.490.201.077,29)	0,00	(118.265.676.845,21)

Adapun rincian penyisihan piutang pajak Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat di tabel sebagai berikut:

Piutang	Lancar 0,5% (Kurang 1 Tahun) 2024	Kurang Lancar 10% (1-2 Tahun) 2021-2023	Diragukan 50% (3-5 Tahun) 2019-2020	Macet 100% (Lebih 5 Tahun) < 2018
Piutang Pajak Reklame	0,00	0,00	84.662.575,00	318.567.000,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	(42.331.287,50)	(318.567.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Piutang Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00		705.602.850,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00		(705.602.850,00)
Piutang Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	462.865.000,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	(462.865.000,00)
Piutang Pajak Air Tanah	0,00	0,00	1.970.137,00	148.902.624,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	(985.068,50)	(148.902.624,00)
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	12.776.783.462,00	6.265.451.344,00	25.131.777.743,00	103.330.105.092,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(63.883.917,31)	(626.545.134,40)	(12.565.888.871,50)	(103.330.105.092,00)
Total Piutang Pajak				149.226.687.827,00
Total Penyisihan Piutang Pajak				(118.265.676.845,21)

Piutang Pajak Netto Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp30.961.010.981,79 di tahun 2024 di dapat dari Piutang Pajak sebesar Rp149.226.687.827,00 di kurangi dengan Penyisihan Piutang Pajak sebesar (Rp118.265.676.845,21).
Perhitungan lebih rinci penyisihan piutang pajak Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada lampiran 6.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.13.2 PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI	(11.909.718.952,20)	(11.915.968.952,20)

Pada Tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi. Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp(11.909.718.952,20) dan sebesar Rp(11.915.968.952,20). Adapun rincian mutasi penambahan dan pengurangan penyisihan piutang retribusi sebagai berikut:

Nama SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Badan Pendapatan Daerah	(11.915.968.952,20)		(6.250.000,00)	(11.909.718.952,20)
Jumlah	(11.915.968.952,20)	0,00	(6.250.000,00)	(11.909.718.952,20)

Adapun rincian penyisihan piutang retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

Piutang	Lancar 0,5% (Kurang 1 Bulan)	Kurang Lancar 10% (1-3 Bulan)	Diragukan 50% (3-12 Bulan)	Macet 100% (Lebih 12 Bulan)
BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Piutang Retrebusi BCT (Biaya Cetak Tulis Tahun 2009 s/d 2010)	0,00	0,00	0,00	18.648.500,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	(18.648.500,00)
Piutang Retrebusi Damkar (Tahun 2009 s/d 2016)	0,00	0,00	0,00	17.627.000,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	(17.627.000,00)
Piutang Retrebusi Jasa Kepelabuhan (Tahun 2009 s/d 2010)	0,00	0,00	0,00	25.550.000,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	(25.550.000,00)
Piutang Retrebusi Limbah (Tahun 2009 s/d 2010)	0,00	0,00	0,00	202.787.000,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	(202.787.000,00)
Piutang Retrebusi HO (Tahun 2009 s/d 2016)	0,00	0,00	0,00	11.330.606.452,20
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	(11.330.606.452,20)
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Piutang dari Pengelolaan Plaza Gemilang PT. LHIU tahun 2015)	0,00	0,00	0,00	314.500.000,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	(314.500.000,00)
Total Piutang Retribusi				11.909.718.952,20
Total Penyisihan Piutang Retribusi				(11.909.718.952,20)



Perhitungan lebih rinci penyisihan piutang retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada lampiran 6.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.13.3 PENYISIHAN PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH	(24.675.304.689,96)	(21.505.439.911,54)

Pada Tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan perhitungan Penyisihan Piutang lain-lain PAD yang sah. Penyisihan Piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp(24.675.304.689,96) dan sebesar Rp(21.505.439.911,54). Dihitung berdasarkan Peraturan Bupati Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun rincian mutasi penambahan dan pengurangan penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah sebagai berikut:

Nama SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
BLUD RSUD Puri Husada	(52.259.934,01)	(80.969.322,51)	(52.259.934,01)	(80.969.322,51)
BLUD RSUD Tengku Sulung	(861.601,00)	(2.735.726,00)	(861.601,00)	(2.735.726,00)
BLUD RSUD Raja Musa	(4.798.737,50)	(5.234.354,00)	(4.798.737,50)	(5.234.354,00)
Piutang BLUD (Puskesmas)	(11.400,00)	(797.585,00)	(11.400,00)	(797.585,00)
Badan Pendapatan Daerah	(21.399.629.697,85)	(3.126.680.692,23)	0,00	(24.526.310.390,08)
Badan Keuangan dan Aset Daerah	(47.878.541,18)	(59.257.312,37)	(47.878.541,18)	(59.257.312,37)
Jumlah	(21.505.439.911,54)	(3.275.674.992,11)	(105.810.213,69)	(24.675.304.689,96)

Adapun rincian penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

Piutang	Lancar 0,5% (Kurang 1 Tahun)	Kurang Lancar 10% (1-2 Tahun)	Diragukan 50% (3-5 Tahun)	Macet 100% (Lebih 5 Tahun)
Piutang BLUD (RSUD Puri Husada)	(80.969.322,51)	0,00	0,00	0,00
Piutang BLUD (RSUD Tengku Sulung)	(2.735.726,00)	0,00	0,00	0,00
Piutang BLUD (RSUD Raja Musa)	(5.234.354,00)	0,00	0,00	0,00
Piutang BLUD (Puskesmas)	(797.585,00)	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Denda Pajak Tidak Tertagih (BAPENDA Tahun 2015 s/d 2024)	0,00	(148.675.861,16)	(6.043.969.063,20)	(18.333.665.465,72)
Penyisihan Tunjangan komunikasi anggota DPRD tahun 2014	0,00	0,00	0,00	(47.766.970,00)
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan (Dinas PUTR Tahun 2024)	(5.240.342,37)	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah (Tunjangan Komunikasi Pimpinan DPRD)	0,00	0,00	0,00	(6.250.000,00)
Total Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah				(24.675.304.689,96)

Perhitungan lebih rinci Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada lampiran 6.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.13.4 PENYISIHAN PIUTANG BAGI HASIL PAJAK	(243.063.845,11)	(76.380.344,50)

Pada Tahun 2024 Pemerintah Daerah Indragiri Hilir telah melakukan perhitungan Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp(243.063.845,11) dan Rp(76.380.344,50) dihitung berdasarkan Peraturan Bupati Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Berikut rincian mutasi penambahan dan pengurangan penyisihan piutang bagi hasil pajak Provinsi:

Nama SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Badan Keuangan dan Aset Daerah	(76.380.344,50)	(243.063.845,11)	(76.380.344,50)	(243.063.845,11)
Jumlah	(76.380.344,50)	(243.063.845,11)	(76.380.344,50)	(243.063.845,11)

Adapun rincian perhitungan Penyisihan Piutang transfer pemerintah daerah lainnya sebagai berikut:

Piutang	Lancar 0,5% (Kurang 1 Tahun)	Kurang Lancar 10% (1-2 Tahun)	Diragukan 50% (3-5 Tahun)	Macet 100% (Lebih 5 Tahun)
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	12.020.051.226,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(60.100.256,13)	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.138.483.121,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(25.692.415,61)	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	30.753.278.649,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(153.766.393,25)	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	700.956.024,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(3.504.780,12)	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Piutang				48.612.769.020,00
Total Penyisihan Piutang				(243.063.845,11)

Piutang Pajak Netto Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp48.369.705.174,90 di tahun 2024 di dapat dari Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp48.612.769.020,00 di kurangi dengan Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar (Rp243.063.845,11).

Perhitungan lebih rinci Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya yang Sah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada lampiran 6.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.14 BEBAN DIBAYAR DIMUKA	2.238.583.276,67	2.719.355.262,17

Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.238.583.276,67 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.719.355.262,17. Merupakan Sewa Rumah dinas dokter sampai dengan 31 Desember 2024 Rumah sakit Umum Daerah Puri Husada dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atas kelebihan pembayaran bobot fisik pada Rekonstruksi Jalan Ruas 6 Pulau Kijang - Sanglar Kec. Reteh. Adapun rincian mutasi penambahan dan pengurangan beban dibayar dimuka sebagai berikut:

Nama SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
RSUD Puri Husada	52.000.000,00	189.708.333,33	158.916.666,67	82.791.666,67
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2.667.355.262,17	0,00	511.563.652,17	2.155.791.610,00
Jumlah	2.719.355.262,17	189.708.333,33	670.480.318,83	2.238.583.276,67

Di bawah ini rincian dari Beban Dibayar Dimuka tahun 2024 dan tahun 2023 :

Nama SKPD	Keterangan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
RSUD Puri Husada	Sewa Rumah an. Desmianto, SH	4.166.666,67	4.166.666,67
RSUD Puri Husada	Sewa Rumah an. Nurlia	17.500.000,00	0,00
RSUD Puri Husada	Sewa Rumah an. Helmi	18.666.666,67	18.666.666,67
RSUD Puri Husada	Sewa Rumah an. Iwan Taruna	11.458.333,33	0,00
RSUD Puri Husada	Sewa Rumah an. Dianto Mampanini	10.416.666,67	10.416.666,67
RSUD Puri Husada	Sewa Rumah an. Hasbi	1.833.333,33	0,00
RSUD Puri Husada	Sewa Rumah an. Sunardi	4.166.666,67	4.166.666,67
RSUD Puri Husada	Sewa Rumah an. Patris Putra Nata	14.583.333,33	14.583.333,33
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kelebihan pembayaran atas bobot fisik pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas 6 Pulau Kijang - Sanglar Kec. Reteh	2.155.791.610,00	2.155.791.610,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kelebihan pembayaran atas bobot fisik pekerjaan Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Tembilahan - Terusan Mas (DAK)	0,00	511.563.652,17
Jumlah		2.238.583.276,67	2.719.355.262,17

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang merupakan kelebihan realisasi belanja Modal dibandingkan bobot fisik atas pekerjaan. Pekerjaan tersebut merupakan Rekonstruksi Jalan Ruas 6 Pulau Kijang - Sanglar Kec. Reteh dengan nilai kontrak sebesar Rp15.398.511.500,00 dengan total pencairan sp2d sebesar Rp7.819.364.139,70 dimana pencairan tersebut mencapai 50,78% dari nilai kontrak sedangkan per 31 Desember 2023 bobot fisik sebesar 36,78% sehingga dilakukan koreksi sebesar Rp2.155.791.610,00.

Rincian Beban Dibayar Dimuka RSUD Puri Husada
Per 31 Desember 2024

Keterangan	Beban Dibayar Dimuka (Rp)	Nomor Kontrak Sewa Menyewa	Lama di Sewakan
Sewa Rumah an. Hasbi	1.833.333,33	027.2/RSUD-BLUD/SP/215 Tanggal 15 Januari 2024	22 Januari 2024 s.d 22 Januari 2025



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Sewa Rumah an. Iwan Taruna	11.458.333,33	027.2/RSUD-BLUD/SP/1317 Tanggal 27 Mei 2024	01 Juni 2024 s.d 31 Mei 2025
Sewa Rumah an. Desmianto, SH	4.166.666,67	027.2/RSUD-BLUD/SP/844	01 Maret 2024 s.d 01 Maret 2025
Sewa Rumah an. Dianto Mampanini	10.416.666,67	027.2/RSUD-BLUD/SP/1361 Tanggal 03 Juni 2024	10 Juni 2024 s.d 10 Juni 2025
Sewa Rumah an. Sunardi	4.166.666,67	027.2/RSUD-BLUD/SP/813 Tanggal 14 Maret 2024	13 Maret 2024 s.d 13 Maret 2025
Sewa Rumah an. Patris Putra Nata	14.583.333,33	027.2/RSUD-BLUD/SP/2393 Tanggal 06 Agustus 2024	12 Agustus 2024 s.d 12 Agustus 2025
Sewa Rumah an. Helmi	18.666.666,67	027.2/RSUD-BLUD/SP/2240 Tanggal 02 September 2024	01 September s.d 01 September 2025
Sewa Rumah an. Nurlia	17.500.000,00	027.2/RSUD-BLUD/SP/2974 Tanggal 04 November 2024	11 November 2024 s.d 11 November 2025
Jumlah	82.791.666,67		

Perhitungan lebih rinci beban dibayar dimuka dapat dilihat pada lampiran 7.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.15 PERSEDIAAN	30.448.791.344,91	32.237.897.187,08

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pencatatan persediaan pada Neraca berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja persediaan, namun secara Berita Acara Stockopname Persediaan masih banyak OPD yang belum mencatat persediaan yang direklas dari aset atas belanja modal yang tidak masuk dalam batas kapitalisasi yang dikelompokkan ke dalam persediaan sesuai kertas kerja rekon aset tahun anggaran 2024.

Pada tahun 2024 persediaan dicatat menggunakan metode perpetual yaitu metode pencatatan setiap waktu yang dapat menyesuaikan transaksi input dan output persediaan barang. Saldo persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp30.448.791.344,91 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp32.237.897.187,08 dengan rincian mutasi persediaan per SKPD sebagai berikut:

Nama SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Dinas Pendidikan	175.534.241,00	95.478.420,00	175.534.241,00	95.478.420,00
Dinas Kesehatan	18.087.949.233,10	25.076.099.741,23	18.087.949.233,10	25.076.099.741,23
Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan	4.765.575.045,88	0,00	4.765.575.045,88	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung	163.789.535,00	0,00	163.789.535,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa	706.594.280,00	0,00	706.594.280,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	31.336.250,00	4.816.700,00	31.336.250,00	4.816.700,00
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	575.159.500,00	573.144.490,00	575.159.500,00	573.144.490,00
Satuan Polisi Pamong Praja	9.882.220,00	10.705.010,00	9.882.220,00	10.705.010,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	148.844.400,00	143.903.112,00	148.844.400,00	143.903.112,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.019.500,00	484.500,00	4.019.500,00	484.500,00
Dinas Sosial	2.237.500,00	672.000,00	2.237.500,00	672.000,00
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	350.750,00	373.000,00	350.750,00	373.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	252.235.683,60	171.537.641,00	252.235.683,60	171.537.641,00
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	66.244.000,00	5.876.087,00	66.244.000,00	5.876.087,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.258.839.408,00	1.032.702.140,00	1.258.839.408,00	1.032.702.140,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	354.312,00	0,00	354.312,00	0,00
Dinas Perhubungan	52.206.958,50	90.085.295,00	52.206.958,50	90.085.295,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	125.650.400,00	4.557.500,00	125.650.400,00	4.557.500,00
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	851.000,00	253.000,00	851.000,00	253.000,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.318.550,00	2.627.870,00	3.318.550,00	2.627.870,00
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	4.252.603.592,26	2.496.025.645,18	4.252.603.592,26	2.496.025.645,18
Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	3.688.000,00	0,00	3.688.000,00	0,00
Dinas Perikanan	20.115.000,00	20.527.300,00	20.115.000,00	20.527.300,00
Dinas Perkebunan	37.142.500,00	121.172.439,00	37.142.500,00	121.172.439,00
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	107.901.927,00	20.250.975,00	107.901.927,00	20.250.975,00
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	484.500,00	503.050,00	484.500,00	503.050,00
Sekretariat Daerah	215.022.880,50	86.546.032,00	215.022.880,50	86.546.032,00
Sekretariat DPRD	46.532.150,00	203.054.350,00	46.532.150,00	203.054.350,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.759.550,00	9.507.550,00	1.759.550,00	9.507.550,00
Badan Pendapatan Daerah	350.280.820,24	236.104.047,50	350.280.820,24	236.104.047,50
Badan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	14.647.500,00	0,00	14.647.500,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	1.771.800,00	2.051.000,00	1.771.800,00	2.051.000,00
Inspektorat Daerah	838.000,00	6.390.000,00	838.000,00	6.390.000,00
Kecamatan Tembilahan	1.428.000,00	1.600.000,00	1.428.000,00	1.600.000,00
Kecamatan Tembilahan Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Tempuling	150.000,00	236.000,00	150.000,00	236.000,00
Kecamatan Batang Tuaka	0,00	247500	0,00	247.500,00
Kecamatan Concong	20.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00
Kecamatan Enok	106.000,00	152.000,00	106.000,00	152.000,00
Kecamatan Gaung	0,00	337000	0,00	337.000,00
Kecamatan Gaung Anak Serka	1.547.100,00	350.200,00	1.547.100,00	350.200,00
Kecamatan Kateman	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
Kecamatan Kempas	262.500,00	196.500,00	262.500,00	196.500,00
Kecamatan Kemuning	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Keritang	186.000,00	366.500,00	186.000,00	366.500,00
Kecamatan Kuala Indragiri	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Mandah	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Pelangiran	10.800.000,00	11.006.000,00	10.800.000,00	11.006.000,00
Kecamatan Pulau Burung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Reteh	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
Kecamatan Sungai Batang	317.000,00	387.000,00	317.000,00	387.000,00
Kecamatan Tanah Merah	397.200,00	350.000,00	397.200,00	350.000,00
Kecamatan Teluk Belengkong	912.700,00	192.000,00	912.700,00	192.000,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	752.417.200,00	3.097.750,00	752.417.200,00	3.097.750,00
Jumlah	32.237.897.187,08	30.448.791.344,91	32.237.897.187,08	30.448.791.344,91

Persediaan SKPD per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp30.448.791.344,91 dan sebesar Rp32.237.897.187,08 yang terdiri dari Persediaan Barang Habis Pakai sebesar Rp24.591.605.793,42 dan Persediaan Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp5.857.185.551,49 dengan Rincian persediaan berdasarkan jenis barang per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Persediaan Habis pakai

Saldo Persediaan Barang Habis Pakai per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp24.591.605.793,42 dan sebesar Rp27.286.335.075,53, dengan rincian per Jenis>Nama Barang sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Jenis>Nama Barang	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Persediaan Alat Tulis Kantor		
Dinas Pendidikan	1.409.700,00	553.779,00
Dinas Kesehatan	6.403.440,90	3.081.825,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4.816.700,00	3.161.250,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.761.990,00	187.000,00
Dinas Satuan Polisi Pamong Peraja	1.824.010,00	1.001.220,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.061.812,00	843.200,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	484.500,00	0,00
Dinas Sosial	672.000,00	2.237.500,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	131.000,00	251.750,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	836.538.500,00	1.062.675.768,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	354.312,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.653.606,00	8.270.798,60
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	5.876.087,00	0,00
Dinas Perhubungan	947.385,00	272.958,50
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	253.000,00	231.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	3.097.500,00	124.190.400,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	2.598.233,00	3.061.450,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	1.788.000,00
Dinas Perikanan	880.300,00	468.000,00
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, dan Kebudayaan	4.032.080,00	2.985.000,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	2.135.975,00	3.160.277,00
Dinas Perkebunan	2.337.330,00	216.100,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	503.050,00	484.500,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.171.600,00	863.600,00
Badan Pendapatan Daerah	62.218.130,00	30.061.079,24
Badan Keuangan Dan Aset Daerah	14.647.500,00	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.967.000,00	1.771.800,00
Inspektorat Daerah	990.000,00	838.000,00
Sekretariat Daerah	10.343.200,00	8.695.960,50
Sekretariat DPRD	2.994.780,00	3.281.000,00
Kecamatan Tembilahan	1.600.000,00	1.428.000,00
Kecamatan Tempuling	236.000,00	150.000,00
Kecamatan Batang Tuaka	247.500,00	0,00
Kecamatan Concong	0,00	20.000,00
Kecamatan Enok	152.000,00	106.000,00
Kecamatan Gaung	337.000,00	0,00
Kecamatan Gaung Anak Serka	350.200,00	1.547.100,00
Kecamatan Kateman	0,00	240.000,00
Kecamatan Kempas	186.500,00	252.500,00
Kecamatan Keritang	366.500,00	186.000,00
Kecamatan Pelangiran	206.000,00	0,00
Kecamatan Reteh	126.500,00	0,00
Kecamatan Sungai Batang	387.000,00	317.000,00
Kecamatan Tanah Merah	0,00	397.200,00
Kecamatan Teluk Belengkong	192.000,00	912.700,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.905.750,00	16.430.200,00
Jumlah	982.043.358,90	1.286.974.227,84
Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)		
Dinas Kesehatan	32.967.888,00	0,00
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	85.000,00	45.000,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	29.637,00	30.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	0,00	28.175.000,00
Jumlah	33.082.525,00	28.250.000,00
Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya		
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	30.000,00	30.000,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	84.000,00	0,00
Kecamatan Concong	50.000,00	0,00
Kecamatan Tanah Merah	350.000,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung	0,00	800.000,00
Kecamatan Kempas	10.000,00	10.000,00
Jumlah	524.000,00	840.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	4.019.500,00
Jumlah	0,00	4.019.500,00
Persediaan Perabot Kantor		
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	127.000,00	0,00
Jumlah	127.000,00	0,00
Persediaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	0,00	64.929.000,00
Dinas Perkebunan	109.531.359,00	22.045.650,00
Jumlah	109.531.359,00	86.974.650,00
Persediaan Bahan Obat-Obatan		
Dinas Kesehatan	18.385.940.532,17	17.408.097.850,57



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Rumah Sakit Umum Puri Husada	0,00	43.655.288,71
Rumah Sakit Umum Tengku Sulung	0,00	78.590.152,00
Rumah Sakit Umum Raja Musa	0,00	258.358.699,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	5.159.900,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	21.459.011,00	66.072.911,00
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	18.115.000,00	104.741.650,00
Jumlah	18.425.514.543,17	17.964.676.451,28
Persediaan Bahan kimia		
Dinas Perkebunan	0,00	7.185.750,00
Jumlah	0,00	7.185.750,00
Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		
Sekretariat Daerah	0,00	2.101.000,00
Jumlah	0,00	2.101.000,00
Persediaan Bahan Cetak		
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	196.163.640,00	196.163.640,00
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	0,00	620.000,00
Dinas Perhubungan	89.033.910,00	51.934.000,00
Badan Pendapatan Daerah	173.885.917,50	315.682.741,00
Jumlah	459.083.467,50	564.400.381,00
Persediaan Suku Cadang Alat Angkutan		
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	0,00	1.315.000,00
Jumlah	0,00	1.315.000,00
Persediaan Bahan Lainnya		
Dinas Kesehatan	1.328.927.700,67	573.796.057,53
Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan	0,00	730.484.241,62
Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung	0,00	67.090.742,00
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa	0,00	53.400.908,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	192.000,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	2.998.000,00	2.998.000,00
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	0,00	24.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	146.455.024,00	176.441.974,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	227.100,00
Dinas Perkebunan	9.303.750,00	7.695.000,00
Sekretariat Daerah	0,00	140.005.000,00
Kecamatan Pelangiran	10.800.000,00	10.800.000,00
Jumlah	1.498.676.474,67	1.762.963.023,15
Persediaan Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan		
Dinas Perikanan	19.647.000,00	19.647.000,00
Jumlah	19.647.000,00	19.647.000,00
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaan	2.491.993.565,18	4.249.618.592,26
Jumlah	2.491.993.565,18	4.249.618.592,26
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya		
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	571.382.500,00	571.382.500,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	735.987.000,00
Jumlah	571.382.500,00	1.307.369.500,00
Jumlah Persediaan Habis Pakai	24.591.605.793,42	27.286.335.075,53

Rincian Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat

Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat per 31 Desember 2024 mengalami pengurangan sebesar Rp465.298.042,45 karena sebagian persediaan sudah diserahkan kepada penerima hibah dengan BAST antar kedua belah pihak.

Saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2024 terdapat pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaan sebesar Rp2.491.993.565,18 yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum ada Berita Acara Serah Terima (BAST) antar kedua belah pihak, sehingga masih tercatat sebagai persediaan pada tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis>Nama Barang	Tahun di Bangun	Penerima Hibah	Nilai (Rp)
				2024
	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaan			
1	Rehab Lap. Voli Desa Sei. Empat	2015	Kec. Gaung Anak Serka	19.026.629,76
2	Pembangunan Lap. Badminton Prt. Jawa Barat Desa Seberang Pulau Kijang	2015	Kec. Reteh	30.047.996,25
3	Semenisasi Lap. Voli Desa Sabar Menanti Dusun Nyiur Permai	2015	Kec. Keritang	40.102.356,53
4	Rehab Makam Tuan Guru Suhada	2015	Kec. Tembilahan Hulu	100,00
5	Pembangunan Lapangan Bola Voli Prt. Pelangi Desa Pelanduk	2015	Kec. Mandah	59.834.176,06
6	Pembangunan Lapangan Bola Voli Tanjung Simpang Desa Pelanduk	2015	Kec. Mandah	59.848.426,67
7	Pembangunan Teratek/Panggung	2015	Kec. Gaung Anak Serka	91.459.698,25
8	Peningkatan Lap. Sepak Bola Kel. Pantai Seberang Makmur	2015	Kec. Enok	171.962.299,58
9	Penimbunan Sirtu Lokasi Bumi Perkemahan Sei. Sirih	2015	Kec. Tembilahan Hulu	178.710.776,65



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

10	Pembangunan GOR Serba Guna 13x25 Desa Kuala Lemang	2015	Kec. Keritang	191.981.849,94
11	Pembugaran Makam Tuan Guru Syekh Abdurrahman Yakub Desa Pasar Kembang	2015	Kec. Keritang	213.414.808,25
12	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain Lapangan Gasing Desa Sungai Empat	2016	Kec. Gaung Anak Serka	23.799.426,09
13	Bangunan Gedung Tempat OR ain-lain Lapangan Gasing Desa Idaman	2016	Kec. Gaung Anak Serka	23.799.426,09
14	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain Lapangan Gasing Desa Kelumpang	2016	Kec. Gaung Anak Serka	23.799.426,09
15	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain Lapangan Voly Parit Rahmat Desa Kuala Keritang	2016	Kec. Keritang	37.084.134,77
16	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain Lapangan Voly Parit Dwi Sepakat desa Pancur	2016	Kec. Keritang	37.084.134,77
17	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain Lapangan Sepak Bola Bangkinan Desa Pelanduk	2016	Kec. Mandah	48.279.877,98
18	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain Lapangan Sepak Bola Desa Tj. Pasir	2016	Kec. Tanah Merah	50.218.417,64
19	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain Lapangan Sepak Bola Kel. Kota Baru Reteh	2016	Kec. Keritang	50.762.601,87
20	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain Tribun Sepak Bola Desa Benteng	2016	Kec. Sei. Batang	54.356.170,66
21	Bangunan Gedung Tempat OR lain-lain Tribun Sepak Bola Desa taga Raja	2016	Kec. Kateman	57.466.112,63
22	Makam bersejarah Syeh H.M Shaleh Teluk Pergam	2016	Kec. GAS	60.200.000,00
23	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain Turab Menongkah Desa Tanjung Pasir	2016	Kec. Tanah Merah	62.668.000,00
24	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain Lapangan Sepak Bola Sumber Baru Desa Sekara	2016	Kec. Kemuning	79.012.023,77
25	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain Tribun Lapangan Sepak Bola Desa Teluk Kelasa	2016	Kec. Keritang	84.590.414,15
26	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain Lapagan Badminton Pelangi Desa Pelanduk	2016	Kec. Mandah	102.883.999,26
27	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain Pagar Lapangan Sepak Bola PERSE Enok	2016	Kec. Enok	109.758.204,21
28	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain Lapangan Futsal Desa Sungai Laut	2016	Kec. Tanah Merah	120.446.457,82
29	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-Lain Gedung Olahraga Desa Bekawan Luar	2016	Kec. Mandah	184.573.103,59
30	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain GOR Bulu Tangkis Desa Idaman	2016	Kec. Gaung Anak Serka	224.822.515,85
Jumlah				2.491.993.565,18

Rincian Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya

Saldo Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya per 31 Desember 2024 terdapat pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sebesar Rp735.987.000,00 dan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman sebesar Rp571.382.500,00 yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum ada Berita Acara Serah Terima (BAST) antar kedua belah pihak, sehingga masih tercatat sebagai persediaan pada tahun 2024. dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis>Nama Barang	Tahun di Bangun	Penerima Hibah	Nilai (Rp)
				2024
	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman			
1	Sumur dengan Pompa	2018	Kec. Gaung Anak Serka	124.222.500,00
2	Sumur dengan Pompa	2017	Kec. Mandah	141.850.000,00
3	Sumur dengan Pompa	2017	Kec. Gaung	128.240.000,00
4	Sumur dengan Pompa	2017	Kec. Mandah	177.070.000,00
Jumlah				571.382.500,00

Persediaan Barang Tak Habis pakai

Saldo Persediaan Barang Tak Habis Pakai per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.857.185.551,49 dan sebesar Rp4.951.562.111,55. Dengan rincian sebagai berikut:

Jenis>Nama Barang	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Persediaan Komponen Lainnya		
Dinas Pendidikan	94.068.720,00	174.980.462,00
Dinas Kesehatan	5.321.860.179,49	102.973.500,00
Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan	0,00	3.991.435.515,55



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung	0,00	17.308.641,00
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa	0,00	394.834.673,00
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	0,00	3.590.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	5.883.000,00	5.883.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	142.841.300,00	142.841.300,00
Dinas Perhubungan	104.000,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	970.000,00	1.450.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	1.460.000,00	1.460.000,00
Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	0,00	1.900.000,00
Sekretariat Daerah	76.202.832,00	64.220.920,00
Sekretariat DPRD	200.059.570,00	43.251.150,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.335.950,00	895.950,00
Inspektorat Daerah	5.400.000,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	4.537.000,00
Jumlah Persediaan Barang Tak Habis Pakai	5.857.185.551,49	4.951.562.111,55
Total Persediaan Akhir	30.448.791.344,91	32.237.897.187,08

Adapun rincian persediaan tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Jenis>Nama Barang	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Persediaan Habis pakai	24.591.605.793,42	27.286.335.075,53
- Persediaan Alat Tulis Kantor	982.043.358,90	1.286.974.227,84
- Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	33.082.525,00	28.250.000,00
- Persediaan Peranko, materai dan benda pos lainnya	524.000,00	840.000,00
- Persediaan Perabot Kantor	127.000,00	0,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	4.019.500,00
- Persediaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	109.531.359,00	86.974.650,00
- Persediaan Bahan Obat-Obatan	18.425.514.543,17	17.964.676.451,28
- Persediaan Bahan kimia	0,00	7.185.750,00
- Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	2.101.000,00
- Persediaan Bahan Cetak	459.083.467,50	564.400.381,00
- Persediaan Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	1.315.000,00
- Persediaan Bahan Lainnya	1.498.676.474,67	1.762.963.023,15
- Persediaan Bahan/Bibit/Ternak/Bibit Ikan	19.647.000,00	19.647.000,00
- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.491.993.565,18	4.249.618.592,26
- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	571.382.500,00	1.307.369.500,00
Persediaan Barang Tak Habis pakai	5.857.185.551,49	4.951.562.111,55
- Persediaan Komponen Lainnya	5.857.185.551,49	4.951.562.111,55
Total Persediaan Akhir	30.448.791.344,91	32.237.897.187,08

Adapun rincian perhitungan persediaan dapat dilihat pada lampiran 8.

Rekapitulasi Mutasi Obat Expired dari UPTD Instalasi Farmasi Tahun 2024 Kabupaten Indragiri Hilir

UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir melaksanakan pengelolaan Obat dan BMHP dari 4 (Empat) sumber anggaran:

- a. Bersumber dari Anggaran DAK
- b. Bersumber dari Anggaran APBD II
- c. Bersumber dari Anggaran APBD I
- d. Bersumber dari Anggaran APBN

Obat dan BMHP yang bersumber dari Anggaran APBD I (Buffer stok Provinsi) adalah Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau di Distribusikan oleh UPT Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Riau. Obat dan BMHP yang bersumber dari anggaran APBN adalah Hibah dari Pusat (Kementrian Kesehatan yang dalam pendistribusiannya juga melalui UPT Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Riau.

UPTD Instalasi Farmasi melaksanakan sistim pengelolaan obat satu pintu, baik obat regular maupun obat Program. Khusus untuk obat program, Instalasi Farmasi hanya menerima, menyimpan dan mengeluarkan karena obat Program merupakan tanggung jawab Program Dinas Kesehatan, mulai dari perencanaan obat program (ROP) dan Pendistribusian ke Puskesmas dengan prosedur, Puskemas melakukan permintaan Obat Program harus minta rekomendasi dulu ke Penanggung Jawab Obat Program Dinas Kesehatan, setelah di berikan rekomendasi berapa jumlah obat yang disetujui oleh Penanggung Jawab Obat Program Dinas, baru IFK berproses untuk melakukan pengeluaran dan menyerahkan kepada Puskesmas.

Rekapitulasi Mutasi Obat Expired dari UPTD Instalasi Farmasi Tahun 2024 Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Nama Obat	Tanggal Exp	Satuan	Harga Satuan	Kadaluarsa
1	Diazepam inj 5 mg/ml (i.v/i.m)	31 Dec 2023	Ampul	1.545,00	270.375,00
2	Zdv (300)+3tc(150)	31 Dec 2023	botol @ 60 tab	241.800,00	9.430.200,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

3	Reagensia ZN (Ziehl neelsen)	31 Dec 2023	Kit	185.079,00	121.596.903,00
4	Kombipak (Azitromycin 1000 mg + Cefixime 400 mg)	31 Dec 2023	ktk@10 amplop	312.310,00	624.620,00
5	VTM	31 Dec 2023	Pcs	24.800,00	3.720.000,00
6	Insektisida DBD (Insektisida Zeta 15 UI)	31 Dec 2023	Liter	200.000,00	24.000.000,00
7	RHZE	31 Dec 2023	Tablet	1.423,00	517.972,00
8	Fluconazole	16/08/2023	ktk/10 tab	188.900,00	377.800,00
9	Rapid 2 (standar Q HIV) HIV 1/2 Ab 3-Line	1 Oct 2023	test	10.500,00	1.837.500,00
10	Kotrimoksazol kombinasi 400 mg+80	28/07/2023	tablet	252,52	909.072,00
11	Virus Transport Media (VTM)	31/12/2024	Buah	16.400,00	820.000,00
12	Acetylsisteine 200 mg	31/12/2024	tablet	309,79	1.189.593,60
13	Haloperidol tab 0.5mg	31/12/2024	tablet	49,00	117.600,00
14	Haloperidol tab 0.5mg	31/12/2024	tablet	49,00	24.500,00
15	Pembalut Gips	31 Dec 2024	kantong/plastik	21.500,00	11.846.500,00
16	Stomach tube 16	31 Dec 2024	pcs	8.470,00	6.267.800,00
17	Stomach tube 18	31 Dec 2024	pcs	4.780,60	4.493.764,00
18	Alopurinol tablet 100 mg (2022)	31 Dec 2024	tablet	87,00	2.314.200,00
19	Alopurinol tablet 300 mg (2022)	31 Dec 2024	tablet	200,00	15.160.000,00
20	Asetilsistein kaps 200 mg 2022	31 Dec 2024	Kaps	309,79	3.531.606,00
21	Bisoprolol tab 5 mg (2021)	31 Dec 2024	tablet	137,00	24.631.230,00
22	Blue Tip	31 Dec 2024	kotak	47.863,20	15.316.224,00
23	Diazepam tab 5 mg	31 Dec 2024	tablet	114,00	855.000,00
24	Hidrokortison krim 2,5% (2022)	31 Dec 2024	tube	2.325,00	2.901.600,00
25	Ibuprofen Sir 200 mg.5 ml (2022)	31 Dec 2024	botol	3.296,00	14.238.720,00
26	Kotrimoksazol dewasa kombinasi (2021)	31 Dec 2024	tablet	126,00	13.696.200,00
27	Metilergometrin maleat inj 0,2 mg/ml (2022)	31 Dec 2024	ampul	1.032,00	541.800,00
28	Meprovent (2022)	31 Dec 2024	Ampul	3.677,00	33.350.390,00
29	Nistatin Susp 100.000 UI/ml	31 Dec 2024	botol	11.857,00	27.472.669,00
30	Prednison tab 5 mg 2022	31 Dec 2024	tablet	71,00	2.406.900,00
31	Ramipril tab 5 mg	31 Dec 2024	tab	147,00	18.345.600,00
32	Risperidon tab 1 mg (2022)	31 Dec 2024	Tab	124,00	3.571.200,00
33	Sefotaksim serb inj 1000 mg/vial 2022	31 Dec 2024	vial	2.850,00	21.933.600,00
34	Seftriakson serb inj 1000 mg/vial 2022	31 Dec 2024	vial	2.850,00	19.140.600,00
35	Strip Gula Darah (Gula Darah 2023)	31 Dec 2024	box	320.000,00	17.280.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

36	Valproat sirup 250 mg/5 ml 2022	31 Dec 2024	botol	12.233,00	69.899.362,00
37	Winner elastic 3 inch (7,5 x 4,5 cm) 2019	31 Dec 2024	Roll	11.407,17	16.836.978,05
38	Winner elastic 4 inch (10 x 4,5 cm) 2019	31 Dec 2024	roll	14.372,38	23.297.619,88
39	Yellow Tip	31 Dec 2024	kotak	37.837,80	9.043.234,20
40	Otsu-NS 10 ml		vial	18,00	39.960,00
41	Rosuvastatin calsium 10 mg		tablet/100	100,00	666.000,00
42	Simketo		box 100	200,00	1.434.120,00
43	Simprofen		box 30	840,00	6.200.460,00
44	Genoint TM 0.3% 5 ml		btl	3,00	35.114,85
45	Cefazolin 1 gr		box 2	10,00	221.001,00
46	Profolat 400 mcg		box 100	2.300,00	893.550,00
47	Cefazoline 1 gr		box 10	50,00	518.481,00
48	Plasbumin 5% 250 ml		btl	2,00	1.880.144,64
49	Benzatin Benzil Penicillin 2,4 gr		pcs	1,00	666.000,00
50	Sulfadiazin silver 10 mg		pot	1,00	285.543,50
51	Cal-95		tablet/30	630,00	3.653.842,50
52	Ocuflame eye drop		botol	15,00	953.712,00
53	Rosuvastatin calsium 10 mg		tablet/90	90,00	64.970,28
54	Diltiazem 30 mg		box 100	1,00	14.199,90
55	Miconazole 2%		tube	86,00	163.374,20
56	KA EN 3A	5 Mar 2024	BOTOL	13.770,00	3.855.600,00
57	KA EN 1B	25 May 2024	BOTOL	10.350,00	2.898.000,00
58	ASERING	15 Dec 2024	BAG	17.700,00	743.400,00
59	WIDA HES 130	30 Sep 2024	BOTOL	91.020,00	2.002.440,00
60	DEXTROSE 10%	30 Nov 2024	BOTOL	8.350,00	668.000,00
61	LANSOPRAZOL 30 MG	30 Sep 2024	KAPSUL	1.500,00	7.200.000,00
62	METYL ERGOMETRIN INJ	30 May 2024	AMPUL	280,00	210.000,00
63	KCL 25 ML	2 Apr 2024	BOTOL	2.200,00	44.000,00
64	PIRACETAM 800 MG	30 Jun 2024	TABLET	1.500,00	750.000,00
65	ONDANSETRON 4 MG INJ	30 Jul 2024	AMPUL	6.500,00	3.250.000,00
66	CEFIXIME 200 MG	30 Mar 2024	KAPSUL	2.200,00	1.100.000,00
67	MGSO4 40% 25 ML	30 Jun 2024	BOTOL	6.227,00	435.890,00
68	DEXTROSE 40% 25 ML	6 Apr 2024	BOTOL	8.547,00	5.205.123,00
69	DEXAMETASONE 0,5 MG	30 Nov 2024	TABLET	150,00	210.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

70	PHYTOMENADION 10 MG	28 Feb 2024	TABLET	781,00	312.400,00
71	SPIRONOLACTONE 25 MG	30 Mar 2024	TABLET	400,00	600.000,00
72	SPIRONOLACTONE 100 MG	28 Feb 2024	TABLET	1.150,00	920.000,00
73	ALLOPURINOL 300 MG	30 Jul 2024	TABLET	700,00	1.470.000,00
74	URINTER	30 Jul 2024	TABLET	5.100,00	1.020.000,00
75	D5 %	1 Jul 2023	BOTOL	12.570,00	1.055.880,00
76	D 10%	1 Apr 2023	BOTOL	13.500,00	81.000,00
77	D 10%	1 Jul 2023	BOTOL	13.500,00	202.500,00
78	LEVOFLOXACIN 500 MG	1 Feb 2022	TABLET	2.000,00	1.002.000,00
79	CALCIFAR/CALSIMUM LACTAT	1 Mar 2022	TABLET	500,00	420.000,00
80	LORATADINE	1 Mar 2022	TABLET	500,00	50.000,00
81	ALLUPURINOL 100 MG	1 Feb 2022	TABLET	300,00	252.000,00
82	TETRASIKLIN 500 MG	1 Jan 2022	TABLET	200,00	50.000,00
83	PHENYTOIN SODIUM	1 Mar 2022	KAPSUL	500,00	500.000,00
84	METHYLPREDNISOL ONE 4 MG	1 Feb 2022	TABLET	560,00	56.000,00
85	DOMPERIDONE SYRUP	1 Feb 2022	BOTOL	16.000,00	576.000,00
86	KCL	1 Apr 2022	VIAL	2.200,00	198.000,00
87	MICONAZOLE KRIM	1 Feb 2022	TUBE	4.777,00	38.216,00
88	CEFOTAXIME INJEKSI	1 Feb 2022	VIAL	11.200,00	1.635.200,00
89	CITICOLINE INJEKSI	1 Jan 2022	AMPUL	9.700,00	252.200,00
90	NORAGES INJEKSI	1 Mar 2022	AMPUL	5.400,00	280.800,00
91	SPIRONOLACTON 25 MG	1 Jan 2022	TABLET	400,00	26.000,00
92	METFORMIN	1 Feb 2021	TABLET	311,00	684.200,00
93	CAPTOPRIL 12,5 MG	1 Jan 2021	TABLET	250,00	865.000,00
94	TABLET TAMBAH DARAH	1 Apr 2021	TABLET	650,00	513.500,00
95	ORALIT	1 Jan 2021	SACHET	1.500,00	900.000,00
96	LOPERAMID	1 Mar 2021	TABLET	250,00	215.000,00
97	SCOPMA	1 Jan 2021	TABLET	2.200,00	338.800,00
98	SPASMINAL	1 Apr 2021	TABLET	2.200,00	440.000,00
99	ACICLOVIR	1 Jan 2021	TABLET	500,00	200.000,00
100	MECOBALAMIN	1 Feb 2021	TABLET	300,00	106.500,00
101	AMINOPHYLLIN	1 Feb 2021	TABLET	430,00	215.000,00
102	L-BIO	1 Feb 2021	SHACET	14.000,00	112.000,00
103	CHLORAMPENICOL TETES MATA	1 Feb 2021	BOTOL	13.000,00	78.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

104	DEXAMETASON INJEKSI	1 Mar 2021	AMPUL	2.200,00	4.400,00
105	PIRACETAM INJEKSI	1 Jan 2021	AMPUL	40.000,00	40.000,00
106	EPINEPHRIN INJEKSI	1 Mar 2021	AMPUL	5.550,00	11.100,00
107	AZITROMISIN INJEKSI	1 Apr 2021	AMPUL	27.000,00	162.000,00
108	CHLORAMPENICOL SALEP MATA	1 Apr 2021	TABLET	9.000,00	504.000,00
109	COTRIMOKSAZOLE 960 MG	1 Sep 2021	TABLET	630,00	504.000,00
110	LIDOCAINE INJEKSI	1 Oct 2021	AMPUL	2.500,00	1.342.500,00
111	INFIMYCIN INJEKSI	1 Jul 2021	AMPUL	17.500,00	52.500,00
112	INFIMYCIN INJEKSI	1 Dec 2021	AMPUL	17.500,00	175.000,00
113	CEFOTAXIME INJEKSI	1 Jul 2021	AMPUL	11.200,00	660.800,00
114	METOCLOPRAMIDE INJEKSI	1 Oct 2021	AMPUL	8.900,00	3.560.000,00
115	PIRACETAM INJEKSI	1 Dec 2021	TABLET	30.000,00	4.950.000,00
116	ERYTROMYSIN SYRUP	1 Aug 2021	BOTOL	26.000,00	468.000,00
117	ERYTROMYSIN TABLET	1 Sep 2021	TABLET	2.200,00	1.870.000,00
118	CAPTOPRIL 25	1 Sep 2021	TABLET	250,00	987.500,00
119	ISONIAZID	1 Jul 2021	TABLET	630,00	138.600,00
120	KOFINEM	1 Aug 2021	TABLET	250,00	46.250,00
121	ATS	1 Jul 2021	AMPUL	220.000,00	1.320.000,00
122	ALLUPURINOL 300 MG	1 Sep 2021	TABLET	700,00	306.600,00
123	ALLUPURINOL 300 MG	1 Nov 2021	TABLET	700,00	203.000,00
124	OXYTETRACYLINE HCL	1 Oct 2021	TUBE	6.300,00	107.100,00
125	TEOSAL	1 Nov 2021	TABLET	200,00	92.000,00
126	CEFADROXYL SYRUP	1 Oct 2021	BOTOL	11.000,00	88.000,00
127	REMDAL/REMSIDAVIR	1 Nov 2021	VIAL	510.000,00	3.060.000,00
128	ANELAT	1 Dec 2021	TABLET	500,00	265.000,00
129	D5 1/2 NS	1 May 2021	BOTOL	11.000,00	1.320.000,00
130	LASAL NEBU	1 Jan 2021	VIAL	10.000,00	140.000,00
131	OXYTETRACYLIN SALEP	1 Jul 2021	TUBE	5.000,00	35.000,00
132	OXYTETRACYLIN SALEP	1 Aug 2021	TUBE	5.000,00	110.000,00
133	IBUPROFEN TABLET	1 Oct 2020	TABLET	600,00	3.000.000,00
134	AMLODIPINE TABLET 5 MG	1 Oct 2020	TABLET	150,00	648.000,00
135	AMLODIPINE TABLET 10 MG	1 Aug 2020	TABLET	122,00	257.420,00
136	AMLODIPINE TABLET 10 MG	1 Feb 2020	TABLET	122,00	240.340,00
137	FAMOTIDINE	1 Jul 2020	TABLET	310,00	155.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

138	VITAMIN B1	1 Aug 2020	TABLET	300,00	1.194.000,00
139	CLONIDIN	1 Aug 2020	TABLET	600,00	300.000,00
140	ALLUPURINOL 100 MG	1 Dec 2020	TABLET	300,00	558.000,00
141	PIRACETAM 800 MG	1 Nov 2020	TABLET	1.500,00	495.000,00
142	ATORVASTATIN 20 MG	1 Dec 2020	TABLET	1.800,00	138.600,00
143	METAMIZOLE 500 MG	1 Oct 2020	TABLET	500,00	170.000,00
144	METRONIDAZOLE 250 MG	1 Nov 2020	TABLET	444,00	1.467.420,00
145	KETOCONAZOLE 200 MG	1 Nov 2020	TABLET	300,00	60.000,00
146	CLOPIDOGREL 75 MG	1 Nov 2020	TABLET	5.000,00	1.950.000,00
147	RAMIPRIL 5 MG	1 Dec 2020	TABLET	790,00	52.930,00
148	NEURODEX	1 Sep 2020	TABLET	200,00	52.000,00
149	DIGOXIN 0,25 MG	1 Oct 2020	TABLET	220,00	35.200,00
150	PROPYTHIOURACIL	1 Oct 2020	TABLET	250,00	75.000,00
151	GLYCERYL GUAIACOLATE	1 Oct 2020	TABLET	210,00	42.000,00
152	PARACETAMOL SYRUP	1 Jun 2020	BOTOL	7.000,00	1.862.000,00
153	VITAMIN B 12	1 Oct 2020	TABLET	300,00	150.000,00
154	CLOPIDOGREL 75 MG	1 Apr 2020	TABLET	7.000,00	840.000,00
155	METOCLOPRAMIDE	1 Apr 2020	TABLET	200,00	105.800,00
156	GLIQUIDONE	1 Jun 2020	TABLET	1.400,00	191.800,00
157	SPIRONOLACTON 100 MG	1 Mar 2020	TABLET	1.150,00	128.800,00
158	CHLORAMPHENICOL 250 MG	1 Dec 2020	TABLET	800,00	32.000,00
159	HALOPERIDOL	1 Mar 2020	TABLET	1.300,00	130.000,00
160	SANGOBION DROP	1 Jul 2020	BOTOL	250.000,00	250.000,00
161	MICROGYNON	1 Jun 2020	TABLET	800,00	67.200,00
162	RETAPHYL	1 Feb 2020	TABLET	2.800,00	75.600,00
163	VITAMIN C INJEKSI	1 Jul 2020	AMPUL	150.000,00	15.000.000,00
164	GENTAMYCIN INJEKSI	1 Jul 2020	AMPUL	6.000,00	834.000,00
165	NOREPINEPHRIN INJEKSI	1 Jun 2020	AMPUL	7.800,00	179.400,00
166	ACETYLSISTEINE INJEKSI	1 Jun 2020	AMPUL	15.000,00	1.500.000,00
167	OXYTOCIN INJEKSI	1 Nov 2020	AMPUL	2.500,00	57.500,00
168	METERGIN INJEKSI	1 Apr 2020	AMPUL	250,00	500,00
169	NEOSTIGMIN INJEKSI	1 Jul 2020	AMPUL	15.000,00	150.000,00
170	DILTIAZEM INJEKSI	1 Feb 2020	AMPUL	13.500,00	67.500,00
171	HEPARIN INJEKSI	1 Jan 2020	AMPUL	25.000,00	50.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

172	ATROPIN SULFAS INJEKSI	1 Jul 2020	AMPUL	4.200,00	176.400,00
173	TETRACYCLINE 500 MG	1 Jul 2020	TABLET	1.700,00	340.000,00
174	TRAMADOL	1 Dec 2020	TABLET	3.500,00	388.500,00
175	BISOLVON INJEKSI	1 Sep 2020	AMPUL	17.500,00	175.000,00
176	D5 1/4 NS	1 Dec 2020	BOTOL	13.000,00	520.000,00
					662.424.315,60

5.3.1.2

INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp107.793.361.354,33 dan Rp108.754.557.000,96, terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	107.793.361.354,33	108.754.557.000,96
Investasi Non Permanen	209.051.055,00	247.351.055,00
Investasi Permanen	107.584.310.299,33	108.507.205.945,96
Jumlah Investasi Jangka Panjang	107.793.361.354,33	108.754.557.000,96

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp107.793.361.354,33 dan Rp108.754.557.000,96 merupakan nilai netto setelah dikurangi dengan dengan Akumulasi Penyisihan Investasi Non Permanen sebesar (Rp7.968.469.876,00). Adapun penjelasan mutasi atas masing-masing jenis investasi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

5.3.1.2.1

INVESTASI NON PERMANEN

Saldo Investasi Non Permanen dana bergulir merupakan saldo dari penyaluran kredit Inhil Revolving Fund ke bank Riau Kepri cabang Tembilahan Tahun 2002 dan 2003 sebesar Rp7.046.093.555,00 ditambah saldo penyaluran kredit dana Chanelling ke Bank BPR Gemilang Tembilahan sebesar Rp1.131.427.376,00.

Saldo investasi non permanen-dana bergulir per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp209.051.055,00 setelah dikurangi penyisihan Investasi Non permanen dengan perhitungan sebagai berikut:

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	209.051.055,00	247.351.055,00
Investasi Non Permanen Dana Bergulir	8.177.520.931,00	8.327.227.313,00
Penyisihan Investasi Non Permanen	(7.968.469.876,00)	(8.079.876.258,00)
Jumlah Investasi Non Permanen	209.051.055,00	247.351.055,00

Perhitungan penambahan dan pengurangan pada tabel masih disajikan sebesar nilai perolehan. Hal ini untuk mengetahui besaran nilai tersebut sebelum disajikan sebesar nilai bukunya, adapun perhitungannya sebagai berikut:

Nama SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Inhil Revolving Fund	7.127.250.555,00	0,00	81.157.000,00	7.046.093.555,00
Dana Chanelling	1.199.976.758,00	450,00	68.549.832,00	1.131.427.376,00
Jumlah	8.327.227.313,00	450,00	149.706.832,00	8.177.520.931,00

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
- INHIL REVOLVING FUND (IRF)	7.046.093.555,00	8.327.227.313,00

Realisasi Saldo Investasi Non Permanen Inhil Revolving Fund tahun 2024 sebesar Rp7.046.093.555,00 dan tahun 2023 sebesar Rp7.127.250.555,00. Pada tahun 2024 Inhil Revolving Fund berkurang sebesar Rp81.157.000,00 dikarenakan adanya pengembalian sebesar Rp60.583.140,00 dan koreksi pengurangan atas permohonan keringanan sebesar Rp20.573.860,00 berdasarkan Surat Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Riau nomor SPPNL-12/PUPNC.03.01/2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang Pernyataan Piutang Negara Lunas atas Koperasi Nusa Indah. Adapun rincian sebagai berikut :

No STS	Nilai	Keterangan
06398/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/III/A06/2024	31.300.000,00	Sesuai surat NO. 500.3/437/DISKOP Hal Pinbuk Saldo REK Penampung ke Kas Daerah IRF 2002 dan 2003 DISKOP Setor Tunai
06399/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/III/A06/2024	7.000.000,00	SESUAI SURAT NO. 500.3/437/DISKOP Hal Pinbuk Saldo REK Penampung ke Kas Daerah IRF 2002 DAN 2003 DISKOP Setor Tunai
07839/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/IV/A06/2024	22.283.140,00	SRT NO. 500.3/798/DISKOP Hal Pinbuk Saldo REK Penampung Koperasi Nusa Indah Setor Pemindahbukuan
Jumlah	60.583.140,00	



Adapun rincian Inhil Revolving Fund di tahun 2024 sebagai berikut:

Rincian Pelunasan Dana IRF yang Belum Masuk Ke Kasda			
Nama SKPD	Nominal	Koreksi 2024	Sisa
Dinas Perkebunan	2.538.239.200,00	0,00	2.538.239.200,00
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (ex. Dinas Tanaman Pangan)	436.050.000,00	0,00	436.050.000,00
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (ex. Dinas Pertanian)	643.772.210,00	0,00	643.772.210,00
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (ex. Dinas Perternakan)	1.231.831.581,00	0,00	1.231.831.581,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	311.222.786,00	0,00	311.222.786,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	727.973.806,00	0,00	727.973.806,00
Dinas Perikanan <i>Inhil Revolving Fund</i> 2003 (ex. Dinas Kelautan dan Perikanan)	1.014.447.309,00	0,00	1.014.447.309,00
Dinas Perikanan	26.574.000,00	0,00	26.574.000,00
Pokja <i>Inhil Revolving Fund</i>	114.982.663,00	0,00	114.982.663,00
PEK Tahun 2023 (1022690009)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Jumlah	7.046.093.555,00	0,00	7.046.093.555,00

Penyaluran kredit *Inhil Revolving Fund (IRF)* di PT Bank Riau dilakukan dengan dua perjanjian kerja sama yaitu:

1. Naskah kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan BPD Riau Nomor 24 Tahun 2002 dan Nomor 14/DIR/BPDR/IX/2002 tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui *Inhil Revolving Fund* sebesar Rp2.800.000.000,00.
2. Naskah kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan PT Bank Riau Nomor 01.27.2 Tahun 2003 dan Nomor 076/DIR/BPDR/VIII/2003 tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Inhil Revolving Fund sebesar Rp5.778.250.000,00.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menyetorkan dana tahun 2002 sebesar Rp2.800.000.000,00 dan tahun 2003 sebesar Rp5.778.250.000,00 ke rekening “Pelimpahan Penerusan Pinjaman Dana *Inhil Revolving Fund*” di PT. Bank Riau. Dari dana yang diberikan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp8.578.250.000,00, PT Bank Riau Kepri telah menyalurkan dana ke masyarakat melalui persetujuan 6 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir masing-masing sebesar Rp2.717.700.000,00 pada tahun 2002 dan sebesar Rp5.198.232.200,00 pada tahun 2003.

Sampai dengan 31 Desember 2024, seluruh pinjaman dana bergulir kepada masyarakat telah jatuh tempo. Dari dana yang telah digulirkan kepada masyarakat masih tersisa senilai Rp7.046.093.555,00 belum dikembalikan ke Kas Daerah. dengan rincian sebagai berikut:

1. Dari dana IRF yang disalurkan Tahun 2002 sebesar Rp2.717.700.000,00 posisi per 31 Desember 2024 bersaldo Rp2.197.415.378,00.
2. Dari dana IRF yang disalurkan Tahun 2003 sebesar Rp5.198.232.200,00 posisi per 31 Desember 2024 bersaldo Rp4.639.627.122,00.
3. Dari dana IRF yang di salurkan terdapat juga yang masih berada pada rekening penampung Bank Riau Kepri Syariah sebesar Rp247.351.055,00 dengan rincian sebagai berikut:

Nama SKPD	Tahun	Nomor Rekening Penampung	Saldo per 31 Desember 2024
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2002	1022620005	0,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2003	1022620005	0,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2003	1022630001	716.617,00
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (ex. Dinas Peternakan)	2003	1022630004	65.777.775,00
POKJA	2003	1022620000	114.982.663,00
Dinas Perikanan	2003	1022630002	26.574.000,00
PEK TH 2023	2023	1022690009	1.000.000,00
Total			209.051.055,00

Dari penyaluran dana IRF tahun 2002 sebesar Rp2.717.700,00 dan penyaluran dana IRF tahun 2003 sebesar Rp5.198.232.200,00 yang telah dikembalikan dan kemudian digulirkan kembali ke masyarakat sebesar Rp3.092.000.000,00, sehingga total dana yang telah digulirkan ke masyarakat sebesar Rp11.007.932.200,00 dengan total pengembalian sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp4.170.889.700,00. Pengembalian dari masyarakat disetorkan ke Rekening Pengembalian dana bergulir kepada 5 SKPD yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana IRF sebagai tersebut:

Daftar Dana Pengembalian per 31 Desember 2024 Inhil Revolving Fund TA.2002 & TA.2003



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Nama SKPD	Tahun	Penyaluran	Realisasi Pengembalian s.d 2024	Saldo Per 31 Desember 2024
DANA IRF YANG BEREDAR DI MASYARAKAT				
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2002-2003	3.165.000.000,00	2.853.777.214,00	311.222.786,00
Dinas Perikanan (ex. Dinas Kelautan dan Perikanan)	2002-2003	1.125.000.000,00	110.552.691,00	1.014.447.309,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2002-2003	1.647.000.000,00	919.742.811,00	727.257.189,00
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (ex. Dinas Peternakan)	2002-2003	436.050.000,00	0,00	436.050.000,00
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (ex. Dinas Peternakan)	2002-2003	658.993.000,00	15.220.790,00	643.772.210,00
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (ex. Dinas Peternakan)	2002-2003	1.435.650.000,00	269.596.194,00	1.166.053.806,00
Dinas Perkebunan	2002-2003	2.540.239.200,00	2.000.000,00	2.538.239.200,00
Rekening Penampung pada Bank Riau Kepri Syariah	2002-2003	0,00	0,00	0,00
Jumlah		11.007.932.200,00	4.170.889.700,00	6.837.042.500,00

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
- DANA CHANNELING	1.131.427.376,00	1.199.976.758,00
Saldo akhir dana channeling per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.131.427.376,00. Pada tahun 2024 dana channeling mengalami penambahan berupa koreksi Dana Channeling sebesar Rp450,00 pada Desa Bayas Jaya menyesuaikan nilai/rekapitulasi data yang disampaikan Bagian Ekonomi dan pengurangan sebesar Rp68.549.832,00 merupakan pengembalian dari nasabah sesuai rekap setoran, dengan rincian sebagai berikut:		

Penerimaan Dana Channeling Tahun 2024		
Nilai	No STS	Keterangan
1.192.428,00	00015/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/I/A06/2024	Set Chaneling An. Irmawati Setor Tunai
1.192.428,00	00016/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/I/A06/2024	Set Chaneling An. Siti Juliah Setor Tunai
1.192.428,00	00017/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/I/A06/2024	Set Chaneling An. Asurah Setor Tunai
1.192.428,00	00018/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/I/A06/2024	Set Chaneling An. Rohani Setor Tunai
1.192.428,00	00019/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/I/A06/2024	Set Chaneling An. Rosita Setor Tunai
1.192.428,00	00020/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/I/A06/2024	Set Chaneling An. Asdiana Setor Tunai
1.192.330,00	00021/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/I/A06/2024	Set Chaneling An. Saniah Setor Tunai
1.192.428,00	00022/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/I/A06/2024	Set Chaneling An. Aisyah Setor Tunai
1.192.428,00	00023/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/I/A06/2024	Set Chaneling An. Marlina Setor Tunai
1.192.428,00	00024/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/I/A06/2024	Set Chaneling An. Hairunisa Setor Tunai
1.433.422,00	00025/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/I/A06/2024	Set Chaneling An. Atringatun Setor Tunai
290.880,00	00045/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/I/A06/2024	Setor Tunai/Pembayaran Tunggal An. Suryani Setor Tunai
1.042.078,00	01542/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/I/A06/2024	Syamsi/Set Tunggal Pinjaman Dana Bergulir An. Maryati Setor Tunai
1.281.510,00	01547/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/I/A06/2024	Hasnah-Pelunasan Pinjaman Bpr Setor Tunai
1.430.818,00	03758/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/II/A06/2024	Juraida/Pelunasan Kredit Chaneling Pemda Setor Tunai
1.957.799,00	07384/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/IV/A06/2024	Yoga Agusrianto-Set Pelunasan Kredit Ckr An Isye Syaritan Pekan Arba Setor Tunai
1.659.377,00	07385/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/IV/A06/2024	Yoga Agusrianto-Set Pelunasan Kredit Ckr An Ari Asiah Tbh Setor Tunai
174.883,00	01552/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/I/A06/2024	BI Fast Transfer Kredit Lewat ATM
69.605,00	01560/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/I/A06/2024	BI Fast Transfer Kredit Lewat ATM



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

570.644,00	00767/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/I/A06/2024	BI Fast Transfer Kredit Lewat ATM
1.166.500,00	00769/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/I/A06/2024	BI Fast Transfer Kredit Lewat ATM
4.807.815,00	00766/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/I/A06/2024	BI Fast Transfer Kredit Lewat ATM
1.420.269,00	00771/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/I/A06/2024	BI Fast Transfer Kredit Lewat ATM
200.000,00	01550/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/I/A06/2024	BI Fast Transfer Kredit Lewat ATM
201.416,00	01569/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/I/A06/2024	BI Fast Transfer Kredit Lewat ATM
1.899.119,00	01522/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/I/A06/2024	BI Fast Transfer Kredit Lewat ATM
467.778,00	01555/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/I/A06/2024	BI Fast Transfer Kredit Lewat ATM
200.000,00	01524/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/I/A06/2024	BI Fast Transfer Kredit Lewat ATM
140.062,00	01556/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/I/A06/2024	BI Fast Transfer Kredit Lewat ATM
3.972.645,00	01551/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/I/A06/2024	BI Fast Transfer Kredit Lewat ATM
617.564,00	01554/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/I/A06/2024	BI Fast Transfer Kredit Lewat ATM
358.025,00	01561/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/I/A06/2024	BI Fast Transfer Kredit Lewat ATM
653.240,00	01553/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/I/A06/2024	BI Fast Transfer Kredit Lewat ATM
415.662,00	01559/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/I/A06/2024	BI Fast Transfer Kredit Lewat ATM
500.000,00	01566/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/I/A06/2024	BI Fast Transfer Kredit Lewat ATM
2.298.000,00	01567/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/I/A06/2024	BI Fast Transfer Kredit Lewat ATM
388.414,00	01549/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/I/A06/2024	BI Fast Transfer Kredit Lewat ATM
4.248.047,00	01564/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/I/A06/2024	BI Fast Transfer Kredit Lewat ATM
666.500,00	00764/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/I/A06/2024	BI Fast Transfer Kredit Lewat ATM
100.000,00	02331/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/I/A06/2024	BI Fast Transfer Kredit Lewat ATM
184.577,00	01557/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/I/A06/2024	BI Fast Transfer Kredit Lewat ATM
4.690.943,00	01548/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/I/A06/2024	BI Fast Transfer Kredit Lewat ATM
523.074,00	03109/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/II/A06/2024	BI Fast Transfer Kredit Lewat ATM
936.852,00	01565/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/I/A06/2024	BI Fast Transfer Kredit Lewat ATM
696.847,00	01568/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/I/A06/2024	BI Fast Transfer Kredit Lewat ATM
102.757,00	01570/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/I/A06/2024	BI Fast Transfer Kredit Lewat ATM
470.518,00	03110/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/II/A06/2024	BI Fast Transfer Kredit Lewat ATM
500.000,00	04542/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/II/A06/2024	BI Fast Transfer Kredit Lewat ATM
10.000,00	03761/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/II/A06/2024	BI Fast Transfer Kredit Lewat ATM
800.000,00	05406/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/II/A06/2024	BI Fast Transfer Kredit Lewat ATM
300.000,00	06316/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/III/A06/2024	BI Fast Transfer Kredit Lewat ATM
210.229,00	06318/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/III/A06/2024	BI Fast Transfer Kredit Lewat ATM



1.170.336,00	04543/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/II/A06/2024	BI Fast Transfer Kredit Lewat ATM
1.490.366,00	06306/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/III/A06/2024	BI Fast Transfer Kredit Lewat ATM
7.572.156,00	07405/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/IV/A06/2024	BI Fast Transfer Kredit Lewat ATM
576.327,00	07834/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/IV/A06/2024	BI Fast Transfer Kredit Lewat ATM
1.103.455,00	01558/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/I/A06/2024	BI Fast Transfer Kredit Lewat ATM
655.141,00	03108/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/II/A06/2024	BI Fast Transfer Kredit Lewat ATM
68.549.832,00		

Penyaluran Dana *Channeling* di PT BPR Gemilang dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan PD BPR Gemilang Nomor 07/VII/HK-2006 dan Nomor 001/VII/PK-BPR/2006 tanggal 21 Juli 2006 tentang Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006. Perjanjian ini telah dua kali diubah/diaddendum. Perjanjian kerjasama berakhir pada tanggal 21 Juli 2010.

Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada awalnya telah menyerahkan Dana *Channeling* sebesar Rp13.800.000.000,00 ke rekening PT BPR Gemilang Nomor 102-23-19959 di PT Bank Riau Kepri melalui dua tahap yaitu tanggal 22 September 2006 sebesar Rp9.200.000.000,00 dan tanggal 30 Januari 2007 sebesar Rp4.600.000.000,00.

Saldo awal Dana *Channeling* tahun 2023 sebesar Rp1.199.976.758,00. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan setoran kembali sebesar Rp68.549.832,00 dan koreksi rekap sebesar Rp450,00. Sehingga saldo akhir dana *channeling* tahun 2024 sebesar Rp1.131.427.376,00.

5.3.1.2.2	PENYISIHAN INVESTASI NON PERMANEN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
		(7.968.469.876,00)	(8.079.876.258,00)

Penyisihan Investasi Non Permanen tahun 2024 dan tahun 2023 (Rp7.968.469.876,00) dan (Rp8.079.876.258,00) merupakan penyisihan dari Inhil Revolving Fund (IRF) dan penyisihan Dana *Chanelling*. Adapun rincian mutasi penambahan dan pengurangan penyisihan investasi non permanen sebagai berikut:

Nama SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Inhil Revolving Fund	(6.879.899.500,00)	0,00	(42.857.000,00)	(6.837.042.500,00)
Dana Chanelling	(1.199.976.758,00)	0,00	(68.549.382,00)	(1.131.427.376,00)
Jumlah	(8.079.876.258,00)	0,00	(111.406.382,000)	(7.968.469.876,00)

Penurunan Penyisihan Investasi Non Permanen sebesar Rp111.406.382,00 yang terdiri dari pengurangan pada Penyisihan Inhil Revolving Fund sebesar Rp42.857.000,00 dan pada Penyisihan Dana *Chanelling* sebesar Rp68.549.382,00. Penurunan nilai Penyisihan pada Inhil Revolving Fund sebesar Rp42.857.000,00 atas Pelunasan pengembalian koperasi Nusa Indah yang tahun sebelumnya telah disihkan 100%. Pengurangan nilai Penyisihan Dana *Chanelling* sebesar Rp68.549.382,00 adalah atas pengembalian dari nasabah yang tahun sebelumnya telah disihkan 100%.

Adapun perhitungan Penyisihan dari IRF dan Dana *Chanelling* sebagai berikut:

Investasi Non Permanen	Investasi Non Permanen	Diragukan	Macet	Jumlah
Inhil Revolving Fund	7.046.093.555,00	0,00	6.837.042.500,00	
Rate (%) Penyisihan)		50%	100%	
Sub Jumlah Penyisihan		0,00	6.837.042.500,00	6.837.042.500,00
Dana Chanelling di BPR Gemilang	1.131.427.376,00	0,00	1.131.427.376,00	
Rate (%) Penyisihan)		50%	100%	
Sub Jumlah Penyisihan		0,00	1.131.427.376,00	1.131.427.376,00
Jumlah	8.177.520.931,00	0,00	7.968.469.876,00	7.968.469.876,00

Penyisihan Investasi Non Permanen (IRF) senilai Rp6.837.042.500,00 merupakan nilai yang beredar dimasyarakat atau debitur yang dikategorikan kedalam kualitas macet.

Sedangkan Penyisihan Investasi Non Permanen (Dana *Chanelling*) senilai Rp1.131.427.376,00 merupakan nilai yang beredar dimasyarakat atau debitur yang dikategorikan kedalam kualitas macet.

5.3.1.2.3	INVESTASI PERMANEN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
		107.584.310.299,33	108.507.205.945,96

Investasi Permanen per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp107.584.310.299,33 dan Rp108.507.205.945,96. Investasi Permanen merupakan investasi jangka panjang Pemerintah Daerah yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan guna menghasilkan pendapatan dan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Rincian perhitungan investasi permanen dapat dilihat pada lampiran 9. Adapun penambahan dan pengurangan dari investasi permanen sebagai berikut:

Nama BUMD	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
PT Bank Riau Kepri Syariah	67.877.200.000,00	0,00	0,00	67.877.200.000,00
PT BPR Gemilang	20.597.069.380,37	0,00	922.895.646,63	19.674.173.733,74
PT Gemilang Citra Mandiri	4.200.000.000,00	0,00	0,00	4.200.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT RIAU AIRLINES (RAL)	2.429.775.000,00	0,00	0,00	2.429.775.000,00
PDAM Tirta Indragiri	13.403.161.565,59	0,00	0,00	13.403.161.565,59
PT. Kelapa Indragiri Hilir Gemilang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	108.507.205.945,96	0,00	922.895.646,63	107.584.310.299,33

Pada PT BPR Gemilang terjadi pengurangan sebesar Rp922.895.646,63 dikarenakan adanya penurunan atas perhitungan metode ekuitas terhadap laba minus sebesar Rp932.783.148,00 atas kepemilikan 98,94% saham pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

Kepemilikan Saham Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2024

Nama BUMD	% Kepemilikan saham Pemda 2024	Saldo Per 31 Desember 2024
PT Bank Riau Kepri Syariah	5,61%	67.877.200.000,00
PT BPR Gemilang	98,94%	19.674.173.733,74
PT Gemilang Citra Mandiri	90,00%	4.200.000.000,00
PT RIAU AIRLINES (RAL)	1,82%	2.429.775.000,00
PDAM Tirta Indragiri	100%	13.403.161.565,59
PT. Kelapa Indragiri Hilir Gemilang	99%	0,00
Jumlah		107.584.310.299,33

Penyertaan pada PT Bank Riau Kepri Syariah dan PT Riau Air Line (RAL) dicatat dengan metode biaya (*cost method*) karena kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir kurang dari 20%. Penyertaan pada PT BPR Gemilang dicatat dengan metode ekuitas (*equity method*) dengan mencatat jumlah penyeteroran modal dikurangi/ditambah akumulasi rugi/laba perusahaan sampai tahun berjalan yang terlihat pada Laporan Keuangan perusahaan tersebut.

Divestasi Bank Riau Syariah, Bank Riau Kepri merupakan salah satu Pemegang Saham pada Bank Perkreditan Rakyat Gemilang, dengan kepemilikan saham sebanyak 400 Lembar Saham atau dengan Nominal jumlah keseluruhan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan nilai nominal masing-masing lembar saham Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bank Riau Kepri yang sebelumnya merupakan Bank Konvensional, tepat pada tanggal 22 Agustus 2022, status Bank Riau Kepri Konversi dari Konvensional ke Syariah. Berdasarkan POJK No. 64/POJK.03/2016 tanggal 22 Desember 2016 Tentang Kegiatan Usaha Konvensional menjadi Bank Syariah pasal 18 ayat 1, yang menyatakan bahwa Bank Konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah wajib menyelesaikan hak dan kewajibannya dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha diberikan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan berikutnya Nomor : 22/POJK/2022 tentang Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum tanggal 1 November 2022 pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dilarang melakukan Penyertaan Modal selain kepada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan berdasarkan prinsip syariah.

Sampai saat ini belum ada pihak ketiga yang berkeinginan untuk membeli saham PT BRK Syariah dimaksud. Bank BPR Gemilang (perseroda) mengusulkan ke Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, untuk menjadi calon pemegang saham pengganti BRK Syariah pada BPR Gemilang. Sehingga kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada BPR Gemilang (Perseroda) menjadi 100% Milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Namun hal ini tentunya akan melalui proses yang sangat panjang, dengan mempedomani ketentuan peraturan yang berlaku.

Metode penilaian investasi permanen Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada masing-masing perusahaan BUMD per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Metode Penilaian Investasi Permanen

Uraian	Metode Penelitian	Keterangan
PT Bank Riau Kepri Syariah	Biaya	LK Unaudited
PT BPR Gemilang	Ekuitas	LK Unaudited
PT Gemilang Citra Mandiri	Ekuitas	Berhenti Operasi
PT RIAU AIRLINES (RAL)	Biaya	Berhenti Operasi
PDAM Tirta Indragiri	Ekuitas	LK Audited
PT. Kelapa Indragiri Hilir Gemilang	Ekuitas	LK Unaudited

PT. Gemilang Citra Mandiri, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 26 tahun 2004 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Indragiri Hilir tertanggal 17 Juli 2004 dan Akta Pendirian Perusahaan Notaris Hj. Isra Samianty, SH Nomor : 20 Tanggal 27 Desember 2004. Dalam Akte Pendirian disebutkan bahwa pendiri adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang diwakili oleh Bupati Indragiri Hilir dan Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir serta Pihak Ketiga yang juga disebutkan sebagai pemegang saham adalah Ny. Hj. Safni Zurianty, SH.

PT. GCM berdiri dengan jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, dengan kegiatan usaha mencakup Bidang Agrobisnis, Kehutanan, Industri, Konstruksi, Perdagangan, Jasa dan Usaha Lainnya yang mempunyai potensi ekonomi. Modal Dasar Perusahaan sebagaimana dijelaskan dalam Akte Notaris adalah sebesar Rp8.400.000.000,00 yang terdiri atas 8.400.000 lembar saham dengan nilai perlembar saham Rp1.000,00. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan modal disetor sebesar Rp4.620.000.000,00.

Komposisi Kepemilikan Saham
PT. GEMILANG CITRA MANDIRI (PT. GCM)

No	Pemegang Saham	Jumlah Setoran Modal	% Kepemilikan
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Rp 4.200.000.000,00	90,00%
2	Ny. Hj. Safni Zurianty, SH	Rp 420.000.000,00	10,00%
	Jumlah	Rp 4.620.000.000,00	100,00%



Kondisi saat ini, PT. GCM sudah tidak beroperasi sejak tahun 2007, dan saat ini sedang berlangsung proses hukum Pengurus Perseroan. Setelah masa inkrah pemerintah selaku pemegang saham pengendali akan melakukan rapat khusus terkait penyelesaian dan masa depan Badan Usaha Milik Daerah PT. Gemilang Citra Mandiri.

Permasalahan Hukum yang sedang dijalani pengurus perseroan PT. Gemilang Citra Mandiri adalah terkait tindak pidana korupsi dalam penyertaan modal pada BUMD PT. GCM tahun 2004, 2005, 2006. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka perhitungan kerugian negara atas penyertaan modal pada BUMD Kabupaten Indragiri Hilir PT. GCM tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 Nomor : 17/LHP/XXI/06/2024 tanggal 27 Juni 2024 dan telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang nyata sebesar Rp1.157.280.695,00 (satu miliar seratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah). (Sumber putusan Nomor 58/Pid-Sus-TPK/2024/PNPBR).

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.3 ASET TETAP	3.423.937.505.393,04	3.334.655.913.186,39

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 pada Neraca sebelum penyusutan sebesar Rp6.454.611.201.663,17 dengan nilai akumulasi penyusutan senilai Rp(3.119.955.288.476,79) sehingga total aset tetap setelah penyusutan sebesar Rp3.334.655.913.186,39 dan Saldo Aset Tetap berdasarkan Kertas Kerja Perolehan Aset Tetap sebesar Rp6.454.611.201.663,17 dengan nilai akumulasi penyusutan senilai Rp(3.119.955.288.476,79) sehingga total aset tetap setelah penyusutan sebesar Rp3.334.655.913.186,39. Sedangkan Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 pada Neraca sebelum penyusutan sebesar Rp6.761.503.484.433,75 dengan nilai akumulasi penyusutan senilai Rp(3.337.565.979.040,71) sehingga total aset tetap setelah penyusutan sebesar Rp3.423.937.505.393,04 dan Saldo Aset Tetap berdasarkan Kertas Kerja Perolehan Aset Tetap sebesar Rp6.761.503.484.433,75 dengan nilai akumulasi penyusutan senilai Rp(3.337.565.979.040,71) sehingga total aset tetap setelah penyusutan sebesar Rp3.423.937.505.393,04. Sebagaimana daftar mutasi penambahan aset tetap sebagaimana disajikan didalam Kertas Kerta Mutasi tambah kurang aset pada daftar lampiran 14.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.334.655.913.186,39 dan Rp3.423.937.505.393,04. Saldo Aset Tetap tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp89.281.592.206,66 dibanding Aset Tetap tahun 2024. Rincian Aset Tetap tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Tanah	549.826.273.096,10	536.045.134.306,10
Peralatan dan Mesin	1.049.254.786.209,34	991.439.091.790,33
Gedung dan Bangunan	1.850.658.469.830,20	1.740.713.897.617,74
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.857.291.468.337,25	2.708.553.692.673,29
Aset Tetap Lainnya	13.637.546.843,51	14.589.136.193,51
Konstruksi Dalam Pengerjaan	440.834.940.117,35	463.270.249.082,20
Akumulasi Penyusutan	(3.337.565.979.040,71)	(3.119.955.288.476,79)
	3.423.937.505.393,04	3.334.655.913.186,39

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Per 31 Desember 2024 tersebut meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. Penambahan dan pengurangan nilai Aset Tetap disajikan dengan entry data dan klasifikasi Aset pada Aplikasi Sistem SIPD e-BMD. Saldo dan mutasi dari masing-masing kelompok Aset Tetap Per 31 Desember 2024 tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap dapat dijelaskan pada Lampiran 14

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.3.1 TANAH	549.826.273.096,10	536.045.134.306,10

Saldo Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2023 sebesar Rp536.045.134.306,10 mengalami penambahan ditahun 2024 senilai Rp17.669.616.790,00 yang terdiri dari hibah masuk, mutasi antar SKPD koreksi aset yang belum tercatat serta mengalami pengurangan senilai Rp3.888.478.000,00 yang terdiri dari Hibah keluar sebesar mutasi antar SKPD sehingga Saldo Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2024 sebesar Rp549.826.273.096,10. Adapun rincian mutasi tambah kurang aset tanah pada SKPD adalah sebagai berikut :

Nama SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Dinas Pendidikan	103.922.034.536,00	3.343.650.000,00	0,00	107.265.684.536,00
Dinas Kesehatan	13.021.699.048,00	0,00	0,00	13.021.699.048,00
Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan	9.736.800.000,00	0,00	0,00	9.736.800.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa	2.250.000.000,00	0,00	0,00	2.250.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	92.397.558.989,00	0,00	0,00	92.397.558.989,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	26.289.142.428,31	0,00	0,00	26.289.142.428,31
Satuan Polisi Pamong Praja	750.000.000,00	0,00	0,00	750.000.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	825.000.000,00	0,00	0,00	825.000.000,00
Dinas Sosial	2.170.500.000,00	0,00	0,00	2.170.500.000,00
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	1.978.525.000,00	0,00	543.900.000,00	1.434.625.000,00
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	17.626.593.500,00	246.400.000,00	0,00	17.872.993.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	702.000.000,00	0,00	0,00	702.000.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	838.750.000,00	0,00	0,00	838.750.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.559.856.000,00	0,00	0,00	1.559.856.000,00
Dinas Perhubungan	36.679.747.500,00	4.490.000,00	0,00	36.684.237.500,00
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	193.600.000,00	0,00	0,00	193.600.000,00
Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	416.289.000,00	0,00	0,00	416.289.000,00
Dinas Perikanan	1.235.678.606,00	0,00	0,00	1.235.678.606,00
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	15.756.974.800,00	0,00	0,00	15.756.974.800,00
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	9.303.236.091,00	10.726.263.790,00	0,00	20.029.499.881,00
Dinas Perkebunan	104.842.500,00	0,00	0,00	104.842.500,00
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	8.421.025.000,00	0,00	0,00	8.421.025.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	187.200.000,00	0,00	0,00	187.200.000,00
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	77.075.531.082,79	3.274.813.000,00	3.344.578.000,00	77.005.766.082,79
Badan Pendapatan Daerah	2.463.740.000,00	0,00	0,00	2.463.740.000,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	1.300.500.000,00	0,00	0,00	1.300.500.000,00
Inspektorat Daerah	1.507.019.000,00	0,00	0,00	1.507.019.000,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	192.000.000,00	0,00	0,00	192.000.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	666.000.000,00	0,00	0,00	666.000.000,00
Sekretariat Daerah	27.702.174.225,00	0,00	0,00	27.702.174.225,00
Sekretariat DPRD	28.536.194.000,00	0,00	0,00	28.536.194.000,00
Kecamatan Tembilahan	3.418.560.000,00	0,00	0,00	3.418.560.000,00
Kecamatan Tembilahan Hulu	2.253.700.000,00	0,00	0,00	2.253.700.000,00
Kecamatan Tempuling	1.136.620.000,00	0,00	0,00	1.136.620.000,00
Kecamatan Batang Tuaka	2.909.180.000,00	0,00	0,00	2.909.180.000,00
Kecamatan Concong	549.000.000,00	0,00	0,00	549.000.000,00
Kecamatan Enok	1.832.270.000,00	0,00	0,00	1.832.270.000,00
Kecamatan Gaung	948.050.000,00	0,00	0,00	948.050.000,00
Kecamatan Gaung Anak Serka	2.084.970.000,00	0,00	0,00	2.084.970.000,00
Kecamatan Kateman	685.275.000,00	0,00	0,00	685.275.000,00
Kecamatan Kempas	18.455.130.000,00	0,00	0,00	18.455.130.000,00
Kecamatan Kemuning	5.004.028.000,00	0,00	0,00	5.004.028.000,00
Kecamatan Keritang	1.348.250.000,00	0,00	0,00	1.348.250.000,00
Kecamatan Kuala Indragiri	247.300.000,00	0,00	0,00	247.300.000,00
Kecamatan Mandah	176.785.000,00	0,00	0,00	176.785.000,00
Kecamatan Pelangiran	392.775.000,00	0,00	0,00	392.775.000,00
Kecamatan Pulau Burung	393.560.000,00	0,00	0,00	393.560.000,00
Kecamatan Reteh	397.950.000,00	74.000.000,00	0,00	471.950.000,00
Kecamatan Sungai Batang	313.325.000,00	0,00	0,00	313.325.000,00
Kecamatan Tanah Merah	1.529.050.000,00	0,00	0,00	1.529.050.000,00
Kecamatan Teluk Belengkong	5.859.145.000,00	0,00	0,00	5.859.145.000,00
Jumlah	536.045.134.306,10	17.669.616.790,00	3.888.478.000,00	549.826.273.096,10

Saldo Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2023 sebesar Rp536.045.134.306,10 dengan jumlah tanah sebanyak 2.524 bidang dengan luas mengalami penambahan jumlah bidang tanah sebanyak 23 bidang sebesar Rp17.669.616.790,00 serta mengalami pengurangan sebanyak 3 bidang sebesar Rp3.888.478.000,00 yang terdiri dari :



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Penambahan 23 bidang tanah senilai Rp17.669.616.790,00 dengan uraian sebagai berikut :

2 bidang sebesar Rp3.343.650.000,00 Dinas Pendidikan yang dari Pengalihan status Pengelola Barang Milik Daerah yang terdiri dari 1 bidang Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan senilai Rp398.400.000,00 yang berlokasi Jalan Soebrantas dan 1 bidang Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan senilai Rp2.945.250.000,00 yang berlokasi Jalan Provinsi Kel. Tembilahan Barat.

1 bidang senilai Rp246.400.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Naskah Hibah Nomor : 000.2.5/BPKAD/5084, Nomor : 00.2.5/2100/BPKAD-BMD tanggal 4 Desember 2024 dan Berita Acara Serah Terima Nomor : 000.2.5/BPKAD/5085, Nomor : 00.2.5/2099/BPKAD-BMD tanggal 4 Desember 2024

2 bidang senilai Rp4.490.000,00 pada Dinas Perhubungan yang merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Naskah Hibah Nomor : 000.2.5/BPKAD/5084, Nomor : 00.2.5/2100/BPKAD-BMD tanggal 4 Desember 2024 dan Berita Acara Serah Terima Nomor : 000.2.5/BPKAD/5085, Nomor : 00.2.5/2099/BPKAD-BMD tanggal 4 Desember 2024. 2 bidang dimaksud terdiri dari 1 bidang Tanah Bangunan Kantor LLASDP Teluk Kiambang senilai Rp2.490.000,00 dan 1 bidang Tanah Bangunan Kantor LLASDP Pulau Kijang senilai Rp2.000.000,00

6 bidang senilai Rp10.726.263.790,00 pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan yang terdiri dari 3 bidang senilai 10.261.173.990,00 bersumber dari hibah Pemerintah Provinsi Riau dan 3 bidang senilai Rp465.089.800,00 merupakan koreksi aset tanah yang belum tercatat berdasarkan hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah.

10 bidang senilai Rp3.274.813.000,00 pada Pengelola Barang Milik Daerah yang terdiri dari 3 bidang tanah senilai Rp1.289.925.000,00 merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi Riau dan 6 bidang senilai Rp1.440.988.000,00 merupakan koreksi atas tanah yang belum tercatat berdasarkan hasil inventarisasi barang milik daerah dan 1 bidang 1 Bidang senilai Rp543.900.000,00 merupakan pengalihan status tanah BLKI dari Dinas Ketenagaan

2 bidang senilai Rp74.000.000,00 pada Kecamatan Rethel merupakan hibah tanah dari Pemerintah Desa yang terdiri dari apangan Upacara Desa Sanglar senilai Rp70.000.000,00 dan 1 bidang tanah dari Pemerintah Desa Seberang Pulau Kijang senilai Rp4.000.000,00 berdasar Berita Acara Serah Terima Nomor : 02/SH/PEM-SPK/I/2024 tanggal 23 Januari 2024.

Serta mengalami pengurangan jumlah bidang tanah sebanyak 4 bidang senilai Rp3.888.478.000,00 yang terdiri dari :

1 Bidang senilai Rp543.900.000,00 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dialihstatuskan ke Pengelola Barang Milik Daerah

1 Bidang senilai Rp928.000,00 pada Pengelola Barang Milik Daerah merupakan hibah keluar tanah Sekretariat PMI berdasarkan Naskah Hibah antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Palang Merah Indonesia Nomor : 25/NHBMD/BKAD-BMD, Nomor : 83/01.03.07/PMIKab.Inhil/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 dan Berita Acara Serah Terima Nomor : 26/NHBMD/BKAD-BMD, Nomor : 84/01.03.07/PMIKab.Inhil/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024.

2 bidang senilai 3.343.650.000 pada Pengelola Barang Milik Daerah yang dialihstatuskan ke Dinas Pendidikan.

Sehingga jumlah bidang tanah per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 2.539 bidang tanah dengan nilai senilai Rp548.691.957.096,10 (2.539=2.524+19-4).

Adapun terkait informasi dokumen kepemilikan tanah bahwa berdasarkan Buku Inventaris Barang Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir per 31 Desember 2023 dari 2.524 bidang tanah yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 310 bidang telah bersertifikat (dengan dokumen kepemilikan berupa 112 sertifikat asli, 56 Duplikat Sertifikat, 5 Salinan Sertifikat dan 137 Salinan buku tanah) 25 bidangSKGR, Surat Pernyataan Kepala Daerah, Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan, Surat Hibah, 29 Salinan SKGR, Surat Pernyataan Kepala Daerah, Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan, Surat Hibah dan 2.160 belum bersertifikat.

Sedangkan untuk dokumen kepemilikan Per 31 Desember 2024 jumlah Bidang Tanah yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang Milik Pemerintah Daerah adalah sebanyak 2.543 bidang. Adapun terkait informasi dokumen Kepemilikan Tanah terdapat penambahan sebanyak 9 sertipikat tanah yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi, 3 sertipikat tanah yang diperoleh dari hasil inventarisasi/rekonsiliasi dan 6 dokumen Lainnya serta mengalami pengurangan 1 sertipikat tanah karena hibah ke Palang Merah Indonesia sehingga Per 31 Desember 2024 dari 2.543 bidang tanah terdapat 321 bidang tanah telah bersertipikat, 64 bidang tanah dengan Dokumen Lainnya dan 2.158 bidang tanah belum bersertipikat.

Penambahan Nilai Tanah sebesar Rp16.609.300.790,00 adalah sebagai berikut:

Hibah Masuk	Rp	11.875.988.990,00
Mutasi Antar SKPD	Rp	3.887.550.000,00
Utang Belanja 2023	Rp	0,00
Koreksi Aset yang belum tercatat	Rp	1.906.077.800,00
Penambahan Bersih Nilai Aset Tanah	Rp	17.669.616.790,00

- 1 Penambahan sebesar Rp11.875.988.990,00 pada hibah masuk dari Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Naskah Hibah Nomor : 000.2.5/BPKAD/5084, Nomor : 00.2.5/2100/BPKAD-BMD tanggal 4 Desember 2024 dan Berita Acara Serah Terima Nomor : 000.2.5/BPKAD/5085, Nomor : 00.2.5/2099/BPKAD-BMD tanggal 4 Desember 2024 terdiri dari :
- 1 bidang senilai Rp246.400.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan merupakan Tanah kantor Dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan berlokasi di Jalan Veteran Tembilahan.
- 2 bidang senilai Rp4.490.000,00 pada Dinas Perhubungan yang terdiri dari 1 bidang Tanah Bangunan Kantor LLASDP Teluk Kiambang senilai Rp2.490.000,00 dan 1 bidang Tanah Bangunan Kantor LLASDP Pulau Kijang senilai Rp2.000.000,00
- 3 bidang senilai 10.261.173.990,00 pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang terdiri dari 1 bidang senilai Rp359.424.000,00 merupakan Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan (Rumah Dinas Eks Dinas Peternakan) yang berlokasi di Jalan Baharuddin Yusuf Tembilahan, 1 bidang senilai Rp4.925.749.990,00 merupakan Tanah Sawah yang berlokasi di Pekan Arba Tembilahan dan 1 bidang senilai Rp4.976.000.000,00 merupakan Tanah Sawah yang berlokasi di Pekan Arba Tembilahan.
- 1 bidang senilai 1.289.925.000,00 pada Pengelola Barang Milik Daerah merupakan tanah Kantor Baznas yang berlokasi di Jalan M. Boya Tembilahan dan 2 bidang senilai Rp74.000.000,00 pada Kecamatan Rethel merupakan hibah tanah dari Pemerintah Desa yang terdiri dari apangan Upacara Desa Sanglar senilai Rp70.000.000,00 dan 1 bidang tanah dari Pemerintah Desa Seberang Pulau Kijang senilai Rp4.000.000,00 berdasar Berita Acara Serah Terima Nomor : 02/SH/PEM-SPK/I/2024 tanggal 23 Januari 2024.

Nama SKPD	Hibah Masuk (Rp)
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	246.400.000,00
Dinas Perhubungan	4.490.000,00



Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	10.261.173.990,00
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	1.289.925.000,00
Kecamatan Reteh	74.000.000,00
TOTAL	11.875.988.990,00

2 Penambahan sebesar Rp3.887.550.000,00 pada mutasi antar SKPD merupakan 2 Bidang senilai Rp3.343.650.000,00 berupa Tanah Pendidikan dan Latihan pada Dinas Pendidikan yang diperoleh dari Pengelola Barang Milik Daerah dan 1 bidang senilai Rp543.900.000,00 berupa tanah bangunan BLKI pada Pengelola Barang Milik Daerah yang diperoleh dari Dinas Tenga Kerja dan Transmigrasi.

Nama SKPD	Mutasi Antar SKPD (Rp)
Dinas Pendidikan	3.343.650.000,00
Pengelola Barang Milik Daerah	543.900.000,00
TOTAL	3.887.550.000,00

3 Penambahan sebesar Rp1.906.077.800,00 pada Koreksi Aset yang belum tercatat merupakan pencatatan tanah berdasarkan hasil inventarisasi Barang Milik Daerah yang terdiri dari :

3 bidang senilai Rp465.089.800,00 pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang terdiri dari 1 bidang senilai Rp35.000.000,00 merupakan Tanah Kantor Eks UPT DKP Kec. Sungai Batang, 1 bidang senilai Rp30.786.000,00 merupakan Tanah Kantor Eks UPT DKP Kec. Kemuning dan 1 bidang senilai Rp399.303.800,00 merupakan Tanah Sawah Lahan Pertanian yang berlokasi ke Kecamatan Gaung Anak Serka.

6 bidang senilai Rp380.672.000,00 pada Pengelola Barang Milik Daerah yang terdiri dari 1 bidang senilai Rp93.952.000,00 merupakan Tanah Kosong yang berlokasi di Jalan Soebrantas Gang Pantai Ceria dan 1 bidang senilai Rp286.720.000,00 merupakan Eks Tanah Kuburan yang berlokasi di Jalan Telaga Biru Parit 10 Tembilahan 4 bidang senilai Rp1.060.316.000,00 merupakan pencatatan tanah kosong yang berlokasi di Jalan Pemda Parit 17 Tembilahan.

Nama SKPD	Koreksi Aset yang belum tercatat
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	465.089.800,00
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	1.440.988.000,00
TOTAL	1.906.077.800,00

Rincian Pengurangan bersih aset tanah sebesar Rp3.888.478.000,00.

Pengurangan aset tanah sebesar Rp3.888.478.000,00 terdiri dari :

Hibah Keluar	Rp	928.000,00
Mutasi Antar SKPD	Rp	3.887.550.000,00
Pengurangan Bersih Nilai Aset Tanah	Rp	3.888.478.000,00

Pengurangan Aset Tanah sebesar Rp3.888.478.000,00 terdiri dari :

1 Pengurangan Aset Tetap Tanah senilai Rp928.000,00 pada hibah keluar terdiri dari :

merupakan hibah keluar tanah Sekretariat PMI berdasarkan Naskah Hibah antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Palang Merah Indonesia Nomor : 25/NHBMD/BKAD-BMD, Nomor : 83/01.03.07/PMIKab.Inhil/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 dan Berita Acara Serah Terima Nomor : 26/NHBMD/BKAD-BMD, Nomor : 84/01.03.07/PMIKab.Inhil/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024.

Nama SKPD	Hibah Keluar (Rp)
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	928.000,00
TOTAL	928.000,00

2 Pengurangan Aset Tetap Tanah pada Mutasi antar SKPD sebesar Rp3.887.550.000,00 pada mutasi antar SKPD merupakan 2 Bidang senilai Rp3.343.650.000,00 berupa Tanah Pendidikan dan Latihan pada Dinas Pendidikan yang diperoleh dari Pengelola Barang Milik Daerah dan 1 bidang senilai Rp543.900.000,00 berupa tanah bangunan BLKI pada Pengelola Barang yang diperoleh dari Dinas Tenga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor : 000.3/09/Nakertrans dan Nomor : 011/BA/BKAD-BMD/2024 tanggal 12 Juni 2024.

Nama SKPD	Mutasi antar SKPD (Rp)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	543.900.000
Pengelola Barang Milik Daerah	3.343.650.000
TOTAL	3.887.550.000,00

5.3.1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
		1.049.254.786.209,34	991.439.091.790,33



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023 sebesar Rp991.439.091.790,33 mengalami penambahan sebesar Rp67.480.154.496,01 yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Kapitalisasi Belanja Pegawai 2024 (Biaya Perolehan), Kapitalisasi Belanja Barang Jasa 2024 (Biaya Perolehan), Belanja Barang Jasa dan Lainnya menjadi Aset, Penambahan Barang Hibah, Mutasi antar SKPD, Penambahan Honor Pokja. Aset Tetap Peralatan dan Mesin juga mengalami pengurangan senilai Rp9.684.440.077,00 yang terdiri dari Koreksi Kesalahan Pencatatan, Mutasi antar SKPD, Dicatat pada Persediaan, Dicatat pada Daftar ekstrakomptabel (Tidak memenuhi Batas Kapitalisasi Aset Tetap), Pelunasan Hutang, Reklas Ke Aset Lainnya. Sehingga Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.049.234.806.209,34.

Nama SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Dinas Pendidikan	156.020.516.827,71	30.861.351.250,00	1.723.220.070,00	185.158.648.007,71
Dinas Kesehatan	188.639.154.238,43	12.425.152.212,00	527.690.495,00	200.536.615.955,43
Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan	117.982.010.858,98	6.339.459.274,00	590.374.499,00	123.731.095.633,98
Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung	30.172.467.397,56	1.585.522.031,00	34.389.111,00	31.723.600.317,56
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa	54.479.088.751,12	1.575.521.250,00	0,00	56.054.610.001,12
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	12.509.419.722,86	703.500.000,00	0,00	13.212.919.722,86
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	6.537.572.974,49	74.993.000,00	0,00	6.612.565.974,49
Satuan Polisi Pamong Praja	5.082.070.840,00	0,00	0,00	5.082.070.840,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	15.690.682.249,00	1.837.018.820,00	0,00	17.527.701.069,00
Dinas Sosial	2.545.912.027,00	29.190.800,00	8.312.800,00	2.566.790.027,00
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	3.170.068.108,00	109.063.716,00	0,00	3.279.131.824,00
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	14.874.446.959,59	1.926.612.190,80	7.575.500,00	16.793.483.650,39
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	6.885.685.595,00	243.581.186,00	0,00	7.129.266.781,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3.941.182.450,00	72.969.000,00	0,00	4.014.151.450,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.505.807.277,00	117.455.000,00	970.000,00	3.622.292.277,00
Dinas Perhubungan	23.044.828.633,81	354.471.545,00	41.018.600,00	23.358.281.578,81
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	6.910.964.288,01	277.905.500,00	24.377.000,00	7.164.492.788,01
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	2.042.339.650,00	55.987.000,00	7.630.000,00	2.090.696.650,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.565.808.938,00	0,00	60.942.000,00	4.504.866.938,00
Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	3.882.138.805,00	293.159.739,00	0,00	4.175.298.544,00
Dinas Perikanan	7.122.145.585,00	52.922.150,00	12.453.250,00	7.162.614.485,00
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	5.970.483.446,00	549.094.550,00	0,00	6.519.577.996,00
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	8.809.254.388,00	0,00	0,00	8.809.254.388,00
Dinas Perkebunan	48.842.188.163,25	65.190.300,00	22.721.700,00	48.884.656.763,25
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	6.963.958.404,00	159.908.252,00	0,00	7.123.866.656,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.055.064.840,92	402.069.000,00	7.440.000,00	7.449.693.840,92
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	31.797.680.027,00	636.233.080,00	2.280.189.430,00	30.153.723.677,00
Badan Pendapatan Daerah	8.696.047.290,00	317.205.440,00	0,00	9.013.252.730,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Badan Keuangan Dan Aset Daerah	5.699.427.545,00	1.537.255.000,00	8.060.000,00	7.228.622.545,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.405.195.636,43	111.707.025,00	0,00	5.516.902.661,43
Inspektorat Daerah	2.821.483.896,43	592.062.000,00	20.385.000,00	3.393.160.896,43
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.611.341.281,43	250.324.000,00	0,00	3.861.665.281,43
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.020.064.630,67	25.701.351,00	0,00	25.045.765.981,67
Sekretariat Daerah	98.784.190.238,00	611.725.974,21	1.862.024.832,00	97.533.891.380,21
Sekretariat Dprd	33.939.096.523,00	2.615.010.030,00	2.021.748.630,00	34.532.357.923,00
Kecamatan Tembilahan	3.120.943.400,00	76.645.500,00	0,00	3.197.588.900,00
Kecamatan Tembilahan Hulu	1.640.823.948,00	8.100.000,00	193.269.080,00	1.455.654.868,00
Kecamatan Tempuling	2.235.597.107,00	74.372.500,00	325.000,00	2.309.644.607,00
Kecamatan Batang Tuaka	1.216.418.060,00	2.600.000,00	0,00	1.219.018.060,00
Kecamatan Concong	858.377.199,37	5.750.000,00	0,00	864.127.199,37
Kecamatan Enok	2.343.859.500,00	21.065.600,00	0,00	2.364.925.100,00
Kecamatan Gaung	1.747.425.120,00	20.000.000,00	0,00	1.767.425.120,00
Kecamatan Gaung Anak Serka	1.676.695.057,27	2.000.000,00	0,00	1.678.695.057,27
Kecamatan Kateman	1.520.295.400,00	22.200.000,00	0,00	1.542.495.400,00
Kecamatan Kempas	1.265.477.942,00	15.400.000,00	0,00	1.280.877.942,00
Kecamatan Kemuning	1.230.779.125,00	195.346.930,00	193.269.080,00	1.232.856.975,00
Kecamatan Keritang	1.567.381.018,00	47.936.000,00	2.604.000,00	1.612.713.018,00
Kecamatan Kuala Indragiri	795.345.405,00	68.111.300,00	18.450.000,00	845.006.705,00
Kecamatan Mandah	1.058.627.900,00	0,00	0,00	1.058.627.900,00
Kecamatan Pelangiran	809.018.295,00	23.000.000,00	15.000.000,00	817.018.295,00
Kecamatan Pulau Burung	808.616.632,00	0,00	0,00	808.616.632,00
Kecamatan Reteih	1.180.700.900,00	36.785.000,00	0,00	1.217.485.900,00
Kecamatan Sungai Batang	1.453.808.295,00	36.000.000,00	0,00	1.489.808.295,00
Kecamatan Tanah Merah	1.203.656.600,00	5.000.000,00	0,00	1.208.656.600,00
Kecamatan Teluk Belengkong	685.456.400,00	30.500.000,00	0,00	715.956.400,00
Jumlah	991.439.091.790,33	67.500.134.496,01	9.684.440.077,00	1.049.254.786.209,34

Jumlah tersebut merupakan Aset Tetap – Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari :

Jenis	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024(Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Alat Besar	71.258.682.343,92	0,00	0,00	71.258.682.343,92
Alat Angkutan	211.867.243.987,47	5.557.063.275,80	7.187.419.090,00	210.236.888.173,27
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	8.808.116.440,89	56.330.679,00	3.404.229,00	8.861.042.890,89
Alat Pertanian	3.557.753.172,59	1.750.000,00	350.000,00	3.559.153.172,59
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	198.319.962.635,43	25.477.044.357,21	1.977.129.950,00	221.819.877.042,64
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	37.277.574.487,75	1.946.562.335,00	17.646.635,00	39.206.490.187,75
Alat Kedokteran Dan Kesehatan	246.867.615.356,84	15.869.755.483,00	153.482.299,00	262.583.888.540,84
Alat Laboratorium	49.960.872.409,32	738.093.558,00	135.246.970,00	50.563.718.997,32
Alat Persenjataan	3.588.392.897,00	0,00	0,00	3.588.392.897,00
Komputer	154.850.555.494,91	17.546.373.216,00	140.597.304,00	172.256.331.406,91
Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Pengeboran	84.032.000,00	0,00	0,00	84.032.000,00
Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	0,00	2.195.000,00	2.195.000,00	0,00
Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Keselamatan Kerja	784.164.155,00	56.676.892,00	0,00	840.841.047,00
Alat Peraga	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Peralatan Proses/Produksi	238.025.473,75	0,00	0,00	238.025.473,75
Rambu - Rambu	170.572.328,00	41.018.600,00	41.018.600,00	170.572.328,00
Peralatan Olah Raga	3.802.528.607,46	207.271.100,00	25.950.000,00	3.983.849.707,46
Jumlah	991.439.091.790,33	67.500.134.496,01	9.684.440.077,00	1.049.254.786.209,34

Penambahan bersih nilai Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp67.500.134.496,01 berasal dari :



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	54.178.362.278,21
Kapitalisasi Belanja Pegawai 2024 (Biaya Perolehan)	Rp	263.336.000,00
Kapitalisasi Belanja Barang Jasa 2024 (Biaya Perolehan)	Rp	278.050.497,00
Belanja Barang Jasa dan Lainnya menjadi Aset	Rp	0,00
Hibah Masuk	Rp	9.843.983.210,80
Mutasi antar SKPD	Rp	2.916.422.510,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	19.980.000,00
Koreksi Aset yang belum tercatat	Rp	0,00
Honor Pokja ULP	Rp	0,00
Koreksi Kesalahan Pencatatan Aset	Rp	0,00
Koreksi Reklasifikasi Aset	Rp	0,00
Beban Pemeliharaan	Rp	0,00
Penambahan Bersih Nilai Aset Peralatan dan Mesin	Rp	67.500.134.496,01

Penjelasan Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin terdiri dari :

Nama SKPD	Belanja Modal dan Reklasifikasi 2024 (Real SP2D) (Rp)
Dinas Pendidikan	30.506.814.640,00
Dinas Kesehatan	4.196.110.880,00
Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan	6.089.260.049,00
Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung	1.585.522.031,00
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa	1.569.131.250,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	703.500.000,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	69.226.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	1.834.298.820,00
Dinas Sosial	29.190.800,00
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	109.063.716,00
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	673.538.150,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	233.541.186,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	70.929.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	115.255.000,00
Dinas Perhubungan	112.279.045,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	271.785.500,00
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	55.987.000,00
Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	59.909.739,00
Dinas Perikanan	52.242.150,00
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	544.414.550,00
Dinas Perkebunan	65.190.300,00
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	159.908.252,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	402.069.000,00
Badan Pendapatan Daerah	301.325.440,00
Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.507.355.000,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	111.707.025,00
Inspektorat Daerah	592.062.000,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	250.324.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.701.351,00
Sekretariat Daerah	611.725.974,21
Sekretariat Dprd	766.943.530,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Kecamatan Tembilahan	76.645.500,00
Kecamatan Tembilahan Hulu	8.100.000,00
Kecamatan Tempuling	74.372.500,00
Kecamatan Batang Tuaka	2.600.000,00
Kecamatan Concong	5.750.000,00
Kecamatan Enok	19.935.600,00
Kecamatan Gaung	20.000.000,00
Kecamatan Gaung Anak Serka	2.000.000,00
Kecamatan Kateman	22.200.000,00
Kecamatan Kempas	15.400.000,00
Kecamatan Kemuning	8.500.000,00
Kecamatan Keritang	47.936.000,00
Kecamatan Kuala Indragiri	68.111.300,00
Kecamatan Pelangiran	23.000.000,00
Kecamatan Reteh	36.000.000,00
Kecamatan Sungai Batang	36.000.000,00
Kecamatan Tanah Merah	5.000.000,00
Kecamatan Teluk Belengkong	30.500.000,00
Jumlah	54.178.362.278,21

2 Penambahan Biaya Perolehan Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp263.336.000,00 diperoleh dari Kapitalisasi Biaya Perolehan dari Belanja Pegawai seperti Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa, Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa, Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan (PPTK). Adapun Rincian Biaya Perolehan Peralatan dan Mesin per SKPD dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Nama SKPD	Kapitalisasi Belanja 2024 Biaya Perolehan (Rp)
Dinas Pendidikan	109.781.000,00
Dinas Kesehatan	10.350.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa	6.390.000,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	4.660.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	2.720.000,00
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	2.880.000,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10.040.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.040.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.200.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	6.120.000,00
Dinas Perikanan	680.000,00
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	4.680.000,00
Badan Pendapatan Daerah	15.880.000,00
Badan Keuangan Dan Aset Daerah	29.900.000,00
Sekretariat Dprd	53.100.000,00
Kecamatan Enok	1.130.000,00
Kecamatan Reteh	785.000,00
Jumlah	263.336.000,00

3 Biaya Perolehan Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp278.050.497,00 diperoleh dari Barang Jasa yang dikapitalisasi sebagai Biaya Perolehan seperti Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan. Adapun Rincian Biaya Perolehan Peralatan dan Mesin per SKPD dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Nama SKPD	Kapitalisasi Belanja 2024 Barang Jasa (Rp)
Dinas Pendidikan	244.755.610,00
Dinas Kesehatan	32.187.887,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	1.107.000,00
Jumlah	278.050.497,00

4 Penambahan Aset Peralatan dan Mesin pada Hibah Masuk sebesar Rp9.843.983.210,80 terdiri dari :
Dinas Kesehatan sebesar Rp7.868.147.445,00 terdiri dari :



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Hibah dari Kementerian Kesehatan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor : KN.02.07/B.III/1227/2024 yang terdiri dari 480 unit Antropometri Kit senilai Rp4.991.774.400,00, 10 unit Hb Meter senilai Rp1.434.300,00, 56 unit Antropometri Kit senilai Rp459.718.518,00 dan 10 unit USG senilai Rp12.97.949.405,00.

Hibah dari Kementerian Kesehatan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor : KN.01.08/C.1/4861.78/2024 berupa 3 unit Speculum Model Kit Rp31.473.684,00.

Hibah dari Kementerian Kesehatan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor : KN.01.08./C.IV/ /2024 berupa 28 unit Alat Pemantau Suhu Vaksin senilai Rp40.832.000,00. 3 unit Cold Box / Vaccine Carrier senilai Rp31.837.074,00, 1 unit Vaccine Refrigerator Freezer senilai Rp112.508.064,00, 1 unit Temperator Loger senilai Rp6.000.000,00.

Hibah dari Kementerian Kesehatan berdasarkan berita acara serah terima Nomor : KN.01.08/C.IV/5564/2024 berupa 1 unit Cold Storage (Alat Pendingin) senilai Rp894.620.000,00

Rumah Sakit Puri Husada berupa 1 unit Ambulance senilai Rp250.199.225,00 yang diperoleh dari CSR Bank Negara Indonesia berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : TBH/5/1677A, Nomor : 028/RSUD-PERL/2610 tanggal 4 September 2023.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berupa 2 unit Kendaraan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lain-lain senilai Rp1.250.194.040,80 yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 000.2.5/BPKAD/5085, Nomor : 00.2.5/2099/BPKAD-BMD tanggal 4 Desember 2024.

Dinas Perhubungan berupa 1 unit Kendaraan Pick Up Ford Ranger Double Cabin / Hitam Metalik senilai Rp242.192.500,00 yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 000.2.5/BPKAD/5085, Nomor : 00.2.5/2099/BPKAD-BMD tanggal 4 Desember 2024.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah berupa 1 (satu) unit Mobil Unit Perpustakaan Keliling merk Mitsubishi BM 9204 AP yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 000.2.5/BPKAD/5085, Nomor : 00.2.5/2099/BPKAD-BMD tanggal 4 Desember 2024 senilai Rp233.250.000,00.

Selanjutnya dapat dijelaskan pada Lampiran 17

Nama SKPD	Hibah Masuk (Rp)
Dinas Kesehatan	7.868.147.445,00
Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan	250.199.225,00
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	1.250.194.040,80
Dinas Perhubungan	242.192.500,00
Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	233.250.000,00
Jumlah	9.843.983.210,80

5 Penambahan Peralatan dan Mesin dari Mutasi antar SKPD sebesar Rp2.916.422.510,00 dapat dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Adapun Rincian Mutasi antar SKPD adalah sebagai berikut :

Nama SKPD	Mutasi antar SKPD (Rp)
Dinas Kesehatan	298.376.000,00
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	636.233.080,00
Sekretariat DPRD	1.794.966.500,00
Kecamatan Kemuning	186.846.930,00
Jumlah	2.916.422.510,00

6 Penambahan Aset Peralatan dan Mesin merupakan Penambahan dari utang belanja tahun 2024 sebesar Rp19.980.000,00 pada Dinas Kesehatan berupa 1 unit AC 2 PK / Popytron pada CV Matrix Perkasa berdasarkan Nomor Pesanana Nomor : PO-333988-241212-1 tanggal 12 Desember 2024.

Nama SKPD	Utang Belanja 2024 (Rp)
Dinas Kesehatan	19.980.000,00
Jumlah	19.980.000,000

Pengurangan nilai Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp9.684.440.077,00 berasal dari :		
Penjualan/Lelang	Rp	3.570.827.500,00
Koreksi Reklasifikasi Aset	Rp	483.120,00
Mutasi antar SKPD	Rp	2.916.422.510,00
Dicatat pada Persediaan	Rp	425.476.882,00
Dicatat pada Daftar ekstrakomptabel (Tidak memenuhi Batas Kapitalisasi Aset Tetap)	Rp	1.862.175.486,00
Pelunasan Utang Tahun 2023	Rp	113.474.499,00
DED/ Konsultan/Pengecatan/ <i>software</i> menjadi Beban	Rp	13.428.000,00
Barang yang Kondisi Rusak Berat	Rp	782.152.080,00
Pengurangan Bersih Nilai Aset Peralatan dan Mesin	Rp	9.684.440.077,00



- 1 Pengurangan nilai Aset Tetap Peralatan Mesin dari Penghapusan karena penjualan langsung sebesar Rp3.570.827.500,00 meliputi :
- 1 unit Kendaraan Roda Empat dengan harga perolehan senilai Rp1.775.861.000,00 berupa Lexus RX300 Luxury 4X2 BM 1139 G pada Sekretariat Daerah merupakan Penjualan Langsung Kendaraan Perorangan Dinas Wakil Bupati Indragiri Hilir Periode 2018-2023 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : Kpts. 329/SEKDA/VII/HK-2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah atas Penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Wakil Bupati Indragiri Hilir periode 2018-2023.
- 2 unit Kendaraan Roda Empat dengan total harga perolehan sebesar Rp1.794.966.500,00 pada Sekretariat DPRD yang terdiri dari 1 unit Kendaraan Dinas Perorangan dengan harga perolehan sebesar Rp1.348.574.500,00 merk Toyota Jeep Land Cruiser Parado TXL BM 1411 G merupakan penjualan langsung kepada Mantan Ketua DPRD Kabupaten Indragiir Hilir periode 2019-2024 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kpts. 427/ SEKDA/XII/HK-2024 tanggal 30 Desember 2024, 1 unit Kendaraan Dinas Perorangan dengan harga perolehan sebesar Rp446.392.000,00 merk Mitsubishi Pajero Sport BM 1254 G merupakan penjualan langsung kepada Mantan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Indragiir Hilir periode 2019-2024 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kpts. 426/ SEKDA/XII/HK-2024 tanggal 30 Desember 2024

Nama SKPD	Penghapusan karena Penjualan/ Lelang (Rp)
Sekretariat Daerah	1.775.861.000,00
Sekretariat DPRD	1.794.966.500,00
Jumlah	3.570.827.500,00

- 2 Pengurangan Peralatan dan Mesin dari Koreksi Reklasifikasi Aset sebesar Rp483.120,00 pada Dinas Pendidikan merupakan Reklasifikasi Belanja Modal Bos Tahun 2023 yang tidak memenuhi batas kapitaslisasi aset tetap namun tercatat pada Intrakomtabel berupa 1 unit Bangku Sekolah.

Nama SKPD	Koreksi Reklasifikasi Aset (Rp)
Dinas Pendidikan	483.120,00
Jumlah	483.120,00

- 3 Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dicatat pada mutasi antar SKPD sebesar Rp2.916.422.510,00 merupakan pengurangan dari Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap sehingga dicatat sebagai Persediaan untuk rincian barang dapat dilihat pada lampiran Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sedangkan rincian per SKPD sebagai berikut :

Nama SKPD	Mutasi Antar SKPD (Rp)
Dinas Kesehatan	442.964.000,00
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	2.280.189.430,00
Kecamatan Kemuning	193.269.080,00
Jumlah	2.916.422.510,00

- 4 Pengurangan Aset yang dicatat pada daftar persediaan merupakan belanja modal yang masa manfaat atas belanja tersebut tidak mencapai 12 bulan sehingga dicatat sebagai persediaan sebesar Rp425.476.882,00 untuk rincian barang dapat dilihat pada Lampiran Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sedangkan rincian per SKPD sebagai berikut :
- Selanjutnya dijelaskan pada Lampiran 25

Nama SKPD	Dicatat pada Daftar Persediaan (Rp)
Dinas Pendidikan	93.879.020,00
Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung	14.157.400,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	970.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.440.000,00
Inspektorat Daerah	5.400.000,00
Sekretariat Daerah	76.202.832,00
Sekretariat Dprd	225.307.630,00
Kecamatan Keritang	2.120.000,00
Jumlah	425.476.882,00

- 5 Pengurangan Aset yang dicatat pada daftar ekstrakomptabel merupakan belanja modal yang dibawah kapitalisasi pengakuan aset tetap sebesar Rp1.862.175.486,00 untuk rincian barang dapat dilihat pada Lampiran Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sedangkan rincian per SKPD sebagai berikut :
- Selanjutnya dijelaskan pada Lampiran 26

Nama SKPD	Dicatat pada Daftar ekstrakomptabel (Rp)
Dinas Pendidikan	1.628.857.930,00
Dinas Kesehatan	84.726.495,00
Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung	6.803.711,00
Dinas Sosial	8.312.800,00
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	7.575.500,00
Dinas Perhubungan	41.018.600,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	24.377.000,00
Dinas Perikanan	12.453.250,00
Dinas Perkebunan	22.721.700,00
Badan Keuangan Dan Aset Daerah	8.060.000,00
Inspektorat Daerah	14.985.000,00
Sekretariat Dprd	1.474.500,00
Kecamatan Tempuling	325.000,00
Kecamatan Keritang	484.000,00
Jumlah	1.862.175.486,00

6 Pengurangan Aset pada Pelunasan Hutang Tahun 2023 sebesar Rp113.474.499,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada yang terdiri dari 1 set F.O LED Laryngoscope Handle Set Dewasa senilai Rp19.827.499,00, 1 set F.O LED Laryngoscope Handle Set Dewasa senilai Rp19.827.500,00, 1 unit Trolly Pembawa Makanan (Food Trolley) senilai Rp10.700.000,00, 5 unit Stetoscope Dewasa Litmen senilai Rp12.500.000,00, 5 unit Instrument Trolley senilai Rp14.150.000,00, 1 unit Digital Baby Scale 100 W (Accessories -Innoq Antrpop Set) senilai Rp10.039.500,00, 1 unit Mikroskop Biologi Trinokuler senilai Rp24.450.000,00 dan 2 unit Nebulizer senilai Rp1.980.000,00.

Nama SKPD	Dicatat pada Daftar ekstrakomptabel (Rp)
Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada	113.474.499,00
Jumlah	113.474.499,00

7 Pengurangan Nilai Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp13.428.000,00 dicatat sebagai beban merupakan realisasi belanja modal alat kantor berupaPembuatan nama-nama Akrilik Ruangan dan Stiker Akrilik. Belanja tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap sehingga di catat sebagai beban.

Nama SKPD	Reklas Ke DED/ Konsultan/Pengecatan/Sof tware menjadi Beban (Rp)
Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung	13.428.000,00
Jumlah	13.428.000,00

8 Pengurangan Nilai Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp782.152.080,00 merupakan koreksi reklasifikasi aset tetap dicatat sebagai rusak berat berdasarkan hasil temuan BPK dengan uraian sebagai berikut :

RSUD Puri Husada Tembilahan sebesar Rp476.900.000,00 yang terdiri dari 1 (satu) unit Mobil Ambulance senilai Rp237.000.000,00, 1 (satu) unit Mobil Jenazah senilai Rp237.000.000,00, 1 (satu) unit dispenser senilai Rp500.000,00 dan 1 (satu) unit Alat Kedokteran Keluarga Berencana Lain-lain senilai Rp2.400.000,00.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp7.630.000,00 merupakan 4 (empat) unit Meja kerja

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp60.942.000,00 merupakan 9 (sembilan) unit Netbook
Sekretariat Daerah sebesar Rp9.961.000,00 merupakan 4 (empat) unit Alat Penghancur Kertas
Kecamatan Tembilahan Hulu sebesar Rp193.269.080,00 merupakan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lain-Lain merk Chevrolet Spin 1.5 LTZ AT
Kecamatan Kuala Indragiri sebesar Rp18.450.000,00 merupakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 100 TD senilai 13.700.000,00 dan 1 (satu) unit Sofa senilai Rp4.750.000,00.
Kecamatan Pelangiran sebesar Rp15.000.000,00 merupakan 1 (satu) unit Sepeda Motor.

Nama SKPD	Barang yang Kondisi Rusak Berat (Rp)
Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan	476.900.000,00
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	7.630.000,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	60.942.000,00
Sekretariat Daerah	9.961.000,00
Kecamatan Tembilahan Hulu	193.269.080,00
Kecamatan Kuala Indragiri	18.450.000,00
Kecamatan Pelangiran	15.000.000,00
Jumlah	782.152.080,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2023 senilai Rp1.740.713.897.617,74 mengalami mutasi penambahan senilai Rp110.828.196.726,45 yang terdiri dari Belanja Modal 2024 (Real SP2D), Kapitalisasi Belanja Pegawai 2024 (Biaya Perolehan) , Kapitalisasi Belanja Barang Jasa 2024 (Biaya Perolehan), Belanja Barang Jasa dan Lainnya menjadi Aset, hibah masuk, mutasi antar SKPD, utang belanja, Honor Pokja ULP, dan mutasi Pengurangan senilai Rp883.624.513,99 yang terdiri dari Penjualan/Lelang, Koreksi Reklasifikasi Aset, Mutasi antar SKPD, Dicatat pada Daftar ekstrakomptabel (Tidak memenuhi Batas Kapitalisasi Aset Tetap) dan Pemeliharaan, Pelunasan Utang Tahun 2022, DED/Pengecatan/Software menjadi Beban, sehingga nilai aset Gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 senilai Rp1.850.658.469.830,20.

Nama SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Dinas Pendidikan	776.295.715.681,18	53.323.268.495,99	0,00	829.618.984.177,17
Dinas Kesehatan	139.452.451.540,87	15.117.067.450,41	37.257.581,99	154.532.261.409,29
Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan	28.426.748.822,00	2.079.769.812,51	0,00	30.506.518.634,51
Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung	18.882.407.160,73	180.143.500,00	0,00	19.062.550.660,73
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa	26.847.897.586,25	7.258.585.380,00	0,00	34.106.482.966,25
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	21.587.058.585,96	20.480.760.473,22	0,00	42.067.819.059,18
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	126.328.639.903,31	0,00	0,00	126.328.639.903,31
Satuan Polisi Pamong Praja	2.411.259.337,50	0,00	0,00	2.411.259.337,50
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	1.121.619.366,87	0,00	0,00	1.121.619.366,87
Dinas Sosial	3.138.973.493,44	0,00	0,00	3.138.973.493,44
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	1.704.490.298,10	0,00	563.632.000,00	1.140.858.298,10
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	12.236.145.218,95	0,00	0,00	12.236.145.218,95
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.246.918.600,00	0,00	0,00	1.246.918.600,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3.162.986.942,00	121.476.000,00	0,00	3.284.462.942,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	5.297.302.671,00	2.012.886.200,00	0,00	7.310.188.871,00
Dinas Perhubungan	122.425.137.422,61	184.590.404,00	0,00	122.609.727.826,61
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	1.721.838.000,00	49.954.000,00	0,00	1.771.792.000,00
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	989.287.000,00	0,00	0,00	989.287.000,00
Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	26.005.318.498,07	24.091.900,00	0,00	26.029.410.398,07
Dinas Perikanan	6.965.299.263,00	0,00	0,00	6.965.299.263,00
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	108.545.058.991,51	8.367.114.931,00	58.760.000,00	116.853.413.922,51
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	11.693.420.171,23	419.680.179,89	0,00	12.113.100.351,12
Dinas Perkebunan	3.033.408.625,00	0,00	0,00	3.033.408.625,00
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	48.514.416.881,21	0,00	0,00	48.514.416.881,21
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.151.684.900,00	0,00	0,00	2.151.684.900,00
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	14.029.028.564,00	613.629.247,00	163.350.000,00	14.479.307.811,00
Badan Pendapatan Daerah	3.281.956.109,63	48.396.932,00	48.396.932,00	3.281.956.109,63
Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.528.558.700,00	0,00	0,00	1.528.558.700,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	1.392.337.660,00	0,00	0,00	1.392.337.660,00
Inspektorat Daerah	2.147.281.129,00	0,00	0,00	2.147.281.129,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.046.054.201,48	0,00	0,00	1.046.054.201,48
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.063.352.800,00	0,00	0,00	1.063.352.800,00
Sekretariat Daerah	103.555.606.505,95	0,00	0,00	103.555.606.505,95
Sekretariat Dprd	52.894.559.764,00	0,00	0,00	52.894.559.764,00
Kecamatan Tembilahan	3.316.615.628,50	0,00	0,00	3.316.615.628,50
Kecamatan Tembilahan Hulu	1.881.465.179,00	0,00	0,00	1.881.465.179,00
Kecamatan Tempuling	4.039.458.665,00	0,00	0,00	4.039.458.665,00
Kecamatan Batang Tuaka	2.913.811.170,00	0,00	0,00	2.913.811.170,00
Kecamatan Concong	3.732.963.499,00	105.425.478,00	5.950.000,00	3.832.438.977,00
Kecamatan Enok	4.364.923.950,00	6.278.000,00	6.278.000,00	4.364.923.950,00
Kecamatan Gaung	3.584.988.030,00	0,00	0,00	3.584.988.030,00
Kecamatan Gaung Anak Serka	4.632.041.900,00	96.190.000,00	0,00	4.728.231.900,00
Kecamatan Kateman	1.986.803.900,00	0,00	0,00	1.986.803.900,00
Kecamatan Kempas	5.546.122.228,79	0,00	0,00	5.546.122.228,79
Kecamatan Kemuning	5.441.446.310,00	0,00	0,00	5.441.446.310,00
Kecamatan Keritang	1.763.925.455,00	0,00	0,00	1.763.925.455,00
Kecamatan Kuala Indragiri	1.899.627.940,00	0,00	0,00	1.899.627.940,00
Kecamatan Mandah	2.345.769.000,00	0,00	0,00	2.345.769.000,00
Kecamatan Pelangiran	4.792.846.398,00	0,00	0,00	4.792.846.398,00
Kecamatan Pulau Burung	1.286.221.259,00	0,00	0,00	1.286.221.259,00
Kecamatan Reteih	3.066.573.233,00	338.888.342,43	0,00	3.405.461.575,43
Kecamatan Sungai Batang	1.099.138.360,00	0,00	0,00	1.099.138.360,00
Kecamatan Tanah Merah	1.714.703.517,60	0,00	0,00	1.714.703.517,60
Kecamatan Teluk Belengkong	180.231.600,00	0,00	0,00	180.231.600,00
Jumlah	1.740.713.897.617,74	110.828.196.726,45	883.624.513,99	1.850.658.469.830,20

Jumlah tersebut merupakan Aset Tetap-Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari:

Jenis	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Bangunan Gedung	1.719.697.390.073,05	107.868.267.022,20	883.624.513,99	1.826.682.032.581,26
Monumen	6.516.356.143,11	0,00	0,00	6.516.356.143,11
Bangunan Menara	1.836.828.426,49	0,00	0,00	1.836.828.426,49
Tugu Titik Kontrol/Pasti	12.663.322.975,09	2.959.929.704,25	0,00	15.623.252.679,34
Jumlah	1.740.713.897.617,74	110.828.196.726,45	883.624.513,99	1.850.658.469.830,20

Penambahan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2024

Belanja Modal 2024 (Real SP2D)	Rp	51.685.484.014,16
Kapitalisasi Belanja Pegawai 2024 (Biaya Perolehan)	Rp	693.110.710,00
Kapitalisasi Belanja Barang Jasa 2024 (Biaya Perolehan)	Rp	3.809.582.633,80
Belanja Barang Jasa dan Lainnya menjadi Aset	Rp	254.061.587,43
Hibah masuk	Rp	25.622.325.122,00
Mutasi Antar SKPD	Rp	726.982.000,00
Utang Belanja	Rp	1.884.939.119,00
Honor Pokja ULP	Rp	39.010.000,00
Koreksi Reklasifikasi Aset	Rp	26.112.701.540,06
Penambahan Bersih Nilai Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2024	Rp	110.828.196.726,45

Penambahan bersih nilai Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp110.828.196.726,45 berasal dari :



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1 Penambahan Gedung dan Bangunan pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp51.685.484.014,16 rincian per SKPD dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Nama SKPD	Belanja Modal 2024 (Real SP2D) (Rp)
Dinas Pendidikan	28.948.982.769,33
Dinas Kesehatan	3.278.856.899,98
Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan	731.750.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung	159.105.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	9.393.590.436,42
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.007.786.200,00
Dinas Perhubungan	161.812.856,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	44.099.000,00
Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	24.091.900,00
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	6.375.749.200,00
Badan Pendapatan Daerah	48.396.932,00
Kecamatan Concong	105.425.478,00
Kecamatan Enok	5.994.000,00
Kecamatan Gaung Anak Serka	96.190.000,00
Kecamatan Reteh	303.653.342,43
TOTAL	51.685.484.014,16

2 Kapitalisasi Belanja Pegawai 2023 (Biaya Perolehan) untuk Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp693.110.710,00 dikapitalisasikan sebagai biaya perolehan untuk penambahan nilai Aset Gedung dan Bangunan sampai siap digunakan. Adapun Belanja Pegawai seperti Honorarium Panitia Pengadaan Barang/ Jasa, Honorarium Pemeriksa Barang/ Jasyang dikapitalisasi ke Aset Tetap berkenaan.

Nama SKPD	Kapitalisasi Belanja Pegawai 2024 (Biaya Perolehan) (Rp)
Dinas Pendidikan	228.121.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	64.010.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.040.000,00
Dinas Perhubungan	3.900.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	1.360.000,00
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	386.160.710,00
Kecamatan Enok	284.000,00
Kecamatan Reteh	7.235.000,00
TOTAL	693.110.710,00

3 Kapitalisasi Biaya Perolehan untuk Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.809.582.633,80 terdiri dari Kapitalisasi Belanja Barang Jasa yang dikapitalisasikan sebagai biaya perolehan untuk penambahan nilai Aset Gedung dan Bangunan sampai siap digunakan. Adapun Belanja Barang Jasa seperti Perencanaan dan Pengawasan, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja ATK, Belanja Perjalanan Dinas dan sebagainya yang dikapitalisasi ke Aset Tetap berkenaan.

Nama SKPD	Kapitalisasi Belanja Barang Jasa 2024 (Biaya Perolehan) (Rp)
Dinas Pendidikan	2.729.606.635,80
Dinas Kesehatan	95.658.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung	21.038.500,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	916.401.950,00
Dinas Perhubungan	18.877.548,00
Kecamatan Reteh	28.000.000,00
TOTAL	3.809.582.633,80

4 Penambahan Aset Bangunan Gedung pada Belanja Barang Jasa dan Lainnya menjadi Aset senilai Rp254.061.587,43 yang terdiri dari :

Dinas Kesehatan senilai Rp134.625.587,43 merupakan rehab kantor yang bersumber dari rekening pemeliharaan.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa senilai Rp119.436.000,00 merupakan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor yang bersumber dari rekening jaga.

Nama SKPD	Belanja Barang Jasa dan Lainnya menjadi Aset (Rp)
Dinas Kesehatan	134.625.587,44
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	119.436.000,00
TOTAL	254.061.587,44



5 Penambahan Aset Gedung dan Bangunan dari Hibah Masuk senilai Rp25.622.325.122,00 terdiri dari :

Hibah bangunan dari Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Naskah Hibah Nomor : 000.2.5/BPKAD/5084, Nomor : 00.2.5/2100/BPKAD-BMD tanggal 4 Desember 2024 dan Berita Acara Serah Terima Nomor : 000.2.5/BPKAD/5085, Nomor : 00.2.5/2099/BPKAD-BMD tanggal 4 Desember 2024 yang terdiri dari :

Dinas Pendidikan senilai Rp11.999.613.302,60 berupa 39 bangunan sekolah yang tersebar di Kabupaten Indragiri Hilir.

Dinas Kesehatan senilai Rp4.071.716.000,00 yang terdiri dari 1 (satu) unit bangunan Puskesmas Mandah senilai Rp1.381.281.000,00 dan 1 (satu) unit bangunan Puskesmas Teluk Sungkai senilai Rp2.690.435.000,00.

RSUD Puri Husada Tembilahan senilai Rp1.026.898.012,00 berupa bangunan IGD.

RSUD Raja Musa Sungai Guntung senilai Rp7.258.585.380,00 berupa bangunan Rumah Sakit.

Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan senilai Rp795.835.000,00 berupa bangunan Gazebo di Jembatan Sungai Piring.

Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan senilai Rp419.680.179,89 berupa bangunan Bangunan Puskesmas yang berlokasi di Jalan Gerilya Tembilahan.

Pengelola Barang Milik Daerah senilai Rp49.997.247,00 merupakan hibah rehabilitasi bangunan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Nomor : 020/PL.09/RA/06/2024, Nomor : 012/NPH/BKAD-BMD dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 020.2/PL.09/RA/06/2024, Nomor : 013/NPH/BKAD-BMD tanggal 4 Juni 2024.

Nama SKPD	Hibah Masuk (Rp)
Dinas Pendidikan	11.999.613.302,60
Dinas Kesehatan	4.071.716.000,00
Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan	1.026.898.012,51
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa	7.258.585.380,00
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	795.835.000,00
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	419.680.179,89
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	49.997.247,00
TOTAL	25.622.325.122,00

6 Penambahan Aset Gedung dan Bangunan dari Mutasi antar SKPD senilai Rp726.982.000,00 terdiri dari :

Dinas Pendidikan senilai Rp163.350.000,00 merupakan bangunan gedung Universitas Indragiri yang dialihstatuskan dari Pengelola Barang Milik Daerah.

Pengelola Barang Milik Daerah senilai Rp563.632.000,00 merupakan bangunan BLKI yang dialihstatuskan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Nama SKPD	Mutasi Antar SKPD (Rp)
Dinas Pendidikan	163.350.000,00
Pengelola Barang Milik Daerah	563.632.000,00
TOTAL	726.982.000,00

7 Penambahan Aset Gedung dan Bangunan dari Utang Belanja adalah senilai Rp1.884.939.119,00 terdiri dari :

Dinas Kesehatan sebesar Rp60.180.938,00 merupakan hutang belanja modal perencanaan dan pengawasan rehabilitasi 11 Puskesmas.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.017.764.160,00 merupakan hutang belanja modal Pembangunan Gedung Kantor Camat Teluk Belengkong di Kecamatan Teluk Belengkong Tahun 2023 yang diselesaikan pada Tahun 2024 namun tidak terdapat realisasi belanja modal untuk pekerjaan tersebut sehingga diakui sebagai utang belanja modal.

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik sebesar Rp4.495.000,00 merupakan belanja modal Pengawasan Bangunan Gedung Kantor Pembuatan Ruangan 112 dan CSIRT berdasarkan Nomor Kontrak/Perjanjian 004/PERSANTIK/SPK/VII/2024

Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan sebesar Rp802.500.021,00 merupakan Pekerjaan Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana wisata religi Kawasan makam syekh Abdurrahman shiddiq mufti kerajaan Indragiri desa teluk dalam kec. Kuala Indragiri dengan nilai kontrak sebesar Rp1.795.896.000 namun per 31 Desember 2024 pekerjaan tersebut dilakukan serah terima pekerjaan dengan bobot fisik sebesar 94,71% senilai Rp1.700.893.100,00.

Selanjutnya dijelaskan pada Lampiran 16

Nama SKPD	Utang Belanja (Rp)
Dinas Kesehatan	60.180.938,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.017.764.160,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	4.495.000,00
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	802.500.021,00
TOTAL	1.884.940.119,00

8 Penambahan Aset Gedung dan Bangunan senilai Rp39.010.000,00 merupakan realisasi honor pokja sebagai biaya atribusi. Adapun rincian per SKPD adalah sebagai berikut :

Selanjutnya dijelaskan pada Lampiran 15

Nama SKPD	Honor Pokja ULP (Rp)
Dinas Pendidikan	14.280.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	12.760.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	5.100.000,00
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	6.870.000,00
TOTAL	39.010.000,00

- 9 Penambahan Aset Gedung dan Bangunan dari Koreksi Reklasifikasi Aset adalah senilai Rp26.112.701.540,06 terdiri dari :
- Dinas Pendidikan sebesar Rp9.239.314.788,26 merupakan reklasifikasi akibat kesalahan kodifikasi pencatatan bangunan MCK yang sebelumnya dicatat pada Bangunan Air direklas ke Bangunan MCK pada akun Bangunan Gedung.
- Dinas Kesehatan sebesar Rp7.476.031.025,00 merupakan reklasifikasi Bangunan Puskesmasn Pelangiran, Puskesmas Sapat dan Puskesmas Teluk Belengkong yang sebelumnya tercatat pada Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- Rumah Sakit Puri Husada senilai Rp321.121.800,00 merupakan reklasifikasi Bangunan IGD yang sebelumnya tercatat pada Aset Tetap Renovasi karena aset induk dari bangunan merupakan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau namun tahun 2024 Pemerintah Provinsi Riau telah menghibahkan bangunan tersebut ke Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp9.076.233.926,80 merupakan reklasifikasi bangunan Mal Pelayanan Publik yang sebelumnya tercatat pada Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Nama SKPD	Koreksi Reklasifikasi Aset (Rp)
Dinas Pendidikan	9.239.314.788,26
Dinas Kesehatan	7.476.031.025,00
Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan	321.121.800,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	9.076.233.926,80
TOTAL	26.112.701.540,06

Pengurangan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2024

Mutasi Antar SKPD Rp 726.982.000,00

Dicatat pada Daftar ekstrakomptabel (Tidak memenuhi Batas Kapitalisasi Aset Tetap) dan Pemeliharaan Rp 49.485.582,00

Pelunasan Utang Tahun 2018 Rp 58.760.000,00

DED/ Konsultan/Pengecatan/S *oftware* menjadi Beban Rp 48.396.932,00

Pengurangan Bersih
Nilai Aset Gedung dan Bangunan Rp 883.624.514,00

Pengurangan bersih nilai Aset Gedung dan Bangunan senilai Rp883.624.514,00 terdiri dari :

- 1 Penambahan Aset Gedung dan Bangunan dari Mutasi antar SKPD senilai Rp726.982.000,00 terdiri dari :
- Dinas Pendidikan senilai Rp163.350.000,00 merupakan bangunan gedung Universitas Indragiri yang dialihstatuskan dari Pengelola Barang Milik Daerah.
- Sekretariat Daerah senilai Rp563.632.000,00 merupakan bangunan BLKI yang dialihstatuskan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Nama SKPD	Mutasi Antar SKPD (Rp)
Pengelola Barang Milik Daerah	163.350.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	563.632.000,00
TOTAL	726.982.000,00

- 1 Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan dari Pengurangan Aset tetap Gedung pada Daftar ekstrakomptabel (Tidak memenuhi Batas Kapitalisasi Aset Tetap) dan Pemeliharaan senilai Rp49.485.582,00 dapat dilihat pada rincian berikut :

Nama SKPD	Aset tetap Gedung pada Daftar ekstrakomptabel (Tidak memenuhi Batas Kapitalisasi Aset Tetap) dan Pemeliharaan (Rp)
Dinas Kesehatan	37.257.582,00
Kecamatan Concong	5.950.000,00
Kecamatan Enok	6.278.000,00
TOTAL	49.485.582,00



3 Pengurangan Aset tetap Gedung dan Bangunan dari Pelunasan Hutang 2023 senilai Rp58.760.000,00 pada Pembayaran Hutang Tahun Anggaran 2023) atas pekerjaan Lapangan Voli Dusun Bikuan Darat Desa Belaras Kecamatan Mandah, Selanjutnya dijelaskan pada Lampiran 24

Nama SKPD	Pelunasan Utang Tahun 2023 (Rp)
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	58.760.000,00
TOTAL	58.760.000,00

4 Pengurangan Aset tetap Gedung dan Bangunan dari DED/ Konsultan/Pengecatan/Software menjadi Beban sebesar Rp48.396.932,00 pada Badan Pendapatan Daerah berupa Rehabilitasi Gedung Kantor UPTD Kec. Kateman yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap karena merupakan pekerjaan pengecatan sehingga belanja tersebut direklas ke beban.

Nama SKPD	DED/ Konsultan/Pengecatan/Software menjadi Beban
Badan Pendapatan Daerah	48.396.932,00
TOTAL	48.396.932,00

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.3.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	2.857.291.468.337,25	2.708.553.692.673,29
Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.708.553.692.673,29 mengalami penambahan sebesar Rp158.889.395.911,87 yang terdiri dari Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi dan Jaringan, Kapitalisasi Belanja Pegawai (Biaya Perolehan), Kapitalisasi Belanja Barang Jasa (Biaya Perolehan), Hibah Masuk, Utang Belanja, Penambahan Honor Pokja ULP, dan Koreksi Reklasifikasi Aset. Mengalami pengurangan senilai Rp10.151.620.247,91 yang terdiri dari Koreksi Kesalahan Pencatatan, Dicatat pada Daftar Ekstrakomptabel (Tidak memenuhi Batas Kapitalisasi Aset Tetap) dan Pemeliharaan dan Pelunasan Utang Tahun 2023, DED/ Konsultan/Pengecatan/Software menjadi Beban. Sehingga Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.857.291.468.337,25.		

Nama SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Dinas Pendidikan	9.105.179.640,06	420.875.148,20	9.240.814.788,26	285.240.000,00
Dinas Kesehatan	10.412.891.930,00	109.369.250,00	24.810.001,99	10.497.451.178,01
Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan	4.903.481.455,00	1.048.317.861,98	0,00	5.951.799.316,98
Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung	1.015.500.000,00	0,00	0,00	1.015.500.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa	1.732.437.970,00	0,00	0,00	1.732.437.970,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.998.505.794.276,70	124.482.583.593,69	885.995.457,66	2.122.102.382.412,73
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	402.871.545.075,96	27.569.266.717,00	0,00	430.440.811.792,96
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	559.854.000,00	0,00	0,00	559.854.000,00
Dinas Sosial	236.205.543,52	0,00	0,00	236.205.543,52
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	1.238.947.846,16	0,00	0,00	1.238.947.846,16
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	29.008.000,00	0,00	0,00	29.008.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	18.664.161.000,00	0,00	0,00	18.664.161.000,00
Dinas Perhubungan	104.574.335.723,72	5.055.450.641,00	0,00	109.629.786.364,72
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	181.039.000,00	0,00	0,00	181.039.000,00
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	42.868.000,00	0,00	0,00	42.868.000,00
Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	230.346.042,74	0,00	0,00	230.346.042,74
Dinas Perikanan	4.852.770.817,19	0,00	0,00	4.852.770.817,19
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	2.853.784.258,00	0,00	0,00	2.853.784.258,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	2.023.876.068,00	0,00	0,00	2.023.876.068,00
Dinas Perkebunan	504.472.800,00	0,00	0,00	504.472.800,00
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	1.360.708.571,60	0,00	0,00	1.360.708.571,60
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	73.050.000,00	0,00	0,00	73.050.000,00
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	78.319.572.079,01	0,00	0,00	78.319.572.079,01
Badan Pendapatan Daerah	39.309.000,00	0,00	0,00	39.309.000,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	143.746.000,00	0,00	0,00	143.746.000,00
Inspektorat Daerah	114.989.000,00	0,00	0,00	114.989.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	567.112.750,00	0,00	0,00	567.112.750,00
Sekretariat Daerah	611.369.156,69	0,00	0,00	611.369.156,69
Sekretariat Dprd	706.351.487,00	0,00	0,00	706.351.487,00
Kecamatan Tembilahan	12.763.488.050,00	0,00	0,00	12.763.488.050,00
Kecamatan Tembilahan Hulu	2.459.463.062,00	0,00	0,00	2.459.463.062,00
Kecamatan Tempuling	7.048.939.819,00	0,00	0,00	7.048.939.819,00
Kecamatan Batang Tuaka	857.235.155,87	0,00	0,00	857.235.155,87
Kecamatan Concong	2.183.750.000,00	0,00	0,00	2.183.750.000,00
Kecamatan Enok	5.683.204.840,00	203.532.700,00	0,00	5.886.737.540,00
Kecamatan Gaung	1.077.564.850,00	0,00	0,00	1.077.564.850,00
Kecamatan Gaung Anak Serka	5.831.226.000,00	0,00	0,00	5.831.226.000,00
Kecamatan Kateman	5.004.027.691,00	0,00	0,00	5.004.027.691,00
Kecamatan Kempas	2.021.673.419,24	0,00	0,00	2.021.673.419,24
Kecamatan Kemuning	1.053.328.000,00	0,00	0,00	1.053.328.000,00
Kecamatan Keritang	917.792.970,00	0,00	0,00	917.792.970,00
Kecamatan Kuala Indragiri	1.437.119.800,00	0,00	0,00	1.437.119.800,00
Kecamatan Mandah	2.325.605.046,00	0,00	0,00	2.325.605.046,00
Kecamatan Pelangiran	1.673.087.290,00	0,00	0,00	1.673.087.290,00
Kecamatan Reth	5.410.129.943,11	0,00	0,00	5.410.129.943,11
Kecamatan Sungai Batang	2.167.899.860,00	0,00	0,00	2.167.899.860,00
Kecamatan Tanah Merah	2.111.399.385,72	0,00	0,00	2.111.399.385,72
Kecamatan Teluk Belengkong	52.050.000,00	0,00	0,00	52.050.000,00
Jumlah	2.708.553.692.673,29	158.889.395.911,87	10.151.620.247,91	2.857.291.468.337,25

Jumlah tersebut merupakan Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari:

Jenis	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Jalan dan Jembatan	2.360.055.495.109,18	149.295.123.553,03	0,00	2.509.350.618.662,21
Bangunan Air (Irigasi)	259.739.715.910,00	8.557.538.746,86	10.125.310.245,92	258.171.944.410,94
Instalasi	33.389.301.884,00	1.036.733.611,98	26.310.001,99	34.399.725.493,99
Jaringan	55.369.179.770,11	0,00	0,00	55.369.179.770,11
Jumlah	2.708.553.692.673,29	158.889.395.911,87	10.151.620.247,91	2.857.291.468.337,25

Penambahan bersih nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp158.889.395.911,87 berasal dari :

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	95.455.833.485,01
Kapitalisasi Belanja Pegawai (Biaya Perolehan)	Rp	264.863.277,52
Kapitalisasi Belanja Barang Jasa (Biaya Perolehan)	Rp	2.823.731.398,48
Hibah Masuk	Rp	150.000.000,00
Mutasi Antar SKPD	Rp	0,00
Utang Belanja	Rp	21.910.565.339,51



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Honor Pokja ULP	Rp	19.980.000,00
Koreksi Kesalahan Pencatatan	Rp	511.563.652,17
Koreksi Reklasifikasi Aset	Rp	37.752.858.759,18
Penambahan Bersih Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	158.889.395.911,87

1 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp95.455.833.485,01 dengan rincian sebagai berikut:

Nama SKPD	Belanja Modal 2024 dan Reklas (Real SP2D) (Rp)
Dinas Pendidikan	383.838.748,20
Dinas Kesehatan	109.369.250,00
Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan	283.773.500,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	64.961.374.976,81
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	25.269.580.000,00
Dinas Perhubungan	4.253.560.310,00
Kecamatan Enok	194.336.700,00
Jumlah	95.455.833.485,01

2 Penambahan dari Kapitalisasi Biaya Perolehan sebesar Rp264.863.277,52 diperoleh dari Kapitalisasi Biaya Perolehan dari Belanja Pegawai seperti Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa, Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa, Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan (PPTK). Adapun Rincian Biaya Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan terdapat pada beberapa SKPD antara lain adalah sebagai berikut :

Nama SKPD	Penambahan Dari Kapitasi Biaya Perolehan (Rp)
Dinas Pendidikan	1.441.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	81.400.000,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	86.566.277,52
Dinas Perhubungan	86.260.000,00
Kecamatan Enok	9.196.000,00
Jumlah	264.863.277,52

3 Penambahan dari Kapitalisasi Biaya Perolehan sebesar Rp2.823.731.398,48 diperoleh dari Kapitalisasi Biaya Perolehan dari Belanja. Adapun Rincian Biaya Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan terdapat pada beberapa SKPD antara lain adalah sebagai berikut :

Nama SKPD	Penambahan Dari Kapitasi Biaya Perolehan (Rp)
Dinas Pendidikan	35.595.400,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	14.245.228,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	2.211.320.439,48
Dinas Perhubungan	562.570.331,00
Jumlah	2.823.731.398,48

4 Penambahan dari Hibah Masuk sebesar Rp150.000.000,00 diperoleh dari hibah masuk pada Dinas Perhubungan merupakan Dermaga Kelurahan Sungai Empat Kec. Gaung Anak Serka yang diserahkan dari Lembaga Pemberdayaan Desa Sungai Empat Kecamatan Gaung Anak Serka.

Nama SKPD	Hibah Masuk (Rp)
Dinas Perhubungan	150.000.000,00
Jumlah	150.000.000,00

5 Penambahan dari Utang Belanja 2024 pada Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 sebesar Rp21.910.565.339,51 terdiri dari :
Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada sebesar Rp764.544.361,98 merupakan Pekerjaan Instalasi Gas Medis berdasarkan Perjanjian Kerja sama antara PT. Golden Group Island dengan Rumah Sakit Puri Husada Nomor : 025/GIG-SPK/IX/24, Nomor : 445/RSUD-Non Med/IX/2024/2254 tanggal 2 September 2024 dimana pada perjanjian tersebut disepakati bahwa Rumah Sakit Umum Daerah akan melakukan pembayaran secara bertahap dalam jangka waktu 24 bulan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp21.146.020.977,53 merupakan Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan Ruas Pekan Tua - Pengalihan Paket A sebesar Rp191.432.170,00, Rekonstruksi Jalan Ruas Pekan Tua - Pengalihan Paket A sebesar Rp4.752.670.393,18, Rekonstruksi Ruas Terusan Mas - Sapat (Simpang Jalan Menuju Makam Tuan Guru - Jalan SMP Sapat) Kec. Kuala Indragiri sebesar Rp1.404.998.802,67, Rekonstruksi Ruas Teluk Sungka - Sungai Baru Kec. Gaung Anak Serka sebesar Rp199.846.226,76, Rehabilitasi Jembatan Parit Gantung Desa Junjangan Kec. Batang Tuaka sebesar Rp60.503.231,19, Rehabilitasi Jembatan Khairiah Mandah Kec. Mandah sebesar Rp198.950.465,40 dan Perencanaan Teknis Jalan di Kabupaten Indragiri Hilir Paket 3 sebesar Rp99.777.900,00. Rekonstruksi Jalan Ruas Pekan Tua - Pengalihan Paket B sebesar Rp13.308.367.198,45 dan Pembangunan Jembatan pada Ruas 6 Pulau Kijang - Sanglar Kec. Reteh (Lanjutan) senilai Rp929.474.589,88.

Nama SKPD	Utang Belanja 2024 (Rp)
Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada	764.544.361,98
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21.146.020.977,53
Jumlah	21.910.565.339,51



6 Penambahan Honor Pokja ULP yang dikapitalisasi ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 sebesar Rp19.980.000,00 dapat dilihat pada Lampiran Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada Lampiran 15 terdapat pada beberapa SKPD antara lain adalah:

Nama SKPD	Penambahan Honor Pokja (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	15.120.000,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	1.800.000,00
Dinas Perhubungan	3.060.000,00
Jumlah	19.980.000,00

7 Penambahan Koreksi kesalahan pencatatan yang dikapitalisasi ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 sebesar Rp511.563.652,17 merupakan pekerjaan Pembangunan Jalan Terusan Mas Tahun 2023 dimana pada saat penyusuna LKPD Tahun 2023 pekerjaan tersebut belum selesai namun realisasi SP2D telah melebihi bobot fisik per 31 Desember 2023 sehingga kelebihan tersebut dicatat sementara pada Beban dibayar dimuka.

Nama SKPD	Koreksi Reklasifikasi Aset (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	511.563.652,17
Jumlah	511.563.652,17

8 Penambahan Koreksi Reklasifikasi Aset yang dikapitalisasi ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 sebesar Rp37.752.858.759,18 merupakan pekerjaan pembangunan Long Segment Terusam Mas yang sebelumnya dicatat pada Kontruksi Dalam Pengerjaan namun pada tahun 2024 telah selesai dan dicatat pada Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp14.653.424.988,51, Pembangunan Jembatan pada Ruas 6 Pulau Kijang - Sanglar Kec. Reteh sebesar Rp2.270.866.229,12 dan Rekonstruksi Jalan Ruas Pekan Tua - Pengalihan Paket B sebesar Rp20.467.950.241,55

Nama SKPD	Koreksi Reklasifikasi Aset (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	37.752.858.759,18
Jumlah	37.752.858.759,18

Pengurangan Bersih Nilai Aset Jalan. Irigasi dan Jaringan :

Koreksi Reklasifikasi Aset	Rp	9.239.314.788,26
Dicatat pada Daftar Ekstrakomptabel (Tidak memenuhi Batas Kapitalisasi Aset Tetap) dan Pemeliharaan	Rp	26.310.001,99
DED/ Konsultan/Pengecatan/S <i>oftware</i> menjadi Beban	Rp	885.995.457,66
Pengurangan Bersih Nilai Aset Jalan. Irigasi dan Jaringan	Rp	10.151.620.247,91

1 Pengurangan dari Dicatat pada Koreksi Reklasifikasi Aset sebesar Rp9.239.314.788,26 pada Dinas Pendidikan merupakan koreksi perubahan kodefikasi Bangunan MCK yang sebelumnya dicatat pada Bangunan Air dilakukan reklasifikasi pada Bangunan MCK pada akun Bangunan Gedung.

Nama SKPD	Koreksi Reklasifikasi Aset (Rp)
Dinas Pendidikan	9.239.314.788,26
Jumlah	9.239.314.788,26

2 Pengurangan dari Dicatat pada Daftar ekstrakomptabel (Aset Dibawah kapitalisasi) dan Pemeliharaan sebesar Rp26.310.001,99, untuk rincian Aset dapat dilihat pada Lampiran Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Adapun SKPD yang memiliki ekstrakomptabel antara lain adalah sebagai berikut :

Nama SKPD	Pengurangan Dari Daftar ekstrakomptabel dan Pemeliharaan (Rp)
Dinas Pendidikan	1.500.000,00
Dinas Kesehatan	24.810.001,99
Jumlah	26.310.001,99

3 Pengurangan dari DED/ Konsultan/Pengecatan/Software menjadi Beban sebesar Rp885.995.457,66 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berupa merupakan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R Pekan Kemis Kecamatan Tembilahan Hulu, dimana pekerjaan tersebut hanya berbentuk galian sehingga tidak memenuhi kriteria penguat aset tetap.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Nama SKPD	DED/ Konsultan/Pengecatan/ Software menjadi Beban (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	885.995.457,66
Jumlah	885.995.457,66

5.3.1.3.5

ASET TETAP LAINNYA

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.589.136.193,51 mengalami penambahan sebesar Rp5.600.208.250,00 yang terdiri dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, Kapitalisasi Belanja Pegawai, Hibah Masuk . Mengalami pengurangan senilai Rp6.551.797.600,00 yang terdiri dari Dicatat pada persediaan Sehingga Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.637.546.843,51.

SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Dinas Pendidikan	11.425.008.296,40	5.551.697.550,00	6.182.165.100,00	10.794.540.746,40
Dinas Kesehatan	200.855.591,95	5.000.000,00	5.000.000,00	200.855.591,95
Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan	321.121.800,00	0,00	321.121.800,00	0,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	470.063.000,00	0,00	0,00	470.063.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	155.359.026,89	0,00	0,00	155.359.026,89
Dinas Perhubungan	25.955.521,27	0,00	0,00	25.955.521,27
Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	376.999.707,00	8.889.800,00	8.889.800,00	376.999.707,00
Dinas Perikanan	119.543.000,00	0,00	0,00	119.543.000,00
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	83.410.000,00	0,00	0,00	83.410.000,00
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	38.200.000,00	0,00	0,00	38.200.000,00
Dinas Perkebunan	11.880.000,00	0,00	0,00	11.880.000,00
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	32.940.000,00	0,00	0,00	32.940.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	376.467.250,00	34.620.900,00	34.620.900,00	376.467.250,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	171955000,00	0,00	0,00	171.955.000,00
Sekretariat Daerah	383.590.000,00	0,00	0,00	383.590.000,00
Sekretariat Dprd	301.401.000,00	0,00	0,00	301.401.000,00
Kecamatan Tembilahan	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00
Kecamatan Gaung	44.737.000,00	0,00	0,00	44.737.000,00
Kecamatan Gaung Anak Serka	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Kecamatan Kateman	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Kecamatan Kuala Indragiri	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Kecamatan Mandah	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Kecamatan Pelangiran	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
Kecamatan Reteih	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00
Kecamatan Sungai Batang	13.300.000,00	0,00	0,00	13.300.000,00
Kecamatan Tanah Merah	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Jumlah	14.589.136.193,51	5.600.208.250,00	6.551.797.600,00	13.637.546.843,51

Jumlah tersebut merupakan Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari :

Jenis	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Bahan Perpustakaan	10.692.575.762,12	5.487.270.250,00	6.190.510.800,00	9.989.335.212,12
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	3.035.343.773,31	112.938.000,00	40.165.000,00	3.108.116.773,31
Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00
Biota Perairan	144.543.000,00	0,00	0,00	144.543.000,00
Tanaman	195.696.266,13	0,00	0,00	195.696.266,13
Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	520.977.391,95	0,00	321.121.800,00	199.855.591,95
Jumlah	14.589.136.193,51	5.600.208.250,00	6.551.797.600,00	13.637.546.843,51



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Penambahan bersih nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp5.600.208.250,00 berasal dari :

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	5.048.671.250,00
Kapitalisasi Belanja Pegawai 2024 (Biaya Perolehan)	Rp	3.159.000,00
Hibah Masuk	Rp	548.378.000,00
Penambahan Bersih Nilai Aset Tetap Lainnya	Rp	5.600.208.250,00

- 1 Penambahan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp5.048.671.250,00. Adapun Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Nama SKPD	Penambahan Dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (Rp)
Dinas Pendidikan	5.000.160.550,00
Dinas Kesehatan	5.000.000,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	8.889.800,00
Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah	34.620.900,00
Jumlah	5.048.671.250,00

- 2 Penambahan Kapitalisasi Belanja Pegawai 2024 (Biaya Perolehan) untuk Aset Tetap Lainnya Sebesar Rp3.159.000,00.

Nama SKPD	Kapitalisasi Belanja Pegawai 2024 (Biaya Perolehan) (Rp)
Dinas Pendidikan	3.159.000,00
Jumlah	3.159.000,00

- 3 Hibah masuk Aset Tetap Lainnya Sebesar Rp548.378.000,00 merupakan hibah buku yang diperoleh Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Naskah Hibah Nomor : 000.2.5/BPKAD/5084, Nomor : 00.2.5/2100/BPKAD-BMD tanggal 4 Desember 2024 dan Berita Acara Serah Terima Nomor : 000.2.5/BPKAD/5085, Nomor : 00.2.5/2099/BPKAD-BMD tanggal 4 Desember 2024

Nama SKPD	Hibah Masuk (Rp)
Dinas Pendidikan	548.378.000,00
Jumlah	548.378.000,00

Pengurangan Nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp6.551.797.600,00 terdiri dari :

Koreksi Reklasifikasi Aset Dicatat pada Daftar ekstrakomptabel (Tidak memenuhi Batas Kapitalisasi Aset Tetap) dan Pemeliharaan	Rp	361.286.800,00
Aset Tak Berwujud	Rp	39.620.900,00
Pengurangan Bersih Nilai Aset Tetap Lainnya	Rp	6.551.797.600,00

- 1 Pengurangan Dicatat pada Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya Sebesar Rp361.286.800,00 terdiri dari :

Dinas Pendidikan Sebesar Rp40.165.000,00 merupakan reklasifikasi belanja tahun 2023 yang sebelumnya tercatat pada Neraca namun aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi aset tetap sehingga dilakukan reklasifikasi ke Ekstrakomtable.

Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Sebesar Rp321.121.800,00 merupakan Aset Tetap Renovasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada berupa Bangunan IGD dimana induk bangunan tersebut milik Pemerintah Provinsi Riau namun tahun 2024 telah dihibahkan ke Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sehingga dilakukan reklasifikasi untuk dikapitalisasi ke aset induk.

Nama SKPD	Koreksi Reklasifikasi Aset (Rp)
Dinas Pendidikan	40.165.000,00
RSUD Puri Husada Tembilahan	321.121.800,00
Jumlah	361.286.800,00

- 2 Pengurangan Dicatat pada Daftar Ekstrakomptabel (Tidak memenuhi Batas Kapitalisasi Aset Tetap) dan PemeliharaanSebesar Rp6.150.889.900,00 terdiri dari Dinas Pendidikan sebesar Rp6.142.000.100,00 dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp8.889.800,00.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Nama SKPD	Dicatat pada Daftar Ekstrakomptabel (Tidak memenuhi Batas Kapitalisasi Aset Tetap) dan Pemeliharaan (Rp)
Dinas Pendidikan	6.142.000.100,00
Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	8.889.800,00
Jumlah	6.150.889.900,00

3 Pengurangan Aset Tetap Lainnya yang dicatat pada Aset Tak Berwujud sebesar Rp39.620.900,00 terdiri dari :

Dinas Kesehatan sebesar Rp5.000.000,00 merupakan belanja modal BLUD dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp34.620.900,00 berupa Aplikasi IOS Client untuk Platform Manajemen Satu Data Geospasial.

Nama SKPD	Aset Tak Berwujud (Rp)
Dinas Kesehatan	5.000.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	34.620.900,00
Jumlah	39.620.900,00

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.3.6 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	440.834.940.117,35	463.270.249.082,20

Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp463.270.249.082,20 mengalami penambahan sebesar Rp31.933.222.196,05 yang terdiri dari Reklas Belanja Modal Antar Aset Tetap, Kapitalisasi Belanja (Biaya Perolehan), Belanja Barang Jasa dan Lainnya menjadi Aset, Utang Belanja 2024, Kapitalisasi Honor Pokja, dan koreksi reklasifikasi aset serta mengalami pengurangan senilai Rp54.368.531.160,90 yang terdiri dari Koreksi Reklasifikasi Aset, Belanja Modal menjadi ekstrakomptable. Sehingga Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp440.834.940.117,35.

SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Dinas Pendidikan	749.121.299,00	0,00	0,00	749.121.299,00
Dinas Kesehatan	11.979.488.326,92	616.398.198,00	7.491.047.474,92	5.104.839.050,00
Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan	57.760.611.585,36	0,00	0,00	57.760.611.585,36
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	362.927.915.045,22	30.381.647.198,05	46.829.092.685,98	346.480.469.557,29
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	11.439.609.201,20	0,00	0,00	11.439.609.201,20
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	84.860.000,00	0,00	0,00	84.860.000,00
Dinas Perhubungan	1.427.643.150,00	935.176.800,00	0,00	2.362.819.950,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	70.022.662,80	0,00	0,00	70.022.662,80
Dinas Perikanan	780.365.195,00	0,00	0,00	780.365.195,00
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	414.164.550,00	0,00	0,00	414.164.550,00
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	1.958.000,00	0,00	1.958.000,00	0,00
Dinas Perkebunan	46.433.000,00	0,00	46.433.000,00	0,00
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	13.704.489.000,00	0,00	0,00	13.704.489.000,00
Sekretariat Dprd	580.704.116,00	0,00	0,00	580.704.116,00
Kecamatan Tembilahan	8.150.000,00	0,00	0,00	8.150.000,00
Kecamatan Tempuling	49.520.000,00	0,00	0,00	49.520.000,00
Kecamatan Concong	562.128.320,70	0,00	0,00	562.128.320,70
Kecamatan Enok	32.374.130,00	0,00	0,00	32.374.130,00
Kecamatan Gaung Anak Serka	49.830.000,00	0,00	0,00	49.830.000,00
Kecamatan Kateman	55.280.000,00	0,00	0,00	55.280.000,00
Kecamatan Keritang	187.834.000,00	0,00	0,00	187.834.000,00
Kecamatan Kuala Indragiri	233.507.000,00	0,00	0,00	233.507.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Kecamatan Reteh	62.795.500,00	0,00	0,00	62.795.500,00
Kecamatan Tanah Merah	49.445.000,00	0,00	0,00	49.445.000,00
Jumlah	463.270.249.082,20	31.933.222.196,05	54.368.531.160,90	440.834.940.117,35

Penambahan bersih nilai Kontruksi dalam pengerjaan sebesar Rp31.933.222.196,05 berasal dari :

Reklas BM Antar Aset Tetap	Rp	30.608.690.090,05
Kapitalisasi Belanja Pegawai 2023 (Biaya Perolehan)	Rp	69.271.000,00
Kapitalisasi Belanja Barang Jasa 2023 (Biaya Perolehan)	Rp	40.879.524,00
Belanja Barang Jasa dan Lainnya menjadi Aset	Rp	1.204.462.332,00
Utang Belanja 2024	Rp	8.119.250,00
Honor Pokja	Rp	1.800.000,00
Penambahan Bersih Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	31.933.222.196,05

- 1 Penambahan Belanja Modal yang dicatat sebagai Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp30.608.690.090,05 merupakan pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan, rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat dari Lampiran Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sedangkan SKPD yang memiliki KDP terdiri dari :

Nama SKPD	Penambahan Belanja Modal dan Reklas 2024 (Real SP2D) (Rp)
Dinas Kesehatan	325.094.245,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	30.283.595.845,05
Jumlah	30.608.690.090,05

- 2 Penambahan Kapitalisasi Belanja (Biaya Perolehan) untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp69.271.000,00 merupakan penambahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan diperoleh dari Kapitalisasi Belanja Pegawai (Biaya Perolehan) terdiri dari :

Nama SKPD	Kapitalisasi Belanja Pegawai 2024 (Biaya Perolehan) (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	69.271.000,00
Jumlah	69.271.000,00

- 3 Penambahan Kapitalisasi Belanja (Biaya Perolehan) untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp40.879.524,00 merupakan penambahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan diperoleh dari Kapitalisasi Belanja Barang Jasa 2024 (Biaya Perolehan) terdiri dari :

Nama SKPD	Kapitalisasi Belanja Jasa 2024 (Biaya Perolehan) (Rp)
Dinas Kesehatan	12.099.171,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	28.780.353,00
Jumlah	40.879.524,00

- 4 Penambahan Belanja Barang Jasa dan Lainnya menjadi Aset untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.204.462.332,00 yang terdiri dari Dinas Kesehatan merupakan Perencanaan Rehabilitasi Pustu yang dianggarkan belanja jasa namun dicatat sebagai KDP sebesar Rp271.085.532,00 dan Dinas Perhubungan sebesar Rp933.376.800,00 merupakan perencanaan pembangunan dermaga yang dicatat sebagai Konstuksi dalam pengerjaan.

Nama SKPD	Belanja Barang Jasa dan Lainnya menjadi Aset (Rp)
Dinas Kesehatan	271.085.532,00
Dinas Perhubungan	933.376.800,00
Jumlah	1.204.462.332,00

- 5 Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada utang belanja sebesar Rp8.119.250,00 pada Dinas Kesehatan berupa perencanaan Rehabilitasi Pustu Catur Karya dan Pustu Mekar Sari.

Nama SKPD	Utang Belanja 2024 (Rp)
Dinas Kesehatan	8.119.250,00
Jumlah	8.119.250,00

- 6 Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Honor Pokja ULP sebesar Rp1.800.000,00 pada Dinas Perhubungan

Nama SKPD	Honor Pokja ULP (Rp)
Dinas Perhubungan	1.800.000,00
Jumlah	1.800.000,00



Pengurangan Nilai Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp54.368.531.160,90 terdiri dari :

Penghapusan karena Penjualan/ Lelang	Rp	48.391.000,00
Koreksi Reklasifikasi Aset	Rp	54.305.123.710,98
Dicatat pada Daftar ekstrakomptabel (Tidak memenuhi Batas Kapitalisasi Aset Tetap) dan Pemeliharaan	Rp	15.016.449,92
Pengurangan Bersih Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	54.368.531.160,90

- 1 Pengurangan Nilai Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Penghapusan sebesar Rp48.433.000 terdiri dari Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan sebesar Rp1.958.000,00 dan Dinas Perkebunan sebesar Rp46.433.000,00 merupakan Perencanaan yang telah tercatat pada Konstuksi Dalam Pengerjaan namun Fisik atas Perencanaan tersebut tidak dilaksanakan sehingga dilakukan penghapusan.

Nama SKPD	Penghapusan karena Penjualan/ Lelang (Rp)
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	1.958.000,00
Dinas Perkebunan	46.433.000,00
Jumlah	48.391.000,00

- 2 Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada reklasifikasi aset sebesar Rp54.305.123.710,98 merupakan Aset tetap yang sebelumnya masih dalam pengerjaan namun setelah pekerjaan tersebut selesai maka dilakukan reklasifikasi sesuai jenis asetnya :

Dinas Kesehatan sebesar Rp7.476.031.025,00 merupakan reklasifikasi Bangunan Puskesmas Pelangiran, Puskesmas Sapat dan Puskesmas Teluk Belengkong yang sebelumnya tercatat pada Konstruksi Dalam Pengerjaan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp46.829.092.685,98 yang terdiri dari Pembangunan Jembatan pada Ruas 6 Pulau Kijang - Sanglar Kec. Reteh (Lanjutan) senilai Rp2.270.866.229,12, Rekonstruksi Jalan Ruas Pekan Tua - Pengalihan Paket B sebesar Rp20.467.950.241,55, Pembangunan Gedung Kantor Camat Teluk Belengkong di Kecamatan Teluk Belengkong senilai Rp2.816.001.240,00, Pembanguna Mall Pelayanan Publik senilai Rp6.260.232.686,80 dan Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Tembilahan - Terusan Mas (DAK) senilai Rp14.653.424.988,51 dan Rp360.617.300 merupakan utang belanja moda 2024 yang berdasarkanhasil review inspektorat tidak diakui sebagai utang dikarenakan pada saat pelaksanaan review tidak menyampaikan dokumen yang dibutuhkan

Nama SKPD	reklasifikasi aset (Rp)
Dinas Kesehatan	7.476.031.025,00
Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang	46.829.092.685,98
Jumlah	54.305.123.710,98

- 4 Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada dicatat sebagai Ekstrakomtable sebesar Rp15.016.449,92 pada Dinas Kesehatan berupa perencanaan Rehabilitasi Pustu Catur Karya dan Pustu Mekar Sari.

Nama SKPD	Dicatat pada Daftar Ekstrakontabel (Tidak memenuhi Batas Kapitalisasi Aset Tetap) dan Pemeliharaan (Rp)
Dinas Kesehatan	15.016.449,92
Jumlah	15.016.449,92

5.3.1.3.7

AKUMULASI PENYUSUTAN

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir s.d 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.337.565.979.040,71 dan Rp3.119.955.288.476,79

Akumulasi Penyusutan Aset dibagi menjadi dua yaitu Akumulasi Penyusutan untuk Aset Tetap dan Akumulasi untuk Penyusutan Aset lain lain yang merupakan Aset Rusak Berat. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir disusutkan menjadi 2 Kelompok yaitu :

- 1 Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan 31 Desember 2024.
- 2 Perhitungan Penyusutan Aset Rusak Berat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan 31 Desember 2024.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Perhitungan Penyusutan Aset tetap tersebut diakumulasi sampai dengan tahun 2022 dengan metode Pendekatan tahunan dengan metode perhitungan garis lurus.

Saldo akumulasi penyusutan sampai dengan tahun 2023 berjumlah Rp3.119.955.288.476,79 mengalami penambahan sebesar Rp231.243.008.197,05 yang terdiri dari koreksi reklas, koreksi tambah, mutasi masuk dan Beban akumulasi penyusutan serta mengalami pengurangan sebesar Rp13.632.317.633,13 yang terdiri dari koreksi kurang, reklasifikasi dan mutasi keluar, sehingga saldo akumulasi penyusutan sampai dengan tahun 2024 berjumlah Rp3.337.565.979.040,71 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Selanjutnya di Jelaskan pada Lampiran 13

Nama SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Pendidikan	282.433.920.557,48	40.313.160.231,74	2.466.309.429,67	320.280.771.359,55
Dinas Kesehatan	173.678.144.756,33	22.613.345.469,80	415.085.078,57	195.876.405.147,56
Rsud Puri Husada	98.859.028.744,25	11.258.290.557,19	476.900.000,00	109.640.419.301,44
Rsud Tengku Sulung	32.341.429.576,95	2.101.296.459,86	0,02	34.442.726.036,79
Rsud Raja Musa	52.105.516.579,18	6.001.858.933,05	0,00	58.107.375.512,23
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	1.465.596.129.289,76	67.942.854.953,19	0,00	1.533.538.984.242,95
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	329.033.607.972,27	29.497.704.637,46	0,00	358.531.312.609,73
Satuan Polisi Pamong Praja	4.058.221.669,91	412.383.792,80	0,00	4.470.605.462,71
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	10.496.771.639,89	1.859.807.813,59	0,02	12.356.579.453,46
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24.207.750.421,52	720.444.241,65	0,00	24.928.194.663,17
Dinas Sosial	3.362.960.440,34	136.835.284,80	0,00	3.499.795.725,14
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	3.145.573.099,63	160.366.427,88	107.352.736,27	3.198.586.791,24
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pp	3.981.710.214,49	317.103.077,03	0,00	4.298.813.291,52
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	17.673.563.180,46	1.669.550.316,23	0,01	19.343.113.496,68
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5.853.752.405,84	714.524.640,46	0,00	6.568.277.046,30
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	22.627.941.694,63	205.699.835,02	0,01	22.833.641.529,64
Dinas Perhubungan	120.138.904.613,73	8.786.003.911,36	0,03	128.924.908.525,06
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	6.095.855.966,07	460.772.502,16	930.361,35	6.555.698.106,88
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	2.135.975.793,66	54.261.895,33	7.630.000,00	2.182.607.688,99
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.399.559.655,28	406.416.046,85	60.942.000,00	3.745.033.702,13
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Dan Kebudayaan	27.546.255.246,99	2.750.234.428,64	6.923.230,00	30.289.566.445,63
Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	7.259.105.252,11	1.117.783.907,25	0,00	8.376.889.159,36
Dinas Perikanan	9.970.752.896,66	228.306.297,52	0,01	10.199.059.194,17
Dinas Perkebunan	36.988.676.689,92	4.241.576.970,21	0,01	41.230.253.660,12
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan	10.220.403.766,21	917.877.178,38	0,00	11.138.280.944,59
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	17.526.988.943,52	1.492.045.849,13	0,01	19.019.034.792,64
Sekretariat Daerah	95.708.270.417,39	10.957.464.142,79	7.227.907.800,94	99.437.826.759,24
Sekretariat DPRD	41.737.572.662,71	3.037.217.062,00	0,00	44.774.789.724,71
Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah	7.125.624.044,56	301.259.243,80	0,00	7.426.883.288,36
Badan Pendapatan Daerah	9.002.469.562,05	285.821.843,25	0,01	9.288.291.405,29



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Badan Keuangan Dan Aset Daerah	104.716.414.050,23	3.455.000.398,45	2.442.348.836,12	105.729.065.612,56
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.584.253.955,10	142.008.191,77	0,00	5.726.262.146,87
Inspektorat Daerah	2.884.586.494,55	263.525.429,36	0,00	3.148.111.923,91
Kecamatan Tembilahan	11.663.803.304,84	1.004.444.347,17	0,00	12.668.247.652,01
Kecamatan Tembilahan Hulu	3.478.840.576,15	240.179.606,19	193.269.080,02	3.525.751.102,32
Kecamatan Tempuling	6.865.997.703,05	570.647.869,37	0,00	7.436.645.572,42
Kecamatan Batang Tuaka	2.254.173.007,03	130.495.236,75	0,00	2.384.668.243,78
Kecamatan Concong	2.810.371.081,42	293.120.216,97	0,00	3.103.491.298,39
Kecamatan Enok	6.843.624.801,19	396.385.016,82	0,00	7.240.009.818,01
Kecamatan Gaung	3.095.803.945,23	226.831.165,52	0,01	3.322.635.110,74
Kecamatan Gaung Anak Serka	5.814.639.266,74	548.344.624,52	0,01	6.362.983.891,25
Kecamatan Kateman	5.259.783.189,71	354.012.089,55	0,00	5.613.795.279,26
Kecamatan Kempas	3.933.224.868,60	217.460.802,07	0,01	4.150.685.670,66
Kecamatan Kemuning	3.299.909.159,39	389.348.780,74	193.269.080,00	3.495.988.860,13
Kecamatan Keritang	2.467.977.317,68	127.407.544,69	0,00	2.595.384.862,37
Kecamatan Kuala Indragiri	2.204.871.958,32	148.210.303,25	18.450.000,01	2.334.632.261,56
Kecamatan Mandah	3.016.211.387,27	234.447.426,78	0,00	3.250.658.814,05
Kecamatan Pelangiran	3.319.564.062,16	244.599.689,45	15.000.000,00	3.549.163.751,61
Kecamatan Pulau Burung	1.198.995.798,62	38.699.406,58	0,00	1.237.695.205,20
Kecamatan Reteh	5.461.628.992,75	523.102.568,47	0,00	5.984.731.561,22
Kecamatan Sungai Batang	3.202.191.424,59	131.964.833,84	0,02	3.334.156.258,41
Kecamatan Tanah Merah	2.893.825.956,95	218.271.484,32	0,00	3.112.097.441,27
Kecamatan Teluk Belengkong	654.358.583,37	37.407.008,38	0,00	691.765.591,75
Badan Kesuatuan Bangsa Dan Politik	2.717.799.838,06	344.826.205,62	0,00	3.062.626.043,68
Jumlah	3.119.955.288.476,79	231.243.008.197,06	13.632.317.633,13	3.337.565.979.040,71

Adapun rincian akumulasi penyusutan per jenis akun asset sebagai berikut:

Jenis Aset	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Total Akumulasi Penyusutan 2024
Akumulasi	1.199.000,00	1.199.000,00	0,00	2.398.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	35.435.000,00	0,00	0,00	35.435.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotoruntuk Barang	686.295.000,00	0,00	0,00	686.295.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung TakBermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	230.604.000,00	0,00	0,00	230.604.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat	24.013.086.549,00	2.551.794.872,23	474.000.000,00	26.090.881.421,23
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	6.353.484.228,42	1.296.136.274,66	0,00	7.649.620.503,08
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	37.263.831.491,81	1.042.106.656,44	28.700.000,03	38.277.238.148,22



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	44.394.126.609,30	3.243.346.305,17	1.946.531.571,42	45.690.941.343,05
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	33.463.219.199,30	970.620.730,72	2.473.458.510,00	31.960.381.420,02
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak	2.330.614.797,00	115.649.475,00	34.378.720,00	2.411.885.552,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	503.562.900,00	21.252.500,00	0,00	524.815.400,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan DaratBermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	2.244.899.682,16	380.691.128,58	0,00	2.625.590.810,74
Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	19.807.482.596,70	1.368.609.715,60	0,00	21.176.092.312,30
Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-AlatAngkutan Apung Bermotor Khusus	1.057.211.806,00	6.557.900,00	0,00	1.063.769.706,00
Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-AlatAngkutan Apung Bermotor untuk Barang	567.876.800,00	70.234.600,00	0,00	638.111.400,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Compressor	8.088.357,14	700.285,71	0,00	8.788.642,85
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	3.229.114.070,85	99.592.714,30	0,00	3.328.706.785,15
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Feeder	158.760.000,00	0,00	0,00	158.760.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Mesin Bor	69.715.057,14	992.971,43	0,00	70.708.028,57
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan SAR Mountenering	16.302.875,00	7.768.692,86	0,00	24.071.567,86
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-PeralatanSelam	4.105.357,15	1.642.142,86	0,01	5.747.500,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-PerlengkapanKebakaran Hutan	687.639.700,00	126.016.271,43	1.886.000,00	811.769.971,43
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	13.770.988.424,78	14.014.100,00	0,00	13.785.002.524,78
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	1.221.000,00	2.442.000,00	0,00	3.663.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Peralatan Las	45.880.670,00	5.925.810,00	0,00	51.806.480,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Listrik	90.916.392,50	14.860.075,00	0,00	105.776.467,50



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	99.000,00	615.500,00	0,00	714.500,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Pabrik Es	146.501.571,02	7.259.800,00	0,00	153.761.371,02
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Pengangkat Bermesin	728.000,00	145.600,00	0,00	873.600,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	2.292.000,00	2.527.000,00	0,00	4.819.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus	551.681.000,00	0,00	0,00	551.681.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	130.803.813,41	3.275.800,10	0,00	134.079.613,51
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada	861.145.898,90	82.002.823,35	0,00	943.148.722,25
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	3.096.688,00	1.448.344,00	0,00	4.545.032,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam	46.502.965,10	19.135.450,20	0,00	65.638.415,30
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu	23.928.000,00	200.000,00	0,00	24.128.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja	16.427.909,00	0,00	0,00	16.427.909,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Service	6.519.250,00	0,00	0,00	6.519.250,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)	17.197.372,00	10.061.800,00	0,00	27.259.172,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel TakBermesin-Peralatan Tukang Besi	8.905.340,00	530.680,00	0,00	9.436.020,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel TakBermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	24.596.700,00	3.029.400,00	0,00	27.626.100,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel TakBermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	720.000,00	1.080.000,00	0,00	1.800.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel TakBermesin-Perkakas Bengkel Listrik	427.713.825,00	10.497.400,00	0,00	438.211.225,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel TakBermesin-Perkakas Khusus (Special Tools)	10.738.000,00	0,00	0,00	10.738.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel TakBermesin-Perkakas Pengangkat	2.500.000,00	1.000.000,00	0,00	3.500.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Mesin	1.257.824.250,00	48.366.250,00	0,00	1.306.190.500,00
Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Aggregate and Concrete Equipment	40.941.000,00	4.549.000,00	0,00	45.490.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-AlatPengangkat	773.201.000,00	670.000,00	0,00	773.871.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-AsphaltEquipment	0,00	13.438.146,00	0,00	13.438.146,00
Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Compacting Equipment	601.035.000,00	99.800.000,00	0,00	700.835.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Excavator	31.408.317.194,47	3.724.305.146,83	0,01	35.132.622.341,29
Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Grader	327.425.000,00	142.850.000,00	0,00	470.275.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Hauler	2.446.549.650,00	0,00	0,00	2.446.549.650,00
Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Mesin Proses	1.114.157.170,00	62.786.534,00	0,00	1.176.943.704,00
Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor	553.500.000,00	0,00	0,00	553.500.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya	256.500.000,00	0,00	0,00	256.500.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	18.073.485.336,55	2.038.767.132,50	9.961.000,00	20.102.291.469,05
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-AlatPenyimpan Perlengkapan Kantor	13.503.574.159,90	1.781.979.180,93	0,00	15.285.553.340,83
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-AlatReproduksi (Penggandaan)	831.275.250,00	41.524.000,00	0,00	872.799.250,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	511.386.250,00	1.280.000,00	1.338.000,00	511.328.250,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-MesinHitung/Mesin Jumlah	99.733.773,00	0,00	0,00	99.733.773,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat	52.790.754,40	13.455.063,60	0,00	66.245.818,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak	3.171.808.967,05	302.280.361,00	0,00	3.474.089.328,05
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi	1.382.327.748,80	308.368.937,20	0,00	1.690.696.686,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	20.654.812.539,42	1.649.728.076,00	0,00	22.304.540.615,42
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	1.187.475,00	791.650,00	0,00	1.979.125,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat	11.578.161.158,90	893.550.832,60	0,00	12.471.711.991,50
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU	231.020.240,00	276.135.060,00	0,00	507.155.300,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung	9.284.391.412,01	625.027.346,80	0,00	9.909.418.758,81
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa	276.649.000,00	0,00	0,00	276.649.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana	1.039.963.611,00	86.660.200,70	2.400.000,00	1.124.223.811,70
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata	1.495.006.760,00	721.969.740,00	0,00	2.216.976.500,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	15.371.135.992,70	936.688.241,00	0,00	16.307.824.233,70
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi Anatomy	4.120.411.048,00	2.599.900.000,00	0,00	6.720.311.048,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik	4.313.223.194,77	185.605.970,00	0,00	4.498.829.164,77
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	2.677.205.179,20	532.954.992,80	0,00	3.210.160.172,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi	54.210.480,00	15.184.320,00	0,00	69.394.800,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT	3.458.405.645,90	172.983.597,80	0,00	3.631.389.243,70
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	1.161.683.902,00	42.719.217,60	0,00	1.204.403.119,60
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-AlatKedokteran Bedah	23.490.431.262,66	2.493.237.193,30	0,00	25.983.668.455,96
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-AlatKedokteran Gigi	10.414.471.471,20	450.845.704,20	0,00	10.865.317.175,40
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-AlatKedokteran ICCU	1.452.317.616,00	534.247.304,00	0,00	1.986.564.920,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-AlatKedokteran Kamar Jenazah/Mortuary	2.630.503.084,00	0,00	0,00	2.630.503.084,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-AlatKedokteran Kulit dan Kelamin	29.538.000,00	6.907.200,00	0,00	36.445.200,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-AlatKedokteran Nuklir	604.617.300,00	57.430.000,00	0,00	662.047.300,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-AlatKedokteran Transfusi Darah	72.369.700,00	3.949.400,00	0,00	76.319.100,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-AlatKedokteran Umum	59.981.310.415,44	10.098.698.834,09	0,00	70.080.009.249,53
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-AlatKesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	15.082.035.464,92	1.278.778.889,60	0,00	16.360.814.354,52
Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-	0,00	1.068.750,00	0,00	1.068.750,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan- Alat Kerja Penerbangan Lainnya	854.650,00	1.709.300,00	0,00	2.563.950,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	4.089.600,00	1.022.400,00	0,00	5.112.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum- Alat Kesehatan Kepolisian	85.740.000,00	88.480.000,00	0,00	174.220.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum- Alat Kesehatan Matra Udara	3.537.612.000,00	0,00	0,00	3.537.612.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut	399.646.823,40	94.535.383,40	0,00	494.182.206,80
Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga	29.139.500,00	11.691.000,00	0,00	40.830.500,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	767.774.529,24	73.289.858,80	0,00	841.064.388,04
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat	8.640.000,00	660.000,00	0,00	9.300.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	89.355.000,00	0,00	0,00	89.355.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	118.101.000,00	0,00	0,00	118.101.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi	95.912.400,00	5.826.600,00	0,00	101.739.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-AlatKomunikasi Khusus	197.600.000,00	49.400.000,00	0,00	247.000.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-AlatKomunikasi Lainnya	543.750,00	1.087.500,00	0,00	1.631.250,00
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-AlatKomunikasi Radio UHF	2.109.676.000,00	4.531.800,00	0,00	2.114.207.800,00
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-AlatKomunikasi Radio VHF	153.591.000,00	0,00	0,00	153.591.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-AlatKomunikasi Sosial	143.531.300,00	1.298.000,00	0,00	144.829.300,00
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-AlatKomunikasi Telephone	3.003.754.819,73	174.292.327,80	0,00	3.178.047.147,53



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Measuring/Testing Device	282.815.230,67	70.966.307,67	0,00	353.781.538,34
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply	27.720.000,00	2.310.000,00	0,00	30.030.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium FisikaNuklir/Elektronika-Assembly/Counting System	89.428.800,00	9.103.200,00	0,00	98.532.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium FisikaNuklir/Elektronika-Modular Counting and Scientific Electronic	56.224.933,35	8.590.466,68	0,00	64.815.400,03
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan	27.818.057,15	736.000,00	0,00	28.554.057,15
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium KualitasAir dan Tanah	3.772.000,00	0,00	0,00	3.772.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	36.000,00	72.000,00	0,00	108.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat LaboratoriumLingkungan Hidup-Alat Laboratorium KualitasUdara	166.029.218,42	60.571.428,57	0,00	226.600.646,99
Akumulasi Penyusutan Alat LaboratoriumLingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang	362.188.027,12	80.642.192,73	0,00	442.830.219,85
Akumulasi Penyusutan Alat LaboratoriumStandarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat LaboratoriumStandarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	730.000,00	1.095.000,00	0,00	1.825.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	0,00	3.442.378,40	0,00	3.442.378,40
Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Baju Pengaman	17.237.686,50	15.438.291,00	0,00	32.675.977,50
Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Masker	46.323.200,00	0,00	0,00	46.323.200,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek	8.403.200,00	16.806.400,00	0,00	25.209.600,00
Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	407.603.500,00	225.000,00	0,00	407.828.500,00
Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Panen	102.262.000,00	0,00	0,00	102.262.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	634.985.424,78	19.962.462,50	0,00	654.947.887,28
Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	130.084.090,00	3.837.500,00	0,00	133.921.590,00
Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	273.335.340,00	0,00	0,00	273.335.340,00
Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-AlatPasca Panen	210.569.125,00	8.961.250,00	0,00	219.530.375,00
Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-AlatPengolahan Lainnya	202.320.000,00	0,00	0,00	202.320.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-AlatPengolahan Tanah dan Tanaman	725.163.065,75	580.190,75	0,00	725.743.256,50
Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-AlatProduksi Perikanan	664.980.049,00	14.743.250,00	0,00	679.723.299,00
Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan	750.000,00	300.000,00	0,00	1.050.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK	117.878.649,80	34.910.349,95	0,00	152.788.999,75
Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	2.062.003.885,88	30.908.534,99	37.632.342,55	2.055.280.078,32
Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah BidangStudi:Bahasa Indonesia	1.974.081.155,94	1.841.100,00	37.847.945,84	1.938.074.310,10
Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah BidangStudi:IPA Atas	38.815.595,43	498.000,00	0,00	39.313.595,43
Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah BidangStudi:IPA Dasar	1.518.001.822,23	9.372.420,00	300.100,00	1.527.074.142,23
Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah BidangStudi:IPA Lanjutan	373.724.547,00	43.290.160,50	0,00	417.014.707,50



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah BidangStudi:IPA Menengah	232.342.704,00	24.903.779,00	0,00	257.246.483,00
Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah BidangStudi:PKN	116.240.886,33	1.553.215,00	0,00	117.794.101,33
Akumulasi Penyusutan Alat Peraga PraktikSekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	2.280.147.523,22	9.169.750,00	0,00	2.289.317.273,22
Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja	930.000,00	1.395.000,00	0,00	2.325.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Meteorological Equipment	115.151.000,00	0,00	0,00	115.151.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat ProteksiRadiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Meubelair	52.434.043.106,90	8.168.113.513,93	4.750.000,00	60.597.406.620,83
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat	3.598.171.724,52	508.322.486,49	0,00	4.106.494.211,01
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	3.468.345.637,00	834.410.400,00	105.000,00	4.302.651.037,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	3.027.752.714,26	9.763.000,00	0,00	3.037.515.714,26
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-AlatDapur	1.378.617.531,60	161.555.296,90	0,00	1.540.172.828,50
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-AlatPendingin	27.800.054.288,76	1.740.785.008,63	0,00	29.540.839.297,39
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-AlatRumah Tangga Lainnya (Home Use)	20.371.710.828,96	2.147.028.962,10	500.000,00	22.518.239.791,06
Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air	258.544.000,00	0,00	0,00	258.544.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian	34.315.250,00	58.180.500,00	700.000,00	91.795.750,00
Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat SAR Lainnya	17.850.000,00	0,00	370.000,00	17.480.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Sekolah-Alat Peraga Praktik Studi:Kesenian	259.611.711,06	94.603.093,20	0,00	354.214.804,26
Akumulasi Penyusutan Alat Sekolah-Alat Peraga Praktik Studi:Olahraga	78.039.500,00	18.597.700,00	0,00	96.637.200,00
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat StudioLainnya	55.996.818,30	3.465.454,60	0,00	59.462.272,90



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	12.507.940.189,94	1.476.869.746,60	0,00	13.984.809.936,54
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	294.080.804,80	96.362.224,80	0,00	390.443.029,60
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	5.488.803.638,60	384.376.113,10	0,00	5.873.179.751,70
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-PeralatanCetak	42.766.000,00	9.710.600,00	3.991.400,00	48.485.200,00
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-PeralatanStudio Gambar	0,00	15.762.000,00	0,00	15.762.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	1.092.749.000,00	0,00	0,00	1.092.749.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan	1.244.800,00	311.200,00	0,00	1.556.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	1.059.391.999,00	5.994.400,00	180.000,00	1.065.206.399,00
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	1.780.172.288,00	900.000,00	0,00	1.781.072.288,00
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	2.726.000,00	920.000,00	0,00	3.646.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	808.080.152,61	58.014.050,00	0,00	866.094.202,61
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain	5.099.000,00	0,00	0,00	5.099.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-AlatUkur/Pembanding	183.821.650,00	23.887.620,00	0,00	207.709.270,00
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Anak	256.829.000,00	0,00	0,00	256.829.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-TakaranLainnya	15.546.000,00	0,00	0,00	15.546.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Universal Tester	12.667.000,00	150.000,00	0,00	12.817.000,00
Akumulasi Penyusutan AlatSekolah-Alat Peraga Praktik Studi:Agama	2.125.000,00	766.740,00	0,00	2.891.740,00
Akumulasi Penyusutan AlatSekolah-Alat Peraga Praktik Studi:IPS	1.181.573.521,49	31.886.640,00	19.405.594,60	1.194.054.566,89
Akumulasi Penyusutan AlatSekolah-Alat Peraga Praktik Studi:Keterampilan	4.802.100,00	2.234.400,00	0,00	7.036.500,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	138.373.993,45	17.991.056,14	0,00	156.365.049,59



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/AirBaku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	1.252.814.277,21	100.317.217,24	713.597.266,59	639.534.227,86
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/AirBaku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/AirBaku	42.316.875,00	6.292.575,00	0,00	48.609.450,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	42.893.970,00	108.672.910,00	0,00	151.566.880,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	74.982.481,28	7.007.403,83	0,00	81.989.885,11
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	85.749.540,00	9.898.360,00	0,00	95.647.900,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	3.864.996.711,57	453.214.778,54	0,00	4.318.211.490,11
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	112.205.660,00	13.690.980,00	0,00	125.896.640,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	13.272.000,00	948.000,00	0,00	14.220.000,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor	41.998.650,00	4.274.825,00	0,00	46.273.475,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	31.593.000,00	2.632.750,00	0,00	34.225.750,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	10.664.859.376,41	518.416.838,23	5.842.121.921,83	5.341.154.292,81
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	185.351.964,89	18.006.930,18	0,00	203.358.895,07
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	110.183.937,48	33.139.423,72	0,00	143.323.361,20
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	4.761.396.210,35	392.578.720,43	0,00	5.153.974.930,78
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	2.043.057.897,94	232.871.612,37	55.608.510,64	2.220.320.999,67



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	4.100.319.930,79	390.551.170,68	0,01	4.490.871.101,46
Akumulasi Penyusutan Bangunan GedungTempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	2.165.086.980,68	158.864.331,97	0,00	2.323.951.312,65
Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara PerambuanPenerangan Pantai	21.528.200,00	1.866.725,00	0,00	23.394.925,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan MenaraPerambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	26.546.983,79	1.659.186,49	0,00	28.206.170,28
Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut	23.874.200,00	3.410.600,00	0,00	27.284.800,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	69.746.647,88	7.433.233,62	0,01	77.179.881,49
Akumulasi Penyusutan Bangunan PengairanPasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut	63.590.320,00	7.549.340,00	0,00	71.139.660,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan BencanaAlam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	62.570.775.168,99	6.123.193.002,00	0,00	68.693.968.170,99
Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan BencanaAlam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	63.029.214.567,36	3.989.931.418,23	0,00	67.019.145.985,59
Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan BencanaAlam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	539.770.576,49	73.157.107,30	0,00	612.927.683,79
Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan BencanaAlam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	7.188.061.667,22	1.026.865.952,46	0,00	8.214.927.619,68



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Bangunan PengamanSungai/Pantai dan Penanggulungan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulungan Bencana Alam	24.471.780.129,11	1.657.436.028,88	0,00	26.129.216.157,99
Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	107.578.400,00	10.757.840,00	0,00	118.336.240,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	2.042.938.282,51	320.635.295,54	0,00	2.363.573.578,05
Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	31.610.600,00	2.257.900,00	0,00	33.868.500,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	661.219.577,74	14.597.933,33	0,01	675.817.511,06
Akumulasi Penyusutan BangunanPengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	94.171.566,40	12.001.235,20	0,00	106.172.801,60
Akumulasi Penyusutan BangunanPengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	1.366.578.234,19	121.537.612,92	0,00	1.488.115.847,11
Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	221.038.282,02	8.341.000,00	0,00	229.379.282,02
Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan	453.289.915,13	89.721.760,49	0,00	543.011.675,62
Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu	9.502.464,39	633.497,63	0,01	10.135.962,01
Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	491.672.208,73	36.410.306,17	1.045.830,00	527.036.684,90
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-	109.426.956.748,18	15.362.138.322,16	217.243.441,26	124.571.851.629,08
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	125.389.288,32	44.863.368,24	73.180,00	170.179.476,56
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	829.053.879,75	990.823.408,67	142.719.453,32	1.677.157.835,10
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik	36.287.272,73	2.267.954,55	0,00	38.555.227,28



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	816.293.690,22	169.072.296,61	0,00	985.365.986,83
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.437.538.633,20	236.538.693,67	0,00	1.674.077.326,87
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	140.889.698.505,65	16.449.281.771,00	0,02	157.338.980.276,63
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.327.920.890,98	566.843.340,80	0,00	3.894.764.231,78
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	48.637.534,03	4.383.282,13	0,00	53.020.816,16
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	2.732.800.821,39	329.668.511,70	0,00	3.062.469.333,09
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan GedungTerminal/Pelabuhan/B andara	23.360.406.409,67	1.485.051.551,35	0,00	24.845.457.961,02
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	7.482.894.692,18	629.908.406,04	0,01	8.112.803.098,21
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	30.404.485.653,82	5.724.159.849,82	0,01	36.128.645.503,63
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan	11.368.280,00	1.033.480,00	0,00	12.401.760,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	9.924.780,00	8.417.955,00	0,00	18.342.735,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Taman	498.341.977,05	52.300.473,70	0,01	550.642.450,74
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	271.828.394,82	28.397.691,61	0,00	300.226.086,43
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	1.429.044.517,54	195.846.885,51	0,00	1.624.891.403,05
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	14.652.644.968,02	1.261.659.513,04	0,00	15.914.304.481,06
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1.222.490.674,26	110.646.612,95	0,00	1.333.137.287,21
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	22.543.061.027,41	1.786.881.732,93	0,00	24.329.942.760,34



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	39.931.148,12	16.031.292,04	0,01	55.962.440,15
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus	38.756.400,00	2.422.275,00	0,00	41.178.675,00
Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/AirBaku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	841.811.146,49	56.390.817,49	0,02	898.201.963,96
Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/AirBaku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	4.148.800,00	345.733,33	0,00	4.494.533,33
Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/AirBaku-Instalasi Air Tanah Dalam	53.554.000,00	5.820.933,33	0,00	59.374.933,33
Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Buangan Domestik	1.097.075.466,68	145.455.833,34	0,00	1.242.531.300,02
Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Buangan Pertanian	15.186.000,00	1.012.400,00	0,00	16.198.400,00
Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Kotor Lainnya	151.794.857,14	9.487.178,57	0,00	161.282.035,71
Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	833.845.314,93	74.778.839,85	0,00	908.624.154,78
Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi	1.781.422.315,79	111.338.894,74	0,00	1.892.761.210,53
Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk	83.415.357,00	7.404.098,00	0,00	90.819.455,00
Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya	0,00	12.742.406,00	0,00	12.742.406,00
Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas	314.962.800,00	26.246.900,00	0,00	341.209.700,00
Akumulasi Penyusutan Instalasi Lain-Instalasi Lain	8.183.981.000,00	0,00	0,00	8.183.981.000,00
Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga	0,00	2.164.662,50	0,00	2.164.662,50
Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel(PLTD)	1.669.784.548,69	130.944.617,11	0,00	1.800.729.165,80
Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	135.820.424,70	20.609.449,95	0,00	156.429.874,65
Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman- Instalasi Pengaman Lainnya	1.879.238.736,84	118.389.921,05	0,00	1.997.628.657,89
Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman- Instalasi Pengaman Penangkal Petir	132.757.726,61	8.281.748,54	249.750,00	140.789.725,15



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	796.710.000,00	0,00	0,00	796.710.000,00
Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik	1.376.470.000,00	0,00	0,00	1.376.470.000,00
Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat	39.677.249,47	3.309.386,87	0,00	42.986.636,34
Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa	461.785.195.082,47	32.065.243.262,45	0,00	493.850.438.344,92
Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten	1.013.851.090.581,70	35.703.100.963,92	0,00	1.049.554.191.545,62
Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	20.623.902.141,66	4.198.771.144,01	0,00	24.822.673.285,67
Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya	1.487.828.354,00	4.135.206.843,85	0,00	5.623.035.197,85
Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Nasional	35.453.755.243,89	1.286.866.539,20	0,00	36.740.621.783,09
Akumulasi Penyusutan Jalan-Landasan PacuPesawat Terbang	62.390.340.460,00	0,00	0,00	62.390.340.460,00
Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Cabang Distribusi	5.635.930.556,37	798.194.047,64	0,00	6.434.124.604,01
Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Induk Distribusi	270.991.500,00	20.845.500,00	0,00	291.837.000,00
Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Pembawa	11.940.000,00	995.000,00	0,00	12.935.000,00
Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	805.730.444,49	65.823.487,04	0,00	871.553.931,53
Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas	210.676.524,33	15.048.323,17	0,00	225.724.847,50
Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi	2.935.858.172,70	292.550.382,17	0,00	3.228.408.554,87
Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi	1.046.841.226,14	148.017.470,40	0,00	1.194.858.696,54
Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	307.794.074,76	42.836.799,56	0,00	350.630.874,32
Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-JaringanListrik Lainnya	19.135.321,14	6.511.879,93	0,00	25.647.201,07
Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-JaringanTransmisi	2.719.296.570,71	312.704.037,63	0,00	3.032.000.608,34



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon- Jaringan Telepon di atas Tanah	234.929.100,00	18.518.650,00	0,00	253.447.750,00
Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus	51.322.210,94	4.665.655,54	0,00	55.987.866,48
Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional	5.736.720,01	956.120,00	-	6.692.840,01
Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Penyeberangan	141.040.025,55	16.455.516,18	0,00	157.495.541,73
Akumulasi Penyusutan Jembatan-JembatanLabuh/Sandar Pada Terminal	4.595.303.845,69	472.531.966,55	0,00	5.067.835.812,24
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	1.824.850.367,50	133.121.775,00	10.742.800,00	1.947.229.342,50
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-KomputerUnit Lainnya	41.615.523,75	10.556.047,50	0,00	52.171.571,25
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-PersonalComputer	95.920.389.895,58	12.195.526.028,64	1.416.970.034,25	106.698.945.889,97
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	3.843.233.212,43	170.236.411,60	0,00	4.013.469.624,03
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	601.018.063,25	24.299.700,00	0,00	625.317.763,25
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	5.649.451.696,28	137.101.751,30	7.630.000,00	5.778.923.447,58
Akumulasi Penyusutan Meja dan KursiKerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	356.031.800,00	8.394.180,00	0,00	364.425.980,00
Akumulasi Penyusutan Meja dan KursiKerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangn Pejabat	218.466.090,00	8.353.800,00	0,00	226.819.890,00
Akumulasi Penyusutan Meja dan KursiKerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	3.576.320.479,99	157.978.920,80	0,00	3.734.299.400,79
Akumulasi Penyusutan Meja dan KursiKerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	496.054.779,00	36.233.150,00	0,00	532.287.929,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan	4.785.601.048,16	348.172.511,25	74.547.470,99	5.059.226.088,42
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya	106.274.375,00	2.859.750,00	0,00	109.134.125,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Mini Computer	2.648.244.827,96	209.853.474,26	2.045.000,00	2.856.053.302,22



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	1.513.286.442,94	19.691.718,75	4.865.480,00	1.528.112.681,69
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	20.656.183.061,94	1.889.281.921,37	0,00	22.545.464.983,31
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untukDokumentasi	500.000,00	200.000,00	0,00	700.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium	53.333,34	79.999,99	0,00	133.333,33
Akumulasi Penyusutan Peralatan LaboratoriumHydrodinamica-Cavitation Tunnel	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan LaboratoriumHydrodinamica-Data Acquisition and AnalyzingSystem	3.949.999,99	0,00	0,00	3.949.999,99
Akumulasi Penyusutan Peralatan LaboratoriumHydrodinamica-MOB	495.000,00	55.000,00	0,00	550.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan LaboratoriumHydrodinamica-Pemesinan:Painting Shop	108.333,34	162.499,99	0,00	270.833,33
Akumulasi Penyusutan Peralatan LaboratoriumHydrodinamica-Peralatan Umum	3.290.000,00	0,00	0,00	3.290.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan LaboratoriumHydrodinamica-Photo and Film Equipment	5.610.000,00	0,00	0,00	5.610.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan LaboratoriumHydrodinamica-Towing Carriage	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Air	33.158.300,00	5.186.900,00	0,00	38.345.200,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Atletik	4.075.000,00	1.362.500,00	0,00	5.437.500,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Senam	222.204.520,89	24.883.328,98	0,00	247.087.849,87
Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	2.927.161.860,72	19.265.400,00	53.548.143,00	2.892.879.117,72
Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	152.209.560,00	51.576.975,00	0,00	203.786.535,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena MF/MW	220.000,00	188.000,00	0,00	408.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena UHF	93.424.200,00	231.300,00	0,00	93.655.500,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima HF	85.300.000,00	0,00	0,00	85.300.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar SHF	16.813.000,00	400.000,00	0,00	17.213.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar UHF	433.195.300,00	18.013.900,00	0,00	451.209.200,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar VHF/FM	119.688.800,00	16.245.900,00	0,00	135.934.700,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Program Input Equipment	45.774.880,18	5.125.000,00	0,00	50.899.880,18
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Sumber Tenaga	29.192.675,00	13.558.225,00	0,00	42.750.900,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Humidity Control	20.826.400,00	2.603.300,00	0,00	23.429.700,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF	1.856.950.000,00	225.000,00	0,00	1.857.175.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola	84.548.300,00	23.356.100,00	0,00	107.904.400,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave Terestrial	2.490.000,00	0,00	0,00	2.490.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW	560.000,00	140.000,00	0,00	700.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio	468.425,00	145.370,00	0,00	613.795,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena	2.224.585.600,00	351.334.800,00	0,00	2.575.920.400,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Solid Material Handling Equipment	103.000.000,00	0,00	0,00	103.000.000,00
Akumulasi Penyusutan PeralatanProses/Produksi-Size Reduction Size Balargement Equipment	108.020.379,00	27.005.094,75	0,00	135.025.473,75



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	594.000,00	198.000,00	0,00	792.000,00
Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	22.990.659,84	3.213.446,56	0,00	26.204.106,40
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	1.911.424.773,73	265.970.891,40	0,01	2.177.395.665,12
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi	237.943.900,00	18.307.700,54	0,00	256.251.600,54
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	52.034.700,00	0,00	0,00	52.034.700,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	205.881.400,05	0,00	0,00	205.881.400,05
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Biologi	312.874.620,50	20.054.355,30	0,00	332.928.975,80
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Energi Surya	38.895.312,50	19.664.250,00	0,00	58.559.562,50
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Film	3.350.000,00	808.125,00	0,00	4.158.125,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Fisika	626.864.625,50	36.193.066,30	368.750,00	662.688.941,80
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Hidrokimia	24.661.000,00	4.162.125,00	875.000,00	27.948.125,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	39.158.000,00	937.500,00	0,00	40.095.500,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Kimia	1.105.630.089,29	145.991.696,50	5.737.500,00	1.245.884.285,79
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	764.497.687,50	309.174.250,00	161.250,00	1.073.510.687,50
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Lain	4.075.361.093,17	345.635.493,75	0,00	4.420.996.586,92
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Makanan	8.746.062,50	3.133.937,50	0,00	11.880.000,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Model Hidrolika	56.293.125,00	8.041.875,00	0,00	64.335.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Patologi	4.963.016.285,94	134.814.368,38	0,00	5.097.830.654,32
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Pelapisan Logam	18.933.750,00	3.786.750,00	0,00	22.720.500,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Pembuatan Pola	66.145.250,00	400.000,00	0,00	66.545.250,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Pendidikan	1.500.000,00	375.000,00	0,00	1.875.000,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Peleburan	3.150.000,00	0,00	350.000,00	2.800.000,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	5.315.500,00	1.687.500,00	0,00	7.003.000,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Umum	2.672.800.500,70	632.176.687,51	0,00	3.304.977.188,21
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Analytical Instrument	19.404.433,33	583.333,34	186.666,66	19.801.100,01
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-General Laboratory Tool	13.463.342,95	432.917,87	0,00	13.896.260,82
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Glassware Plastic/Utensils	105.333,34	157.999,99	0,00	263.333,33
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Laboratorium Kearsipan	23.985.802,33	0,00	106.500,00	23.879.302,33
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi	369.361.525,00	45.068.719,88	0,00	414.430.244,88
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika	112.355.250,00	11.844.375,00	0,00	124.199.625,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi	1.167.416.144,37	69.986.663,88	0,00	1.237.402.808,25
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi	12.676.093,75	6.519.531,25	0,00	19.195.625,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	43.561.875,00	17.424.750,00	0,00	60.986.625,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	455.866.162,26	12.275.250,00	0,00	468.141.412,26
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	64.131.625,00	0,00	90.625,00	64.041.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi	1.258.033.931,88	61.529.619,38	0,00	1.319.563.551,26
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi	19.992.000,00	0,00	0,00	19.992.000,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	1.101.164.528,75	269.067.358,75	2.996.875,00	1.367.235.012,50
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan	14.483.125,00	2.896.625,00	0,00	17.379.750,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik	250.000,00	62.500,00	0,00	312.500,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	50.634.000,00	0,00	0,00	50.634.000,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim	12.040.250,00	12.040.250,00	0,00	24.080.500,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Laboratory Safety Equipment	53.375.391,57	17.532.549,94	0,00	70.907.941,51
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Laboratorium Hematologi dan Urinolisis	2.949.687.427,11	319.300.317,18	0,00	3.268.987.744,29
Akumulasi Penyusutan pada Jalan Desa	12.223.249.913,32	1.531.228.959,90	0,00	13.754.478.873,22
Akumulasi Penyusutan pada Jalan Kabupaten	120.729.182.396,64	8.574.282.394,90	0,00	129.303.464.791,54
Akumulasi Penyusutan pada Jalan Provinsi	27.131.280,00	4.521.880,00	0,00	31.653.160,00
Akumulasi Penyusutan Perambuan- Bangunan Lainnya	455.651.099,90	42.519.238,16	0,00	498.170.338,06
Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti- Candi/Tugu	3.379.591,84	211.224,49	0,00	3.590.816,33
Akumulasi Penyusutan Senjata Api-Alat Keamanan	844.414.181,99	724.500,00	0,00	845.138.681,99
Akumulasi Penyusutan Senjata Api-Alat Nuklir, Biologi dan Kimia	74.725.000,00	10.633.333,33	0,00	85.358.333,33
Akumulasi Penyusutan Senjata Api-Alat Penjinak Bahan Peledak (Aljihandak)	33.900.000,00	0,00	0,00	33.900.000,00
Akumulasi Penyusutan Senjata Api-Senjata Lain-lain	86.997.250,00	888.700,00	0,00	87.885.950,00
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	117.686.417,06	13.102.474,59	0,00	130.788.891,65
Jumlah	3.119.955.288.476,79	231.243.008.197,06	13.632.317.633,13	3.337.565.979.040,71

5.3.1.4

ASET LAINNYA

Saldo Aset Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp91.982.337.669,83 dan Rp168.116.592.196,83 yang terdiri dari:

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
91.982.337.669,83	168.116.592.196,83



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Tagihan Penjualan Angsuran	716.350.000,00	1.106.950.000,00
Tuntutan Ganti Rugi	1.387.336.979,92	1.535.099.766,92
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	14.006.135.056,00	14.006.135.056,00
Aset Tak Berwujud	4.106.608.100,00	4.066.987.200,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(3.144.010.300,00)	(2.910.686.660,00)
Aset Lain-Lain	69.250.779.833,91	68.712.279.833,91
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.659.138.000,00	81.599.827.000,00
	91.982.337.669,83	168.116.592.196,83
	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.4.1 TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN	716.350.000,00	1.106.950.000,00

Tagihan Penjualan Angsuran tahun 2024 sebesar Rp716.350.000,00 dan tahun 2023 sebesar Rp1.106.950.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

SKPD	31 Desember 2023	Mutasi		31 Desember 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	1.106.950.000,00	0,00	390.600.000,00	716.350.000,00
Jumlah	1.106.950.000,00	0,00	390.600.000,00	716.350.000,00

Tagihan Penjualan Angsuran merupakan tagihan atas penjualan aset lelang dengan rincian antara lain sebagai berikut :

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp1.106.950,00 merupakan kendaraan atas lelang/penjualan pada tahun 2013 kendaraan dinas roda 4 (empat) dengan jumlah kendaraan sebanyak 11 Unit dengan total nilai sisa pelunasan sebesar Rp1.051.100.000,00 dan kendaraan roda dua sebanyak 5 unit dengan total nilai sisa pelunasan sebesar Rp14.000.000,00, dan sisa angsuran lelang kendaraan dinas tahun 2007 sebanyak 4 unit kendaraan roda empat senilai Rp41.850.000,00.

Mengalami pengurangan sebesar Rp390.600.000,00 dikarenakan adanya pengembalian berupa Kendaraan Roda Empat merk Land Rover BM 1 G dengan atas nama pemenang lelang H. Indra Muchlis Adnan, sehingga per 31 Desember 2024 saldo Tagihan Penjualan Angsuran adalah sebesar Rp716.350.000,00

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.4.2 TUNTUTAN GANTI RUGI	1.387.336.979,92	1.535.099.766,92

Tuntutan Ganti Rugi tahun 2024 sebesar Rp1.387.336.979,92 dan tahun 2023 sebesar Rp1.535.099.766,92 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Akun	31 Desember 2023	Mutasi		31 Desember 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Tuntutan Perbendaharaan	242.000.322,00	0,00	7.425.000,00	234.575.322,00
Tuntutan Ganti Rugi	1.293.099.444,92	0,00	140.337.787,00	1.152.761.657,92
Jumlah	1.535.099.766,92	0,00	147.762.787,00	1.387.336.979,92

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.4.2.1 TUNTUTAN PERBENDAHARAAN	234.575.322,00	242.000.322,00

Saldo Tuntutan Perbendaharaan (TP) per 31 Desember 2024 sebesar Rp234.575.322,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp242.000.322,00. Tuntutan Perbendaharaan tersebut merupakan kerugian daerah yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2008 s.d. 2024 yang menjadi tanggungan para bendahara yang sudah diterbitkan SKTJM.

Pembebanan sementara terhadap Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran tahun 2008 s.d. 2016 yang telah diterbitkan surat pembebanannya oleh Wakil Bupati Indragiri Hilir dengan Nomor Kpts.362/VII/HK-2015 tanggal 26 Juli 2015 tentang Pembebanan Penggantian Sementara Terhadap Pihak Terkait Kerugian Negara. Adapun rincian saldo tuntutan perbendaharaan sebagai berikut:

Saldo Tuntutan Perbendaharaan :		
Tahun 2013	Rp	43.474.669,00
Tahun 2015	Rp	191.100.653,00
Jumlah	Rp	234.575.322,00

Saldo Tuntutan Perbendaharaan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp242.000.322,00, terdapat koreksi penyetoran sebesar Rp7.425.000,00 dikarenakan penyetoran ke BUN, sehingga saldo tuntutan perbendaharaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp234.575.322,00, dengan rincian sebagai berikut:

SKPD	31 Desember 2023	Mutasi		31 Desember 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Badan Keuangan dan Aset Daerah	242.000.322,00	0,00	7.425.000,00	234.575.322,00
Jumlah	242.000.322,00	0,00	7.425.000,00	234.575.322,00

Tabel dibawah ini merupakan penjelasan saldo tuntutan perbendaharaan tahun Anggaran 2024 :



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Nama	Tagihan s.d 2023	Koreksi	Disetor s.d 2024	Keterangan
YONSON DERI (Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Kesra Setda Inhil)	50.899.669,00	(7.425.000,00)	0,00	SKTJM
Jumlah	50.899.669,00	(7.425.000,00)	0,00	
Total			43.474.669,00	

Selain saldo di dalam Neraca terdapat juga saldo Tuntutan Perbendaharaan yang masih bersifat informasi Laporan Hasil Pemeriksaan senilai Rp5.790.195.218,23 terdiri atas:

Tahun	BPK (dalam Rp)	APIP (dalam Rp)	Total (dalam Rp)
2022		167.438.861,00	167.438.861,00
2021	0,00	3.395.000,00	3.395.000,00
2020	0,00	63.205.000,00	63.205.000,00
2019	0,00	275.838.500,00	275.838.500,00
2017	0,00	670.025.277,64	670.025.277,64
2016	66.400.000,00	205.467.924,00	271.867.924,00
2015	0,00	267.798.419,00	267.798.419,00
2014	0,00	326.714.564,00	326.714.564,00
2013	21.816.151,44	422.638.405,00	444.454.556,44
2012	0,00	315.587.802,00	315.587.802,00
2011	28.894.169,00	42.395.343,00	71.289.512,00
2010	362.078.207,07	632.302.190,65	994.380.397,72
2009	0,00	6.505.599,00	6.505.599,00
2008	156.995.779,00	111.628.371,43	268.624.150,43
2007	1.537.766.515,00	36.976.524,00	1.574.743.039,00
2006	0,00	66.597.456,00	66.597.456,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	1.729.160,00	1.729.160,00
Total	2.173.950.821,51	3.616.244.396,72	5.790.195.218,23

5.3.1.4.2.2 TUNTUTAN GANTI RUGI	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	1.152.761.657,92	1.293.099.444,92

Saldo Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.152.761.657,92 dan Rp1.293.099.444,92. Adapun rincian saldo tuntutan ganti rugi sebagai berikut:

Saldo Tuntutan Ganti Rugi:

Tahun 2003	Rp	119.605.000,00
Tahun 2008	Rp	739.807.773,00
Tahun 2012	Rp	124.293.104,00
Tahun 2015	Rp	8.707.125,00
Tahun 2016	Rp	63.905.305,00
Tahun 2017	Rp	3.735.305,92
Tahun 2020	Rp	92.708.045,00
Jumlah	Rp	1.152.761.657,92

Pada tahun 2024 mengalami pengurangan Saldo Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp140.337.787,00, dengan rincian penambahan pengurangan saldo tuntutan ganti rugi sebagai berikut :

SKPD	31 Desember 2023	Mutasi		31 Desember 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.293.099.444,92	0,00	140.337.787,00	1.152.761.657,92
Jumlah	1.293.099.444,92	0,00	140.337.787,00	1.152.761.657,92

Tabel dibawah ini merupakan penjelasan saldo tuntutan ganti rugi tahun Anggaran 2024 :

Nama	Tagihan s.d 2023	Koreksi	Disetor s.d 2024	Keterangan
Nusirwan (Kasi Pelayanan Umum pada Kantor Camat Kateman)	33.605.000,00	0,00	0,00	SKTJM (yang bersangkutan meninggal dunia)
Tarmizi (Staf Kantor Camat Keritang, Mantan UPTD Kecamatan Kateman Sungai Guntung)	86.000.000,00	0,00	0,00	SKTJM (yang bersangkutan meninggal dunia)



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Hj. Murnisyah (Kasubbag Pembukuan, Verifikasi dan Kas Daerah Tahun 2007)	741.807.773,00	0,00	2.000.000,00	SKTJM
Ngadirin, SKM	27.200.000,00	0,00	0,00	SKTJM, LKPD 2016 No.22/LHP/XVIII.PEK/06/2017 tanggal 9 juni 2017
Ricky Putra	32.800.000,00	0,00	0,00	SKTJM, LKPD 2016 No.22/LHP/XVIII.PEK/06/2017 tanggal 9 juni 2017
H.M. Najamuddin	10.060.500,00	(1.000.000,00)	5.155.195,00	SKTJM, LKPD 2016 No.22/LHP/XVIII.PEK/06/2017 tanggal 9 juni 2017
Shinta	0,00	0,00	0,00	SKTJM, LKPD 2016 No.22/LHP/XVIII.PEK/06/2017 tanggal 9 juni 2017
Al Yusroni Pagta	29.909.592,00	(1.729.267,00)	28.180.325,00	LHP Inspektorat No:34/INSP/VII/2016 tanggal 26 Juli 2017
Kamren	0,00	0,00	0,00	LHP Inspektorat No:062/INSP-KH/XI/2017 tanggal 21 November 2017
H. Syahbudi	3.735.305,92	0,00	0,00	SKTJM (Nilai Awal Rp.42.956.249,92)
Ahmad Fitri, S.Sos/H.Taruddin, SE,MM	0,00	0,00	0,00	LHP No.011/Insp-LHA/VI/2021 Tanggal 14 Juni 2021 (SKTJM)
Junaidy, S.Sos, M,Si	104.295.250,00	(7.272.750,00)	80.000.250,00	Inspektorat Kabupaten 2015 No: 13/INSP/XII/KH/2015 Tanggal 21 Desember 2015
Wanhar, S.Sos, M.Si	122.270.854,00	0,00	15.000.000,00	Inspektorat Kabupaten 2015 No: 13/INSP/XII/KH/2015 Tanggal 21 Desember 2015
Villy Rafli, S, STP (Lurah Sapat Kec. Kuindra)	8.707.125,00	0,00	0,00	
Hady Rahman	22.227.000,00	0,00	0,00	SKTJM, Inspektorat Daerah No . 012/INSP-LHA/VI/2021 Tanggal 28 Juni 2021
M. Nazar, S.Sos, M.Si	40.800.545,00	0,00	0,00	Inspektorat Daerah No . 042/INSP-LHA/ I/2021 Tanggal 25 Januari 2021
Zainal Mustofa	29.680.500,00	0,00	0,00	Inspektorat Daerah No . 042/INSP-LHA/ I/2021 Tanggal 25 Januari 2021
Jumlah	1.293.099.444,92	(10.002.017,00)	130.335.770,00	
Total			1.152.761.657,92	

Saldo kerugian pihak ketiga yang masih bersifat informasi Laporan Hasil Pemeriksaan sebesar Rp41.530.004.022,67 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	TGR (dalam Rp)	Pihak Ketiga (dalam Rp)	Total (dalam Rp)
2023	281.214.133,91	0,00	281.214.133,91
2022	342.766.979,00	300.174.126,83	642.941.105,83
2021	251.211.688,75	233.726.557,00	484.938.245,75
2020	1.759.220.359,73	0,00	1.759.220.359,73
2019	67.138.406,00	35.515.327,36	102.653.733,36
2018	35.062.611,05	0,00	35.062.611,05
2017	1.405.382.735,74	145.740.351,32	1.551.123.087,06
2016	1.122.826.096,41	3.692.104.709,11	4.814.930.805,52
2015	1.601.483.804,53	20.831.046,10	1.622.314.850,63
2014	483.070.793,19	1.633.452.475,00	2.116.523.268,19
2013	8.286.538.800,55	23.815.081,45	8.310.353.882,00
2012	359.397.506,00	0,00	359.397.506,00
2011	304.777.636,00	4.149.413.282,70	4.454.190.918,70
2010	548.764.401,10	27.242.445,00	576.006.846,10



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2009	3.902.649.817,00	186.141.598,88	4.088.791.415,88
2008	6.187.015.096,30	1.092.628.336,77	7.279.643.433,07
2007	14.943.000,00	1.984.451.330,89	1.999.394.330,89
2006	387.274.000,00	0,00	387.274.000,00
2005	62.945.620,00	21.000.000,00	83.945.620,00
2004	580.083.869,00	0,00	580.083.869,00
Total	27.983.767.354,26	13.546.236.668,41	41.530.004.022,67

5.3.1.4.3	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
		14.006.135.056,00	14.006.135.056,00
Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kabupaten Indragiri Hilir per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp14.006.135.056,00 dan Rp14.006.135.056,00, dengan rincian sebagai berikut:			

SKPD	31 Desember 2023	Mutasi		31 Desember 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Tanaman Pangan Holtikulturan dan Peternakan	9.274.187.056,00	0,00	0,00	9.274.187.056,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	4.731.948.000,00	0,00	0,00	4.731.948.000,00
Jumlah	14.006.135.056,00	0,00	0,00	14.006.135.056,00

- 1 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan PT Lahan Hijau Inhil Utama dengan Nomor 69.39/DKPP-2001/511.2 dan Nomor 38/LHIU/I/2001. Melalui SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Perjanjian Kerjasama tersebut tentang Pembangunan Pasar Indragiri yang terletak di Tanah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Berukuran seluas 3.674 M2 yang berada di jalan Yos Sudarso. Pembangunan Pasar Indragiri menggunakan sistem Kerjasama. Sistem Kerjasama antara lain menyebutkan:
- Sistem Kerjasama yang dimaksud dengan perjanjian pembangunan Pasar Indragiri ini adalah BOT (*Built Operate Transfer*) dalam jangka waktu pembangunan Fisik selama 3 tahun dan waktu Operasional selama 25 tahun.
 - Terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini maka pihak kedua harus mengembalikan seluruh bangunan sarana dan prasarana lainnya kepada Pihak Pertama dalam hal ini Pihak Pertama adalah Pemkab Inhil dan Pihak ke dua adalah PT lahan Hijau Utama.
 - Pihak Kedua Menjamin bahwa pada saat pengembalian hak atas Tanah dan Bangunan serta sarana dan prasarana lainnya seperti dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berada dalam keadaan bebas dari segala macam bentuk ikatan hak tanggung/jaminan dari kredit atau segala macam bentuk tuntutan hukum apapun.

Dalam Perjanjian kerja sama Pihak Pertama Memberikan Penyertaan Modal berupa :

a Tanah seluas 3.674 M2 x	Rp	2.946.548.000,00
Rp802.000		
b Dana Fisik	Rp	550.000.000,00
c Dana Perencanaan Detail	Rp	270.000.000,00
Jumlah Keseluruhan	Rp	3.766.548.000,00

Pembangunan Pasar Rakyat yang terletak di Kota Tembilahan dengan nilai Investasi sebesar Rp965.400.000,00. Jumlah Total Kemitraan Sekretariat Daerah Kepada Pihak Ketiga Berjumlah Rp4.731.948.000,00. Informasi Terkait Penyertaan Modal pada penjelasan diatas dapat dilihat pada Kontrak kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan PT Lahan Hijau.

- 2 Kerja sama Pemanfaatan Aset Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura saldo Tahun 2023 sebesar Rp9.274.187.056,00 terdiri dari aset kemitraan tahun 2009 sebesar Rp483.567.000,00 berupa Power Thereser, RMU, Pompa Air yang dikerjasamakan kepada Kelompok Tani Kembang Sari Desa Kembang Mekar Sari, Tahun 2010 sebesar Rp434.889.000,00 berupa Power Thereser (Alat Perontok Padi), Pompa Air dan Hidrotiller, Tahun 2011 sebesar Rp712,537.000,00 berupa Hidrotiller dan RMU yang dikerjasamakan KT. Karya Tani, Hand Traktor dikerjasamakan KT. Tunas Buana, Power Thereser dikerjasamakan ke Kelompok Tani Mekar Sari, Corn Seller dikerjasamakan ke Kelompok Tani Banjarsari, RMU dikerjasamakan ke Kelompok Tani Murni Jaya, Tahun 2012 sebesar Rp2.372.605.900,00 berupa Hidrotiller, Power Thereser (Alat Perontok Mesin), Corn Seller, RMU yang dikerjasamakan ke Kelompok Tani di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir, Tahun 2013 sebesar Rp681.646.300,00 berupa Plastik Sealer, Trolly Benih, Hand Tractor, Mixer dan Mesin Jahit Karung, Tahun 2014 sebesar Rp1.735.914.606,00 berupa Handtractor, Hidrotiller, RMU, Power Thereser, Corn Seller, Peddy Mower, tahun 2015 sebesar Rp1.54.578.4000,00 berupa RMU, Power Thereser dan Pompa Air.
- Tahun 2016 sebesar Rp236.829.000,00 berupa Pompa Air, *Power Theser*, *Corn Seller*, RMU, *Hand Traktor*, Tahun 2017 sebesar Rp266.063.750,00 berupa *Power Theser*, *Rice Milling Unit* (RMU), Traktor Tangan dengan peralatannya, Tahun 2018 sebesar Rp618.232.500,00 berupa 6 unit *Rice Milling Unit* (RMU) sebesar Rp314.987.500,00 1 unit dimanfaatkan UPJA Mekar Sari berdasarkan KSO Nomor Kpts.521/DTPHP-PSP/776 tanggal 15 Mei 2018, 1 unit oleh Kelompok Tani Muda Taruna berdasarkan KSO : Kpts.521/DTPHP-PSP/779 tanggal 15 Mei 2018, 1 unit oleh Kelompok Tani Pelita Jaya berdasarkan KSO Kpts.521/DTPHP-PSP/779 tanggal 15 Mei 2018, 1 unit oleh Kelompok tani Karya berdasarkan KSO : Kpts.521/DTPHP-PSP/778 tanggal 15 Mei 2018, 1 unit oleh UPJA Sepakat berdasarkan KSO : Kpts.521/DTPHP-PSP/777 tanggal 15 Mei 2018, 1 unit oleh Kelompok Tani Sumber Rezeki berdasarkan KSO Kpts.521/DTPHP-PSP/775 tanggal 15 Mei 2018. 11 unit Alat Perontok Mesin (Power Theresar) sebesar Rp227.222.000,00, 1 unit di dimanfaatkan oleh Kelompok Tani Mina Padi berdasarkan KSO Kpts.521/DTPHP-PSP/914 tanggal 07 Juni 2020, 1 unit lainnya dimanfaatkan oleh Kelompok Tani Muda Taruna Parit 12 berdasarkan KSO : Kpts.521/DTPHP-PSP/910 tanggal 07 Juni 2018, 1 unit oleh Kelompok Tani Karya Tani Parit 9 berdasarkan KSO Kpts.521/DTPHP-PSP/911 tanggal 07 Juni 2018.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1 unit oleh Kelompok Tani Sadariah berdasarkan KSO Kpts.521/DTPHP-PSP/908 tanggal 07 Juni 2018, 4 unit oleh Kelompok Tani Mawar indah berdasarkan KSO Nomor Kpts.521/DTPHP-PSP/916 tanggal 17 Juni 2018, 1 unit oleh Kelompok Tani Usaha Baru berdasarkan KSO Nomor Kpts.521/DTPHP-PSP/915 tanggal 17 Juni 2018, 1 unit oleh Kelompok Tani Waspada berdasarkan KSO Nomor Kpts.521/DTPHP-PSP/913 tanggal 17 Juni 2018, 1 unit oleh Kelompok Tani Bagan Jaya berdasarkan KSO Kpts.521/DTPHP-PSP/912 tanggal 17 Juni 2018. 1 unit Alat Pengering Gabah (*Drayer*) sebesar Rp76.022.500,00. Dimanfaatkan oleh Poktan Pelita Jaya berdasarkan KSO Nomor Kpts.521/DTPHP-PSP/809 tanggal 18 Mei 2018 dan pada tahun 2020 dari Realisasi Belanja Modal pengadaan mesin pengurai/*combine Harvester* Sedang berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian Milik Pemerintah di Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : Kpts.521/DPTPHP-TPH/191 tanggal 17 Desember 2020 berupa 1 unit *Combine Harvester Crown* Dwi Sri DCH 9270 yang dimanfaatkan oleh UPJA Usaha Maju.

5.3.1.4.4

ASET TAK BERWUJUD

Aset Tak Berwujud ini merupakan pengadaan berupa software sampai dengan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp4.106.608.100,00 dan Rp4.066.987.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

		31 Desember 2024		31 Desember 2023
		(Rp)		(Rp)
ASET TAK BERWUJUD		4.106.608.100,00		4.066.987.200,00
Aset Tak Berwujud ini merupakan pengadaan berupa software sampai dengan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp4.106.608.100,00 dan Rp4.066.987.200,00 dengan rincian sebagai berikut:				
SKPD	31 Desember 2023	Mutasi		31 Desember 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Pendidikan	51.288.000,00	0,00	0,00	51.288.000,00
RSUD Puri Husada Tembilahan	59.750.000,00	0,00	0,00	59.750.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	441.200.000,00	34.620.900,00	0,00	475.820.900,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	71.570.500,00	0,00	0,00	71.570.500,00
Sekretariat Daerah	414.577.000,00	0,00	0,00	414.577.000,00
Badan Pendapatan Daerah	516.983.000,00	0,00	0,00	516.983.000,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	110.898.000,00	0,00	0,00	110.898.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	797.772.000,00	0,00	0,00	797.772.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	361.219.100,00	0,00	0,00	361.219.100,00
Dinas Kesehatan	578.945.000,00	5.000.000,00	0,00	583.945.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	134.750.000,00	0,00	0,00	134.750.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	42.076.000,00	0,00	0,00	42.076.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	274.260.000,00	0,00	0,00	274.260.000,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	42.900.000,00	0,00	0,00	42.900.000,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	69.050.000,00	0,00	0,00	69.050.000,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	99.748.600,00	0,00	0,00	99.748.600,00
Jumlah	4.066.987.200,00	39.620.900,00	0,00	4.106.608.100,00

Berikut ini rincian dan jenis aset tak berwujud :

Nama SKPD	Jenis Aset Tak Berwujud (ATB)	Tahun Perolehan	Harga Perolehan
Dinas Pendidikan	SIMPLE (Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Elektronik)	2018	51.288.000,00
Dinas Kesehatan	Software /Aplikasi Komputer	2018	84.323.000,00
Dinas Kesehatan	Cityzen E Health Profil	2018	67.459.000,00
Dinas Kesehatan	System Digital Interaktif Presentasi Mobile	2018	219.239.000,00
Dinas Kesehatan	E Health Software Engine	2021	49.574.000,00
Dinas Kesehatan	ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETER	2022	158.350.000,00
Dinas Kesehatan	Https://www/pkmsungaisala k.com	2023	5.000.000,00
RSUD Puri Husada Tembilahan	Domain Website	2010	59.750.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	RKPD ONLINE	2017	208.925.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Aplikasi Sistem Informasi Evaluasi dan Kinerja Pembangunan Daerah (SIEVK)	2018	154.800.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Aplikasi Jurnal Online	2023	21.940.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Aplikasi Berbasis Android/IOS satu Peta Indragiri Hilir	2023	55.535.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Domain https://api.insap.inhilkab.go.id	2024	34.620.900,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Aplikasi E-Perizinan Kabupaten Indragiri Hilir (perizinan.inhilkab.go.id)	2016	71.570.500,00
Sekretariat Daerah			
- Bagian Umum	e-Office Berbasis Web	2015	209.369.000,00
- Bagian Umum	Aplikasi Analisis Standar Belanja (ASB)	2019	72.545.000,00
- Bagian Pembangunan	Aplikasi Pelaporan Online	2017	95.700.000,00
- Bagian Organisasi	Aplikasi E-SAKIP	2022	36.963.000,00
Badan Pendapatan Daerah	Aplikasi PBB/SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak)	2013	137.023.000,00
Badan Pendapatan Daerah	Aplikasi PAD-NPB	2017	106.311.000,00
Badan Pendapatan Daerah	Aplikasi C-SPTPD	2017	53.531.000,00
Badan Pendapatan Daerah	Aplikasi H2H	2017	53.531.000,00
Badan Pendapatan Daerah	Aplikasi Modul e-PAD PBB, e-PAD BPHTB, eResponsive, e-PAD Non PBB dan BPHTB, Web Service e-PAD PADL, Web Service BPHTB dan Web Service PBB	2019	166.587.000,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	Web Pembangunan Desa	2017	95.717.000,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	Aplikasi <i>Window Microsoft SQL Server</i> 2008 R2	2022	15.181.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Aplikasi GIS Wilayah I	2016	217.700.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Aplikasi GIS Wilayah II	2016	314.313.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Aplikasi GIS Wilayah III	2016	265.759.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Aplikasi GIS Jalan dan Jembatan	2017	161.352.500,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Penerapan Aplikasi GIS Pada Website Konsolidasi Dinas PUTR Kab. Indragiri Hilir	2022	99.933.300,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rancang Bangun Sistem Informasi Website Konsolidasi pada Dinas PUTR Kab. Indragiri Hilir	2022	99.933.300,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Aplikasi Valid Aset	2019	134.750.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Apliksi SIKUDa	2019	42.076.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	Sistem Informasi Produk Hukum Daerah Kab. Inhil	2022	94.350.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	MKC-001 CKAN <i>Theme Template</i>	2022	90.000.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	Software Pembangunan Portal Layanan Publik Terintegrasi	2022	89.910.000,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Aplikasi <i>Bapokting</i> dan Web	2022	42.900.000,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Aplikasi Marketplace - UMKM	2023	69.050.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Aplikasi E-BOOK Agama Versi 1, Aplikasi E-BOOK IPA Versi 1, Aplikasi E-BOOK Umum Versi 1, Aplikasi E-BOOK IPS Versi 1, Aplikasi E-BOOK SASTRA Versi 1	2023	99.748.600,00
Jumlah			4.106.608.100,00

Adapun perhitungan terinci dari Amortisasi Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada lampiran 10.

5.3.1.4.5		31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
	AKUMULASI AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD	(3.144.010.300,00)	(2.910.686.660,00)
	Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp-3.144.010.300,00 dan Rp-2.910.686.660,00. Adapun rincian mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2024 sebagai berikut:		

SKPD	31 Desember 2023	Mutasi		31 Desember 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Pendidikan	51.288.000,00	0,00	0,00	51.288.000,00
RSUD Puri Husada Tembilahan	59.750.000,00	0,00	0,00	59.750.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	63.320.500,00	29.693.680,00	0,00	93.014.180,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	71.570.500,00	0,00	0,00	71.570.500,00
Sekretariat Daerah	392.399.200,00	7.392.600,00	0,00	399.791.800,00
Badan Pendapatan Daerah	516.983.000,00	0,00	0,00	516.983.000,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	101.789.400,00	3.036.200,00	0,00	104.825.600,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	797.772.000,00	0,00	0,00	797.772.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	241.299.140,00	39.973.320,00	0,00	281.272.460,00
Dinas Kesehatan	454.190.600,00	52.499.600,00	0,00	506.690.200,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.207.600,00	841.520,00	0,00	5.049.120,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	13.475.000,00	2.695.000,00	0,00	16.170.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	91.722.000,00	54.852.000,00	0,00	146.574.000,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	17.160.000,00	8.580.000,00	0,00	25.740.000,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	13.810.000,00	13.810.000,00	0,00	27.620.000,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	19.949.720,00	19.949.720,00	0,00	39.899.440,00
Jumlah	2.910.686.660,00	233.323.640,00	0,00	3.144.010.300,00

Adapun penjelasan lebih terinci tentang akumulasi amortisasi aset tak berwujud sebagai berikut :

Nama SKPD	Harga Perolehan	Masa Manfaat	Beban Amortisasi ATB	Akumulasi Amortisasi ATB
Dinas Pendidikan	51.288.000,00	5 Tahun	0,00	51.288.000,00
RSUD Puri Husada Tembilahan	59.750.000,00	5 Tahun	0,00	59.750.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	475.820.900,00	50 Tahun	29.693.680,00	93.014.180,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	71.570.500,00	5 Tahun	0,00	71.570.500,00
Sekretariat Daerah	414.577.000,00	5 Tahun	7.392.600,00	399.791.800,00
Badan Pendapatan Daerah	516.983.000,00	5 Tahun	0,00	516.983.000,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	110.898.000,00	5 Tahun	3.036.200,00	104.825.600,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	797.772.000,00	5 Tahun	0,00	797.772.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	361.219.100,00	5 Tahun	39.973.320,00	281.272.460,00
Dinas Kesehatan	583.945.000,00	5 Tahun	52.499.600,00	506.690.200,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	134.750.000,00	5 Tahun	841.520,00	5.049.120,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	42.076.000,00	5 Tahun	2.695.000,00	16.170.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	274.260.000,00	5 Tahun	54.852.000,00	146.574.000,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	42.900.000,00	5 Tahun	8.580.000,00	25.740.000,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	69.050.000,00	5 Tahun	13.810.000,00	27.620.000,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	99.748.600,00	5 Tahun	19.949.720,00	39.899.440,00
Jumlah	4.106.608.100,00		233.323.640,00	3.144.010.300,00

Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*Straightline Method*). Adapun perhitungan terinci dari Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada lampiran 10.

5.3.1.4.6	ASET LAIN-LAIN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
		69.250.779.833,91	68.712.279.833,91

Nilai buku aset lain lain tahun 2023 adalah sebesar Rp68.712.279.833,91 dan nilai aset lain-lain tahun 2024 adalah sebesar Rp69.250.779.833,91. Nilai yang disajikan tersebut merupakan nilai buku, adapun pencatatan Aset lain-lain berdasarkan Harga Perolehan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Aset lain-lain tahun 2023 adalah sebesar Rp161.224.284.478,15 mengalami penambahan sebesar Rp1.320.652.080,00 yang terdiri dari reklasifikasi aset tetap dicatat sebagai rusak berat sebesar Rp782.152.080,00 dan pencatatan aset Eks Lelang Tahun 2013 yang telah ditarik kembali berupa kendaraan roda empat BM 1 G sebesar Rp538.500.000,00 sehingga saldo aset lain-lain Tahun 2024 adalah sebesar Rp162.544.936.558,15. Dalam CaLK akan dijelaskan nilai aset lain-lain sebelum dinilaibukukan. Perhitungan penambahan dan pengurangan pada tabel masih disajikan sebesar nilai perolehan aset tersebut. Hal ini untuk mengetahui besaran nilai aset tersebut sebelum disajikan sebesar nilai bukunya, adapun rekapitulasi penambahan dan pengurangan aset lain-lain disajikan pada Lampiran 20, 21, 22 dan 23.

Uraian	31 Desember 2023	Mutasi		31 Desember 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Aset Lain-Lain	161.224.284.478,15	1.320.652.080,00	0,00	162.544.936.558,15
Jumlah	161.224.284.478,15	1.320.652.080,00	0,00	162.544.936.558,15

Adapun penambahan dan pengurangan sebagai berikut :

SKPD	31 Desember 2023	Mutasi		31 Desember 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Pendidikan	73.490.363.841,76	0,00	0,00	73.490.363.841,76
Dinas Kesehatan	2.378.441.695,00	0,00	0,00	2.378.441.695,00
Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan	12.974.428.557,35	476.900.000,00	0,00	13.451.328.557,35
Rsud Puri Husada Blud	70.252.260,00	0,00	0,00	70.252.260,00
Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung	247.489.785,00	0,00	0,00	247.489.785,00
Rsud Tengku Sulung Blud	0,00	0,00	0,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa	168.411.500,00	0,00	0,00	168.411.500,00
Rsud Raja Musa Blud	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	31.230.136.391,38	0,00	0,00	31.230.136.391,38
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	256.997.400,00	0,00	0,00	256.997.400,00
Satuan Polisi Pamong Praja	264.518.080,00	0,00	0,00	264.518.080,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	17.354.000,00	0,00	0,00	17.354.000,00
Dinas Sosial	343.850.083,00	0,00	0,00	343.850.083,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	539.461.604,00	0,00	0,00	539.461.604,00
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	3.256.963.592,87	0,00	0,00	3.256.963.592,87
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	877.500,00	0,00	0,00	877.500,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	93.577.000,00	0,00	0,00	93.577.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	197.378.083,33	0,00	0,00	197.378.083,33
Dinas Perhubungan	8.769.160.315,36	0,00	0,00	8.769.160.315,36
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	32.100.000,00	0,00	0,00	32.100.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	104.886.500,00	7.630.000,00	0,00	112.516.500,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	149.934.250,00	60.942.000,00	0,00	210.876.250,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.222.467.507,63	0,00	0,00	1.222.467.507,63
Dinas Perikanan	3.404.917.500,00	0,00	0,00	3.404.917.500,00
Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Dan Kebudayaan	877.997.300,00	0,00	0,00	877.997.300,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan	1.783.301.450,00	0,00	0,00	1.783.301.450,00
Dinas Perkebunan	1.675.845.000,00	0,00	0,00	1.675.845.000,00
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	303.359.000,00	0,00	0,00	303.359.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	285.176.900,00	0,00	0,00	285.176.900,00
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	978.362.216,00	538.500.000,00	0,00	1.516.862.216,00
Badan Pendapatan Daerah	564.982.050,00	0,00	0,00	564.982.050,00
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	91.067.087,00	0,00	0,00	91.067.087,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	579.532.232,00	0,00	0,00	579.532.232,00
Inspektorat Daerah	190.535.852,37	0,00	0,00	190.535.852,37
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	351.385.300,00	0,00	0,00	351.385.300,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	415.024.202,00	0,00	0,00	415.024.202,00
Sekretariat Daerah	1.282.915.317,00	9.961.000,00	0,00	1.292.876.317,00
Sekretariat Dprd	5.786.213.056,00	0,00	0,00	5.786.213.056,00
Kecamatan Tembilahan	424.348.950,00	0,00	0,00	424.348.950,00
Kecamatan Tembilahan Hulu	465.870.250,00	193.269.080,00	0,00	659.139.330,00
Kecamatan Tempuling	161.196.200,00	0,00	0,00	161.196.200,00
Kecamatan Batang Tuaka	565.757.850,00	0,00	0,00	565.757.850,00
Kecamatan Concong	363.572.207,63	0,00	0,00	363.572.207,63
Kecamatan Enok	536.979.000,00	0,00	0,00	536.979.000,00
Kecamatan Gaung	183.383.200,00	0,00	0,00	183.383.200,00
Kecamatan Gaung Anak Serka	300.638.500,00	0,00	0,00	300.638.500,00
Kecamatan Kateman	238.161.450,00	0,00	0,00	238.161.450,00
Kecamatan Kempas	255.418.300,00	0,00	0,00	255.418.300,00
Kecamatan Kemuning	119.988.350,00	0,00	0,00	119.988.350,00
Kecamatan Keritang	281.112.000,00	0,00	0,00	281.112.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Kecamatan Kuala Indragiri	533.239.485,00	18.450.000,00	0,00	551.689.485,00
Kecamatan Mandah	601.025.000,00	0,00	0,00	601.025.000,00
Kecamatan Pelangiran	160.831.800,00	15.000.000,00	0,00	175.831.800,00
Kecamatan Pulau Burung	537.723.750,00	0,00	0,00	537.723.750,00
Kecamatan Reteh	331.799.300,00	0,00	0,00	331.799.300,00
Kecamatan Sungai Batang	15.048.500,00	0,00	0,00	15.048.500,00
Kecamatan Tanah Merah	144.722.676,47	0,00	0,00	144.722.676,47
Kecamatan Teluk Belengkong	623.803.300,00	0,00	0,00	623.803.300,00
Jumlah	161.224.284.478,15	1.320.652.080,00	0,00	162.544.936.558,15

Daftar Aset Lain-lain menurut katagori adalah sebagai berikut :

Reklasifikasi piutang	Rp	1.012.050.454,60
Reklasifikasi Persediaan	Rp	160.104.000,00
Aset tak Berwujud	Rp	258.143.000,00
Rusak Berat	Rp	130.915.551.059,42
Aset Rusak Berat	Rp	29.660.588.044,13
Aset Lain-lain Lainnya	Rp	538.500.000,00
Jumlah Aset Lain-lain	Rp	162.544.936.558,15

Reklasifikasi Piutang sebesar Rp1.012.050.454,60 yang terdiri dari sisa piutang BPJS tahun 2014 sebesar Rp989.566.090,00 dan Koreksi Penyajian Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa ke Aset lain-lain pada RSUD Puri husada sebesar Rp22.484.364,60. Sisa Piutang BPJS sebesar Rp989.566.090,00 pada tahun 2014 tersebut masih tercatat pada Laporan Keuangan tahun 2015 diakun aset lancar. Pada tahun 2016, RSUD Puri Husada Tembilahan diaudit atas Laporan Keuangan 2015 oleh Auditor Independen (KAP), maka untuk piutang tersebut disarankan untuk dilakukan penghapusan karena sudah tidak diakui oleh pihak BPJS. Dan sebelum dilakukan penghapusan maka sisa piutang tersebut direklasifikasi kedalam akun aset tidak digunakan yang merupakan sub akun aset lainnya. Reklasifikasi tersebut tercatat dalam Laporan Keuangan tahun 2016 sampai dengan Laporan Keuangan tahun 2022 RSUD Puri Husada Tembilahan belum melakukan penghapusan piutang atas akun tersebut, adapun untuk uang muka dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Berikut rincian uang muka pengadaan barang/jasa pada RSUD Puri Husada sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nilai
1	Uang Muka PT. Indomedika Mulia Jaya	600.001,60
2	Uang Muka PT. Millenium Pharmacon International Tbk	3.135.000,00
3	Uang Muka PT. Merapi Utama Pharma	6.011.363,00
4	Uang Muka PT. Parit Padang Global	11.913.000,00
5	Uang Muka PT. Rajawali Nusindo	825.000,00
Jumlah		22.484.364,60

Reklasifikasi persediaan barang sebesar Rp160.104.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan realisasi belanja modal berupa Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Bintara dan Jl. Tamtama Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu pada Tahun 2021 namun tidak dapat diakui sebagai aset karena jalan tersebut bukan merupakan Barang Milik Daerah melainkan Barang Milik Negara pada Kodim 0314 Indragiri Hilir dan belum dapat dihapuskan karena belum ada dokumen serah terima antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kodim 0314 Indragiri Hilir.

Aset Lain-lain Lainnya senilai Rp29.660.588.044,13 terdiri dari :

- 1 Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada sebesar Rp1.010.279.202,75 merupakan gedung bangunan yang telah dilakukan pembongkaran namun belum dilakukan penghapusan.
- 2 Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada sebesar Rp14.468.500,00 merupakan reklasifikasi aset tetap berupa kendaraan roda dua (sepeda motor) yang tidak diketahui keberadaanya akibat kecurian berdasarkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian Nomor : Sket/493/VIII/2020/Sat Reskrim tanggal 04 agustus 2020.
- 3 Dinas Pekerjaan Umun dan Tata Ruang sebesar Rp28.635.840.341,38 merupakan reklasifikasi aset tetap berupa Jaringan Pipa Baja dan Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi) yang digunakan oleh PDAM namun belum dilakukan serah terima.

Aset Tak Berwujud Rusak Berat sebesar Rp258.143.000,00 terdiri dari Aplikasi SPPD pada Sekretariat Daerah sebesar Rp70.358.000,00, Sistem Infromasi Evaluasi RKPD pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp53.035.000,00 dan Aplikasi SIM Pelaporan Kegiatan Pembangunan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp134.750.000,00.

Aset Rusak Berat per 31 Desember 2023 sebesar Rp130.133.398.979,42 mengalami penambahan sebesar Rp782.152.080,00 merupakan reklasifikasi aset tetap menjadi rusak berat sehingga saldo aset rusak berat per 31 Desember 2024 sebesar Rp130.915.551.059,42.

Penambahan sebesar Rp782.152.050,00 terdiri dari :

- 1 RSUD Puri Husada Tembilahan sebesar Rp476.900.000,00 yang terdiri dari 1 (satu) unit Mobil Ambulance senilai Rp237.000.000,00, 1 (satu) unit Mobil Jenazah senilai Rp237.000.000,00, 1 (satu) unit dispenser senilai Rp500.000,00 dan 1 (satu) unit Alat Kedokteran Keluarga Berencana Lain-lain senilai Rp2.400.000,00.
- 2 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp7.630.000,00 merupakan 4 (empat) unit Meja kerja.
- 3 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp60.942.000,00 merupakan 9 (sembilan) unit Netbook
- 4 Sekretariat Daerah sebesar Rp9.961.000,00 merupakan 4 (empat) unit Alat Penghancur Kertas
- 5 Kecamatan Tembilahan Hulu sebesar Rp193.269.080,00 merupakan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lain-Lain merk
- 6 Kecamatan Kuala Indragiri sebesar Rp18.450.000,00 merupakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 100 TD senilai 13.700.000,00 dan 1 (satu) unit Sofa senilai Rp4.750.000,00.
- 7 Kecamatan Pelangiran sebesar Rp15.000.000,00 merupakan 1 (satu) unit Sepeda Motor.

Adapun Daftar Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Rusak Berat per OPD adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

SKPD	31 Desember 2023	Mutasi		31 Desember 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Pendidikan	73.490.363.841,76	0,00	0,00	73.490.363.841,76
Dinas Kesehatan	2.378.441.695,00	0,00	0,00	2.378.441.695,00
Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan	10.952.098.900,00	476.900.000,00	0,00	11.428.998.900,00
Rsud Puri Husada Blud	55.783.760,00	0,00	0,00	55.783.760,00
Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung	247.489.785,00	0,00	0,00	247.489.785,00
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa	168.411.500,00	0,00	0,00	168.411.500,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.594.296.050,00	0,00	0,00	2.594.296.050,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	96.893.400,00	0,00	0,00	96.893.400,00
Satuan Polisi Pamong Praja	264.518.080,00	0,00	0,00	264.518.080,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	17.354.000,00	0,00	0,00	17.354.000,00
Dinas Sosial	343.850.083,00	0,00	0,00	343.850.083,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	539.461.604,00	0,00	0,00	539.461.604,00
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	3.256.963.592,87	0,00	0,00	3.256.963.592,87
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	877.500,00	0,00	0,00	877.500,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	93.577.000,00	0,00	0,00	93.577.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	197.378.083,33	0,00	0,00	197.378.083,33
Dinas Perhubungan	8.769.160.315,36	0,00	0,00	8.769.160.315,36
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	32.100.000,00	0,00	0,00	32.100.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	104.886.500,00	7.630.000,00	0,00	112.516.500,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	149.934.250,00	60.942.000,00	0,00	210.876.250,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.222.467.507,63	0,00	0,00	1.222.467.507,63
Dinas Perikanan	3.404.917.500,00	0,00	0,00	3.404.917.500,00
Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Dan Kebudayaan	877.997.300,00	0,00	0,00	877.997.300,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan	1.783.301.450,00	0,00	0,00	1.783.301.450,00
Dinas Perkebunan	1.675.845.000,00	0,00	0,00	1.675.845.000,00
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	303.359.000,00	0,00	0,00	303.359.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	232.141.900,00	0,00	0,00	232.141.900,00
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	978.362.216,00	0,00	0,00	978.362.216,00
Badan Pendapatan Daerah	564.982.050,00	0,00	0,00	564.982.050,00
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	91.067.087,00	0,00	0,00	91.067.087,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	579.532.232,00	0,00	0,00	579.532.232,00
Inspektorat Daerah	190.535.852,37	0,00	0,00	190.535.852,37
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	351.385.300,00	0,00	0,00	351.385.300,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah	415.024.202,00	0,00	0,00	415.024.202,00
Sekretariat Daerah	1.282.915.317,00	9.961.000,00	0,00	1.292.876.317,00
Sekretariat Dprd	5.651.463.056,00	0,00	0,00	5.651.463.056,00
Kecamatan Tembilahan	353.990.950,00	0,00	0,00	353.990.950,00
Kecamatan Tembilahan Hulu	465.870.250,00	193.269.080,00	0,00	659.139.330,00
Kecamatan Tempuling	161.196.200,00	0,00	0,00	161.196.200,00
Kecamatan Batang Tuaka	565.757.850,00	0,00	0,00	565.757.850,00
Kecamatan Concong	363.572.207,63	0,00	0,00	363.572.207,63
Kecamatan Enok	536.979.000,00	0,00	0,00	536.979.000,00
Kecamatan Gaung	183.383.200,00	0,00	0,00	183.383.200,00
Kecamatan Gaung Anak Serka	300.638.500,00	0,00	0,00	300.638.500,00
Kecamatan Kateman	238.161.450,00	0,00	0,00	238.161.450,00
Kecamatan Kempas	255.418.300,00	0,00	0,00	255.418.300,00
Kecamatan Kemuning	119.988.350,00	0,00	0,00	119.988.350,00
Kecamatan Keritang	281.112.000,00	0,00	0,00	281.112.000,00
Kecamatan Kuala Indragiri	533.239.485,00	18.450.000,00	0,00	551.689.485,00
Kecamatan Mandah	601.025.000,00	0,00	0,00	601.025.000,00
Kecamatan Pelangiran	160.831.800,00	15.000.000,00	0,00	175.831.800,00
Kecamatan Pulau Burung	537.723.750,00	0,00	0,00	537.723.750,00
Kecamatan Reteh	331.799.300,00	0,00	0,00	331.799.300,00
Kecamatan Sungai Batang	15.048.500,00	0,00	0,00	15.048.500,00
Kecamatan Tanah Merah	144.722.676,47	0,00	0,00	144.722.676,47
Kecamatan Teluk Belengkong	623.803.300,00	0,00	0,00	623.803.300,00
Jumlah	130.133.398.979,42	782.152.080,00	0,00	130.915.551.059,42

AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN

Penyajian nilai akumulasi penyusutan aset lain-lain dicatat sebesar nilai buku sesuai dengan permendagri nomor 90 tahun 2019. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar Rp82.977.175.102,22 dengan rincian sebagai berikut:

SKPD	31 Desember 2023	Mutasi		31 Desember 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Pendidikan	36.173.869.982,52	0,00	0,00	36.173.869.982,52
Dinas Kesehatan	2.346.695.062,71	0,00	0,00	2.346.695.062,71
Rumah Sakit Umum Puri Husada	9.972.596.355,24	476.900.000,00	0,00	10.449.496.355,24
Rumah Sakit Umum Tengku Sulung	242.062.907,80	0,00	0,00	242.062.907,80
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa	165.867.700,00	0,00	0,00	165.867.700,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2.010.641.200,00	0,00	0,00	2.010.641.200,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	59.083.705,00	0,00	0,00	59.083.705,00
Dinas Satuan Polisi Pamong Peraja	264.518.080,00	0,00	0,00	264.518.080,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	17.354.000,00	0,00	0,00	17.354.000,00
Dinas Sosial	343.552.520,50	0,00	0,00	343.552.520,50
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	534.849.626,22	0,00	0,00	534.849.626,22
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	3.250.213.035,73	0,00	0,00	3.250.213.035,73
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	877.500,00	0,00	0,00	877.500,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	82.856.200,00	0,00	0,00	82.856.200,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan	192.491.683,33	0,00	0,00	192.491.683,33
Dinas Perhubungan	4.660.540.339,63	0,00	0,00	4.660.540.339,63
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	32.100.000,00	0,00	0,00	32.100.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	102.554.000,00	0,00	0,00	102.554.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	141.896.650,00	7.630.000,00	0,00	149.526.650,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	507.536.150,00	60.942.000,00	0,00	568.478.150,00
Dinas Perikanan	2.091.757.757,14	0,00	0,00	2.091.757.757,14
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, dan Kebudayaan	546.495.680,00	0,00	0,00	546.495.680,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	1.485.815.782,44	0,00	0,00	1.485.815.782,44
Dinas Perkebunan	1.675.845.000,00	0,00	0,00	1.675.845.000,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	257.075.150,00	0,00	0,00	257.075.150,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	231.424.900,00	0,00	0,00	231.424.900,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.021.217.084,58	0,00	0,00	1.021.217.084,58
Badan Pendapatan Daerah	564.982.050,00	0,00	0,00	564.982.050,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	570.709.988,76	0,00	0,00	570.709.988,76
Inspektorat Daerah	177.501.865,70	0,00	0,00	177.501.865,70
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	345.550.300,00	0,00	0,00	345.550.300,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	396.805.152,00	0,00	0,00	396.805.152,00
Sekretariat Daerah	1.117.304.167,00	0,00	0,00	1.117.304.167,00
Sekretariat DPRD	5.352.739.566,79	0,00	0,00	5.352.739.566,79
Kecamatan Tembilahan	334.541.950,00	9.961.000,00	0,00	344.502.950,00
Kecamatan Tembilahan Hulu	220.299.973,42	0,00	0,00	220.299.973,42
Kecamatan Tempuling	144.153.800,00	0,00	0,00	144.153.800,00
Kecamatan Batang Tuaka	459.575.288,30	193.269.080,00	0,00	652.844.368,30
Kecamatan Concong	334.931.828,91	0,00	0,00	334.931.828,91
Kecamatan Enok	510.980.340,00	0,00	0,00	510.980.340,00
Kecamatan Gaung	174.977.210,00	0,00	0,00	174.977.210,00
Kecamatan Gaung Anak Serka	294.614.840,00	0,00	0,00	294.614.840,00
Kecamatan Kateman	153.177.802,00	0,00	0,00	153.177.802,00
Kecamatan Kempas	238.436.098,00	0,00	0,00	238.436.098,00
Kecamatan Kemuning	116.612.794,44	0,00	0,00	116.612.794,44
Kecamatan Keritang	247.205.740,43	0,00	0,00	247.205.740,43
Kecamatan Kuala Indragiri	220.766.803,75	0,00	0,00	220.766.803,75
Kecamatan Mandah	334.862.040,19	0,00	0,00	334.862.040,19
Kecamatan Pelangiran	153.507.848,94	18.450.000,00	0,00	171.957.848,94
Kecamatan Pulau Burung	519.713.150,00	0,00	0,00	519.713.150,00
Kecamatan Reteh	284.200.322,86	15.000.000,00	0,00	299.200.322,86
Kecamatan Sungai Batang	15.048.500,00	0,00	0,00	15.048.500,00
Kecamatan Tanah Merah	143.382.676,47	0,00	0,00	143.382.676,47
Kecamatan Teluk Belengkong	356.652.871,43	0,00	0,00	356.652.871,43
Jumlah	82.195.023.022,22	782.152.080,00	0,00	82.977.175.102,22

Pada tahun 2024 penyajian aset lain-lain pada neraca yang disajikan sebesar nilai buku dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	Nilai Buku
Reklasifikasi piutang	1.012.050.454,60	1.012.050.454,60	-
Reklasifikasi Persediaan	160.104.000,00	160.104.000,00	-
Aset tak Berwujud Rusak Berat	258.143.000,00	258.143.000,00	-
Aset Rusak Berat	130.915.551.059,42	82.977.175.102,22	47.938.375.957,20
Aset Lain-lain Lainnya	29.660.588.044,13	8.348.184.167,42	21.312.403.876,71
Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	538.500.000,00	538.500.000,00	-
Jumlah Aset Lain-lain	162.544.936.558,15	93.294.156.724,24	69.250.779.833,91



5.3.1.4.7	DANA TRANSFER <i>TREASURY DEPOSIT FACILITY</i> (TDF)	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
		5.659.138.000,00	81.599.827.000,00

Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) Kabupaten Indragiri Hilir per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.659.138.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

SKPD	31 Desember 2023	Mutasi		31 Desember 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Badan Keuangan dan Aset Daerah	81.599.827.000,00	5.659.138.000,00	81.599.827.000,00	5.659.138.000,00
Jumlah	81.599.827.000,00	5.659.138.000,00	81.599.827.000,00	5.659.138.000,00

- 1 Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mendapatkan Transfer Non Tunai dalam bentuk Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp5.659.138.000,00 berdasarkan konfirmasi dari bidang Kas Daerah melalui aplikasi SIMTRADA.

Adapun rincian penerimaan Non Tunai dalam bentuk *Treasury Deposit Facility* (TDF) adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
DBH SDA Kehutanan-PSDH	549.239.000,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	3.509.506.000,00
DBH SDA Gas Bumi	1.600.393.000,00
Total	5.659.138.000,00

5.3.2	KEWAJIBAN	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
		90.385.518.344,60	34.534.021.669,82

Saldo Kewajiban Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp90.385.518.344,60 dan Rp34.534.021.669,82, terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang dengan rincian sebagai berikut:

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
		90.385.518.344,60	34.534.021.669,82
Kewajiban Jangka Pendek		0,00	0,00
Kewajiban Jangka Panjang		90.385.518.344,60	34.534.021.669,82

5.3.2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
		90.385.518.344,60	34.534.021.669,82

Saldo Kewajiban Jangka Pendek yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp90.385.518.344,60 dan Rp34.534.021.669,82. Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja dan Utang Perhitungan Jangka Pendek dengan rincian sebagai berikut :

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
		8.039.296,00	17.823.125,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		809.041.833,34	146.332.500,00
Pendapatan Diterima Dimuka		88.036.612.607,09	32.677.189.180,91
Utang Belanja		1.531.824.608,17	1.692.676.863,91
Utang Perhitungan Jangka Pendek lainnya		90.385.518.344,60	34.534.021.669,82

5.3.2.1.1	UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
		8.039.296,00	17.823.125,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga merupakan utang yang timbul akibat Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir belum menyetorkan ke Kas Negara atas pungutan/potongan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPN dan Utang pihak ketiga lainnya.

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp8.039.296,00 dan sebesar Rp17.823.125,00 terdiri dari PFK yang ada di BUD ditambah dengan PFK yang ada di SKPD dan BLUD dengan rincian mutasi sebagai berikut:

SKPD	31 Desember 2023	Mutasi		31 Desember 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Pendidikan	0,00	1.368.080.109,00	1.362.364.666,00	5.715.443,00
Dinas Kesehatan	1.524.397,00	1.311.447.291,43	1.311.533.375,43	1.438.313,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	15.531.228,00	104.057.363.226,00	104.072.893.454,00	1.000,00
Kecamatan Kuala Indragiri	0,00	38.470.740,00	37.586.200,00	884.540,00
Kecamatan Gaung	767.500,00	0,00	767.500,00	0,00
Jumlah	17.823.125,00	106.775.361.366,43	106.785.145.195,43	8.039.296,00

Adapun rincian perhitungan pihak ketiga sebagai berikut:

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Dinas Pendidikan (BOS)	5.715.443,00	0,00
Dinas Kesehatan (BLUD)	1.438.313,00	1.524.397,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.000,00	15.531.228,00
Kecamatan Kuala Indragiri	884.540,00	0,00
Kecamatan Gaung	0,00	767.500,00
Jumlah	8.039.296,00	17.823.125,00



		31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
5.3.2.1.2	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	809.041.833,34	146.332.500,00

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp809.041.833,34 dan sebesar Rp146.332.500,00. Perhitungan rincian pendapatan diterima dimuka dapat dilihat pada lampiran 11.

Saldo tersebut merupakan saldo pendapatan di terima di muka lainnya untuk RSUD Puri Husada sebesar Rp69.600.000,00 merupakan pendapatan di terima di muka dari sewa Anjungan Tunai Mandiri (ATM) berupa ruangan ATM BNI dan ATM Bank Riau Kepri, ditambah Dinas Sosial berjumlah sebesar Rp5.092.500,00 yaitu pendapatan dari sewa Ruko untuk Bank BPR Gemiling Tembilahan dan pendapatan sewa tanah untuk Mesin ATM BNI dan Kantor Pelayanan Bank pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp48.066.666,67.

Pendapatan diterima dimuka Dinas Perhubungan sebesar Rp674.333.000,00 berupa penyewaan gedung dan bangunan PT. Bakti Energi Sejahtera sebesar Rp279.994.000,00 dengan Nomor:799/DISHUB/IV/2024 dan Nomor:632.PJ/BEST-DISHUB/IV/2024 dan PT. Korindo Komplit Karbon senilai Rp406.288.666,67 dengan Nomor 1999/DISHUB/X/2024 dan Nomor:001/KKK/X/2024. Penjelasan Perhitungan Pendapatan di terima di muka dapat dilihat pada lampiran laporan keuangan. Berikut merupakan tabel mutasi untuk pendapatan diterima dimuka.

SKPD	31 Desember 2023	Mutasi		31 Desember 2024
		Penambahan	Pengurangan	
RSUD Puri Husada	116.400.000,00	0,00	46.800.000,00	69.600.000,00
Dinas Sosial	5.092.500,00	61.110.000,00	61.110.000,00	5.092.500,00
Sekretariat Daerah	24.840.000,00	61.800.000,00	38.573.333,33	48.066.666,67
Dinas Perhubungan	0,00	686.282.666,67	0,00	686.282.666,67
Jumlah	146.332.500,00	809.192.666,67	146.483.333,33	809.041.833,34

		31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
5.3.2.1.3	UTANG BELANJA	88.036.612.607,09	32.677.189.180,91

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp88.036.612.607,09 dan sebesar Rp32.677.189.180,91. Adapun rincian utang belanja sebagai berikut:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Utang Belanja Barang dan Jasa	4.554.533.865,00	1.367.687.308,00
2	Utang Belanja Pegawai	50.725.000,00	125.356.269,00
3	Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	290.599.500,00	290.599.500,00
4	Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek	31.897.275.582,00	18.584.148.992,15
5	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang melalui BLUD-Jangka Menengah	492.584.355,80	919.316.800,00
6	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	15.709.444.785,00	0,00
7	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.980.000,00	113.474.499,00
8	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.535.266.483,77	9.700.968.114,77
9	Utang Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	23.486.203.035,52	1.575.637.697,99
	Jumlah	88.036.612.607,09	32.677.189.180,91

Dalam tabel rincian mutasi penambahan dan pengurangan Utang Belanja Barang dan Jasa, Utang Belanja Pemeliharaan, Utang Belanja Pegawai, Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial, Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat, Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang melalui BLUD-Jangka Menengah dengan rincian antara lain sebagai berikut :

SKPD	31 Desember 2023	Mutasi		31 Desember 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Kesehatan	922.122.400,00	47.895.269.387,80	922.122.400,00	47.895.269.387,80
Rumah Sakit Umum Puri Husada	16.588.424.450,15	0,00	16.588.424.450,15	0,00
Rumah Sakit Umum Tengku Sulung	276.013.505,00	0,00	276.013.505,00	0,00
Rumah Sakit Umum Raja Musa	1.902.104.609,00	0,00	1.902.104.609,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	271.482.655,00	826.584.155,00	271.482.655,00	826.584.155,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	725.694.818,00	2.622.985.617,00	725.694.818,00	2.622.985.617,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4.426.050,00	8.537.750,00	4.426.050,00	8.537.750,00
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	0,00	5.259.699,00	0,00	5.259.699,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.451.638,00	16.563.774,00	13.451.638,00	16.563.774,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	17.133.228,00	15.563.700,00	17.133.228,00	15.563.700,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	52.300.390,00	264.597.597,00	52.300.390,00	264.597.597,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Dinas Pengendalian Penduduk KB dan Pemberdayaan Perempuan	9.411.341,00	7.167.021,00	9.411.341,00	7.167.021,00
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	3.694.002,00	3.676.877,00	3.694.002,00	3.676.877,00
Dinas Perkebunan	128.099.500,00	424.525.500,00	128.099.500,00	424.525.500,00
Dinas Perikanan	4.653.329,00	4.581.453,00	4.653.329,00	4.581.453,00
Dinas Perhubungan	17.784.955,00	20.073.609,00	17.784.955,00	20.073.609,00
Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaan	19.967.519,00	14.859.824,00	19.967.519,00	14.859.824,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	10.979.111,00	0,00	10.979.111,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	5.486.986,00	0,00	5.486.986,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	99.567.757,00	54.964.093,00	99.567.757,00	54.964.093,00
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	0,00	93.600.000,00	0,00	93.600.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	0,00	189.500.000,00	0,00	189.500.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.619.738,00	7.073.017,00	6.619.738,00	7.073.017,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.452.481,00	6.182.479,00	5.452.481,00	6.182.479,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.606.526,00	408.265.244,00	6.606.526,00	408.265.244,00
Sekretariat Daerah	118.009.454,00	0,00	118.009.454,00	0,00
Sekretariat DPRD	87.888.738,00	90.523.063,00	87.888.738,00	90.523.063,00
Kecamatan Tempuling	69.000,00	30.000,00	69.000,00	30.000,00
Kecamatan Batang Tuaka	0,00	1.047.453,00	0,00	1.047.453,00
Kecamatan Gaung Anak Serka	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
Kecamatan Reteih	0,00	2.293.464,00	0,00	2.293.464,00
Kecamatan Enok	643.800,00	311.200,00	643.800,00	311.200,00
Jumlah	21.287.108.869,15	52.995.163.087,80	21.287.108.869,15	52.995.163.087,80

Penjelasan Utang Belanja terdiri dari :

- 1 Utang Belanja Jasa Rutin terdiri dari Listrik, Air, Telepon, Internet dan surat kabar/majalah sebesar Rp1.000.861.449,00. Berikut ini rincian Utang Belanja Jasa Rutin per 31 Desember 2024 :

Jenis Utang Belanja Jasa Rutin	Per 31 Desember 2024
	(Rp)
Utang Belanja Jasa-Tagihan Listrik	225.411.119,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.337.627,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4.709.499,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.724.294,00
Badan Pendapatan Daerah	19.238.256,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	11.524.417,00
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	5.259.699,00
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	2.824.720,00
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	12.042.574,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	7.086.500,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	4.286.316,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	4.385.521,00
Dinas Perhubungan	7.485.224,00
Dinas Perikanan	2.916.103,00
Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	15.563.700,00
Kecamatan Reteih	2.293.464,00
Sekretariat DPRD	77.750.375,00
Dinas Kesehatan	37.982.830,00
Utang Belanja Jasa-Tagihan Air	20.074.850,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	69.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	194.500,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.171.900,00
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	62.500,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	197.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	478.250,00
Dinas Perhubungan	9.961.000,00
Dinas Perikanan	50.000,00
Kecamatan Enok	311.200,00
Kecamatan Gaung Anak Serka	148.000,00
Kecamatan Tempuling	30.000,00
Sekretariat DPRD	3.754.500,00
Dinas Kesehatan	647.000,00
Utang Belanja Jasa-Tagihan Telepon	516.292.000,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	43.237,00
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	79.037,00
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	2.754.750,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	48.787,00
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	513.194.818,00
Sekretariat DPRD	136.371,00
Dinas Kesehatan	35.000,00
Utang Belanja Jasa-Tagihan Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	238.663.480,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	1.666.390,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.472.980,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	884.950,00
Badan Pendapatan Daerah	8.550.837,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.807.211,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.996.120,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	189.500.000,00
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	773.120,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	1.451.250,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	646.300,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.303.250,00
Dinas Perhubungan	2.627.385,00
Dinas Perikanan	1.615.350,00
Sekretariat DPRD	8.881.817,00
Dinas Kesehatan	6.486.520,00
Utang Belanja Jasa Kantor-LanggananJurnal/Surat Kabar/Majalah	120.000,00
Dinas Kesehatan	120.000,00
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-BahanBakar dan Pelumas	300.000,00
Dinas Kesehatan	300.000,00
Total Utang Belanja Jasa Rutin	1.000.861.449,00

Pada tahun 2024 Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai Utang Belanja Jasa Rutin Lain-Lain bersifat kontraktual per 31 Desember 2024 sebesar Rp51.994.301.638,80, dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Utang Alat/bahan untuk kegiatan kantor Alat Tulis Kantor dan Cetak sebesar Rp10.859.962,00, dengan rincian sebagai berikut :

Nama SKPD	Nilai Utang Belanja Jasa (Rp)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	10.859.962,00
Jumlah	10.859.962,00

- 2 Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-BahanBangunan dan Konstruksi sebesar Rp19.900.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Nama SKPD	Nilai Utang Belanja Jasa (Rp)	Keterangan	Dokumen Pendukung
Dinas Perkebunan	5.250.000,00	Dibayarkan Pembelian Melting Lokasi Parit Belaung Dusun Tanjung Beringin Desa Terusan Kempas Kec. Gaung Untuk Pekerjaan Tanggul Mekanik Sub Kegiatan Rehabiltasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Tahun Anggaran 2024	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perkebunan	6.450.000,00	Dibayarkan Pembelian Melting Lokasi Parit Adon, Parit Bihim, dan Parit Penageh Desa Kuala Gaung Kec. Gaung Untuk Pekerjaan Tanggul Mekanik Sub Kegiatan Rehabiltasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Tahun Anggaran 2024	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perkebunan	8.200.000,00	Dibayarkan Pembelian Oli Hidrolik Excavator Untuk Pekerjaan Tanggul Mekanik Swakelola Tahun Anggaran 2024	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025
Jumlah	19.900.000,00		



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

3 Utang Belanja Jasa Kantor yang terdiri dari Honorarium, jasa kantor operator, jasa kantor tenaga teknis sebesar Rp726.361.500,00, dengan rincian sebagai berikut :

Nama SKPD	Nilai Utang Belanja Jasa (Rp)	Keterangan	Dokumen Pendukung
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	402.461.500,00	Pembayaran Tahap II atas Belanja Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Sub Kegiatan Penyusunan Kjian Risiko Bencana Kabupaten/Kota sesuai dengan Kontrak Swakelola Nomor: 01.04.4/490/BPBD Tanggal 27 Juni 2024	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 009/INSP-LHR/III/2025
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	90.000.000,00	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan (Uang Kerja Bimbingan) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 016/INSP-LHR/III/2025
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	3.600.000,00	Belanja Paket Pengiriman Container untuk bulan November s.d Desember 2024 pada Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 016/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perkebunan	11.360.000,00	Di Bayarkan Honorarium Tim Pelaksana Mandor, Pekerja dan Pengawas Lapangan Pekerjaan Tanggul Mekanik Swakelola Lokasi Parit 3B Kelurahan Tempuling Kec. Tempuling Sub,Kegiatan Rehabiltasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Tahun Anggaran 2024	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perkebunan	7.810.000,00	Di Bayarkan Honorarium Tim Pelaksana Mandor, Pekerja dan Pengawas Lapangan Pekerjaan Tanggul Mekanik Swakelola Lokasi Dusun 2 RT.010 RW.004 Desa Bantayan Kec. Mandah Sub,Kegiatan Rehabiltasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Tahun Anggaran 2024	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perkebunan	11.005.000,00	Di Bayarkan Honorarium Tim Pelaksana Mandor, Pekerja dan Pengawas Lapangan Pekerjaan Tanggul Mekanik Swakelola Lokasi Dusun II sawa Rt.033, Rt, 034, RT 035, Rt 004/ RW.009, RW.002 Desa Igal Kec. Mandah Sub,Kegiatan Rehabiltasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Tahun Anggaran 2024	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perkebunan	7.810.000,00	Di Bayarkan Honorarium Tim Pelaksana Mandor, Pekerja dan Pengawas Lapangan Pekerjaan Tanggul Mekanik Swakelola Lokasi Parit Belaung Dusun Tanjung Beringin Desa Terusan Kempas Kec. Gaung Sub,Kegiatan Rehabiltasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Tahun Anggaran 2024	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perkebunan	11.005.000,00	Di Bayarkan Honorarium Tim Pelaksana Mandor, Pekerja dan Pengawas Lapangan Pekerjaan Tanggul Mekanik Swakelola Lokasi Parit Adon, Parit Bihim, dan Parit Penageh Desa Kuala Gaung Kec. Gaung Anak Serka Sub,Kegiatan Rehabiltasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Tahun Anggaran 2024	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perkebunan	10.650.000,00	Di Bayarkan Honorarium Tim Pelaksana Mandor, Pekerja dan Pengawas Lapangan Pekerjaan Tanggul Mekanik Swakelola Lokasi Parit Pasar Intan RT 016 Rw 006 Dusun Bersama Jaya Desa Kampung Baru Kec. Concong Sub,Kegiatan Rehabiltasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Tahun Anggaran 2024	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perkebunan	11.005.000,00	Di Bayarkan Honorarium Tim Pelaksana Mandor, Pekerja dan Pengawas Lapangan Pekerjaan Tanggul Mekanik Swakelola Lokasi Parit Manin Sungai Lalak Kel. Teluk Pinang Kec. Gaung Anak Sub,Kegiatan Rehabiltasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Tahun Anggaran 2024	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perkebunan	4.615.000,00	Di Bayarkan Honorarium Tim Pelaksana Mandor, Pekerja dan Pengawas Lapangan Pekerjaan Tanggul Mekanik Swakelola Lokasi Parit 04 Kel. Bandar Sri Gemilang Kec. Kateman Sub,Kegiatan Rehabiltasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Tahun Anggaran 2024	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perkebunan	9.940.000,00	Di Bayarkan Honorarium Tim Pelaksana Mandor, Pekerja dan Pengawas Lapangan Pekerjaan Tanggul Mekanik Swakelola Lokasi Kelurahan Tempuling Kec. Tempuling Sub,Kegiatan Rehabiltasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Tahun Anggaran 2024	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Dinas Perkebunan	11.400.000,00	Dibayarkan Premi Operator Dan Helper Excavator Lokasi Parit 20 Kelurahan Sungai Beringin Kec. Tembilahan Sub,Kegiatan Rehabiltasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Tahun Anggaran 2024	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perkebunan	9.000.000,00	Dibayarkan Premi Operator Dan Helper Excavator Lokasi Dusun 3 dan Dusun 4 Desa Concong Tengah Kec. Concong Sub,Kegiatan Rehabiltasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Tahun Anggaran 2024	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perkebunan	9.600.000,00	Dibayarkan Premi Operator Dan Helper Excavator Lokasi Parit 3B Kelurahan Tempuling Kec. Tempuling Sub,Kegiatan Rehabiltasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Tahun Anggaran 2024	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perkebunan	6.600.000,00	Dibayarkan Premi Operator Dan Helper Excavator Lokasi Dusun 2 RT.010 RW.004 Desa Bantayan Kec. Mandah Sub,Kegiatan Rehabiltasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Tahun Anggaran 2024	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perkebunan	6.000.000,00	Dibayarkan Premi Operator Dan Helper Excavator Lokasi Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Sub,Kegiatan Rehabiltasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Tahun Anggaran 2024	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perkebunan	7.500.000,00	Dibayarkan Premi Operator Dan Helper Excavator Lokasi parit 7B Desa sungai laut kecamatan tanah merah Sub,Kegiatan Rehabiltasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Tahun Anggaran 2024	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perkebunan	9.300.000,00	Dibayarkan Premi Operator Dan Helper Excavator LokasiParit Dusun II sawa Rt.033, Rt, 034, RT 035, Rt 004/ RW.009, RW.002 Desa Igal Kec. Mandah Sub,Kegiatan Rehabiltasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Tahun Anggaran 2024	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perkebunan	6.600.000,00	Dibayarkan Premi Operator Dan Helper Excavator Lokasi Parit Belaung Dusun Tanjung Beringin Desa Terusan Kempas Kec. Gaung Sub,Kegiatan Rehabiltasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Tahun Anggaran 2024	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perkebunan	9.300.000,00	Dibayarkan Premi Operator Dan Helper Excavator Lokasi Parit Adon, Parit Bihim, dan Parit Penageh Desa Kuala Gaung Kec. Gaung Anak Serka Sub,Kegiatan Rehabiltasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Tahun Anggaran 2024	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perkebunan	9.000.000,00	Dibayarkan Premi Operator Dan Helper Excavator Lokasi Parit Pasar Intan RT 016 Rw 006 Dusun Bersama Jaya Desa Kampung Baru Kec. Concong Sub,Kegiatan Rehabiltasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Tahun Anggaran 2024	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perkebunan	9.300.000,00	Dibayarkan Premi Operator Dan Helper Excavator Lokasi Parit Manin Sungai Lalak Kel. Teluk Pinang Kec. Gaung Anak Serka Sub,Kegiatan Rehabiltasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Tahun Anggaran 2024	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perkebunan	3.900.000,00	Dibayarkan Premi Operator Dan Helper Excavator Lokasi Parit 04 Kel. Bandar Sri Gemilang Kec. Kateman Sub,Kegiatan Rehabiltasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Tahun Anggaran 2024	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perkebunan	8.400.000,00	Dibayarkan Premi Operator Dan Helper Excavator Lokasi Kelurahan Tempuling Kec. Tempuling Sub,Kegiatan Rehabiltasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Tahun Anggaran 2024	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perkebunan	1.600.000,00	Dibayarkan Premi Nakhoda Tugboad dan ABK Tugboad Untuk Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat Excavator Pekerjaan Tanggul Mekanik Swakelola (Penjemputan Alat Berat Excavator Dari Parit 3B Kelurahan Tempuling Kec. Tempuling ke Workshop Disbun Parit 7 Tembilahan Hulu)	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Dinas Perkebunan	3.200.000,00	Dibayarkan Premi Nakhoda Tugboat dan ABK Tugboat Untuk Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat Excavator Pekerjaan Tanggul Mekanik Swakelola (Pergeseran Alat Berat Excavator Dari Desa Pulau Burung Kec. Pulau Burung ke Kel.Bandar Sri Gemilang)	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perkebunan	2.400.000,00	Dibayarkan Premi Nakhoda Tugboat dan ABK Tugboat Untuk Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat Excavator Pekerjaan Tanggul Mekanik Swakelola (Pergesaran Alat Berat Excavator Dari Dusun 3 dan Dusun 4 Desa Concong Tengah Kec. Concong ke Desa Kampung Baru Kec. Concong)	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perkebunan	2.400.000,00	Dibayarkan Premi Nakhoda Tugboat dan ABK Tugboat Untuk Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat Excavator Pekerjaan Tanggul Mekanik Swakelola (Pergesaran Alat Berat Excavator Dari Dusun 2 RT.010 RW.004 Desa Bantayan Kec. Mandah ke Dusun II sawa Rt.033, Rt, 034, RT 035, Rt 004/ RW.009, RW.002 Desa Igal Kec. Mandah)	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perkebunan	1.600.000,00	DiBayarkan Premi Nakhoda Tugboat dan ABK Tugboat Untuk Mobilisasi Alat Berat Excavator Pekerjaan Tanggul Mekanik Swakelola (Pengantaran Alat Berat Excavator Dari Workshop Disbun Parit 7 Tembilahan Hulu ke Lokasi Kelurahan Tempuling Kec. Tempuling Tahun Anggaran 2024	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perkebunan	1.600.000,00	DiBayarkan Premi Nakhoda Tugboat dan ABK Tugboat Untuk Mobilisasi Alat Berat Excavator Pekerjaan Tanggul Mekanik Swakelola (Pengantaran Alat Berat Excavator Dari Workshop Disbun Parit 7 Tembilahan Hulu ke Lokasi Desa Kuala Gaung Kec.GAS Tahun Anggaran 2024	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perkebunan	3.200.000,00	DiBayarkan Premi Nakhoda Tugboat dan ABK Tugboat Untuk Mobilisasi Alat Berat Excavator Pekerjaan Tanggul Mekanik Swakelola (Pergeseran Alat Berat Excavator Dari Parit 7b Desa Sungai Laut Kec. TAnah Merah ke Lokasi Kelurahan Teluk Pinang Kec.Gas Tahun Anggaran 2024	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perkebunan	2.400.000,00	DiBayarkan Premi Nakhoda Tugboat dan ABK Tugboat Untuk Mobilisasi Alat Berat Excavator Pekerjaan Tanggul Mekanik Swakelola (Pengantaran Alat Berat Excavator Dari Workshop Disbun Parit 7 Tembilahan Hulu ke Lokasi Desa Terusan Kempas Kec.Gaung Tahun Anggaran 2024	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perkebunan	1.600.000,00	DiBayarkan Premi Nakhoda Tugboat dan ABK Tugboat Untuk Mobilisasi Alat Berat Excavator Pekerjaan Tanggul Mekanik Swakelola (Penjemputan Alat Berat Excavator Dari Kelurahan Tempuling Kec. Tempuling ke Workshop Disbun Parit 7 Tembilahan Hulu Tahun Anggaran 2024	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perkebunan	2.400.000,00	DiBayarkan Premi Nakhoda Tugboat dan ABK Tugboat Untuk Mobilisasi Alat Berat Excavator Pekerjaan Tanggul Mekanik Swakelola (Penjemputan Alat Berat Excavator Dari Dusun II sawa Rt.033, Rt, 034, RT 035, Rt 004/ RW.009, RW.002 Desa Igal Kec. Mandah) ke Workshop Disbun Parit 7 Tembilahan Hulu Tahun Anggaran 2024	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perkebunan	3.200.000,00	DiBayarkan Premi Nakhoda Tugboat dan ABK Tugboat Untuk Mobilisasi Alat Berat Excavator Pekerjaan Tanggul Mekanik Swakelola (Penjemputan Alat Berat Excavator Dari Kel.Bandar Sri Gemilang ke Workshop Disbun Parit 7 Tembilahan Hulu Tahun Anggaran 2024	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perkebunan	2.400.000,00	DiBayarkan Premi Nakhoda Tugboat dan ABK Tugboat Untuk Mobilisasi Alat Berat Excavator Pekerjaan Tanggul Mekanik Swakelola (Penjemputan Alat Berat Excavator Dari Desa Kampung Baru Kec. Concong ke Workshop Disbun Parit 7 Tembilahan Hulu Tahun Anggaran 2024	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Dinas Perkebunan	3.200.000,00	DiBayarkan Premi Nakhoda Tugboad dan ABK Tugboad Untuk Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat Excavator Pekerjaan Tanggul Mekanik Swakelola (Pergesaran Alat Berat Excavator Dari Parit 20 Kelurahan Sungai Beringin Kec. Tembilahan ke Desa Pulau Burung Kec. Pulau Burung	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perkebunan	1.600.000,00	DiBayarkan Premi Nakhoda Tugboad dan ABK Tugboad Untuk Mobilisasi Alat Berat Excavator Pekerjaan Tanggul Mekanik Swakelola (Penjemputan Alat Berat Excavator Dari Desa Kuala Gaung Kec.GAS ke Workshop Disbun Parit 7 Tembilahan Hulu Tahun Anggaran 2024	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perkebunan	1.600.000,00	DiBayarkan Premi Nakhoda Tugboad dan ABK Tugboad Untuk Mobilisasi Alat Berat Excavator Pekerjaan Tanggul Mekanik Swakelola (Penjemputan Alat Berat Excavator Dari Desa Kuala Gaung Kec.GAS ke Workshop Disbun Parit 7 Tembilahan Hulu Tahun Anggaran 2024	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perkebunan	2.400.000,00	DiBayarkan Premi Nakhoda Tugboad dan ABK Tugboad Untuk Mobilisasi Alat Berat Excavator Pekerjaan Tanggul Mekanik Swakelola (Penjemputan Alat Berat Excavator Dari Desa Terusan Kempas Kec.Gaung ke Workshop Disbun Parit 7 Tembilahan Hulu Tahun Anggaran 2024	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perkebunan	2.400.000,00	DiBayarkan Premi Nakhoda Tugboad dan ABK Tugboad Untuk Mobilisasi Alat Berat Excavator Pekerjaan Tanggul Mekanik Swakelola (Pengantaran Alat Berat Excavator Dari Workshop Disbun Parit 7 Tembilahan Hulu ke Lokasi Parit 7b Desa Sungai Laut Kec. TAnah Merah Tahun Anggaran 2024	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025
Jumlah	726.361.500,00		

4 Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan dan Perencanaan sebesar Rp2.195.575.299,00, dengan rincian sebagai berikut :

Nama SKPD	Nilai Utang Belanja Jasa (Rp)	Keterangan	Dokumen Pendukung
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	99.733.500,00	Pembayaran kepada sdr. ARDIANSYAH atas Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, atas Pekerjaan DED Bangunan Pengendali Banjir Parit 12 dan 13 Kec. Tembilahan	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 014/INSP-LHR/III/2025
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	99.706.000,00	Desain Tipologi Standar Perencanaan dan Perancangan Bangunan Gedung Rumah Hunian Ukuran 36, 45 dan 72 untuk 15 Model dalam Pengusulan PBG	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 014/INSP-LHR/III/2025
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	49.230.000,00	Pekerjaan Penyusunan DED Jalan Poros Air Tawar - Pulau Burung Tahun 2017 (Paket dibatalkan berdasarkan dokumen surat pernyataan dari Kepala Dinas PUPR dengan keterangan Paket dibatalkan karena Dokumen tidak lengkap)	
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	49.615.000,00	Pekerjaan Penyusunan DED Jembatan Ruas Jalan Kota Baru Kecamatan Keritang Tahun 2017 (Paket dibatalkan berdasarkan dokumen surat pernyataan dari Kepala Dinas PUPR dengan keterangan Paket dibatalkan karena Dokumen tidak lengkap)	
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	82.000.000,00	Pengawasan Teknis Prasarana, Sarana Drainase Wilayah I Kecamatan Tembilahan, Kec. Tembilahan Hulu dan Kec. Batang Tuaka	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 015/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	52.700.000,00	Pengawasan Teknis Prasarana, Sarana Drainase Wilayah II Kecamatan Reteh, Kecamatan Keritang dan Kecamatan Kemuning	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 015/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	45.000.000,00	Pengawasan Teknis Prasarana, Sarana Drainase Wilayah III Kecamatan Gaung dan Kecamatan Kateman	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 015/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	34.300.000,00	Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan Wilayah I Kec. Kempas	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 015/INSP-LHR/III/2025



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	234.290.475,00	Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan Wilayah I Kec. Tembilahan dan Kec. Batang Tuaka	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 015/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	120.000.324,00	Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan Wilayah I Kec. Tembilahan Hulu	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 015/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	60.400.000,00	Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan Wilayah I Kec. Tempuling	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 015/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	54.000.000,00	Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan Wilayah II Kec. Enok dan Kec. Sungai Batang	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 015/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	37.200.000,00	Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan Wilayah II Kec. Kemuning	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 015/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	28.200.000,00	Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan Wilayah II Kec. Kuindra dan Kec. Concong	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 015/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	81.100.000,00	Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan Wilayah II Kec. Reteh	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 015/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	57.000.000,00	Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan Wilayah II Kec. Tanah Merah	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 015/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	39.800.000,00	Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan Wilayah III Kec. Gaung Anak Serka dan Kec. Gaung	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 015/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	62.300.000,00	Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan Wilayah III Kec. Kateman	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 015/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	53.300.000,00	Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan Wilayah III Kec. Mandah	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 015/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	62.500.000,00	Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan Wilayah III Kec. Pelangiran	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 015/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	32.300.000,00	Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan Wilayah III Kec. Pulau Burung	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 015/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	47.200.000,00	Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan Wilayah III Kec. Teluk Belengkong	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 015/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	53.800.000,00	Pengawasan Teknis Prasarana, Sarana Rumah Ibadah Wilayah I Kecamatan Tembilahan Hulu	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 015/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	60.000.000,00	Pengawasan Teknis Prasarana, Sarana Rumah Ibadah Wilayah I Kecamatan Tempuling dan Kecamatan Kempas	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 015/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	73.600.000,00	Pengawasan Teknis Prasarana, Sarana Rumah Ibadah Wilayah I Kec. Tembilahan dan Kec. Batang Tuaka	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 015/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	49.200.000,00	Pengawasan Teknis Prasarana, Sarana Rumah Ibadah Wilayah II Kecamatan Enok dan Kecamatan Sei. Batang	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 015/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	76.200.000,00	Pengawasan Teknis Prasarana, Sarana Rumah Ibadah Wilayah II Kecamatan Reteh	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 015/INSP-LHR/III/2025



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	56.300.000,00	Pengawasan Teknis Prasarana, Sarana Rumah Ibadah Wilayah II Kec. Concong, Kec. Kuindra dan Kec. Tanah Merah	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 015/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	76.900.000,00	Pengawasan Teknis Prasarana, Sarana Rumah Ibadah Wilayah II Kec. Keritang dan Kec. Kemuning	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 015/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	55.400.000,00	Pengawasan Teknis Prasarana, Sarana Rumah Ibadah Wilayah III Kecamatan Gaung	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 015/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	48.200.000,00	Pengawasan Teknis Prasarana, Sarana Rumah Ibadah Wilayah III Kecamatan Gaung Anak Serka	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 015/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	63.800.000,00	Pengawasan Teknis Prasarana, Sarana Rumah Ibadah Wilayah III Kecamatan Kateman dan Kecamatan Teluk Belengkong	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 015/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	56.100.000,00	Pengawasan Teknis Prasarana, Sarana Rumah Ibadah Wilayah III Kecamatan Mandah dan Kecamatan Pelangiran	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 015/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	44.200.000,00	Pengawasan Teknis Prasarana, Sarana Rumah Ibadah Wilayah III Kecamatan Pulau burung	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 015/INSP-LHR/III/2025
Jumlah	2.195.575.299,00		

5 Utang Pemeliharaan sebesar Rp528.299.655,00, dengan rincian sebagai berikut :

Nama SKPD	Nilai Utang Belanja Jasa (Rp)	Keterangan	Dokumen Pendukung
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	97.730.000,00	Pembayaran kepada sdr. JANUARDI ADLIN atas Kegiatan Rehabilitasi Kanal Banjir Tahun Anggaran 2024, atas Pekerjaan Normalisasi Parit 5 Kecamatan Tembilahan Hulu	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 014/INSP-LHR/III/2025
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	143.198.000,00	Pembayaran kepada sdr. BAKRI CHANIAGO atas Kegiatan Rehabilitasi Kanal Banjir Tahun Anggaran 2024, atas Pekerjaan Normalisasi Parit Penyengat Desa Mekar Sari Kec. Reteih	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 014/INSP-LHR/III/2025
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	114.734.000,00	Pembayaran kepada sdr. BAKRI CHANIAGO Direktur atas Kegiatan Rehabilitasi Kanal Banjir Tahun Anggaran 2024, atas Pekerjaan Normalisasi Parit Tanong Desa Seberang Pulau Kijang Kecamatan Reteih	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 014/INSP-LHR/III/2025
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	172.637.655,00	Normalisasi Parit Pinang Desa Mekar Sari Kec. Reteih	
Jumlah	528.299.655,00		

6 Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp46.226.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Nama SKPD	Nilai Utang Belanja Jasa (Rp)	Keterangan	Dokumen Pendukung
Dinas Perkebunan	5.727.000,00	Pembayaran 100% Kepada PT. ENERGI BERSAUDARA NUSANTARA Atas Paket Pekerjaan Mobilisasi Solar dari Depot Ke Tembilahan untuk Lokasi Dusun II sawa Rt.033, Rt, 034, RT 035, Rt 004/ RW.009, RW.002 Desa Igal Kec. Mandah Spk No.000.3/433 /DISBUN-PS/XI/2024 Tanggal 1 November 2024	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perkebunan	5.780.000,00	Pembayaran 100% Kepada PT. ENERGI BERSAUDARA NUSANTARA Atas Paket Pekerjaan Mobilisasi Solar dari Depot Ke Tembilahan untuk Lokasi Parit Adon, Parit Bihim, dan Parit Penageh Desa Kuala Gaung Kec. Gaung Spk No.000.3/429/DISBUN-PS/XI/2024 Tanggal 1 November 2024	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perkebunan	5.780.000,00	Pembayaran 100% Kepada PT. ENERGI BERSAUDARA NUSANTARA Atas Paket Pekerjaan Mobilisasi Solar dari Depot Ke Tembilahan untuk Lokasi Parit Manin Sungai Lalak Kel. Teluk Pinang Kec. Gaung Anak Serka Spk No.000.3/428/DISBUN-PS/XI/2024 Tanggal 1 November 2024	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Dinas Perkebunan	2.123.000,00	Pembayaran 100% Kepada PT. ENERGI BERSAUDARA NUSANTARA Atas Paket Pekerjaan Mobilisasi Solar dari Depot Ke Tembilahan untuk Lokasi Parit 04 Kel. Bandar Sri Gemilang Kec. Kateman Spk No.000.3/431 /DISBUN-PS/XI/2024 Tanggal 1 November 2024	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perkebunan	2.967.000,00	Pembayaran 100% Kepada PT. ENERGI BERSAUDARA NUSANTARA Atas Paket Pekerjaan Mobilisasi dan DEMobilisasi Minyak dari Depot Lokasi Tangki Solar untuk taugbod Keperluan Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat Excavator tahap 2 Spk No.000.3/432 /DISBUN-PS/XI/2024 Tanggal 1 November 2024	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perkebunan	2.967.000,00	Pembayaran 100% Kepada PT. ENERGI BERSAUDARA NUSANTARA Atas Paket Pekerjaan Mobilisasi dan DEMobilisasi Minyak dari Depot Lokasi TAngki Solar untuk taugbod Keperluan Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat Excavator tahap 3 Spk No.000.3/435 /DISBUN-PS/XI/2024 Tanggal 1 November 2024	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perkebunan	6.204.000,00	Pembayaran 100% Kepada CV. USTMAN SINERGI BERSAMA Atas Paket Pekerjaan Mobilisasi Solar dari Tembilahan Ke Tempat Penyimpanan Sementara Lokasi Dusun II sawa Rt.033, Rt, 034, RT 035, Rt 004/ RW.009, RW.002 Desa Igal Kec. Mandah Spk No.000.3/450 /DISBUN-PS/XI/2024 Tanggal 1 November 2024	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perkebunan	6.021.000,00	Pembayaran 100% Kepada CV. USTMAN SINERGI BERSAMA Atas Paket Pekerjaan Mobilisasi Solar dari Tembilahan Ke Tempat Penyimpanan Sementara Lokasi Parit Adon, Parit Bihim, dan Parit Penageh Desa Kuala Gaung Kec. Gaung Spk No.000.3/447 /DISBUN-PS/XI/2024 Tanggal 1 November 2024	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perkebunan	5.728.000,00	Pembayaran 100% Kepada CV. USTMAN SINERGI BERSAMA Atas Paket Pekerjaan Mobilisasi Solar dari Tembilahan Ke Tempat Penyimpanan Sementara Lokasi Parit Pasar Intan RT 016 Rw 006 Dusun Bersama Jaya Desa Kampung Baru Kec. Concong Spk No.000.3/451 /DISBUN-PS/XI/2024 Tanggal 1 November 2024	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025
Dinas Perkebunan	2.929.000,00	Pembayaran 100% Kepada CV. USTMAN SINERGI BERSAMA Atas Paket Pekerjaan Mobilisasi Solar dari Tembilahan Ke Tempat Penyimpanan Sementara Lokasi Parit 04 Kel. Bandar Sri Gemilang Kec. Kateman Spk No.000.3/449 /DISBUN-PS/XI/2024 Tanggal 1 November 2024	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 017/INSP-LHR/III/2025
Jumlah	46.226.000,00		

8 Utang Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Hadiah yang Bersifat Perlombaan dan Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yangDiberikan kepada Masyarakat sebesar Rp50.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Nama SKPD	Nilai Utang Belanja Jasa (Rp)	Keterangan
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	50.000.000,00	Desa Lintas Utara Kecamatan Keritang
Jumlah	50.000.000,00	

9 Utang Belanja Insentif bagi ASN sebesar Rp27.175.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Nama SKPD	Nilai Utang Belanja Jasa (Rp)	Keterangan	Dokumen Pendukung
Badan Pendapatan Daerah	13.800.000,00	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 012/INSP-LHR/III/2025
Badan Pendapatan Daerah	1.500.000,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 012/INSP-LHR/III/2025
Badan Pendapatan Daerah	1.875.000,00	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 012/INSP-LHR/III/2025



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Badan Pendapatan Daerah	10.000.000,00	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung/IMB	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 012/INSP-LHR/III/2025
Jumlah	27.175.000,00		

- 10 Utang Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan danLembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dan Utang Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Hadiah yang Bersifat Perlombaan dan Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan danLembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp290.559.500,00, dengan rincian sebagai berikut :

Nama SKPD	Nilai Utang Belanja Jasa (Rp)	Keterangan
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	162.500.000,00	Rehab Masjid Al-Muttaqin Kelurahan Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang
Dinas Perkebunan	128.099.500,00	Pembangunan Pintu Klep Permanen Kelompok Tani Medan Jaya di Desa Tekulai Bugis Kecamatan Tanah Merah Tahun Anggaran 2023
Jumlah	290.599.500,00	

- 11 Utang Iuran Jaminan Kesehatan dan Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp15.709.444.785,00, dengan rincian sebagai berikut:

Nama SKPD	Nilai Utang Belanja Jasa (Rp)	Keterangan	Dokumen Pendukung
Kecamatan Batang Tuaka	1.047.453,00	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 011/INSP-LHR/III/2025
Dinas Kesehatan	15.302.066.500,00	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 011/INSP-LHR/III/2025
Dinas Kesehatan	157.771.600,00	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 011/INSP-LHR/III/2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	248.559.232,00	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 011/INSP-LHR/III/2025
Jumlah	15.709.444.785,00		

- 12 Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek di tahun 2024 sebesar Rp31.897.275.582,00. Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD dengan rincian sebagai berikut :

Nama SKPD	Nilai Utang Belanja Jasa (Rp)	Jenis Utang	Keterangan
Dinas Kesehatan	7.600.245.155,00	Hutang Obat-Obatan	Utang BLUD Puri Husada telah tercatat pada Laporan Keuangan BLUD Tahun 2024 yang telah ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 31 Desember 2024
Dinas Kesehatan	8.100.766.798,00	Hutang Bhp / Alkes	
Dinas Kesehatan	1.538.608.662,00	Hutang Bahan Laboratorium	
Dinas Kesehatan	171.444.000,00	Hutang Bahan Radiologi	
Dinas Kesehatan	543.900.000,00	Hutang Usaha (BPJS) Pmi	
Dinas Kesehatan	434.265.000,00	Hutang Gas Medis	
Dinas Kesehatan	190.860.000,00	Hutang Linen	
Dinas Kesehatan	771.338.587,00	Biaya Jasa Pelayanan Umum	
Dinas Kesehatan	8.033.116.390,00	Biaya Jasa Pelayanan Bpjs	
Dinas Kesehatan	713.708.939,00	Biaya Jasa Kefamasian	
Dinas Kesehatan	109.951.623,00	Biaya Jasa Selisih Tarif	
Dinas Kesehatan	350.000.000,00	Beban Pengolahan Limbah B3	
Dinas Kesehatan	10.452.216,00	Beban Telpon	
Dinas Kesehatan	4.457.350,00	Beban Air	
Dinas Kesehatan	7.965.000,00	Beban Rapat-Rapat Koordinasi	
Dinas Kesehatan	9.967.000,00	Beban Makan Minum Rapat	
Dinas Kesehatan	16.500.000,00	Hutang Plastik Sampah	
Dinas Kesehatan	43.356.600,00	Hutang Bahan Rekam Medis	
Dinas Kesehatan	26.000.000,00	Hutang Amplop Rontgen	
Dinas Kesehatan	56.287.000,00	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional	
Dinas Kesehatan	31.286.460,00	Biaya Pemeliharaan Ac	



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Dinas Kesehatan	3.483.600,00	Biaya Cetak Dan Penggandaan	
Dinas Kesehatan	95.846.000,00	Hutang Kalibrasi Alkes	
Dinas Kesehatan	489.483.500,00	Biaya Makan Minum Pasien	
Dinas Kesehatan	65.465.000,00	Biaya Patologi Anatomi	
Dinas Kesehatan	6.124.400,00	Biaya Tes Pendengaran, Fitting Ha/Abd Dan Klaim Abd	
Dinas Kesehatan	166.555.758,00	Beban Tagihan Listrik	
Dinas Kesehatan	7.350.000,00	Pembayaran Darah Pmi Bulan Desember 2024	Utang BLUD Tengku Sulung telah tercatat pada Laporan Keuangan BLUD Tahun 2024 yang telah ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 31 Desember 2024
Dinas Kesehatan	6.924.000,00	Pelayanan Jasa Umum Bulan Desember 2024	
Dinas Kesehatan	788.895,00	Pelayanan Jasa Bpjs Susulan Juni 2024	
Dinas Kesehatan	74.705.850,00	Pelayanan Jasa Bpjs Bulan November 2024	
Dinas Kesehatan	6.020.100,00	Pelayanan Jasa Bpjs Susulan Agustus 2024	
Dinas Kesehatan	20.548.440,00	Pelayanan Jasa Bpjs Susulan September 2024	
Dinas Kesehatan	20.741.220,00	Pelayanan Jasa Bpjs Susulan Oktober 2024	
Dinas Kesehatan	33.817.905,00	Pelayanan Jasa Bpjs Susulan November 2024	
Dinas Kesehatan	77.597.730,00	Pelayanan Jasa Bpjs Bulan Desember 2024	
Dinas Kesehatan	6.016.000,00	Pelayanan Ambulance Bulan September 2024	
Dinas Kesehatan	752.000,00	Pelayanan Ambulance Bulan Oktober 2024	
Dinas Kesehatan	5.264.000,00	Pelayanan Ambulance Bulan November 2024	
Dinas Kesehatan	9.024.000,00	Pelayanan Ambulance Bulan Desember 2024	
Dinas Kesehatan	18.000.000,00	Kuasa Pengguna Anggaran	Utang BLUD Tengku Sulung telah tercatat pada Laporan Keuangan BLUD Tahun 2024 yang telah ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 31 Desember 2024
Dinas Kesehatan	9.350.000,00	Bendahara Penerimaan Blud	
Dinas Kesehatan	5.500.000,00	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
Dinas Kesehatan	10.200.000,00	Perencanaan	
Dinas Kesehatan	369.098.690,00	Pelayanan Bpjs Bulan Agustus	
Dinas Kesehatan	351.191.605,00	Pelayanan Bpjs Bulan September	Utang BLUD Raja Musa telah tercatat pada Laporan Keuangan BLUD Tahun 2024 yang telah ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 31 Desember 2024
Dinas Kesehatan	298.924.468,00	Pelayanan Bpjs Bulan Oktober	
Dinas Kesehatan	208.484.010,00	Pelayanan Bpjs Bulan November	
Dinas Kesehatan	280.036.293,00	Pelayanan Bpjs Bulan Desember	
Dinas Kesehatan	24.932.983,00	Jasa Bpjs Pending Agustus 2024	
Dinas Kesehatan	25.831.576,00	Jasa Bpjs Pending September 2024	
Dinas Kesehatan	28.650.427,00	Jasa Umum Bulan Juli 2024	
Dinas Kesehatan	32.211.213,50	Jasa Umum Bulan Agustus 2024	
Dinas Kesehatan	43.476.890,50	Jasa Umum Bulan September 2024	
Dinas Kesehatan	34.202.382,00	Jasa Umum Bulan Oktober 2024	
Dinas Kesehatan	25.107.013,00	Jasa Umum Bulan November 2024	
Dinas Kesehatan	42.267.680,00	Jasa Umum Bulan Desember 2024	
Dinas Kesehatan	124.008.995,00	Obat-Obatan Tahun 2024	
Dinas Kesehatan	98.371.678,00	Bhp Tahun 2024	
Dinas Kesehatan	1.782.500,00	Kalibrasi/Pemeliharaan Alat Kesehatan	
Dinas Kesehatan	4.662.000,00	Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang Kesehatan (Radiologi)	
Jumlah	31.897.275.582,00		

13 Terdapat Bagian Lancar Utang Jangka Panjang melalui BLUD-Jangka Menengah di tahun 2024 sebesar Rp492.584.355,80 di Dinas Kesehatan dengan rincian sebagai berikut :

Nama SKPD	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD (Rp)	Nama Puskesmas	Keterangan
Dinas Kesehatan	12.846.600,00	BLUD Puskesmas Kempas Jaya	Utang BLUD Puskesmas telah tercatat pada Laporan Keuangan BLUD Tahun 2024 yang telah ditandatangani oleh Kepala Puskesmas pada tanggal 31
Dinas Kesehatan	87.389.914,80	BLUD Puskesmas Sungai Salak	
Dinas Kesehatan	1.206.000,00	BLUD Puskesmas Enok	
Dinas Kesehatan	67.329.600,00	BLUD Puskesmas Gajah Mada	
Dinas Kesehatan	216.000,00	BLUD Puskesmas Concong Luar	
Dinas Kesehatan	12.415.459,00	BLUD Puskesmas Benteng	
Dinas Kesehatan	24.996.000,00	BLUD Puskesmas Tembilahan Hulu	
Dinas Kesehatan	571.200,00	BLUD Puskesmas Tembilahan Kota	
Dinas Kesehatan	9.753.000,00	BLUD Puskesmas Tanah Merah	
Dinas Kesehatan	1.637.400,00	BLUD Puskesmas Pulau Kijang	
Dinas Kesehatan	1.046.510,00	BLUD Puskesmas Kuala Enok	
Dinas Kesehatan	11.441.960,00	BLUD Puskesmas Pengalihan Enok	
Dinas Kesehatan	80.541.983,00	BLUD Puskesmas Selensen	



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Dinas Kesehatan	2.072.400,00	BLUD PuskesmasPengalihan Kerintang	Desember 2024
Dinas Kesehatan	3.183.600,00	BLUD PuskesmasTeluk Pinang	
Dinas Kesehatan	4.389.600,00	BLUD PuskesmasBatang Tumu	
Dinas Kesehatan	17.517.000,00	BLUD PuskesmasSungai Guntung	
Dinas Kesehatan	3.502.800,00	BLUD PuskesmasKotabaru	
Dinas Kesehatan	3.000.000,00	BLUD PuskesmasSungai Iliran	
Dinas Kesehatan	4.230.600,00	BLUD PuskesmasBekawan	
Dinas Kesehatan	97.914.991,00	BLUD PuskesmasKerintang Hulu	
Dinas Kesehatan	45.381.738,00	BLUD PuskesmasSimpang Gaung	
Jumlah	492.584.355,80		

Pada Tahun 2024 Kabupaten Indragiri Hilir memiliki Utang Belanja Modal sebesar Rp20.799.112.730,96, dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2024 sebesar Rp19.980.000,00 dan tahun 2023 sebesar Rp113.474.499,00, dengan rincian sebagai berikut:

Nama SKPD	31 Desember 2023	Mutasi		31 Desember 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Kesehatan	113.474.499,00	19.980.000,00	113.474.499,00	19.980.000,00
Jumlah	113.474.499,00	19.980.000,00	113.474.499,00	19.980.000,00

Berikut ini penjelesan rincian utang belanja modal peralatan dan mesin tahun 2024 :

Nama SKPD	Dokumen Pendukung	Kegiatan	No Kontrak	Jumlah
1 Dinas Kesehatan	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 022/INSP-LHR/III/2025	Pengadaan Ac Puskesmas Tembilahan Kota Kec. Tembilahan	PR-333988-241212-1	19.980.000,00
Total				19.980.000,00

- 2 Pada tahun 2024 Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2024 sebesar Rp11.535.266.483,77 dan tahun 2023 sebesar Rp9.700.968.114,77, dengan rincian sebagai berikut:

Nama SKPD	31 Desember 2023	Mutasi		31 Desember 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Kesehatan	8.465.739.050,42	68.299.188,00	0,00	8.534.038.238,42
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.006.280.024,35	0,00	0,00	1.006.280.024,35
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	170.189.040,00	1.017.764.160,00	0,00	1.187.953.200,00
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan	58.760.000,00	802.500.021,00	58.760.000,00	802.500.021,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	4.495.000,00	0,00	4.495.000,00
Jumlah	9.700.968.114,77	1.893.058.369,00	58.760.000,00	11.535.266.483,77

Berikut ini penjelesan rincian utang belanja modal gedung dan bangunan tahun 2024 :

Nama SKPD	Dokumen Pendukung	Kegiatan	No Kontrak	Jumlah
1 Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 020/INSP-LHR/III/2025	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Wisata Religi Kawasan Makam Syeikh Abdurrahman Shiddiq Mufti Kerajaan Indragiri Desa teluk Dalam Kecamatan Kuala Indragiri	800/DPPOK-SARPRAS/SP-PAR/VI/2024/002	802.500.021,00
2 Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang		Pembangunan Gedung Kantor Camat Teluk Belengkong di Kecamatan Teluk Belengkong	640/SP/DPUTR-CK/V/2023/06.02 Tgl. 25-5-2023	170.189.040,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	SK Bupati KPTS 310/V/HK- 2025 dan LHR NOMOR : 037/INSP-LHR/IV/2024	Pembangunan Gedung Kantor Camat Teluk Belengkong di Kecamatan Teluk Belengkong Tahun Anggaran 2024 atas kontrak tahun 2023 di Kabupaten Indragiri Hilir pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		1.017.764.160,00
3	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman		Rehab Gedung Eks Multiyears Jl. Swarna Bumi Kec. Tembilahan (utang tahun 2018)	650/DPERAKIM/SP/RE HAB/VIII/2017/02.03	1.006.280.024,35
4	Dinas Kesehatan				8.465.739.050,42
	Dinas Kesehatan	SK Bupati KPTS 310/V/HK- 2025 dan LHR NOMOR : 022/INSP-LHR/III/2025	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Pustu Desa Terusan Kempas	027/SPK- DINKES/VII/2024/010	4.051.500,00
	Dinas Kesehatan	SK Bupati KPTS 310/V/HK- 2025 dan LHR NOMOR : 022/INSP-LHR/III/2025	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Pustu Desa Sepakat Jaya	027/SPK- DINKES/VIII/2024/016	5.328.000,00
	Dinas Kesehatan	SK Bupati KPTS 310/V/HK- 2025 dan LHR NOMOR : 022/INSP-LHR/III/2025	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Pustu Desa Panglima Raja	027/SPK- DINKES/VIII/2024/022	4.059.270,00
	Dinas Kesehatan	SK Bupati KPTS 310/V/HK- 2025 dan LHR NOMOR : 022/INSP-LHR/III/2025	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Pustu Seberang Tembilahan Barat	027/SPK- DINKES/X/2024/045	5.294.500,00
	Dinas Kesehatan	SK Bupati KPTS 310/V/HK- 2025 dan LHR NOMOR : 022/INSP-LHR/III/2025	Konsultan Perencanaan Semenisasi Desa Pustu Rumbai Jaya	027/SPK- DINKES/VII/2024/012	4.050.500,00
	Dinas Kesehatan	SK Bupati KPTS 310/V/HK- 2025 dan LHR NOMOR : 022/INSP-LHR/III/2025	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Pustu Desa Catur Karya	027/SPK- DINKES/X/2024/036	4.079.250,00
	Dinas Kesehatan	SK Bupati KPTS 310/V/HK- 2025 dan LHR NOMOR : 022/INSP-LHR/III/2025	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Pustu Desa Mekar Sari	027/SPK- DINKES/VII/2024/014	4.040.000,00
	Dinas Kesehatan	SK Bupati KPTS 310/V/HK- 2025 dan LHR NOMOR : 022/INSP-LHR/III/2025	Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Pustu Terusan Kempas	027/SPK- DINKES/VIII/2024/034	5.278.050,00
	Dinas Kesehatan	SK Bupati KPTS 310/V/HK- 2025 dan LHR NOMOR : 022/INSP-LHR/III/2025	Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Panglima Raja	027/SPK- DINKES/X/2024/042	5.372.400,00
	Dinas Kesehatan	SK Bupati KPTS 310/V/HK- 2025 dan LHR NOMOR : 022/INSP-LHR/III/2025	Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Pustu Sepakat Jaya	027/SPK- DINKES/IX/2024/038	7.181.700,00
	Dinas Kesehatan	SK Bupati KPTS 310/V/HK- 2025 dan LHR NOMOR : 022/INSP-LHR/III/2025	Konsultan Pengawasan Semenisasi Pustu Desa Rumbai Jaya	027/SPK- DINKES/VIII/2024/032	5.337.990,00
	Dinas Kesehatan	SK Bupati KPTS 310/V/HK- 2025 dan LHR NOMOR : 022/INSP-LHR/III/2025	Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Pustu Seberang Tembilahan Barat	027/SPK- DINKES/X/2024/047	7.094.500,00
	Dinas Kesehatan	SK Bupati KPTS 310/V/HK- 2025 dan LHR NOMOR : 022/INSP-LHR/III/2025	Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Pustu Desa Sungai Nyiur	027/SPK- DINKES/X/2024/049	7.131.528,00
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	SK Bupati KPTS 310/V/HK- 2025 dan LHR NOMOR : 032/INSP-LHR/IV/2025	Belanja Modal (Pengawasan) Bangunan Gedung Kantor Pembuatan Ruangan 112 dan CSIRT		4.495.000,00
Total					11.535.266.483,77

3 Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan di tahun 2024 sebesar Rp9.248.361.247,19 dan tahun 2023 sebesar Rp1.575.637.697,99 dengan rincian utang belanja modal sebagai berikut :

Nama SKPD	31 Desember 2023	Mutasi	31 Desember 2024
-----------	------------------	--------	------------------



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	31 DESEMBER 2023	Penambahan	Pengurangan	31 DESEMBER 2024
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	774.517.797,99	21.146.020.977,53	0,00	21.920.538.775,52
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	794.745.400,00	0,00	0,00	794.745.400,00
Dinas Kesehatan	0,00	764.544.360,00	0,00	764.544.360,00
Kecamatan Pelangiran	6.374.500,00	0,00	0,00	6.374.500,00
Jumlah	1.575.637.697,99	21.910.565.337,53	0,00	23.486.203.035,52

Berikut ini penjelesan rincian utang belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2024:

	Nama SKPD	Dokumen Pendukung	Kegiatan	No Kontrak	Jumlah
1	Kecamatan Pelangiran		Kegiatan Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Pelangiran		3.836.250,00
	Kecamatan Pelangiran		Kegiatan Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Pelangiran		2.538.250,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		utang Belanja tahun 2016 dan belum bisa dihapus karena belum ada dokumen pengesahan sebagai dasar untuk menghapus utang tersebut juga dari pihak ketiga tidak mengurusnya		66.884.454,40
	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		Rekonstruksi Jalan Ruas 16 Teluk Pinang - Lahang Baru Kec. Gaung Anak Serka	600.1.9.3/DPUTR-BM/SP-RKJL/2023/12.01	707.633.343,59
	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 014/INSP-LHR/III/2025	Rehabilitasi Jembatan Parit Gantung Desa Junjangan Kec. Batang Tuaka	600.1.10.3/DPUTR-BM/SPK-RHJBT/XI/2024/04.02 Add-I:	60.503.231,19
	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 014/INSP-LHR/III/2025	Rehabilitasi Jembatan Khairiah Mandah Kec. Mandah	600.1.10.3/DPUTR-BM/SPK-RHJBT/XI/2024/04.03	198.950.465,40
	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 014/INSP-LHR/III/2025	Perencanaan Teknis Jalan di Kabupaten Indragiri Hilir Paket 3		99.777.900,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 014/INSP-LHR/III/2025	Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan Ruas Pekan Tua - Pengalihan Paket A		191.432.170,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 014/INSP-LHR/III/2025	Rekonstruksi Jalan Ruas Pekan Tua - Pengalihan Paket A		4.752.670.393,18
	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 014/INSP-LHR/III/2025	Rekonstruksi Ruas Terusan Mas - Sapat (Simpang Jalan Menuju Makam Tuan Guru - Jalan SMP Sapat) Kec. Kuala Indragiri		1.404.998.802,67
	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 014/INSP-LHR/III/2025	Rekonstruksi Ruas Teluk Sungka - Sungai Baru Kec. Gaung Anak Serka		199.846.226,76
	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 014/INSP-LHR/III/2025	Rekonstruksi Jalan Ruas Pekan Tua - Pengalihan Paket B		13.308.367.198,45
	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SK Bupati KPTS 310/V/HK-2025 dan LHR NOMOR : 014/INSP-LHR/III/2025	Pembangunan Jembatan pada Ruas 6 Pulau Kijang - Sanglar Kec. Reteh (Lanjutan)		929.474.589,88
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Pengawasan Teknis Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong		123.549.400,00
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Pengawasan Teknis Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kec. Keritang	640/DPERAKIM/SPK/KONS-PDRAIN /VII/2018/01.03	5.080.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Pengawasan Teknis Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kec. Kateman		5.350.000,00
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Pembangunan Drainase Gg. Tunas Kelapa Jl. Pendidikan Kel. Tagaraja Kec. Kateman		86.552.000,00
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Pembangunan Sumur Bor RT.05 RW.03 Desa Panglima Raja Kec. Concong	640/DPERAKIM-CK/SPK/SB-WIL II-P/XI/2017/01.005	115.350.000,00
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Pembangunan Sumur Bor Desa Concong Tengah Kec. Concong	640/DPERAKIM-CK/SPK/SB-WIL II/IX/2017/01.095	53.340.000,00
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Pengawasan Teknis Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin Kec. Tembilahan Hulu	640/DPERAKIM/SPK/KONS-PAB/IX/2018/01.02	9.967.000,00
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Pengawasan Teknis Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin Kec. Gaung Anak Serka	640/DPERAKIM/SPK/KONS-PAB/VII/2018/01.09	23.087.000,00
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Pengawasan Teknis Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin Kec. Pelangiran	640/DPERAKIM/SPK/KONS-PAB/VII/2018/01.13	13.150.000,00
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Pengawasan Teknis Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin Kec. Gaung	640/DPERAKIM/SPK/KONS-PAB/VII/2018/01.14	30.002.000,00
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Pengawasan Teknis Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin Kec. Batang Tuaka	640/DPERAKIM/SPK/KONS-PAB/IX/2018/01.16	15.078.000,00
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Peningkatan Jalan Lingkungan Parit Sidomulyo Tebing Desa Sungai Rukam Kec. Enok	660/SPK/DPERKIM-PSU/FISIK-PJL/PP/WIL.II/IX/2023/06.04	134.800.000,00
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Muhammad Alias Tajam RT. 07 RW. 01 Dusun Garuda 01 Kec. Keritang	660/SPK/DPERKIM-PSU/FISIK-PJL/PP/WIL.II/VII/2023/69.04	89.600.000,00
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Pemakaman Gg. Timbul Jaya RT. 03 RW. 04 Kel. Bandar Sri Gemilang Kec. Kateman	660/SPK/DPERKIM/PSU-PJL-III/IX/2023/63.04	89.840.000,00
4	Dinas Kesehatan		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD (Instalasi Gas Medis)		764.544.360,00
Total					23.486.203.035,52

Perhitungan rincian utang belanja dapat dilihat pada lampiran 12.

5.3.2.1.4	UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
		1.531.824.608,17	1.692.676.863,91
Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya tahun 2024 sebesar Rp1.531.824.608,17 dan tahun 2023 sebesar Rp1.692.676.863,91. Utang Jangka Pendek Tahun 2024 merupakan Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan dengan rincian sebagai berikut:			

SKPD	31 Desember 2023	Mutasi		31 Desember 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.692.676.863,91	7.212.815,00	168.065.070,74	1.531.824.608,17
Jumlah	1.692.676.863,91	7.212.815,00	168.065.070,74	1.531.824.608,17



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Adapun penambahan saldo utang jangka pendek lainnya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp7.212.815,00 merupakan Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, pengurangan saldo utang jangka pendek lainnya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp142.993.221,74 merupakan utang kelebihan pembayaran hasil eksekusi atas jaminan kelebihan pembayaran MPP pada dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan pengurangan atas pencatatan giro dana desa yang berada di Kas Daerah sejak tahun 2014 sebesar Rp25.071.849,00.

Sehubungan dengan telah disalurkan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.308/IV/2018 tanggal 23 April. Apabila dana yang sudah disalurkan tidak digunakan sampai akhir tahun anggaran berkenaan, maka dana tersebut harus dikembalikan dan disetor ke Kas Bendahara Umum Daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 62 Tahun 2019 Pasal 17 huruf c. Adapun rincian Ketetapan Kurang Bayar Pajak sebagai berikut:

No. Ketetapan	Saldo Awal	Utang 2024	Bayar 2024	Sisa
Dana Bankeu Provinsi tahun 2017	1.230.258.340,00	0,00	0,00	1.230.258.340,00
Dana Bankeu Provinsi Tahun 2018	269.498.953,17	0,00	0,00	269.498.953,17
Dana Bankeu Provinsi Tahun 2020	24.854.500,00	0,00	0,00	24.854.500,00
Jumlah	1.524.611.793,17	0,00	0,00	1.524.611.793,17

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.3 Ekuitas	3.704.214.260.792,24	3.835.119.352.944,80

Saldo Ekuitas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.704.214.260.792,24 dan sebesar Rp3.835.119.352.944,80. Saldo ekuitas tahun 2024 merupakan nilai ekuitas akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas.

No	Nama OPD	Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	851.531.567.751,07
2	Dinas Kesehatan	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	359.920.010.098,93
6	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	1.082.329.984.909,86
7	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	239.236.462.834,19
8	Satuan Polisi Pamong Praja	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	3.938.788.751,68
9	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	7.812.960.344,41
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	2.196.430.174,50
11	Dinas Sosial	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	4.608.550.401,33
12	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	2.655.753.609,64
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	8.447.640.876,49
14	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	28.822.806.462,96
15	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	3.555.054.700,70
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	3.720.079.465,36
17	Dinas Perhubungan	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	169.838.585.989,41
18	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	2.511.874.181,13
19	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	1.174.182.584,00
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	770.498.705,87
21	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	114.201.926.501,06
22	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	23.680.694.012,88
23	Dinas Perikanan	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	12.246.317.761,88
24	Dinas Perkebunan	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	11.005.653.967,13
25	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	41.373.973.442,08
26	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	60.202.458.216,18
27	Sekretariat Daerah	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	130.567.680.223,94
28	Sekretariat Dprd	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	73.258.391.341,50
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	3.193.264.861,56
30	Badan Pendapatan Daerah	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	44.034.171.948,23
31	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	290.021.762.617,91
32	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	2.668.051.280,79
33	Inspektorat Daerah	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	4.033.762.088,19
34	Kecamatan Tembilahan	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	10.061.453.926,49
35	Kecamatan Tembilahan Hulu	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	4.770.102.283,28
36	Kecamatan Tempuling	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	7.164.785.918,59
37	Kecamatan Batang Tuaka	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	5.619.958.750,79
38	Kecamatan Concong	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	4.916.643.577,40
39	Kecamatan Enok	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	7.267.190.962,00
40	Kecamatan Gaung	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	4.108.872.879,25
41	Kecamatan Gaung Anak Serka	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	8.020.194.926,02
42	Kecamatan Kateman	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	3.757.070.359,74
43	Kecamatan Kempas	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	23.170.296.621,37
44	Kecamatan Kemuning	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	9.239.045.980,43
45	Kecamatan Keritang	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	3.269.403.340,20



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

46	Kecamatan Kuala Indragiri	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	2.643.401.864,69
47	Kecamatan Mandah	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	2.924.291.092,76
48	Kecamatan Pelangiran	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	4.141.218.682,45
49	Kecamatan Pulau Burung	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	1.268.713.285,81
50	Kecamatan Reteh	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	4.634.923.370,45
51	Kecamatan Sungai Batang	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	1.749.702.256,59
52	Kecamatan Tanah Merah	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	3.504.847.062,05
53	Kecamatan Teluk Belengkong	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	6.382.959.836,78
54	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	2.039.843.710,24
	Total Ekuitas			3.704.214.260.792,24



5.4 PENJELASAN POS - POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/defisit Operasional-LO dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.1 PENDAPATAN - LO	2.076.855.032.644,32	2.150.860.307.539,06

Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada Laporan Realisasi Anggaran terealisasi sebesar Rp2.057.359.021.735,74 sedangkan Pendapatan pada Laporan Operasional - LO Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp2.076.855.032.644,32 dan Rp2.150.860.307.539,06, mengalami penurunan sebesar Rp(74.005.274.894,74) atau (3,56)% dari realisasi pendapatan tahun lalu. Pendapatan - LO Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari Pendapatan Asli Daerah - LO, Pendapatan Transfer - LO, Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO, dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah - LO	226.923.289.672,18	200.043.998.681,83
Pendapatan Transfer - LO	1.808.161.893.871,49	1.939.950.487.366,65
Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO	41.769.849.100,65	10.865.821.490,58
Jumlah	2.076.855.032.644,32	2.150.860.307.539,06

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	226.923.289.672,18	200.043.998.681,83

Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada Laporan Realisasi Anggaran terealisasi sebesar Rp206.629.160.330,74 sedangkan Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional - LO Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp226.923.289.672,18 dan sebesar Rp200.043.998.681,83, mengalami kenaikan sebesar Rp26.879.290.990,35 atau 11,85% dari realisasi pendapatan tahun lalu. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO Tahun 2024 dan 2023 terdiri dari:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	59.759.521.136,00	50.053.620.642,00
Pendapatan Retribusi Daerah	3.752.681.349,66	4.113.779.708,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.967.609.930,00	14.112.352.048,00
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	152.443.477.256,52	131.764.246.283,83
Jumlah	226.923.289.672,18	200.043.998.681,83

Rincian masing-masing Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO sebagai berikut :

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.1.1.1 PENDAPATAN PAJAK DAERAH - LO	59.759.521.136,00	50.053.620.642,00

Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada Laporan Realisasi Anggaran terealisasi sebesar Rp46.982.737.674,00 sedangkan Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional - LO yang diakui Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp59.759.521.136,00 dan sebesar Rp50.053.620.642,00, mengalami kenaikan sebesar Rp9.705.900.494,00 atau 16,24% dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Pajak Hotel-LO	953.555.095,00	882.710.576,00
Pajak Restoran-LO	3.604.144.022,00	4.517.755.215,00
Pajak Hiburan-LO	97.140.623,00	43.642.124,00
Pajak Reklame-LO	766.856.720,00	727.576.673,00
Pajak Penerangan Jalan-LO	32.293.965.690,00	30.333.169.451,00
Pajak Air Tanah-LO	212.934.792,00	191.062.235,00
Pajak Sarang Burung Walet-LO	192.537.383,00	213.449.043,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	34.905.900,00	46.040.400,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	19.417.680.188,00	7.195.834.567,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	2.185.800.723,00	5.902.380.358,00
Jumlah	59.759.521.136,00	50.053.620.642,00

Adapun penjelasan mengenai selisih antara pendapatan pajak Daerah LRA dengan pendapatan pajak Daerah - LO sebagai berikut:



No	Uraian Akun	LRA	LO	Selisih	Penjelasan
1	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	6.640.896.726,00	19.417.680.188,00	(12.776.783.462,00)	Selisih Pendapatan Pajak PBBP2-LRA dengan LO Sebesar Rp12.776.783.462,00 yang merupakan Pencatatan piutang di Tahun 2024 (Badan Pendapatan Daerah)
Jumlah		6.640.896.726,00	19.417.680.188,00	(12.776.783.462,00)	

5.4.1.1.2 PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH - LO

Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada Laporan Realisasi Anggaran terealisasi sebesar Rp4.462.190.683,00 sedangkan Pendapatan Retribusi Daerah dalam Laporan Operasional - LO Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp3.752.681.349,66 dan sebesar Rp4.113.779.708,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp(361.098.358,34) atau (9,62)%. Adapun rincian Pendapatan Retribusi Daerah - LO adalah sebagai berikut:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Retribusi Jasa Umum - LO	834.578.305,00	2.921.890.208,00
Retribusi Jasa Usaha - LO	579.512.474,66	532.155.600,00
Retribusi Perizinan Tertentu - LO	2.338.590.570,00	659.733.900,00
Jumlah	3.752.681.349,66	4.113.779.708,00

Adapun rincian masing-masing Pendapatan Retribusi Daerah - LO adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum - LO
- Retribusi Jasa Umum pada Laporan Realisasi Anggaran pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp834.578.305,00 sedangkan pada Retribusi Jasa Umum - LO Tahun 2024 sebesar Rp834.578.305,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp2.921.890.208,00 mengalami penurunan sebesar Rp(2.087.311.903,00) atau (250,10)% dengan rincian sebagai berikut:
- | | Tahun 2024
(Rp) | Tahun 2023
(Rp) |
|--|--------------------|--------------------|
| Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas- LO | 22.894.200,00 | 75.407.700,00 |
| Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO | 549.981.105,00 | 368.993.008,00 |
| Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO | 0,00 | 450.000.000,00 |
| Retribusi Pelataran-LO | 37.920.000,00 | 63.200.000,00 |
| Retribusi Los-LO | 180.188.000,00 | 122.989.000,00 |
| Retribusi Kios-LO | 43.595.000,00 | 41.060.000,00 |
| Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran-LO | 0,00 | 41.013.000,00 |
| Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO | 0,00 | 72.007.500,00 |
| Retribusi Pengawasan dan Pengendalian | 0,00 | 1.687.220.000,00 |
| Jumlah | 834.578.305,00 | 2.921.890.208,00 |
- b. Retribusi Jasa Usaha - LO
- Retribusi Jasa Usaha pada Laporan Realisasi Anggaran pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.289.021.808,00 sedangkan pada Retribusi Jasa Usaha - LO Tahun 2024 sebesar Rp579.512.474,66 dan sebesar Rp532.155.600,00 mengalami kenaikan sebesar Rp47.356.874,66 atau 8,17%. dengan rincian sebagai berikut:

Retribusi Jasa Usaha - LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Retribusi Penyewaan Tanah-LO	38.573.333,33	40.770.000,00
Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	281.461.933,33	162.433.000,00
Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	319.000,00	10.102.000,00
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	0,00	2.500.000,00
Retribusi Pemakaian Alat-LO	28.861.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO	0,00	120.000,00
Retribusi Jasa Usaha - LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO	0,00	100.000.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	1.365.500,00	4.157.300,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	217.781.708,00	201.773.300,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman-LO	8.000.000,00	8.200.000,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO	3.150.000,00	2.100.000,00
Jumlah	579.512.474,66	532.155.600,00



Adapun penjelasan mengenai selisih antara pendapatan Retribusi Jasa Usaha LRA dengan pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO sebagai berikut:

No	Uraian	LRA	LO	Selisih	Penjelasan
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	61.800.000,00	38.573.333,33	23.226.666,67	Pendapatan Sewa Bank Riau Kepri ATM dan Kantor Pelayanan tahun 2024 sebesar Rp48.066.666,67 dan Sewa dibayar dimuka ATM BNI tahun 2024 yang sudah jatuh tempo sebesar Rp24.840.000,00 (Sekretariat Daerah)
2	Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	967.744.600,00	281.461.933,33	686.282.666,67	Pendapatan diterima dimuka 2024 atas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (31 Oktober 2024 s.d 31 Oktober 2027) Nomor 1999/DISHUB/X/2024 dan Nomor:001/KKK/X/2024 Sebesar Rp406.288.666,67 dan reklas dari retribusi penyewaan Bangunan sebesar Rp62.212.292,00 (Dinas Perhubungan)
3	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	217.781.708,00	0,00	217.781.708,00	Reklasifikasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ke Retribusi Penyewaan Bangunan sebesar Rp217.781.708,00 (Dinas Perhubungan)
Jumlah		1.247.326.308,00	320.035.266,66	927.291.041,34	

c. Retribusi Perizinan Tertentu - LO
Retribusi Perizinan Tertentu pada Laporan Realisasi Anggaran pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp2.338.590.570,00 sedangkan pada Retribusi Perizinan Tertentu - LO Tahun 2024 sebesar Rp2.338.590.570,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp659.733.900,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp1.678.856.670,00 atau 71,79% dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO	2.089.996.170,00	659.733.900,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	248.594.400,00	0,00
Jumlah	2.338.590.570,00	659.733.900,00

5.4.1.1.3 PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada Laporan Realisasi Anggaran - LRA terealisasi sebesar Rp10.967.609.930,00 - sedangkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Laporan Operasional - LO Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp10.967.609.930,00 dan sebesar Rp14.112.352.048,00 mengalami penurunan sebesar Rp(3.144.742.118,00) atau (28,67)% merupakan dari hasil investasi yang ditanamkan pada beberapa Lembaga Keuangan (Perbankan), dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	10.967.609.930,00	14.112.352.048,00
Jumlah	10.967.609.930,00	14.112.352.048,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Tahun 2024 merupakan gabungan dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) yaitu terdiri dari : NK. 6603/Deviden Laba Bank Riau Kepri sebesar Rp10.774.992.662,00 Tahun 2023 Cn Dari Perantara Umum dan BPR Gemilang/Set Deviden sebesar Rp192.617.268,00 Pemda Inhil Tahun Buku 2023 PB Setor Pemindah bukuan.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.1.1.4 PENDAPATAN ASLI DAERAH LAINNYA - LO	152.443.477.256,52	131.764.246.283,83



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan Asli Daerah Lainnya Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp144.256.981.043,74 sedangkan pada Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp152.443.477.256,52 dan sebesar Rp131.764.246.283,83 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp20.679.230.972,69 atau 13,57%.. Dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Hasil Penjualan Alat Angkutan-LO	101.848.400,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain- LO	12.044.000,00	3.780.000,00
Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	2.319.908.478,25	2.564.106.930,00
Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	2.764,00	0,00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	1.213.519.877,00	679.853.915,04
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	10.570.420,00	956.000,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	841.131.628,49	1.592.489.577,65
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.773.952.675,59	222.822.192,57
Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	3.446.896,00	7.398.526,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	19.430.273,00	27.275.694,00
Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling-LO	332.916,00	748.339,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron-LO	33.922.849,00	6.395.182,00
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	810.455,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	1.257.504,48	960.275,64
Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet-LO	1.270.998,00	3.163.488,00
Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	33.550,00	214.720,00
Pendapatan Denda PBBP2-LO	1.446.678.346,76	3.457.207.505,04
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO	151.136.329,32	5.448.121.079,64
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21-LO	0,00	348.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	614.297.782,00	315.666.927,29
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO	922.955.988,00	521.177.684,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi-Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten-LO	116.743.746,51	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga	8.775.106,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS-LO	40.359.000,00	8.188.000,00
Pendapatan dari BLUD-LO	142.557.111.685,51	115.961.580.624,96
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO	87.700.000,00	0,00
Pendapatan BLUD dari Jasa Giro-LO	39.387.087,61	0,00
Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD-LO	124.848.500,00	0,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	0,00	941.791.623,00
Jumlah	152.443.477.256,52	131.764.246.283,83

Adapun penjelasan mengenai selisih antara Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LRA dengan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO sebagai berikut:

No	Uraian Akun	LRA	LO	Selisih	Penjelasan
1	Hasil Penjualan Alat Angkutan-LO	453.172.000,00	101.848.400,00	351.323.600,00	Merupakan Hasil Penjualan Alat Angkutan-LRA dengan Hasil Penjualan Alat Angkutan-LO yaitu merupakan Lelang aset (yang kas hasil lelangnya setor ke kasda) sebesar Rp351.323.600,00 (Sekretariat Daerah)
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	979.580.154,86	841.131.628,49	138.448.526,37	Merupakan Reklas ke pengembalian TGR sebesar Rp130.335.770,00 dan Reklas Penerimaan ke Pengembalian Dana Bergulir sebesar Rp7.212.815,00 serta reklas dari Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp899.941,37 (BKAD)



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

3	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.154.165.576,19	1.773.952.675,59	(619.787.099,40)	Penerimaan Piutang Denda Piutang TA 2023 sebesar Rp4.499,71 (DISPORA) dan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dinas PUTR sebesar Rp619.782.599,69
3	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	2.813.857,00	33.922.849,00	(31.108.992,00)	Penerimaan atas Piutang Denda Pajak Reklame sesuai perhitungan kertas kerja piutang denda Tahun 2024 (Badan Pendapatan Daerah)
4	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	745.272,00	1.257.504,48	(512.232,48)	Penerimaan atas Piutang Denda Pajak Air Tanah sesuai perhitungan kerts kerja piutang denda Tahun 2024 sebesar Rp512.232,48 (Badan Pendapatan Daerah)
5	Pendapatan Denda PBBP2-LO	37.225.382,00	1.446.678.346,76	(1.409.452.964,76)	Penerimaan atas Piuang Denda PBBP2 sesuai perhitungan kertas kerja piutang denda Tahun 2024 sebesar Rp1.409.452.964,76 (Badan Pendapatan Daerah)
6	Pendapatan dari BLUD-LO	135.941.704.635,00	142.557.111.685,51	(6.615.407.050,51)	Penerimaan piutang Tahun 2023 sebesar Rp11.435.970.302,00, Piutang Tahun 2024 sebesar Rp17.947.397.501,00, Penerimaan Piutang yang telah disisihkan sebesar Rp57.179.851,51 dan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024 Rp46.800.000,00
Jumlah		138.569.406.877,05	146.755.903.089,83	(8.186.496.212,78)	

Penjelasan selisih Pendapatan dari BLUD-LO sebagai berikut:

Pendapatan dari BLUD				Selisih
Nama SKPD	LRA		LO	
	Anggaran	realisasi		
	2024		2024	
Dinas Kesehatan	42.827.918.445,00	36.559.597.034,00	36.716.845.434,00	(157.248.400,00)
RSUD Puri Husada Tembilahan	70.000.000.000,00	85.287.523.993,00	91.128.461.626,01	(5.840.937.633,01)
RSUD Tengku Sulung	4.000.000.000,00	2.045.209.241,00	2.420.895.842,00	(375.686.601,00)
RSUD Raja Musa	8.000.000.000,00	11.453.537.589,00	11.695.072.005,50	(241.534.416,50)
Dinas Perhubungan (UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor Terminal Dan Perparkiran)	0,00	600.336.778,00	600.336.778,00	0,00
Total	124.827.918.445,00	135.946.204.635,00	142.561.611.685,51	(6.615.407.050,51)

Rekap Perhitungan Pendapatan dari BLUD-LO sebagai berikut:

Nama SKPD	Uraian				Selisih
	Penerimaan piutang Tahun 2023	Piutang Tahun 2024	Penerimaan Piutang yang telah disisihkan	Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024	
Dinas Kesehatan	2.280.000,00	159.517.000,00	11.400,00	0,00	(157.248.400,00)



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

RSUD Puri Husada Tembilahan	10.451.986.802,00	16.193.864.501,00	52.259.934,01	46.800.000,00	(5.840.937.633,01)
RSUD Tengku Sulung	172.320.200,00	547.145.200,00	861.601,00	0,00	(375.686.601,00)
RSUD Raja Musa	809.383.300,00	1.046.870.800,00	4.046.916,50	0,00	(241.534.416,50)
Total	11.435.970.302,00	17.947.397.501,00	57.179.851,51	46.800.000,00	(6.615.407.050,51)

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.808.161.893.871,49	1.939.950.487.366,65

5.4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada Laporan Realisasi Anggaran pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.850.689.502.405,00 sedangkan Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional - LO Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp1.808.161.893.871,49 dan sebesar Rp1.939.950.487.366,65 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp(131.788.593.495,16) atau (7,29)%. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.477.940.475.605,00	1.592.956.133.419,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	186.238.341.500,00	192.085.204.000,00
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	137.476.373.766,49	139.321.233.947,65
Bantuan Keuangan	6.506.703.000,00	15.587.916.000,00
Jumlah	1.808.161.893.871,49	1.939.950.487.366,65

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.477.940.475.605,00	1.592.956.133.419,00

5.4.1.2.1. PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN- LO

Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.553.881.164.605,00 sedangkan pada Dana Perimbangan - LO Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp1.477.940.475.605,00 dan sebesar Rp1.592.956.133.419,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp(115.015.657.814,00) atau (7,78)%. Dana Perimbangan - LO berasal dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pajak - LO , Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO, Dana Alokasi Umum - LO dan Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak - LO	71.475.765.000,00	86.824.086.000,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO	176.563.746.000,00	260.374.481.000,00
Dana Alokasi Umum - LO	919.817.829.148,00	925.026.162.597,00
Dana Alokasi Khusus - LO	310.083.135.457,00	320.731.403.822,00
Jumlah	1.477.940.475.605,00	1.592.956.133.419,00

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan-LO adalah sebagai berikut:

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
71.475.765.000,00	86.824.086.000,00

5.4.1.2.1.1. DANA BAGI HASIL PAJAK - LO

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pajak pada Laporan Realisasi Anggaran terealisasi sebesar Rp84.294.507.000,00 sedangkan pada Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) - LO Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp71.475.765.000,00 dan Rp86.824.086.000,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp(15.348.321.000,00) atau (21,47%) dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
DBH PBB-LO	57.807.107.000,00	70.342.650.000,00
DBH PPh Pasal 21-LO	12.775.322.000,00	15.174.213.000,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	893.253.000,00	1.307.223.000,00
DBH CHT-LO	83.000,00	0,00
Jumlah	71.475.765.000,00	86.824.086.000,00

Adapun penjelasan mengenai selisih antara Dana Bagi Hasil Pajak - LRA dengan Dana Bagi Hasiil Pajak - LO sebagai berikut:



No	Uraian Akun	LRA	LO	Selisih	Penjelasan
1	DBH PBB-LO	68.103.462.000,00	57.807.107.000,00	(10.296.355.000,00)	Merupakan Dana TDF tahun 2023 yang diterima tahun 2024
2	DBH PPh Pasal 21-LO	15.261.948.000,00	12.775.322.000,00	(2.486.626.000,00)	Perbedaan selisih DBH PPh Pasal 21 - LRA dan DBH PPh Pasal 21 - LO merupakan TDF Tahun 2023 yang diterima Kasda di tahun 2024 sebesar Rp2.486.626.000,-
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN	929.014.000,00	893.253.000,00	(35.761.000,00)	Perbedaan selisih DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN -LRA dan DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN - LO merupakan TDF Tahun 2023 yang diterima Kasda di tahun 2024 sebesar Rp35.761.000,-
Jumlah		84.294.424.000,00	71.475.682.000,00	(12.818.742.000,00)	

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp)	(Rp)
176.563.746.000,00	260.374.481.000,00

5.4.1.2.1.2. DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM - LO

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam pada Laporan Realisasi Anggaran terealisasi sebesar Rp239.685.693.000,00 sedangkan Pada Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp176.563.746.000,00 dan Rp260.374.481.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp(83.810.735.000,00) atau 47,47%, dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
DBH SDA Minyak Bumi-LO	44.091.057.000,00	88.415.845.000,00
DBH SDA Gas Bumi-LO	23.924.130.000,00	18.198.534.000,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	108.111.000,00	523.316.982,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	59.728.552.000,00	92.550.748.018,00
DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	46.374.527.000,00	55.701.038.356,00
DBH SDA Kehutanan-IIUPH-LO	0,00	1.550.006.000,00
DBH SDA Perikanan-LO	2.337.369.000,00	3.434.992.644,00
Jumlah	176.563.746.000,00	260.374.481.000,00

Adapun penjelasan mengenai selisih antara Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LRA dengan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO sebagai berikut:

No	Uraian Akun	LRA	LO	Selisih	Penjelasan
1	DBH SDA Minyak Bumi-LO	66.612.932.000,00	44.091.057.000,00	(22.521.875.000,00)	Perbedaan selisih DBH SDA Minyak Bumi-LRA dan DBH SDA Minyak Bumi-LO merupakan TDF Tahun 2023 yang diterima Kasda di tahun 2024 sebesar Rp22.521.875.000,-
2	DBH SDA Gas Bumi-LO	24.073.502.000,00	23.924.130.000,00	(149.372.000,00)	Perbedaan selisih DBH SDA Gas Bumi-LRA dan DBH SDA Gas Bumi-LO merupakan TDF Tahun 2023 yang diterima Kasda di tahun 2024 sebesar Rp1.749.765.000,- dan penerimaan Penerimaan TDF Tahun 2024 (Belum diterima Kasda) sebesar Rp1.600.393.000,-



3	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	99.936.563.000,00	59.728.552.000,00	(40.208.011.000,00)	Perbedaan selisih DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LRA dan DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO merupakan TDF Tahun 2023 yang diterima Kasda di tahun 2024 sebesar Rp43.717.517.000,- dan penerimaan Penerimaan TDF Tahun 2024 (Belum diterima Kasda) sebesar Rp3.509.506.000,-
4	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	46.617.216.000,00	46.374.527.000,00	(242.689.000,00)	Perbedaan selisih DBH SDA Kehutanan-PSDH-LRA dan DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO merupakan TDF Tahun 2023 yang diterima Kasda di tahun 2024 sebesar Rp791.928.000,- dan penerimaan Penerimaan TDF Tahun 2024 (Belum diterima Kasda) sebesar Rp549.239.000,-
Jumlah		237.240.213.000,00	174.118.266.000,00	(63.121.947.000,00)	

5.4.1.2.1.3. DANA ALOKASI UMUM - LO

Dana Alokasi Umum pada Laporan Realisasi Anggaran terealisasi sebesar Rp919.817.829.148,00 sedangkan pada Dana Alokasi Umum - LO Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp919.817.829.148,00 dan sebesar Rp925.026.162.597,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp(5.208.333.449,00) atau 0,57%, dengan rincian sebagai berikut:

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) - LO

Jumlah

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp)	(Rp)
919.817.829.148,00	925.026.162.597,00

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp)	(Rp)
919.817.829.148,00	925.026.162.597,00
919.817.829.148,00	925.026.162.597,00

5.4.1.2.1.4. DANA ALOKASI KHUSUS - LO

Dana Alokasi Khusus pada Laporan Realisasi Anggaran terealisasi sebesar Rp310.083.135.457,00 sedangkan pada Dana Alokasi Khusus - LO Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp310.083.135.457,00 dan sebesar Rp320.731.403.822,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp(10.648.268.365,00) atau (3,43%).

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO

DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD- LO	684.277.470,00	744.538.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	3.288.130.000,00	3.872.060.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	3.303.103.500,00	1.558.679.000,00
DAKFisik-BidangPendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah-LO	0,00	977.345.320,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar-LO	0,00	3.919.946.250,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB-LO	1.479.379.950,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)-LO	6.876.199.890,00	13.888.621.210,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	9.147.347.330,00	11.533.461.740,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan-LO	0,00	768.659.300,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	15.146.305.999,00	15.179.630.200,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	889.240.457,00	973.670.254,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO

DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	0,00	87.411.111.523,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	0,00	4.170.000.000,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	102.185.159.240,00	104.222.707.045,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	4.691.170.000,00	2.454.680.227,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	36.773.439.000,00	30.813.275.000,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	0,00	5.641.173.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	0,00	1.878.300.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	7.951.249.617,00	2.820.605.757,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas- LO	18.839.037.159,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	5.058.651.014,00	2.830.340.000,00
DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	0,00	991.718.196,00
DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal-LO	570.267.533,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKB-KB-LO	0,00	24.080.881.800,00
DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	0,00
DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	502.788.161,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler-LO	84.998.570.137,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler-LO	2.758.500.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler-LO	4.369.319.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja-LO	165.000.000,00	0,00
	310.083.135.457,00	320.731.403.822,00

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.2.2 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA-LO	186.238.341.500,00	192.085.204.000,00

Pedapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Pada Laporan Realisasi Anggaran terealisasi sebesar Rp186.238.341.500,00 sedangkan pada Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp186.238.341.500,00 dan Rp192.085.204.000,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp(5.846.862.500,00) atau (3,14)%. Dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
Dana Penyesuaian-LO	186.238.341.500,00	192.085.204.000,00
Jumlah	186.238.341.500,00	192.085.204.000,00
	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.2.2.1. DANA PENYESUAIAN-LO	186.238.341.500,00	192.085.204.000,00

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Pada Laporan Realisasi Anggaran terealisasi sebesar Rp186.238.341.500,00 sedangkan pada Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp186.238.341.500,00 dan Rp192.085.204.000,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp(5.846.862.500,00) atau (3,14)%. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
Dana Insentif Daerah - LO	2.810.478.500,00	0,00
Dana Desa - LO	183.427.863.000,00	182.593.182.000,00
Insentif Fiskal-LO	0,00	9.492.022.000,00
Jumlah	186.238.341.500,00	192.085.204.000,00
	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.2.3. PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA - LO	137.476.373.766,49	139.321.233.947,65

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada Laporan Realisasi Anggaran terealisasi sebesar Rp104.063.293.300,00 sedangkan pada Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp137.476.373.766,49 dan sebesar Rp139.321.233.947,65 mengalami penurunan sebesar Rp(1.844.860.181,16) atau (1,34)%. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah-LO	137.476.373.766,49	139.321.233.947,65
Jumlah	137.476.373.766,49	139.321.233.947,65
	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.2.3.1. PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH- LO	137.476.373.766,49	139.321.233.947,65

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Pada Laporan Realisasi Anggaran terealisasi sebesar Rp104.063.293.300,00 sedangkan pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah- LOTahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp137.476.373.766,49 dan sebesar Rp139.321.233.947,65 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp(1.844.860.181,16) atau (1,34)%. Dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	24.394.657.122,50	25.469.798.210,72
- Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	16.834.279.391,89	17.729.923.125,03
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	60.683.252.738,97	62.200.075.830,98
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	1.375.482.639,13	1.324.119.156,92
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	34.188.701.874,00	32.597.317.624,00
Jumlah	137.476.373.766,49	139.321.233.947,65

Adapun penjelasan mengenai selisih antara pendapatan bagi hasil pajak LRA dengan pendapatan bagi hasil pajak - LO sebagai berikut:

No	Uraian Akun	LRA	LO	Selisih	Penjelasan
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	18.827.899.585,00	24.394.657.122,50	5.566.757.537,50	Perbedaan selisih Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - LRA dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - LO merupakan penerimaan piutang DBH tahun lalu Senilai Rp6.485.722.300,- kemudian piutang Tahun 2024 bertambah sebesar Rp9.277.812.842,- dan penerimaan pendapatan yang telah disisihkan senilai Rp32.428.611,50. serta Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor atas Piutang PKB TW IV 2024 (Desember) dengan Keputusan Gubernur No.Kpts.357/V/2025 tanggal 2 Mei 2025- sebesar Rp2.742.238.384,00.
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	15.120.434.013,00	16.834.279.391,89	1.713.845.378,89	Perbedaan antara Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA Dan Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO merupakan Piutang DBH dari Propinsi tahun anggaran 2023 adalah penerimaan piutang tahun lalu senilai Rp3.441.846.977,- kemudian Piutang Tahun 2024 bertambah sebesar Rp2.781.135.239,- dan Penerimaan atas piutang yang telah disisihkan di tahun sebelumnya senilai Rp17.209.234,89,- serta Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas Keputusan Gubernur No.Kpts.357/V/2025 tanggal 2 Mei 2025 - Piutang PBBNKB TW IV Tahun 2024 (Desember) sebesar Rp2.357.347.882,00.



3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	35.129.082.313,00	60.683.252.738,97	25.554.170.425,97	Perbedaan antara Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA Dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO merupakan penerimaan piutang tahun lalu senilai Rp5.225.234.395,- kemudian Piutang Tahun 2024 bertambah sebesar Rp25.920.229.606,- dan Penerimaan piutang yang telah disisihkan sebesar Rp26.126.171.97,- serta Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atas Keputusan Gubernur No.Kpts.357/V/2025 tanggal 2 Mei 2025 - Piutang PBB-KB TW IV Tahun 2024 (Desember) Rp4.833.049.043,00.
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	797.175.515,00	1.375.482.639,13	578.307.124,13	Perbedaan antara Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan - LRA Dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan - LO merupakan penerimaan piutang tahun lalu senilai Rp123.265.226,- kemudian Piutang Tahun 2024 bertambah sebesar Rp583.711.210,- dan Penerimaan piutang yang telah disisihkan sebesar Rp616.326,13,- serta Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan atas Keputusan Gubernur No.Kpts.357/V/2025 tanggal 2 Mei 2025 - Piutang PAP TW IV 2024 (Desember) sebesar Rp117.244.814,00.
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	34.188.701.874,00	34.188.701.874,00	0,00	
Jumlah		104.063.293.300,00	137.476.373.766,49	33.413.080.466,49	

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp)	(Rp)
6.506.703.000,00	15.587.916.000,00

5.4.1.2.3.2 BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI - LO

Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp6.506.703.000,00 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi - LO Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp6.506.703.000,00 dan sebesar Rp15.587.916.000,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp(9.081.213.000,00) atau (139,57)%.

Adapun penjelasan mengenai rincian Bantuan keuangan dari pemerintah Daerah Provinsi - LO adalah sebagai berikut :

Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Nomor STS	Nilai
Bantuan Keuangan Gaji Guru Bantu Tahap I Nomor: 000048/LS BPKAD	03120/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/II/A06/2024	3.605.931.000,00
Bantuan Keuangan Gaji Guru Bantu Tahap II Nomor: 000194/LS BPKAD	06401/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/III/A06/2024	1.930.572.000,00
Bantuan Keuangan Rumah Layak Huni Nomor: 000274/LS/BPKAD	07544/5.02.0.00.0.00.02/STS/Penerimaan Rek.BUD/IV/A06/2024	970.200.000,00
Jumlah		6.506.703.000,00

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp)	(Rp)
41.769.849.100,65	10.865.821.490,58

5.4.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada Laporan Realisasi Anggaran terealisasi sebesar Rp0,00 sedangkan pada Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO pada Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp41.769.849.100,65 dan sebesar Rp10.865.821.490,58 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp30.904.027.610,07 atau 73,99%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp)	(Rp)
41.769.849.100,65	10.865.821.490,58
41.769.849.100,65	10.865.821.490,58

Pendapatan Hibah - LO

Jumlah



5.4.1.3.1 PENDAPATAN HIBAH-LO

Pendapatan Hibah-LO Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp41.769.849.100,65 dan sebesar Rp10.865.821.490,58 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp30.904.027.610,07 atau 73,99%. Dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	639.432.661,00	9.455.111.154,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	40.880.217.214,65	1.410.710.336,58
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri - LO	250.199.225,00	0,00
	41.769.849.100,65	10.865.821.490,58

Adapun rincian dari Pendapatan Hibah - LO adalah sebagai berikut :

Daftar SKPD Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO

	Nilai
- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak - Penerimaan Hibah obat-obatan dan Alat KB dari Persediaan Hibah Provinsi-BKKBN Tahun 2024, Sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 880/SP03.06/J1/2024 Tanggal 21 Februari 2024, BA Nomor 1825/SP03.06/J1/2024 Tanggal 05 Juni 2024 dan BA Nomor 1825/SP03.06/J1/2024 tanggal 11 November 2024	589.435.414,00
- Badan Keuangan dan Aset Daerah Penerimaan Hibah aset dari Bawaslu sesuai surat Nomor BAST nomor : 020.2/PL.09/RA/06/2024 Nomor : 013/BA/BKAD-BMD	49.997.247,00

639.432.661,00

Daftar SKPD Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO

	Nilai
- Dinas Pendidikan - Hibah aset Gedung Pendidikan dari Provinsi Nomor : 000.2.5/BPKAD/5085, Nomor : 00.2.5/2099/BPKAD-BMD tanggal 4 Desember 2024 Nomor : 000.2.5/BPKAD/5084, Nomor : 00.2.5/2100/BPKAD-BMD tanggal 4 Desember 2024	9.261.237.593,37
- Dinas Kesehatan - Hibah aset Peralatan dan Mesin alat kedokteran dari Provinsi sesuai dokumen BAST Nomor : KN.02.07/B.III/1227/2024 tanggal Maret 2024	6.024.724.653,63
- Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan - Hibah aset Bangunan Kesehatan IGD dari Provinsi Riau Tahun perolehan aset 2013	1.026.898.012,51
- Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa - Hibah dari nilai bangunan yang diserahterimakan namun nilai tersebut merupakan koreksi atas hibah yang telah dilaksanakan pada tahun 2019, selanjutnya selisish atas nilai tersebut dikapitalisasi pada gedung rumah sakit naskah hibah No : 000.2.5/BPKAD/5084, No : 00.2.5/2100/BPKAD-BMD BAST no.BAST No : 000.2.5/BPKAD/5085, No : 00.2.5/2099/BPKAD-BMD tanggal 4 Desember 2024	6.532.726.842,00
- Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan - Hibah aset Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dari Provinsi sesuai BAST No.00.2.5/BPKAD/5085. 00.2.5/2099/BPKAD-BMD tanggal 4 Desember 2024	246.400.000,00
- Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan - Hibah aset Kendaraan Bermotor dari dari PT. BRK SYARI AH dan Provinsi Riau sesuai BAST No.13/BAN/PL.03/TBBH/KMTRN-BRKS/2024 tanggal 26 Juni 2024	392.000.000,00
- Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan - Hibah aset Kendaraan Bermotor dari Provinsi Riau tahun 2024 sesuai BAST No.00.2.5/BPKAD/5085. 00.2.5/2099/BPKAD-BMD tanggal 4 Desember 2024	858.194.040,80
- Dinas Perhubungan - Hibah dari provinsi Kantor Satker LLADP Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir (BAST HIBAH BMD Nomor : 000.2.5/BPKAD/5085 / Nomor : 00.2.5/2099/BPKAD-BMD Tanggal 4/12/2024) dan Kantor Satker LLASDP Teluk Kiambang Kabupaten Indragiri Hilir (BAST HIBAH BMD Nomor : 000.2.5/BPKAD/5085 / Nomor : 00.2.5/2099/BPKAD-BMD Tanggal 4/12/2024)	4.490.000,00
- Dinas Perhubungan - Hibah aset Mobil Patwal Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir Jl. Baharudin Yusuf No.33 Tembilahan Hulu (Hibah Pemerintah Provinsi Riau 2024) seusai dokumen BAST Nomor : 000.2.5/BPKAD/5085 dan Nomor: 00.2.5/2099/BPKAD-DMD tanggal 4 Desember 2024	242.192.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

- Dinas Perhubungan - Hibah dari desa Dermaga Kelurahan Sungai Empat Kecamatan Gaung Anak Serka tahun 2024 sesuai dokumen naskah hibah dari kelurahan Sungai Empat Kecamatan Gaung Nomor:03.LPM-SE/III/2024 dan Nomor 155.1.DISHUB-SET/III/2024 tanggal Maret 2024	150.000.000,00
- Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan - Hibah aset Bangunan Gedung dari provinsi tahun 2024 sesuai dokumen BAST Nomor : 000.2.5/BPKAD/5085 TANGGAL : 04 Desember 2024	588.917.900,01
- Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan - Hibah aset Tanah dari Provinsi Sesuai Dokumen Nomor : 00.2.55/2100/BPKAD-BMD Tanggal : 4 Desember 2024	10.261.173.990,00
- Badan Keuangan Dan Aset Daerah - Hibah aset dari Provinsi sesuai dokumen BAST Nomor : 000.2.5/BPKAD/5085, Nomor : 00.2.5/2099/BPKAD-BMD tanggal 4 Desember 2024	1.288.997.000,00
- Kecamatan Reteh - Hibah aset Tanah Lapangan Upacara dari Desa sanglar SKH No.01/SKH/S/I/2024 Tanggal 22 Januari 2024 Rp.70.000.000 dan Hibah Tanah untuk Bangunan Rumah PKK-dari PEMDES seberang Pulau Kijang SKH No. 02/SH/PEM-SPK/I/2024 Tanggal 23 Januari 2024 Rp4.000.000	74.000.000,00
- DTPHP - Penerimaan hibah aset dari Pemerintah Provinsi sesuai surat Nomor BAST 000.2.5/BPKAD/5085 Nomor : 00.2.5/2099/BPKAD-BMD	285.382.522,33
- Dinas Kesehatan - Penerimaan Hibah aset dari Pemerintah Provinsi sesuai surat Nomor BAST 000.2.5/BPKAD/5085 Nomor : 00.2.5/2099/BPKAD-BMD senilai Rp4.071.716.000,- (Dinas Kesehatan)	3.094.504.160,00
- Dinas pendidikan - Penerimaan hibah aset tahun 2005 yaitu Buku Umum sebesar Rp518.918.000,- serial sebesar Rp29.460.000,- berdasarkan surat Nomor BAST 000.2.5/BPKAD/5085 Nomor : 00.2.5/2099/BPKAD-BMD	548.378.000,00

40.880.217.214,65

Daftar SKPD Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO

Nilai

- Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan - Hibah Aset Mobil Ambulance Oleh PT.BANK BNI Off The Road tahun perolehan aset 2023	250.199.225,00
	250.199.225,00

Tahun 2024
(Rp)

Tahun 2023
(Rp)

5.4.2

BEBAN

Beban dalam Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp2.204.415.593.068,72 dan sebesar Rp2.157.805.513.312,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp46.610.079.756,72 atau 2,11%. Beban Daerah dapat dirincikan sebagai berikut:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Beban Pegawai	869.312.151.244,72	783.911.726.812,31
Beban Persediaan	95.882.967.138,05	168.833.727.602,64
Beban Jasa	444.612.315.030,27	396.389.519.696,27
Beban Pemeliharaan	26.951.728.374,06	33.510.223.299,72
Beban Perjalanan Dinas	126.590.329.483,50	144.977.473.403,00
Beban Subsidi	259.876.000,00	0,00
Beban Hibah	110.962.245.385,99	74.674.482.099,76
Beban Bantuan Sosial	299.000.000,00	500.126.230,00
Beban Penyusutan	213.365.850.298,08	222.329.807.792,82
Beban Penyisihan Piutang	10.324.362.606,05	14.673.018.200,48
Beban Transfer	305.854.767.508,00	312.437.346.475,00
Beban Lain-Lain	0,00	5.568.061.700,00
	2.204.415.593.068,72	2.157.805.513.312,00

Ada terdapat perbedaan antara nilai belanja di Laporan Realisasi Anggaran-LRA dengan Beban pada Laporan Operasional - LO, perbedaan tersebut dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian Akun	Nilai	Nilai	Selisih	Keterangan	
		LO	LRA		Nilai	Penjelasan
1	Beban Pegawai	869.312.151.244,72	854.797.200.588,72	14.514.950.656,00	(15.890.000,00)	Merupakan Pelunasan Utang Belanja Tunjangan Fungsional PNS tahun 2023 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
					(20.650.000,00)	Merupakan Pelunasan Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS tahun 2023 pada Dinas
					15.460.885.553,00	Merupakan Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Tahun 2024 Pada Dinas Kesehatan atas LHR Nomor 022/INSP-LHR/III/2025 dan LHR Nomor 018/INSP-LHR/III/2025 sebesar Rp15.459.838.100,00 dan Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Tahun 2024 Pada Kec.Batang Tuaka Berdasarkan LHR No.011/INSP-LHR/III/2025 Tanggal 11 Maret 2025 sebesar Rp1.047.453,00
					(62.144.341,00)	Merupakan Pelunasan Utang Belanja Insentif atas Pemungutan Retribusi tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah
					27.175.000,00	Merupakan Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi tahun 2024 pada Badan Pendapatan Daerah sesuai LHR Inspektorat Nomor.012/INSP-LHR/III/2025 Tanggal 13 Maret 2025
					(52.463.279,00)	Merupakan reklas akun Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas ke Beban jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN tahun 2024 pada Dinas Kesehatan akibat kesalahan jurnal di puskesmas
					(441.626.783,00)	Merupakan Biaya Perolehan Kapitalisasi aset tahun 2024 atas Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan SKPD
					(315.805.494,00)	Merupakan Biaya Perolehan Kapitalisasi aset tahun 2024 atas Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
					(63.850.000,00)	Perolehan SKPD dari Belanja Honorarium ULP Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) tahun 2024 pada Sekretariat Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

					(680.000,00)	Merupakan Biaya Perolehan Kapitalisasi aset tahun 2024 atas Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas perikanan
					14.514.950.656,00	0,00
2	Beban Persediaan	95.882.967.138,05	76.159.611.486,60	19.723.355.651,45	11.700.000,00	Merupakan Utang Persediaan Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi tahun 2024 atas LHR Inspektorat Nomor 017/INSP-LHR/III/2025 pada Dinas perkebunan
					95.474.650,00	Merupakan Penggunaan atas persediaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Tahun 2023 SKPD
					(109.531.359,00)	Merupakan Persediaan Akhir Tahun 2024 Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas SKPD
					2.133.402.807,15	Merupakan Penggunaan atas persediaan Bahan-Bahan Lainnya Tahun 2023 SKPD
					(1.484.878.474,67)	Merupakan Persediaan Akhir Tahun 2024 Bahan-Bahan Lainnya SKPD
					1.315.000,00	Merupakan Persediaan Akhir Tahun 2024 Suku Cadang Alat Angkutan SKPD
					(90.754.733,00)	Merupakan Biaya Perolehan Kapitalisasi aset tahun 2024 atas Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
					327.017.327,84	Merupakan Penggunaan atas persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Tahun 2023 SKPD
					(145.036.858,90)	Merupakan Persediaan Akhir Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Tahun 2024 SKPD
					491.167.141,00	Merupakan Penggunaan atas persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Tahun 2023 SKPD
					25.248.060,00	Merupakan reklas akun atas kapitalisasi aset ke beban persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Tahun 2024 pada Sekretariat DPRD
					(173.885.917,50)	Merupakan Persediaan Akhir Tahun 2024 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak pada Badan Pendapatan Daerah
					(89.033.910,00)	Merupakan Persediaan Akhir Tahun 2024 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak pada Badan Dinas Perhubungan



					(141.631.963,00)	Merupakan Biaya Perolehan Kapitalisasi aset tahun 2024 atas Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak SKPD
					860.000,00	Merupakan Penggunaan atas persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos Tahun 2023 pada SKPD
					(524.000,00)	Merupakan Persediaan Akhir Tahun 2024 persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos pada SKPD
					(3.450.000,00)	Merupakan Biaya Perolehan Kapitalisasi aset tahun 2024 atas persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos pada Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
					(127.000,00)	Merupakan Persediaan Akhir Tahun 2024 persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor pada Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
					28.250.000,00	Merupakan Penggunaan atas persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Tahun 2023 pada SKPD
					(33.082.525,00)	Merupakan Persediaan Akhir Tahun 2024 persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik pada SKPD
					6.347.600,00	Merupakan Penggunaan atas persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Tahun 2023 pada SKPD
					13.571.005.442,38	Merupakan Penggunaan atas persediaan Obat-Obatan Tahun 2023 pada SKPD
					(13.957.527.940,96)	Merupakan Persediaan Akhir Tahun 2024 persediaan Obat-Obatan pada SKPD
					104.741.650,00	Merupakan Penggunaan atas persediaan Obat-Obatan Lainnya Tahun 2023 pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
					(18.115.000,00)	Merupakan Persediaan Akhir Tahun 2024 persediaan Obat-Obatan Lainnya pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan



					1.757.625.027,08	Merupakan Penggunaan atas persediaan Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dan Kebudayaan
					(10.542.000,00)	Merupakan Biaya Perolehan Kapitalisasi aset tahun 2024 atas persediaan Makanan dan Minuman Rapat pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang sebear Rp3542000,00 dan Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan sebesar Rp7.000.000,00
					10.039.730.500,45	Merupakan Penggunaan atas persediaan Komponen-Komponen Lainnya tahun 2023 pada SKPD
					7.363.387.327,66	merupakan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya atas aset yang di ekstrakontable
					24.205.199,92	Koreksi pencatatan perolehan aset tahun 2023 menjadi beban (tidak memenuhi kriteria aset tetap) senilai Rp24.205.199,92 pada (Dinas Kesehatan)
					(400,00)	Koreksi Nilai Utang Belanja Modal senilai Rp400,- atas LHR Inspektorat Nomor 022/INSP-LHR/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 (Dinas Kesehatan)
					19.723.355.651,45	0,00
3	Beban Jasa	444.612.315.030,27	445.462.800.257,79	(850.485.227,52)		
					(21.600.000,00)	Merupakan biaya perolehan dari Kapitalisasi perhitungan Aset Tahun 2024 atas Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
					(262.050.000,00)	Merupakan biaya perolehan dari Kapitalisasi perhitungan Aset Tahun 2024 atas Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari : Dinas Pendidikan sebesar Rp165.600.000,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp10.350.000,00, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp86.050.000,00



					90.000.000,00	Utang Belanja Jasa tahun 2024 atas Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan, sesuai LHR Nomor 016/INSP-LHR/III/2025 pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
					402.461.500,00	Merupakan Utang Belanja Jasa tahun 2024 atas Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana, sesuai LHR Nomor 009/INSP-LHR/III/2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					191.100.000,00	Utang Belanja Jasa tahun 2024 atas Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana, sesuai LHR Nomor 017/INSP-LHR/III/2025 pada Dinas Perkebunan
					(42.120.000,00)	Merupakan biaya perolehan dari Kapitalisasi perhitungan Aset Tahun 2024 atas Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
					(116.400.000,00)	Merupakan biaya perolehan dari Kapitalisasi perhitungan Aset Tahun 2024 atas Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang sebesar Rp106.400.000,00 dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dan Kebudayaan sebesar Rp10.000.000,00
					39.200.000,00	Merupakan Utang Belanja Jasa tahun 2024 atas Belanja Jasa Operator Kapal, LHR Nomor 017/INSP-LHR/III/2025 pada Dinas Perkebunan
					(6.879.306,00)	Merupakan Pelunasan Utang belanja jasa tahun 2023 atas Belanja Tagihan Telepon di SKPD
					3.097.182,00	Merupakan Utang Belanja Jasa Tahun 2024 atas Belanja Tagihan Telepon SKPD
					(17.877.700,00)	Merupakan Pelunasan Utang belanja jasa tahun 2023 atas Belanja Tagihan Air di SKPD
					20.074.850,00	Merupakan Utang Belanja Jasa Tahun 2024 atas Belanja Tagihan Air SKPD
					(444.520.796,00)	Merupakan Pelunasan Utang belanja jasa tahun 2023 atas Belanja Tagihan Listrik di SKPD



					222.436.319,00	Merupakan Utang Belanja Jasa Tahun 2024 atas Belanja Tagihan Listrik SKPD
					120.000,00	Merupakan Utang Belanja Jasa Tahun 2024 atas Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Dinas Kesehatan
					(45.640.421,00)	Merupakan Pelunasan Utang belanja jasa tahun 2023 atas Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan SKPD
					237.212.230,00	Merupakan Utang Belanja Jasa Tahun 2024 atas Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan SKPD
					3.600.000,00	Merupakan Utang Belanja Jasa tahun 2024 atas Belanja Paket/Pengiriman berdasarkan LHR Nomor 016/INSP-LHR/III/2025-DTPHP
					248.559.232,00	Merupakan Utang Belanja Jasa tahun 2024 atas Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan LHR Inspektorat Nomor. 010/INSP-LHR/III/2025 Tanggal 11 Maret 2025-Dinas PMD
					(2.000.000,00)	Merupakan biaya perolehan dari Kapitalisasi perhitungan Aset Tahun 2024 atas Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dan Kebudayaan
					25.344.000,00	Utang Belanja Jasa tahun 2024 atas Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya berdasarkan LHR Nomor 017/INSP-LHR/III/2025 Dinas Perkebunan
					20.882.000,00	Utang Belanja Jasa tahun 2024 atas Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus sesuai LHR Nomor 017/INSP-LHR/III/2025
					(19.500.000,00)	Merupakan biaya perolehan dari Kapitalisasi perhitungan Aset Tahun 2024 atas Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dan Kebudayaan



					(1.344.576.549,60)	Merupakan biaya perolehan dari Kapitalisasi perhitungan Aset Tahun 2024 atas Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural, terdiri dari Dinas pendidikan sebesar Rp1.073.491.017,6 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp271.085.532,00
					51.955.908,00	Reklas ke akun dari Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural ke Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise akibat kesalahan mapping di aplikasi sipkd
					(40.868.000,00)	Merupakan Kapitalisasi perhitungan Aset Tahun 2024 atas Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya, terdiri dari RSUD tengku sulung sebesar Rp15.100.000,00, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp9.768.000,00 dan Kec Reteih sebesar Rp16.000.000,00
					99.733.500,00	Merupakan Utang Belanja Jasa Tahun 2024 atas Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air Dinas Dinas PUTR
					(1.217.543.200,00)	Merupakan Kapitalisasi perhitungan Aset Tahun 2024 atas Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air Dinas perhubungan sebesar Rp1.122.343.200 dan Dinas Perkim sebesar Rp95.200.000,00
					(850.691.690,00)	Merupakan Kapitalisasi perhitungan Aset Tahun 2024 atas Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi, yang terdiri dari Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman sebesar Rp843.500.000,00 dan Dinas Perhubungan sebesar Rp7.191.690,00



					99.706.000,00	Utang Belanja Tahun 2024 Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya paket Pekerjaan Desain Tipologi Standar Perencanaan dan Perancangan Bangunan GedungRumah Hunian Ukuran 36, 45 dan 72 untuk 15 Model dalam Pengusulan PBG pada Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Dinas PUTR Sesuai Dengan Surat Perintah Kerja (SPK) : Nomor : 600.1.15/SPK/DPUTR- CK/VI/2024/06.03 Tanggal : 26 Juni 2024
					(1.192.526.203,20)	Merupakan Kapitalisasi perhitungan Aset Tahun 2024 atas Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur, yang terdiri dari Dinas Pendidikan sebesar Rp1.174.587.703,20, RSUD Tengku Sulung sebesar Rp5.938.500,00, kec reteh sebesar Rp12.000.000,00 dan Dinas PMD sebesar Rp9.823.500,00
					713.700.000,00	Utang Belanja jasa tahun 2024 atas Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung berdasarkan LHR Nomor 022/INSP- LHR/III/2025 utang Dinas Perkim sebesar Rp713.700.000,00
					(82.185.450,00)	Merupakan Kapitalisasi perhitungan Aset Tahun 2024 atas Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi terdiri dari Dinas perkim sebesar Rp73.200.000,00 dan Dinas perhubungan sebesar Rp8.985.450,00
					(236.108.100,00)	Merupakan Kapitalisasi perhitungan Aset Tahun 2024 atas Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air Dinas Perhubungan
					(342.000.000,00)	Merupakan Kapitalisasi perhitungan Aset Tahun 2024 atas Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan Dinas Pendidikan



					(51.955.908,00)	Reklas ke akun dari Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise ke Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural akibat kesalahan mapping di aplikasi sipkd
					(89.845.000,00)	Merupakan Belanja Barang dan Jasa BOS TK/PAUD yang diakui pencatatannya sebagai aset Dinas Pendidikan
					52.463.279,00	Merupakan reklas akun Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas ke Beban jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN tahun 2024 pada Dinas Kesehatan akibat kesalahan jurnal di puskesmas
					3.109.502.484,28	Merupakan selisih dari Beban Barang dan Jasa BLUD-LO dan Belanja Barang dan Jasa BLUD-LRA terdiri dari Persediaan Barang dan Jasa BLUD Tahun 2024 sebesar Rp9.705.634.593,70, Utang BLUD tahun 2024 sebesar Rp32.389.859.937,80, pelunasan Utang BLUD tahun 2024 sebesar Rp19.522.665.792,15, Pendapatan diterima dimuka BLUD tahun 2023 sebesar Rp52.000.000,00, Pendapatan Diterima dimuka BLUD tahun 2024 sebesar Rp82.791.666,67, Koreksi Utang BLUD sebesar Rp19.089.401,00, reklas Belanja BLUD sebesar Rp2.176.000,00
					(2.805.600,00)	Pelunasan utang BPJS tahun lalu yang belum disesuaikan senilai Rp2.805.600,00 dibayarkan tanggal 26 Juni 2024 (Dinas Kesehatan)
					(51.939.788,00)	Koreksi kurang catat Persediaan BLUD sebesar Rp51.939.788,- terdiri dari : Puskesmas Pulau Burung Rp2.590.600,- ; Puskesmas Sapat Rp11.889.959,- ; RSUD Raja Musa Rp37.459.232,-
					(850.485.227,52)	0,00
4	Beban Pemeliharaan	26.951.728.374,06	27.439.300.011,49	(487.571.637,43)	(9.823.500,00)	Kapitalisasi perhitungan Aset Tahun 2024 atas Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer pada Dinas Pemdес



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

					(244.432.087,43)	Kapitalisasi perhitungan Aset Tahun 2024 atas Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor terdiri dari Dinas Kesehatan sebesar Rp134.625.587,43, Dinas Pemdes sebesar Rp15.956.000,00, Dinas Pemdes sebesar Rp99.844.500,00 dan Kecamatan Enok terdapat aset yang ekstra kontable sebesar Rp5.994.000,00
					(233.316.050,00)	Kapitalisasi perhitungan Aset Tahun 2024 atas Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum Dinas Kesehatan
					(487.571.637,43)	0,00
5	Beban Perjalanan Dinas	126.590.329.483,50	127.487.074.841,50	(896.745.358,00)	(896.745.358,00)	Merupakan Biaya Perolehan Kapitalisasi aset tahun 2024 atas Beban Perjalanan Dinas, terdiri dari Dinas Kesehatan sebesar Rp138.857.058,00, Dinas PUTR sebesar Rp65.364.000,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp119.768.000,00 dan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan sebesar Rp201.991.000,00
					(896.745.358,00)	0,00

6	Beban Subsidi	259.876.000,00	259.876.000,00	0,00	0,00	Beban subsidi tidak terdapat selisih antara Laporan realisasi Anggaran-LRA dengan Laporan Operasional-LO Tahun 2024 merupakan Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta pada kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dinas perdagangan dan perindustrian)
7	Beban Hibah	110.962.245.385,99	110.962.245.385,99	0,00	0,00	Beban Hibah tidak terdapat selisih antara Laporan realisasi Anggaran-LRA dengan Laporan Operasional-LO Tahun 2024
8	Beban Bantuan Sosial	299.000.000,00	299.000.000,00	0,00	0,00	Beban Bantuan Sosial tidak terdapat selisih antara Laporan realisasi Anggaran-LRA dengan Laporan Operasional-O Tahun 2024
9	Beban Penyusutan	213.365.850.298,08	0,00	213.365.850.298,08	213.365.850.298,08	Beban Penyusutan dan Amortisasi tidak bersumber dari LRA



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

10	Beban Penyisihan Piutang	10.324.362.606,05	0,00	10.324.362.606,05	10.324.362.606,05	Beban Penyisihan tidak bersumber dari LRA- Beban Penyisihan dapat dilihat di Lampiran 6 - Daftar Umur Piutang Kualitas dan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024
11	Beban Transfer	305.854.767.508,00	305.854.767.508,00	0,00	0,00	Beban Transfer tidak terdapat selisih antara Laporan realisasi Anggaran- LRA dengan Laporan Operasional-O Tahun 2024
	Jumlah	2.204.415.593.068,72	1.948.721.876.080,09	255.693.716.988,63		

Adapun mengenai rincian Beban-LO adalah sebagai berikut :

5.4.2.1

BEBAN PEGAWAI

Beban Pegawai Laporan Operasional Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp869.312.151.244,72 dan sebesar Rp783.911.726.812,31. Mengalami Kenaikan sebesar Rp85.400.424.432,41 atau 9,82% . Dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Beban Pegawai		
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	542.555.525.748,00	467.946.651.789,00
Beban Gaji Pokok PNS	342.336.888.500,00	333.469.676.148,00
Beban Gaji Pokok PPPK	57.629.343.400,00	16.942.896.825,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	32.236.497.385,00	31.405.603.338,00
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	5.566.647.202,00	1.701.005.234,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	7.631.640.000,00	8.194.579.992,00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	24.926.419.000,00	24.070.213.350,00
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	249.345.000,00	28.745.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.646.960.000,00	3.864.484.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.202.455.000,00	1.035.355.000,00
Beban Tunjangan Beras PNS	17.757.456.420,00	18.661.934.484,00
Beban Tunjangan Beras PPPK	3.626.214.240,00	1.228.582.480,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	684.906.963,00	1.276.769.525,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	79.060,00	0,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	4.481.109,00	4.581.784,00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.184.194,00	288.931,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	38.090.321.408,00	22.353.256.019,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.635.100.152,00	823.667.464,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	702.420.693,00	684.415.383,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	128.232.600,00	36.837.241,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	2.114.171.842,00	2.053.252.696,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	384.761.580,00	110.506.895,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	138.286.418.121,00	140.745.668.341,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	77.410.743.122,00	80.592.203.818,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	4.236.350.000,00	2.699.400.000,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	16.488.224.999,00	17.069.898.367,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	12.333.710.000,00	12.149.360.600,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	221.000.000,00	102.000.000,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	27.596.390.000,00	28.132.805.556,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	157.031.391.539,00	145.465.775.280,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	544.752,00	3.352.545,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan RetribusiJasaUmum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	22.152.865,00	16.060.925,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum -Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	21.637.686,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum-Pelayanan Pasar	3.540.889,00	3.467.666,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum -Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	676.464,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	1.647.653,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	72.114.790,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha -Pemakaian Kekayaan Daerah	7.818.525,00	6.467.135,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	0,00	4.519.206,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	0,00	81.176,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	6.983.115,00	6.777.608,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Mendirikan Bangunan	0,00	27.151.598,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	37.243.275,00	0,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	3.173.485,00	0,00
Beban TPG PNSD	105.037.966.300,00	100.783.204.940,00
Beban TKG PNSD	36.201.171.400,00	30.503.812.895,00
Beban Tamsil Guru PNSD	3.957.750.000,00	2.521.075.000,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.605.035.990,00	2.126.372.493,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.684.252.437,00	8.426.288.500,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	656.658.506,00	846.027.000,00
Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	171.350.000,00	95.040.000,00
Beban Tunjangan Khusus bagi Penyelenggara PTSP Daerah	635.750.000,00	0,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	22.940.383.326,00	23.005.756.426,00
Beban Uang Representasi DPRD	1.001.595.000,00	1.002.435.000,00
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	131.329.800,00	137.694.900,00
Beban Tunjangan Beras DPRD	141.696.000,00	146.592.000,00
Beban Uang Paket DPRD	85.900.500,00	85.900.500,00
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.452.312.750,00	1.453.530.750,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	103.986.750,00	124.601.400,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	13.245.750,00	15.894.900,00
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.659.500.000,00	5.659.500.000,00
Beban Tunjangan Reses DPRD	945.000.000,00	1.417.500.000,00
Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	264.420,00	264.420,00
Beban Pembulatan Gaji DPRD	13.300,00	17.950,00
Beban Jaminan Kesehatan DPRD	90.487.032,00	88.871.958,00
Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.052.036,00	2.061.612,00
Beban Jaminan Kematian DPRD	6.178.788,00	6.184.836,00
Beban Tunjangan Perumahan DPRD	6.475.406.200,00	6.475.406.200,00
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	6.409.000.000,00	6.383.000.000,00
Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	422.415.000,00	6.300.000,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	154.655.351,00
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	0,00	50.700.000,00
Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	0,00	2.730.000,00
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	0,00	91.260.000,00
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	0,00	2.824.380,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	0,00	1.830.111,00
Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	0,00	1.820,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	0,00	4.897.200,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	0,00	102.960,00
Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	0,00	308.880,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	587.640.000,00	832.000.000,00
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	227.640.000,00	252.000.000,00
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	360.000.000,00	580.000.000,00
Beban Pegawai BLUD	7.910.792.510,72	5.761.219.625,31



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Beban Pegawai BLUD		7.910.792.510,72	5.761.219.625,31
Jumlah		869.312.151.244,72	783.911.726.812,31
		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.2.2	BEBAN PERSEDIAAN	95.882.967.138,05	168.833.727.602,64
Beban Persediaan Laporan Operasional Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 dan 2022 sebesar Rp95.882.967.138,05 dan sebesar Rp168.833.727.602,64, Mengalami penurunan sebesar Rp(72.950.760.464,59) atau (76,08)%. Dengan rincian sebagai berikut:			
		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Pakai Habis		78.455.644.510,02	103.122.438.641,81
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		674.951.558,00	307.315.537,50
Beban Bahan-Bahan Kimia		2.750.000,00	151.188.000,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		11.881.223.099,00	15.590.831.880,00
Beban Bahan-Bahan Baku		37.000.000,00	1.173.377.930,00
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman		10.260.000,00	118.033.000,00
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran		0,00	4.890.000,00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas		51.100.000,00	76.237.800,00
Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan		0,00	10.220.000,00
Beban Bahan-Bahan Lainnya		8.359.634.864,68	8.750.462.844,66
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan		1.753.196.846,00	1.366.452.157,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar		186.345.620,00	699.695.000,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran		0,00	175.000,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium		14.201.000,00	39.260.000,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi		5.655.000,00	0,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel		6.500.000,00	3.500.000,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya		1.941.949.319,00	1.633.894.612,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		6.755.420.724,94	6.954.421.415,16
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		9.518.490.812,50	10.763.923.981,78
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos		544.856.287,00	549.216.500,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender		2.000.000,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-		45.385.600,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor		40.272.200,00	6.751.460,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		1.203.718.168,00	937.282.083,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas		150.941.356,00	62.497.760,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga		168.043.880,00	499.927.430,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata		861.565.660,00	699.588.750,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		1.425.530.569,00	1.351.291.717,00
Beban Obat-Obatan-Obat		4.988.761.703,82	4.307.466.969,26
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya		224.615.200,00	50.907.740,00
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		1.944.077.027,08	13.210.829.627,45
Beban Natura dan Pakan-Natura		378.627.159,00	459.348.505,00
Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya		98.031.000,00	112.386.300,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat		9.064.591.738,00	17.195.642.566,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		6.657.740.521,00	6.972.571.270,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan		0,00	1.020.000,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan		1.446.442.157,00	1.555.039.050,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial		6.794.000,00	12.648.000,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		4.171.541.576,00	3.952.687.630,00
Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH		91.653.100,00	169.069.650,00
Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD		0,00	8.991.000,00
Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)		132.750.000,00	103.680.000,00
Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)		270.659.000,00	14.439.000,00
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)		114.864.000,00	403.143.850,00
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)		493.497.026,00	335.130.925,00
Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)		175.743.000,00	127.631.000,00
Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)		0,00	42.766.000,00
Beban Pakaian Siaga		89.910.000,00	67.873.400,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Beban Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	86.090.550,00
Beban Pakaian KORPRI	0,00	60.275.000,00
Beban Pakaian Adat Daerah	1.199.735.250,00	985.697.091,00
Beban Pakaian Batik Tradisional	193.419.748,00	86.129.200,00
Beban Pakaian Olahraga	727.810.445,00	799.786.230,00
Beban Pakaian Paskibraka	343.388.295,00	218.503.230,00
Beban Pakaian Jas/Safari	0,00	32.250.000,00
Beban Barang Tak Habis Pakai	10.039.730.500,45	65.711.288.960,83
Beban Komponen-Komponen Lainnya	10.039.730.500,45	65.711.288.960,83
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	7.387.592.127,58	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.387.592.127,58	0,00
Jumlah	95.882.967.138,05	168.833.727.602,64

Adapun rincian Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi aset berdasarkan SKPD sebagai berikut :

No.	SKPD	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	6.064.455.650,00	Merupakan aset ektrakontabel pada tahun 2024 yang tidak memenuhi batas kapitalisasi aset sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
2	Dinas Kesehatan	136.171.427,00	Merupakan aset ektrakontabel pada tahun 2024 yang tidak memenuhi batas kapitalisasi aset sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
3	Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung	20.231.711,00	Merupakan aset ektrakontabel pada tahun 2024 yang tidak memenuhi batas kapitalisasi aset sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	889.055.457,66	Merupakan aset ektrakontabel pada tahun 2024 yang tidak memenuhi batas kapitalisasi aset sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
5	Dinas Sosial	8.312.800,00	Merupakan aset ektrakontabel pada tahun 2024 yang tidak memenuhi batas kapitalisasi aset sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
6	Sekretariat DPRD	1.474.500,00	Merupakan aset ektrakontabel pada tahun 2024 yang tidak memenuhi batas kapitalisasi aset sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
7	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	7.575.500,00	Merupakan aset ektrakontabel pada tahun 2024 yang tidak memenuhi batas kapitalisasi aset sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
8	Dinas Perhubungan	40.914.600,00	Merupakan aset ektrakontabel pada tahun 2024 yang tidak memenuhi batas kapitalisasi aset sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
9	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	8.889.800,00	Merupakan aset ektrakontabel pada tahun 2024 yang tidak memenuhi batas kapitalisasi aset sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	24.377.000,00	Merupakan aset ektrakontabel pada tahun 2024 yang tidak memenuhi batas kapitalisasi aset sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
11	Dinas Perikanan	12.453.250,00	Merupakan aset ektrakontabel pada tahun 2024 yang tidak memenuhi batas kapitalisasi aset sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
12	Dinas Perkebunan	69.154.700,00	Merupakan aset ektrakontabel pada tahun 2024 yang tidak memenuhi batas kapitalisasi aset sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
13	Badan Keuangan dan Aset Daerah	8.060.000,00	Merupakan aset ektrakontabel pada tahun 2024 yang tidak memenuhi batas kapitalisasi aset sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	48.396.932,00	Merupakan aset ektrakontabel pada tahun 2024 yang tidak memenuhi batas kapitalisasi aset sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
15	Inspektorat Daerah	14.985.000,00	Merupakan aset ektrakontabel pada tahun 2024 yang tidak memenuhi batas kapitalisasi aset sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
16	Kecamatan Tempuling	325.000,00	Merupakan aset ektrakontabel pada tahun 2024 yang tidak memenuhi batas kapitalisasi aset sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
17	Kecamatan Concong	5.950.000,00	Merupakan aset ektrakontabel pada tahun 2024 yang tidak memenuhi batas kapitalisasi aset sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Kab. Indragiri Hilir



18	Kecamatan Tempuling	2.604.000,00	Merupakan aset ektrakontabel pada tahun 2024 yang tidak memenuhi batas kapitalisasi aset sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
	TOTAL	7.363.387.327,66	

5.4.2.3

BEBAN JASA

Beban Jasa Laporan Operasional Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp444.612.315.030,27 dan sebesar Rp396.389.519.696,27, Mengalami kenaikan sebesar Rp48.222.795.334,00 Atau 10,85%. Dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Beban Jasa	226.478.310.943,54	246.810.880.072,79
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.087.805.500,00	6.899.571.000,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.588.330.000,00	13.897.555.000,00
Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	147.800.000,00	70.200.000,00
Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.124.700.000,00	1.145.550.000,00
Beban Honorarium Rohaniwan	6.067.515.000,00	5.382.208.000,00
Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	204.540.000,00	408.140.000,00
Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	134.850.000,00	97.800.000,00
Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	544.000.000,00	510.380.000,00
Beban Jasa Tenaga Pendidikan	6.537.353.000,00	12.828.150.000,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	19.362.994.700,00	19.457.195.301,00
Beban Jasa Tenaga Laboratorium	179.753.500,00	172.586.500,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	306.300.000,00	310.800.000,00
Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	7.781.750.000,00	7.329.550.000,00
Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.782.685.000,00	1.719.462.000,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	2.179.261.500,00	1.668.600.000,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.236.000.000,00	1.021.350.000,00
Beban Jasa Tenaga Perhubungan	504.000.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	1.600.620.000,00	1.149.310.000,00
Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	28.800.000,00	16.800.000,00
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.028.250.000,00	1.121.150.000,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	12.556.189.000,00	10.704.159.000,00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	8.264.687.375,00	10.733.826.125,00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.704.661.000,00	2.624.450.400,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	11.306.716.000,00	13.580.091.300,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	8.782.264.800,00	8.208.961.500,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	7.507.440.000,00	5.473.637.400,00
Beban Jasa Tenaga Caraka	158.380.000,00	114.700.000,00
Beban Jasa Tenaga Supir	2.021.669.000,00	2.077.987.100,00
Beban Jasa Tenaga Juru Masak	218.400.000,00	217.200.000,00
Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	387.900.000,00	449.350.000,00
Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	31.778.224,00	0,00
Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	479.594.000,00	223.160.000,00
Beban Jasa Tata Rias	18.385.600,00	14.290.500,00
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	3.164.605.000,00	2.300.665.000,00
Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	57.665.430,00	168.427.745,00
Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	149.472.500,00	124.700.000,00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	4.063.186.799,00	5.367.255.837,00
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	1.427.970.000,00	1.458.190.000,00
Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	442.218.730,00	538.025.364,00
Beban Jasa Kalibrasi	125.869.500,00	254.971.000,00
Beban Jasa Pengolahan Sampah	162.652.000,00	888.000,00
Beban Jasa Pengukuran Tanah	19.045.000,00	57.215.000,00
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	20.644.343.210,00	19.671.625.246,00
Beban Jasa Operator Kapal	403.600.000,00	494.400.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Beban Tagihan Telepon	150.783.562,00	118.218.076,00
Beban Tagihan Air	401.672.200,00	351.650.950,00
Beban Tagihan Listrik	16.611.871.135,00	17.903.721.008,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.282.811.800,00	1.175.932.675,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.215.025.620,00	3.919.721.247,00
Beban Paket/Pengiriman	42.785.522,00	202.758.359,00
Beban Penambahan Daya	0,00	3.202.700,00
Beban Registrasi/Keanggotaan	50.100.000,00	224.010.000,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	624.100.233,00	610.671.179,00
Beban Medical Check Up	117.756.020,00	145.935.360,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.996.848.504,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	24.727.354.550,00	31.864.318.675,00
Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	390.798.800,00	609.000.000,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	2.920.668.808,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	727.097.122,40	127.399.601,00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	565.885.042,60	149.492.134,00
Beban Asuransi Barang Milik Daerah	89.339.859,00	104.165.595,00
BebanSewaTanahBangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	0,00	52.545.000,00
Beban Sewa Alat Pengangkat	0,00	1.140.000,00
Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	0,00	1.500.000,00
Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	84.005.000,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	880.168.754,00	884.659.457,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	151.133.582,00	147.750.000,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	12.000.000,00	26.900.000,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	11.500.000,00
Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.175.198.500,00	1.946.299.047,00
Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	136.400.000,00	202.500.000,00
Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	2.487.789.400,00	548.990.000,00
Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	73.408.000,00	180.759.629,75
Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	398.694.000,00	282.920.001,00
Beban Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	0,00	13.500.000,00
Beban Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	108.306.641,00	107.292.398,00
Beban Sewa Alat Laboratorium Pertanian	0,00	2.700.000,00
Beban Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	2.000.000,00
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	229.751.000,00	274.973.240,00
Beban Sewa Mebel	243.655.000,00	0,00
Beban Sewa Alat Pendingin	7.600.000,00	0,00
Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	849.546.300,00	1.119.986.050,00
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	149.300.000,00	157.800.000,00
Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	7.994.000,00	3.500.000,00
Beban Sewa Peralatan Studio Gambar	1.600.000,00	0,00
Beban Sewa Alat Studio Lainnya	454.280.100,00	964.632.000,00
Beban Sewa Alat Komunikasi Satelit	0,00	118.928.565,00
Beban Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	0,00	774.730.000,00
Beban Sewa Peralatan Umum	59.800.000,00	12.000.000,00
Beban Sewa Komputer Unit Lainnya	21.600.000,00	0,00
Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	0,00	5.386.000,00
Beban Sewa Mekanik	0,00	7.000.000,00
Beban Sewa Elektronik/Electric	105.952.500,00	56.673.000,00
Beban Sewa Elektrik	0,00	26.973.000,00
Beban Sewa Suara	0,00	1.200.000,00
Beban Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	1.000.000,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	215.742.500,00	416.678.500,00
Beban Sewa Bangunan Gudang	0,00	5.500.000,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	10.000.000,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	942.009.711,00	733.024.260,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	6.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	18.000.000,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	107.650.000,00	87.000.000,00
Beban Sewa Bangunan Fasilitas Umum	0,00	70.157.716,00
Beban Sewa Taman	0,00	2.500.000,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	7.000.000,00
Beban Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	289.877.100,00	216.713.754,00
Beban Sewa Hotel	4.029.084.576,00	3.846.628.100,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	270.000.000,00	884.180.000,00
Beban Sewa Jaringan dengan Media Udara	500.000,00	500.000,00
Beban Sewa Audio Visual	0,00	7.000.000,00
Beban Sewa Musik Lainnya	4.000.000,00	6.000.000,00
Beban Sewa Alat Musik	144.032.500,00	139.825.000,00
Beban Sewa Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	0,00	1.200.000,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	406.225.858,54	107.273.951,04
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	99.578.100,00	38.444.850,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	0,00	13.500.000,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	323.555.579,00	421.746.015,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	761.100.000,00	992.100.000,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	924.250.380,00	1.245.136.515,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	91.562.300,00	53.586.000,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	406.533.096,00	920.646.455,20
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-jasa Perencanaan dan	696.140.900,00	452.666.730,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	399.600.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	329.120.842,80	351.216.044,80
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.480.409.667,20	1.352.920.038,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	104.983.000,00	142.223.800,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	507.606.280,00	803.535.150,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	5.938.500,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	795.073.020,00	798.553.980,00
Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	5.600.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	0,00	377.600.000,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	150.000.000,00	420.000.000,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Keuangan	25.000.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Survei	172.483.500,00	13.388.800,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	5.000.000,00	211.200.000,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Khusus	50.000.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	0,00	86.008.818,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan	0,00	7.484.000,00
Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	75.000.000,00	100.000.000,00
Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	102.000.000,00	170.000.000,00
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	468.405.000,00	1.580.514.029,00
Beban Sosialisasi	12.000.000,00	37.630.000,00
Beban Bimbingan Teknis	651.949.418,00	837.564.494,00
Beban Diklat Kepemimpinan	351.890.000,00	300.890.000,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.831.778.700,00	12.091.492.442,00
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.878.778.700,00	2.067.792.442,00
Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	251.500.000,00	2.444.900.000,00
Beban Beasiswa	0,00	628.800.000,00
Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	8.692.500.000,00	6.950.000.000,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	9.000.000,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BOS	61.319.640.849,60	79.756.552.260,00
Beban Barang dan Jasa BOS	61.319.640.849,60	79.756.552.260,00



	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	18.486.917.928,00	0,00
	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	18.486.917.928,00	0,00
	Beban Barang dan Jasa BLUD	127.495.666.609,13	57.730.594.921,48
	Beban Barang dan Jasa BLUD	127.495.666.609,13	57.730.594.921,48
	Jumlah	444.612.315.030,27	396.389.519.696,27
		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.2.4	BEBAN PEMELIHARAAN	26.951.728.374,06	33.510.223.299,72
	Beban Pemeliharaan Laporan Operasional Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp26.951.728.374,06 dan sebesar Rp33.510.223.299,72, Mengalami penurunan sebesar Rp(6.558.494.925,66) atau (24,33)%. Dengan rincian sebagai berikut:		
		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	Beban Pemeliharaan Tanah	327.397.926,00	487.072.187,50
	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.777.093.885,00	6.405.943.828,00
	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.430.317.951,06	2.716.510.789,22
	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.416.918.612,00	23.885.896.495,00
	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	14.800.000,00
	Jumlah	26.951.728.374,06	33.510.223.299,72
		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.2.5	BEBAN PERJALANAN DINAS	126.590.329.483,50	144.977.473.403,00
	Beban Perjalanan Dinas Laporan Operasional Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp126.590.329.483,50 dan sebesar Rp144.977.473.403,00, Mengalami penurunan sebesar Rp(18.387.143.919,50) atau (14,52)%. Dengan rincian sebagai berikut:		
		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	126.590.329.483,50	144.977.473.403,00
	Jumlah	126.590.329.483,50	144.977.473.403,00
		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.2.6	BEBAN SUBSIDI	259.876.000,00	0,00
	Beban Subsidi Laporan Operasional Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp259.876.000,00 dan sebesar Rp0,00, mengalami kenaikan sebesar Rp259.876.000,00 atau 100%. Dengan rincian sebagai berikut:		
		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	Dinas Perdagangan dan Perindustrian - Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	259.876.000,00	0,00
	Dalam Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
	Jumlah	259.876.000,00	0,00
		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.2.7	BEBAN HIBAH	110.962.245.385,99	74.674.482.099,76
	Beban Hibah Laporan Operasional Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp110.962.245.385,99 dan sebesar Rp74.674.482.099,76, Mengalami Kenaikan sebesar Rp36.287.763.286,23 atau 32,70%. Dengan rincian sebagai berikut:		
		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	Rincian Beban Hibah		
	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	1.609.405.143,47
	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	243.057.000,00	0,00
	Beban Hibah Barang kepada BUMD	0,00	4.600.867.113,00
	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	65.972.132.590,00	21.003.224.856,00
	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.236.288.148,38	6.446.771.397,62



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	655.000.000,00	400.000.000,00
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.122.668.617,61	14.670.816.967,67
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.576.000.000,00	8.976.741.530,00
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	13.423.195.030,00	13.808.455.092,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.244.825.000,00	3.158.200.000,00
Beban Hibah Dana BOSP-BOS	8.606.660.000,00	0,00
Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	5.180.019.000,00	0,00
Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesenjangan	1.702.400.000,00	0,00
	110.962.245.385,99	74.674.482.099,76

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
299.000.000,00	500.126.230,00

5.4.2.8 BEBAN BANTUAN SOSIAL

Beban Bantuan Sosial Laporan Operasional Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp299.000.000,00 dan sebesar Rp500.126.230,00, Mengalami penurunan sebesar Rp(201.126.230,00) atau (67,27)%. Dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	299.000.000,00	245.500.000,00
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	213.006.780,00
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	41.619.450,00
Jumlah	299.000.000,00	500.126.230,00

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
213.365.850.298,08	222.329.807.792,82

5.4.2.9 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Perhitungan beban penyusutan dan beban amortisasi menggunakan metode garis lurus. Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp213.365.850.298,08 dan sebesar Rp222.329.807.792,82 Mengalami penurunan sebesar Rp(8.963.957.494,74) atau (4,20)%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
213.142.441.458,08	222.076.411.532,82

5.4.2.9.1 BEBAN PENYUSUTAN

Beban Penyusutan Laporan Operasional Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp213.142.441.458,08 dan sebesar Rp222.076.411.532,82, Mengalami Penurunan sebesar Rp(8.933.970.074,74) atau (4,19)%. Dengan rincian sebagai berikut:

Beban Penyusutan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	73.491.568.111,15	79.415.433.287,26
Beban Penyusutan Alat Besar Darat	4.043.919.444,83	4.038.584.305,83
Beban Penyusutan Alat Besar Apung	48.366.250,00	48.366.250,00
Beban Penyusutan Alat Bantu	253.169.178,57	322.224.939,71
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	7.212.098.195,14	8.870.807.731,22
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	136.401.975,00	306.457.990,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor	1.445.402.215,60	1.445.346.598,10
Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	116.267.384,00	183.495.816,65
Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	44.917.044,20	40.109.110,90
Beban Penyusutan Alat Ukur	88.812.720,00	303.414.420,00
Beban Penyusutan Alat Pengolahan	46.351.278,25	184.024.577,75
Beban Penyusutan Alat Kantor	3.619.432.023,42	3.109.317.976,25
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	12.541.372.028,69	9.734.371.912,32
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	537.365.715,40	552.545.720,40
Beban Penyusutan Alat Studio	1.914.833.573,20	2.440.080.418,30
Beban Penyusutan Alat Komunikasi	212.593.727,80	568.462.820,30
Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	430.385.795,00	425.037.883,02
Beban Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi	200.000,00	200.000,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran	22.597.289.177,99	22.068.747.152,00



Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum	267.996.242,20	494.523.552,77
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium	2.465.153.667,43	3.075.670.450,35
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir	18.654.134,47	18.788.134,48
Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah	287.616.340,14	335.772.675,63
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	90.036.641,01	89.303.307,67
Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	930.000,00	465.000,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	101.768.169,86	86.944.903,57
Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	216.666,66	399.166,67
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	1.602.000,00	1.001.000,00
Beban Penyusutan Alat Persenjataan.	12.246.533,33	14.638.033,33
Beban Penyusutan Komputer Unit	12.334.827.048,64	16.067.401.676,42
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	2.398.906.025,64	4.386.244.104,08
Beban Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin	16.806.400,00	8.403.200,00
Beban Penyusutan Alat Pelindung	18.880.669,40	11.491.791,00
Beban Penyusutan Alat SAR	58.180.500,00	32.265.250,00
Beban Penyusutan Alat Kerja Penerbangan	3.800.450,00	1.877.050,00
Beban Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	300.000,00	300.000,00
BebanPenyusutanUnitPeralatan	27.005.094,75	27.005.094,75
Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	3.411.446,56	3.411.446,56
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	94.052.353,97	117.931.827,23
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	35.365.842.032,58	33.255.630.752,99
Bangunan Gedung Tempat Kerja	33.738.444.927,38	31.697.300.781,05
Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal	1.170.403.678,67	1.165.382.149,30
Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	128.857.224,29	127.811.394,29
Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan	46.045.149,65	46.045.149,65
Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas	282.091.052,59	219.091.278,70
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	104.276.690.314,35	109.397.006.492,57
Beban Penyusutan Jalan	77.313.114.913,44	80.487.426.937,48
Beban Penyusutan Jembatan	10.604.642.493,10	10.517.111.025,73
Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	593.432.432,37	527.653.492,37
Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut	18.393.173,62	18.393.173,62
Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	144.296.688,12	144.296.688,12
Beban Penyusutan Bangunan Pengaman	12.716.067.740,98	14.568.014.854,22
Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	337.491.128,86	372.279.670,62
Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku	85.574.770,66	252.817.181,23
Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	6.907.575,00	6.907.575,00
Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku	62.557.484,15	62.557.484,15
Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor	155.955.411,91	155.955.411,91
Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	55.511.000,00
Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	153.718.729,55	151.241.567,06
Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	193.521.832,59	191.989.629,47
Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan	3.309.386,87	3.309.386,87
Beban Penyusutan Instalasi Gas	38.989.306,00	26.246.900,00
Beban Penyusutan Instalasi Pengaman	126.671.669,59	126.921.419,59
Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	885.858.034,68	885.858.034,68
Beban Penyusutan Jaringan Listrik	362.052.717,12	368.380.234,71
Beban Penyusutan Jaringan Telepon	18.518.650,00	18.518.650,00
Beban Penyusutan Jaringan Gas	455.616.175,74	455.616.175,74
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	8.341.000,00	8.341.000,00
Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian	8.341.000,00	8.341.000,00
Jumlah	213.142.441.458,08	222.076.411.532,82

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp)	(Rp)
223.408.840,00	253.396.260,00

5.4.2.9.2 BEBAN AMORTISASI

Beban Amortisasi Laporan Operasional Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp223.408.840,00 dan sebesar Rp253.396.260,00, mengalami penurunan sebesar Rp(29.987.420,00) atau (13,42)% Dengan rincian sebagai berikut:

Beban Amortisasi	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	(Rp)	(Rp)
	223.408.840,00	253.396.260,00
Jumlah	223.408.840,00	253.396.260,00



Perhitungan Beban Amortisasi dapat dilihat pada lampiran 10.

5.4.2.10 BEBAN PENYISIHAN PIUTANG

Beban Penyisihan Piutang Laporan Operasional Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp10.324.362.606,05 dan sebesar Rp14.673.018.200,48 , Mengalami penurunan sebesar Rp(4.398.904.995,05) atau 42,82% . Dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	10.324.362.606,05	14.673.018.200,48
Beban Penyisihan Piutang	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Beban Penyisihan Pajak Reklame	0,00	70.646.070,00
Beban Penyisihan Pajak Penerangan Jalan	40.836.139,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	0,00	894.769,90
Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6.818.911.671,29	9.725.165.510,24
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	111.571,18
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	89.736.987,51	57.931.672,51
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda	3.131.813.963,14	4.741.888.262,16
Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil	243.063.845,11	76.380.344,49
Jumlah	10.324.362.606,05	14.673.018.200,48

Adapun penjelasan rincian Beban Penyisihan Piutang berdasarkan SKPD sebagai berikut :

No.	SKPD	Nilai	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	797.585,00	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD
2	Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan	80.969.322,51	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD
3	Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung	2.735.726,00	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD
4	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa	5.234.354,00	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD
5	Badan Pendapatan Daerah	40.836.139,00	Beban Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
6	Badan Pendapatan Daerah	6.818.911.671,29	Beban Penyisihan Piutang PBBP2
7	Badan Pendapatan Daerah	3.126.680.692,24	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda
8	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	5.133.270,90	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda
9	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	243.063.845,11	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak
	Jumlah	10.324.362.606,05	

5.4.2.11 BEBAN TRANSFER

Beban Transfer Laporan Operasional Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp305.854.767.508,00 dan sebesar Rp312.437.346.475,00, Mengalami penurunan sebesar Rp(6.582.578.967,00) atau (2,15)% . Dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	305.854.767.508,00	312.437.346.475,00
Beban Transfer	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Beban Bagi Hasil	0,00	5.246.872.975,00
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	0,00	4.747.545.725,00
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	0,00	499.327.250,00
Beban Bantuan Keuangan	305.854.767.508,00	307.190.473.500,00
Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	183.427.863.000,00	301.890.473.500,00
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	0,00	5.300.000.000,00
Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	122.426.904.508,00	0,00
Jumlah	305.854.767.508,00	312.437.346.475,00
	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	0,00	5.568.061.700,00

5.4.2.12 BEBAN LAIN-LAIN

Beban Lain-Lain Laporan Operasional Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp5.568.061.700,00, Mengalami penurunan sebesar sebesar Rp(5.568.061.700,00).

5.4.3. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp(127.560.560.424,40) dan sebesar Rp(6.945.205.772,94), sehingga mengalami Penurunan sebesar Rp(120.615.354.651,46) atau 94,56% .



		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.3.1	Defisit Penjualan Aset Non lancar	(1.078.960.903,78)	(3.810.809.920,99)
Defisit Penjualan Aset Non Lancar Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp(1.078.960.903,78) dan Sebesar Rp(3.810.809.920,99) Sehingga mengalami penurunan sebesar Rp2.731.849.017,21 atau (253,19)%. Defisit penjualan aset non lancar merupakan Defisit Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4 Pjb Neg Type Lexus Rx 300 Luxury BM 1139 G pada sekretariat Daerah tahun 2024 sebesar Rp(156.065.257,15) dan Defisit Pelepasan Penyertaan Modal PT. BPR GEMILANG (Penurunan Investasi/ Defisit Pelepasan Penyertaan Modal atas perhitungan metode Ekuitas 98,94% sebesar Rp(922.895.646,63). Defisit Penjualan Aset Non lancar dapat dirincikan sebagai berikut:			
		Tahun 2024 (Rp)	
Defisit Penjualan Peralatan dan Mesin-LO			
Defisit Penjualan Alat Angkutan-LO-Sekretariat Daerah		(156.065.257,15)	
Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang Permanen-LO			
Defisit Pelepasan Penyertaan Modal-LO - PT. BPR GEMILANG (BKAD)		(922.895.646,63)	
		(1.078.960.903,78)	
Rincian Defisit Penjualan Aset Non lancar yaitu:			
Surplus Penjualan Peralatan dan Mesin-LO - setda		Nilai	
Jumlah Harga Perolehan Aset Lelang		1.775.861.000,00	
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Lelang		(1.268.472.142,86)	
Nilai Buku Aset Lelang		507.388.857,14	
Hasil Penawaran Lelang (Net)		351.323.600,00	
Kerugian Pelepasan Aset (Penawaran - Nilai Buku)		(156.065.257,14)	
Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang Permanen-LO - PT. BPR GEMILANG (BKAD)			
Penurunan Investasi/ Defisit Pelepasan Penyertaan Modal-LO atas perhitungan metode Ekuitas (Rugi Rp(932.783.148,00) x 98,94%)		(922.895.646,63)	
		(922.895.646,63)	
		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.3.2	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	90.832.972,00	1.497.977.094,90
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp90.832.972,00 dan sebesar Rp1.497.977.094,90 mengalami penurunan sebesar Rp(1.407.144.122,90) atau (1.549,16)%. Merupakan Surplus Pelepasan Dana Bergulir atas Penerimaan kas pengembalian dana bergulir IRF tahun 2024 sebesar Rp22.283.140,00 dan Surplus Pelepasan Dana Bergulir atas Penerimaan kas pengembalian dana bergulir Channeling tahun 2024 sebesar Rp68.549.832,00. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dapat di rincikan sebagai berikut:			
Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang Non Permanen-LO		Tahun 2024 (Rp)	
Surplus Pelepasan Dana Bergulir-LO			
Penerimaan kas pengembalian dana bergulir IRF tahun 2024		22.283.140,00	
Penerimaan kas pengembalian dana bergulir Channeling tahun 2024		68.549.832,00	
		90.832.972,00	
		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.4	POS LUAR BIASA	1.157.985.156,00	183.454.962,00
Pos Luar Biasa Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp1.157.985.156,00 dan sebesar Rp183.454.962,00, sehingga mengalami kenaikan Sebesar Rp974.530.194,00 atau 84,16%, Merupakan Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) atas SP2D No.00234/SP2D/2024 sebesar Rp 309.088.656,00 Dalam rangka Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kecamatan Kemuning,Kecamatan Tempuling, Kecamatan Pelangiran, Kecamatan Batang Tuaka, Kecamatan Gaung, Kecamatan Keritang, Kecamatan Pulau Burung, Kecamatan Tembilahan Hulu dan Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) atas SP2D No. 00397/SP2D/2024 sebesar Rp 711.696.500,00 Untuk Pengembalian Bantuan Keuangan (BANKEU) Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2023 dan Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) atas SP2D no. 05293/SP2D/2024 sebesar Rp 137.200.000,00 dalam rangka Tanggap Darurat Bencana Non Alam Kejadian Luar Biasa Malaria di Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir.			
		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.5	SURPLUS DEFISIT LO	(129.706.673.512,18)	(9.441.493.561,03)
Surplus/Defisit Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 dan 2023 berjumlah sebesar Rp(129.706.673.512,18) dan Tahun 2023 sebesar Rp(9.441.493.561,03) mengalami penurunan sebesar Rp(120.265.179.951,15) atau 92,72%.			



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas adalah Laporan mengenai arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum BLUD dan Dana BOS. Laporan Arus Kas meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi dan Aktivitas Pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.5.1 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	106.977.046.786,65	189.703.944.468,85

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam membiayai aktivitas operasionalnya.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp106.977.046.786,65 dan sebesar Rp189.703.944.468,85 mengalami penurunan sebesar Rp82.726.897.682,20 atau sebesar 77,33 yang merupakan selisih arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas operasi.

Pada tahun 2024 arus masuk kas dari aktivitas operasi sebesar Rp2.056.856.908.022,74 dan arus keluar kas dari aktivitas operasi sebesar Rp1.949.879.861.236,09. Pada tahun 2023 arus masuk kas pada BUD sebesar Rp2.095.784.613.992,77 dan arus keluar kas pada BUD sebesar Rp1.906.080.669.523,92.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.5.1.1 ARUS MASUK KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	2.056.856.908.022,74	2.095.784.613.992,77

Realisasi Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi tahun 2024 sebesar Rp2.056.856.908.022,74, mengalami penurunan sebesar Rp38.927.705.970,03 atau 1,89% dari realisasi Arus Masuk Kas tahun 2023 sebesar Rp2.095.784.613.992,77.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi merupakan arus kas masuk dari pendapatan daerah dan termasuk pendapatan BLUD pada pendapatan lain-lain PAD yang sah dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pajak Daerah	46.982.737.674,00	48.326.458.632,00
Penerimaan Retribusi Daerah	4.450.367.583,00	4.073.009.708,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.967.609.930,00	14.112.352.048,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	143.766.690.430,74	126.317.904.132,77
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	84.294.507.000,00	83.168.162.473,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	239.685.693.000,00	214.404.530.490,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	919.817.829.148,00	925.026.162.597,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	310.083.135.457,00	320.731.403.822,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	186.238.341.500,00	192.085.204.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	104.063.293.300,00	151.951.510.090,00
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah	6.506.703.000,00	15.587.916.000,00
Jumlah	2.056.856.908.022,74	2.095.784.613.992,77

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.5.1.2 ARUS KELUAR KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	1.949.879.861.236,09	1.906.080.669.523,92



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 sebesar Rp1.949.879.861.236,09, mengalami kenaikan sebesar Rp43.799.191.712,17 atau 2,25% dari realisasi Arus Keluar Kas Tahun 2023 sebesar Rp1.906.080.669.523,92. Arus keluar kas dari Belanja Operasi, Belanja Tak Terduga dan Transfer tahun 2024 termasuk arus keluar kas BLUD dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	854.797.200.588,72	785.061.183.209,31
Pembayaran Barang	676.548.786.597,38	736.412.520.191,32
Pembayaran Subsidi	259.876.000,00	0,00
Pembayaran Hibah	110.962.245.385,99	71.486.038.456,29
Pembayaran Bantuan Sosial	299.000.000,00	500.126.230,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	305.854.767.508,00	307.190.473.500,00
Pembayaran Tak Terduga	1.157.985.156,00	183.454.962,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	0,00	4.747.545.725,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	0,00	499.327.250,00
Jumlah	1.949.879.861.236,09	1.906.080.669.523,92

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.5.2 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN	(236.422.169.817,43)	(197.787.594.395,28)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi tahun 2024 sebesar Rp-236.422.169.817,43 merupakan selisih Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp-38.634.575.422,15 dari Arus Kas Bersih Investasi tahun 2023 sebesar Rp-197.787.594.395,28, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.5.2.1 ARUS MASUK KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN	465.216.000,00	1.296.800.500,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan perolehan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun berjalan dan masa selanjutnya.

Realisasi Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp465.216.000,00 dan sebesar Rp0,00.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Masuk Kas		
Penjualan Aset Tetap Lainnya	465.216.000,00	1.296.800.500,00
Jumlah	465.216.000,00	1.296.800.500,00

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.5.2.2 ARUS KELUAR KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN	236.887.385.817,43	199.084.394.895,28

Realisasi Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan tahun 2024 sebesar Rp236.887.385.817,43 mengalami kenaikan sebesar Rp37.802.990.922,15 atau 15,96% dari realisasi Arus Keluar Kas tahun 2023 sebesar Rp199.084.394.895,28. Arus Keluar Kas dari belanja modal dan termasuk belanja modal pada BLUD dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Keluar Kas			
Perolehan Peralatan dan Mesin		53.172.618.238,21	59.841.785.825,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		52.866.220.044,23	57.555.551.158,70
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		125.646.558.484,99	76.405.708.976,58
Perolehan Aset Tetap Lainnya		5.167.368.150,00	5.281.348.935,00
Perolehan Aset lainnya		34.620.900,00	0,00
Jumlah		236.887.385.817,43	199.084.394.895,28
		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.5.3	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	129.132.972,00	254.111.994,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp129.132.972,00 dan Rp254.111.994,00 merupakan selisih Arus Kas Masuk tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp129.132.972,00 dan Rp254.111.994,00 dan Arus Kas Keluar tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:			
		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.5.3.1	ARUS MASUK KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	129.132.972,00	254.111.994,00
Realisasi Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan tahun 2024 sebesar Rp129.132.972,00 mengalami penurunan yang bersumber dari Pinjaman kepada Perusahaan Daerah sebesar Rp124.979.022,00 atau 96,78% dari realisasi Arus Masuk Kas tahun sebelumnya.			
		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.5.4	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN	(7.416.527,52)	326.619.583,12
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris pada tahun 2024 sebesar Rp-7.416.527,52 merupakan Arus Masuk Kas yang berasal dari Aktivitas Transitoris tahun 2024 sebesar Rp106.739.877.469,31 dengan Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Transitoris pada tahun 2024 sebesar Rp106.747.293.996,83.			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris pada tahun 2023 sebesar Rp326.619.583,12 berasal dari Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2023 sebesar Rp107.748.330.930,25 dengan Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Transitoris tahun 2023 sebesar Rp107.421.711.347,13.			
		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.5.4.1	ARUS KAS MASUK DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN	106.739.877.469,31	107.748.330.930,25
Realisasi Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2024 sebesar Rp106.739.877.469,31 mengalami kenaikan sebesar Rp1.008.453.460,93 atau 0,94% dari realisasi Arus Masuk Kas tahun 2023.			
		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		106.737.775.166,43	107.355.060.268,25
Penerimaan Sisa UP		2.102.302,88	393.270.662,00
Penerimaan Dana Talangan		0,00	0,00
Jumlah		106.739.877.469,31	107.748.330.930,25
		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.5.4.2	ARUS KAS KELUAR DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN	106.747.293.996,83	107.421.711.347,13
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp106.747.293.996,83 dan Rp107.421.711.347,13 dengan rincian sebagai berikut:			



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Keluar Kas			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		106.747.160.495,83	107.419.609.044,25
Sisa UP Tahun 2024		133.501,00	2.102.302,88
Pengeluaran Dana Talangan		0,00	0,00
Jumlah		106.747.293.996,83	107.421.711.347,13
		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.5.5	KENAIKAN/PENURUNAN BERSIH KAS PERIODE BERJALAN	(129.323.406.586,30)	(7.502.918.349,31)
Kenaikan/Penurunan Bersih Kas tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp(129.323.406.586,30) dan sebesar Rp(7.502.918.349,31) dengan rincian sebagai berikut:			
		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		106.977.046.786,65	189.703.944.468,85
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		(236.422.169.817,43)	(197.787.594.395,28)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan		129.132.972,00	254.111.994,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris		(7.416.527,52)	326.619.583,12
Penurunan Kas Bersih		(129.323.406.586,30)	(7.502.918.349,31)
		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.5.6	SALDO AWAL KAS (BUD), KAS DI FKTP & KAS DANA BOS	162.304.262.284,56	169.807.180.633,87
Saldo awal Kas (BUD), Kas di FKTP & Kas Dana BOS tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp162.304.262.284,56 dan sebesar Rp169.807.180.633,87, terdiri dari saldo Kas Daerah dan Saldo Kas di BLUD dengan rincian sebagai berikut:			
		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Saldo di Kas Daerah		145.496.714.182,35	162.118.157.558,51
Saldo di Bendahara Dana BOS		8.441.424.819,31	545.201.546,00
Saldo di Bendahara FKTP		513.546.793,00	109.309,00
Saldo di Kas BLUD		649.925.638,90	7.143.712.220,36
Saldo Kas Bendahara BOK		7.202.650.851	0,00
Pengurangan Kas SCF (<i>Supply Chain Finance</i>)		0,00	0,00
Jumlah		162.304.262.284,56	169.807.180.633,87
		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.5.7	SALDO AKHIR KAS (BUD), KAS DI FKTP & KAS DANA BOS	32.980.855.698,26	162.304.262.284,56
Saldo Akhir Arus Kas tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp32.980.855.698,26 dan sebesar Rp162.304.262.284,56 merupakan kenaikan/penurunan bersih kas selama periode tahun 2024 ditambah dengan saldo awal kas, dengan rincian sebagai berikut:			
		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Saldo di Kas Daerah		18.553.366.165,26	145.496.714.182,35
Saldo Kas di Bendahara BLUD		7.926.431.114,35	8.441.424.819,31
Saldo Kas di Bendahara FKTP		0,00	513.546.793,00
Saldo Kas di Bendahara Dana BOS		521.111.572,90	649.925.638,90
Setara Kas Lainnya		30.215.653,75	7.202.650.851,00
Saldo Kas Dana BOK Puskesmas		5.949.731.192,00	0,00
Kenaikan/Penurunan Kas		0,00	0,00
Jumlah		32.980.855.698,26	162.304.262.284,56



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.5.8 SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN	11.825.864,00	0,00

Saldo Akhir Kas di Bendahara tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp11.825.864,00 dan sebesar Rp0,00.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.5.9 SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	133.501,00	2.102.302,88

Saldo akhir kas di bendahara pengeluaran tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp133.501,00 dan sebesar Rp2.102.302,88 mengalami penurunan sebesar Rp1.968.801,88 atau 0,07%.

Saldo akhir kas di bendahara pengeluaran merupakan sisa UYHD UP/TU tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

UYHD Kecamatan Enok	133.500,00
UYHD Kecamatan Mandah	1,00
	133.501,00

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.5.10 SALDO AKHIR KAS LAINNYA	0,00	767.500,00

Saldo akhir kas lainnya tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp767.500,00.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.5.11 SALDO AKHIR KAS	32.992.815.063,26	162.307.132.087,44

Saldo akhir kas tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp32.992.815.063,26 dan Rp162.307.132.087,44 mengalami penurunan sebesar Rp129.314.317.024,18 atau 391,95%



5.6 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.6.1 EKUITAS AWAL	3.835.119.352.944,80	3.865.465.880.925,72

Ekuitas awal pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp3.835.119.352.944,80 dan sebesar Rp3.865.465.880.925,72.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.6.2 SURPLUS/DEFISIT - LO	(129.706.673.512,18)	(9.441.493.561,03)

Surplus/Defisit LO pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan selisih antara Pendapatan - LO dengan Beban selama satu periode pelaporan. Surplus/Defisit tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp(129.706.673.512,18) dan sebesar Rp(9.441.493.561,03).

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.6.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	(1.198.418.640,38)	(20.905.034.419,89)

Dampak Kumulatif/Perubahan disajikan pada Laporan Keuangan berbasis akrual pada Laporan Perubahan Ekuitas. Dampak Kumulatif merupakan kejadian-kejadian tahun lalu yang berdampak terhadap laporan di tahun berjalan dikarenakan Pemda tidak melakukan Restatement Laporan Keuangan tahun sebelumnya sehingga dampak kumulatif tersebut akan terlihat pada Laporan Keuangan Pemda tahun 2024.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp(1.198.418.640,38) dan sebesar Rp(20.905.034.419,89).

Uraian dampak Kumulatif/Perubahan Kebijakan / Kesalahan mendasar adalah sebagai berikut:

Uraian	2024	2023
Koreksi Tambah/Kurang Dampak Kumulatif		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	(141.850.000,00)
Koreksi Pencatatan Aset Lancar	(369.000,40)	0,00
Koreksi Pencatatan Aset Tetap	155.569.300,00	(2.986.676.706,53)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset	(1.455.940.492,54)	(181.754.121,62)
Koreksi Akumulasi Amortisasi	(9.914.800,00)	0,00
Koreksi Lain-lain	751.821,00	14.629.670,30
Koreksi Utang	131.375.748,74	(66.779.722,00)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	0,00	0,00
Koreksi Investasi	0,00	(18.354.125.720,41)
Koreksi Piutang	(150.364.200,18)	752.147.447,00
Koreksi Aset Lain-Lain	130.472.983,00	59.374.733,37
Jumlah	(1.198.418.640,38)	(20.905.034.419,89)

Penjelasan dampak Kumulatif/Perubahan Laporan Keuangan berbasis akrual pada Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut:

a. Koreksi Pencatatan Aset Lancar

Koreksi Pencatatan Aset Lancar sebesar Rp(369.000,40), dengan rincian sebagai berikut:

Nama SKPD	Nilai	Keterangan
Dinas Pendidikan	(369.000,40)	Koreksi atas Pajak Dana BOS SD Tahun 2023 PAJE #02 Koreksi Utang PFK SD NEGERI 011 KUALA ENOK, koreksi atas pencatatan utang pajak yang telah disetorkan tahun 2022 berdasarkan bukti setor (setoran melalui PT. POS) tanggal 07-04-2022 (Utang pajak Dana BOS tahun 2021).
Jumlah	(369.000,40)	

b. Koreksi Pencatatan Aset Tetap

Koreksi pencatatan aset tetap sebesar Rp155.569.300,00, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Nama SKPD	Nilai	Keterangan
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	463.131.800,00	
	(1.958.000,00)	Koreksi atas penghapusan konstruksi dalam pengerjaan dengan surat keputusan KPTS : 378/SEKDA/IX/HK-2024 TANGGAL : 10 September 2024
	465.089.800,00	Koreksi pencatatan atas hasil inventaris baru berdasarkan surat tanah.
Badan Keuangan Dan Aset Daerah	380.672.000,00	koreksi pencatatan atas hasil inventaris baru berdasarkan surat tanah.
Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.060.316.000,00	Koreksi kurang catat aset tanah berdasarkan surat pernyataan pemilik tanah yang di dukung dengan dokumen surat riwayat tanah dan kepemilikan tanah serta surat penyerahan tanah ke Pemda.
Dinas Pendidikan	(1.748.550.500,00)	Koreksi pencatatan perolehan aset tahun 2014 menjadi beban (tidak memenuhi kriteria aset tetap).
Jumlah	155.569.300,00	

c. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset

Koreksi akumulasi penyusutan aset pada tahun 2024 sebesar Rp(1.455.940.492,54) di koreksi karena terjadi perbedaan perhitungan nilai setelah dilakukan pengecekan ulang terhadap nilai yang telah di sajikan sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Nama SKPD	Nilai	Keterangan
Dinas Pendidikan	(4.176.400,51)	
	(147.059.485,70)	Koreksi atas kesalahan perhitungan rumus beban penyusutan pada tahun 2023. Dimana kertas kerja penyusutan tahun 2023 rumus untuk beban penyusutan masih menghitung beban penyusutan tahun 2022.
	163.631,87	Koreksi atas lebih catat akumulasi penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor karena kesalahan rumus rehab atau kapitalisasi pada tahun lalu.
	142.719.453,32	Koreksi nilai Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Instalasi atas reklasifikasi MCK dari Jenis Jalan Irigasi dan Jaringan ke Gedung dan Bangunan.
Dinas Kesehatan	(291.860.519,53)	
	(14.270.413,04)	Koreksi atas kurang catat Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan karena kesalahan rumus rehab atau kapitalisasi pada tahun lalu.
	35.078.720,00	Koreksi atas lebih catat karena adanya nilai buku yang minus pada tahun 2023 pada akumulasi penyusutan Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Kendaraan Tak Bermotor Penumpang sebesar Rp34.378.720,00 dan Akumulasi Penyusutan Alat SAR- Alat Pendukung Pencarian sebesar Rp700.000,00.
	(17.871.373,21)	Koreksi atas kurang catat Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat yang merupakan hibah ambulance di tahun 2023 oleh PT. BNI dengan Nomor : TBH/5/1677A Nomor : 028/RSUD-PERL/2610.
	(296.564.358,76)	Koreksi atas kurang catat Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan merupakan hibah dengan BAST tahun 2023 berupa gedung IGD dari Provinsi Riau dengan tahun perolehan 2013 sebesar Rp225.917.562,76 dan koreksi atas kurang catat aset renovasi tahun 2017 sebesar Rp70.646.796,00.
	322.930,00	Koreksi pencatatan perolehan aset tahun 2023 menjadi beban (tidak memenuhi kriteria aset tetap).



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	1.443.975,48	Koreksi kurang catat hibah aset dari Bawaslu sesuai surat Nomor BAST nomor : 020.2/PL.09/RA/06/2024 Nomor : 013/BA/BKAD-BMD
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	(38.337.653,98)	Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor atas aset konstruksi dalam pengerjaan tahun 2023 yang tidak disusutkan kemudian pada tahun 2024 konstruksi dalam pengerjaan di reklas menjadi bangunan gedung kantor dengan tahun perolehan 2023.
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	(76.073.839,99)	Koreksi atas Pencatatan Aset Tetap Tanah di Bawah Jalan KIB A dan Aset Tetap Jalan dalam KIB D Belum Mutakhir
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	(858.194.040,80)	Koreksi atas habis nilai buku akumulasi penyusutan pada Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang yang merupakan hibah kendaraan bermotor dari Provinsi Riau sesuai dengan BAST No.00.2.5/BPKAD/5085.00.2.5/2099/BPKAD-BMD tanggal 4 Desember 2024.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,01	Koreksi pembulatan angka atas perhitungan Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
Dinas Perhubungan	(164.711.452,10)	Koreksi atas kurang catat Akumulasi Penyusutan karena rumus beban penyusutan tahun 2023 tidak tertarik pada kertas kerja penyusutan dengan rincian item Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-AsphaltEquipment sebesar Rp4.479.382,00, Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal sebesar Rp553.550,00, Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-AlatPenyimpan Perlengkapan Kantor sebesar Rp1.324.750,00, Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya sebesar Rp336.199,70, Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-PersonalComputer sebesar Rp3.501.802,50 dan Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan BencanaAlam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai sebesar Rp154.515.767,90.
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	(754.400,00)	Koreksi atas reklas kode rekening aset yang menyebabkan masa manfaat berubah dari akun Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan sebesar Rp1.886.000,00 ke akun Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp2.640.400,00.
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	(22.762.546,97)	Koreksi atas kurang catat masa manfaat pada kertas kerja rehab atau kapitalisasi.
Badan Pendapatan Daerah	0,01	Koreksi pembulatan angka atas perhitungan Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor.
Kecamatan Tembilahan Hulu	(0,01)	Koreksi pembulatan angka atas perhitungan Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya.
Kecamatan Batang Tuaka	(0,02)	Koreksi pembulatan angka atas perhitungan Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III dan Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa
Dinas Komunikasi dan Informatika	930.361,35	Koreksi atas kurang catat Bangunan Gedung berdasarkan LHR Inspektorat Nomor 032/INSP-LHR/IV/2025 tanggal 22 April 2025 yang merupakan utang belanja yang baru dicatat dan dikapitalisasi sehingga merubah perhitungan nilai penyusutan.
Jumlah	(1.455.940.492,54)	



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

d. Koreksi Akumulasi Amortisasi

Koreksi Akumulasi Amortisasi tahun 2024 sebesar Rp(9.914.800,00) dengan rincian sebagai berikut:

Nama SKPD	Nilai	Keterangan
Dinas Kesehatan	(9.914.800,00)	Koreksi kurang catat atas perhitungan amortisasi aset tak berwujud karena masa manfaat tidak berkurang di tahun sebelumnya.
Jumlah	(9.914.800,00)	

e. Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-lain tahun 2024 sebesar Rp751.821,00 dengan rincian sebagai berikut:

Nama SKPD	Nilai	Keterangan
Dinas Kesehatan	751.821,00	Koreksi atas Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Rumah Sakit Umum Raja Musa atas perbedaan klaim BPJS.
Jumlah	751.821,00	

f. Koreksi Utang

Koreksi Utang tahun 2024 sebesar Rp131.375.748,74, dengan rincian sebagai berikut:

Nama SKPD	Nilai	Keterangan
Dinas Kesehatan	(19.089.401,00)	
	(7.768.260,00)	Koreksi atas kurang catat perhitungan utang BLUD di tahun sebelumnya pada Rumah Sakit Umum Tengku Sulung.
	(11.321.141,00)	Koreksi atas kurang catat perhitungan utang BLUD di tahun sebelumnya pada Rumah Sakit Umum Raja Musa.
Badan Pendapatan Daerah	7.471.928,00	Koreksi atas kelebihan pencatatan Utang Belanja di LKPD Tahun 2023 dengan akun Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-PelayananKesehatan sebesar Rp1.044.869,00, Utang Belanja Insentif bagi ASN atasPemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebesar Rp726.041,00, Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Parkirdi Tepi Jalan Umum sebesar Rp1.289.526,00, Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp4.099.992,00 dan Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp311.500,00.
Badan Keuangan dan Aset Daerah	142.993.221,74	Koreksi Utang MPP yang sudah dilunasi dengan nomor 07988/SP2D/2023 di tahun 2023.
Jumlah	131.375.748,74	

g. Koreksi Piutang

Koreksi Piutang tahun 2024 sebesar Rp(150.364.200,18), dengan rincian sebagai berikut:

Nama SKPD	Nilai	Keterangan
Dinas Kesehatan	(150.364.200,00)	Koreksi atas Piutang Pendapatan BLUD pada Rumah Sakit Umum Raja Musa atas perbedaan klaim BPJS.
Badan Pendapatan Daerah	0,01	Koreksi pembulatan angka atas perhitungan kertas kerja piutang.
Badan Keuangan dan Aset Daerah	(0,19)	Koreksi atas penyesuaian penerimaan piutang tahun sebelumnya atas bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor.
Jumlah	(150.364.200,18)	



h. Koreksi Aset Lain-lain

Koreksi pencatatan lain-lain tahun 2024 sebesar Rp(408.027.017,00) dengan rincian sebagai berikut:

Nama SKPD	Nilai	Keterangan
Badan Keuangan dan Aset Daerah	(17.427.017,00)	Koreksi atas tuntutan perbendaharaan atas nama Yonson Deri karena penyetorannya ke Kas Negara bukan ke Kas Daerah sebesar Rp7.425.000,00, koreksi tuntutan ganti rugi atas nama H.M. Najamuddin yang menyetorkan pada tanggal 7 november 2017 dan tanggal 12 desember 2023 sebesar Rp1.000.000,00, koreksi tuntutan ganti rugi atas nama AI Yusroni Pagta yang menyetorkan pada tanggal 6 Desember 2022 sebesar Rp1.729.267,00 dan koreksi tuntutan ganti rugi atas nama Junaidy pada tanggal 2 Desember 2022 sebesar Rp7.272.750.
	(390.600.000,00)	Koreksi atas penghapusan tagihan penjualan angsuran atas pengembalian aset lelang yang ditarik kembali atas nama H. Indramuchlis Adnan BM 1 G
Badan Keuangan dan Aset Daerah	538.500.000,00	Koreksi atas pengembalian aset lelang yang ditarik kembali atas nama H. Indramuchlis Adnan BM 1 G.
Jumlah	130.472.983,00	

5.6.4 EKUITAS AKHIR

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan mengenai ekuitas awal Surplus/Defisit LO pada periode bersangkutan ditambah nilai dampak kumulatif akibat koreksi tahun sebelumnya. Adapun jumlah ekuitas akhir pada tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp3.704.214.260.792,24 dan sebesar Rp3.835.119.352.944,80.

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
3.704.214.260.792,24	3.835.119.352.944,80



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI LAINNYA

6.1 PENGUNGKAPAN LAINNYA

6.1.1 Perubahan Peraturan Pemerintah

Pengelolaan Barang Milik Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang selanjutnya diturunkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan sejalan dengan itu diterbitkan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kodifikasi Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, sejalan dengan hal tersebut pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menerapkan Kodifikasi Barang Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016.

6.1.2 Informasi Penting

Berdasarkan informasi penting atas Pemeriksaan Manajemen Aset LKPD Tahun 2015 dan LKPD Tahun 2018 antara lain :

- a. Dalam rangka menindaklanjuti LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Riau atas Pengamanan Aset Tanah Pemkab Indragiri Hilir belum memadai maka berdasarkan rekomendasi BPK bahwa Sekda dan Kabag Perlengkapan agar berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir dan pihak kepolisian setempat untuk dokumen tanah yang terbakar dan yang belum disertifikasi. Menindaklanjuti hal tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir telah berkoordinasi kepada Kantor Pertanahan Kab. Indragiri Hilir berdasarkan Surat Nomor 71/BPKAD-AST/2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal Permintaan dan Pembuatan Sertifikat dan Penerbitan Duplikasi Tanah Milik Pemkab Indragiri Hilir dan berdasarkan Surat Keterangan dari Kepolisian Resor Inhil No: Sket/28/VII/2017/Polres Inhil Tanggal 06 Juli 2017 bahwa terdapat 146 bidang sertifikat tanah Milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang dilaporkan terbakar. Pengusulan Penerbitan Sertifikat Pengganti karena terbakar ini dilakukan secara bertahap ke Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun terkait informasi dokumen kepemilikan tanah bahwa berdasarkan Buku Inventaris Barang Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir per 31 Desember 2023 dari 2.524 bidang tanah yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 310 bidang telah bersertifikat, 54 bidang Dokumen Lainnya/Salinan Dokumen Lainnya dan 2.160 belum bersertifikat. Sedangkan untuk tahun 2024 terdapat penambahan jumlah bidang tanah sebanyak 16 bidang yang terdiri dari 9 bidang diperoleh hibah dari Pemerintah Provinsi Riau, 2 bidang diperoleh hibah dari Pemerintah Desa dan 5 bidang merupakan pencatatan asset tanah yang belum tercatat serta mengalami pengurangan 1 bidang tanah karena adanya hibah antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Palang Merah Indonesia sehingga Per 31 Desember 2024 jumlah Bidang Tanah yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang Milik Pemerintah Daerah adalah sebanyak 2.539 bidang. Adapun terkait informasi dokumen Kepemilikan Tanah terdapat penambahan sebanyak 9 sertifikat tanah yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi, 3 sertifikat tanah yang diperoleh dari hasil inventarisasi/rekonsiliasi dan 6 dokumen lainnya serta mengalami pengurangan 1



sertifikat tanah karena hibah ke Palang Merah Indonesia sehingga Per 31 Desember 2024 dari 2.539 bidang tanah terdapat 321 bidang tanah telah bersertifikat, 60 bidang tanah dengan dokumen Lainnya dan 2.158 bidang tanah belum bersertifikat.

- b. Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 77/BPKAD-AST/I/2019 tanggal 6 Januari 2019 tentang Pemutakhiran Pencatatan Aset Tetap Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dapat diinformasikan bahwa selisih pencatatan aset Sekretariat Daerah tersebut tidak dapat ditelusuri dikarenakan terjadi musibah kebakaran dan dokumen yang dibutuhkan ikut terbakar. Sehingga perlu dilakukan identifikasi dan inventarisasi kembali atas aset-aset tersebut. Pada saat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 dilakukan rekonsiliasi data dengan membandingkan Kertas Kerja Perolehan Aset Tetap dari tahun 2009 sampai dengan 2014 dengan Data KIB SKPD dengan total nilai perolehan sebesar Rp14.440.921,15 yang sebelumnya tidak memiliki nilai perolehan. Hal ini mempengaruhi selisih pencatatan nilai aset tetap di neraca Sekretariat Daerah dengan rincian barang di Buku Inventaris menjadi Rp26.279.544.255,19= (Rp41.199.405.401,52-Rp14.919.861.146,33).
- c. Terdapat Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit (Dana Alokasi Khusus) Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan bekerja sama dengan Penyedia PT. Kiyolan Mulia Karya berdasarkan Kontrak Nomor : 027/RSUD-PERJ/2569 dengan nilai sebesar Rp42.708.803.604.20. Namun hingga berakhirnya tahun anggaran bobot pekerjaan tersebut belum mencapai 100% yaitu hanya berkisar pada 89,82% dengan total realisasi SP2D sebesar Rp29.896.162.522,94 atau sebesar 70% dari Nilai Kontrak, sehingga terdapat selisih antara persentase bobot fisik dengan realisasi SP2D sebesar 19,82% atau senilai Rp8.465.739.050,42 diakui sebagai hutang belanja modal. Pekerjaan tersebut beberapa kali mengalami perubahan kontrak (addendum) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 6.1
Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
Tahun Anggaran 2024

No.	Perjanjian	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Hari Kalender	Masa Kontrak	Keterangan
1	Kontrak Awal	027/RSUD-PERJ/2569	17 April 2020	255 HK	17 April 2020 - 27 Desember 2020	1. Tahap Pekerjaan Fisik s.d. 30 % = bobot 25 % 2. Tahap Pekerjaan Fisik s.d. 70 % = bobot 65 3. Tahap Pekerjaan Fisik s.d. 100 % = bobot 100 %
2	Addendum 1	027.2/RSUD-PERJ/2569.A	6 Juli 2020	255 HK	17 April 2020 - 27 Desember 2020	Termin 1. Tahap Pekerjaan Fisik s.d. 20 % =



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

						<div>bobot 15 %</div> <div>2. Tahap Pekerjaan Fisik s.d. 45 % = bobot 40 %</div> <div>3. Tahap Pekerjaan Fisik s.d. 70 % = bobot 65 %</div> <div>4. Tahap Pekerjaan Fisik s.d. 100 % = bobot 100 %</div>
3	Addendum 2	027.2/RSUD-PERJ/6863	27 Oktober 2020	255 HK	17 April 2020 - 27 Desember 2020	<div>Termin</div> <div>1. Tahap Pekerjaan Fisik s.d. 20 % = bobot 15 %</div> <div>2. Tahap Pekerjaan Fisik s.d. 35 % = bobot 30 %</div> <div>3. Tahap Pekerjaan Fisik s.d. 55 % = bobot 50 %</div> <div>4. Tahap Pekerjaan Fisik s.d. 75 % = bobot 70 %</div> <div>5. Tahap Pekerjaan Fisik s.d. 100 % = bobot 100 %</div>
4	Addendum 3	027.2/RSUD-PERJ/8146	21 Desember 2020	255 HK	17 April 2020 - 27 Desember 2020	Tambah kurang RI dan RJ
5	Addendum 4	027.2/RSUD-PERJ/8296	28 Desember 2020	255 HK menjadi 345 HK	17 April 2020- 27 Maret 2021	<div>- Pemberian Kesempatan</div> <div>- Tidak dikenakan</div>



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

						denda keterlambatan - Konsultasi LKPP RI
6	Addendum 5	027.2/RSUD- PERJ/232	24 Maret 2021	345 menjadi 384 HK	17 April 2020 - 7 Mei 2021	- Konsultasi LKPP RI ttg perpanjangan waktu - Tidak dikenakan denda - Peraturan tentang Pandemi Covid-19
7	Addendum 6	027.2/RSUD- PERJ/448	7 Mei 2021	384 menjadi 438 HK	17 April 2020 - 30 Juni 2021	- Konsultasi LKPP RI ttg perpanjangan waktu - Tidak dikenakan denda - Peraturan tentang Pandemi Covid-19
8	Addendum 7	027.2/RSUD- PERJ/692	30 Juni 2021	438 menjadi 468 HK	17 April 2020- 29 Juli 2021	- Pemberian Kesempatan - Konsultasi LKPP RI - Dikenakan Denda
9	Addendum 8	027.2/RSUD- PERJ/836	29 Juli 2021	468 menjadi 488 HK	17 April 2020- 18 Agustus 2021	- Pemberian Kesempatan - Konsultasi LKPP RI - Dikenakan Denda

Setelah addendum 8 RSUD Puri Husada melakukan rapat dan koordinasi terkait percepatan pembangunan gedung tersebut dengan hasil sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi di Rumah Dinas Bupati Indragiri Hilir tgl 9 Desember 2020 tentang percepatan pembangunan (Notulen).
2. Rapat Koordinasi dengan Pendamping dan Inspektorat tgl 9 Januari 2021 tentang percepatan pembangunan (Notulen).
3. Konsultasi ke LKPP RI:
 - a) Permohonan Konsultasi tentang Permohonan Penghapusan Denda tanggal 10 Maret 2021 nomor 445/RSUD-NONMED/188, dan LKPP RI tentang tanggapan konsultasi tanggal 22 April 2021 nomor 8130/D.4.2/04/2021 bahwa pada poin 4 pemberian kesempatan oleh PPK kepada penyedia dalam kondisi *pandemic* Covid-19 bukan pemberian kesempatan yang diakibatkan oleh kesalahan Penyedia. Namun, hal tersebut merupakan perpanjangan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan karena keadaan kahar sehingga dalam perpanjangan masa pelaksanaan pekerjaan Penyedia tidak dikenakan denda keterlambatan.
 - b) Permohonan konsultasi tanggal 27 April 2021 nomor 445/RSUD-NONMED/370 tentang hasil audit BPK RI Perwakilan Prov. Riau terdapat temuan denda keterlambatan terhadap pekerjaan tersebut, dan LKPP RI tentang Notulensi konsultasi tanggal 29 April 2021 bahwa pada poin 6 pemberian kesempatan oleh PPK kepada penyedia dalam kondisi *pandemic* Covid-19



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

bukan pemberian kesempatan yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia. Namun, hal tersebut merupakan perpanjangan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan karena keadaan kahar sehingga dalam perpanjangan masa pelaksanaan pekerjaan Penyedia tidak dikenakan denda keterlambatan. Dan LKPP RI mengirim surat tentang tanggapan konsultasi pada tanggal 31 Mei 2021, nomor : 10469/D.4.2/05/2021 bahwa keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang disebabkan karena keadaan kahar tidak dikenakan denda keterlambatan selama justifikasi atas penetapan keadaan kahar tersebut didukung dengan data/dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

- c) Permohonan konsultasi dan rekomendasi pemberian kesempatan tanggal 15 Maret 2021 nomor 445/NON-MED/195 dan tanggal 18 Maret 2021 nomor 445/NON-MED/214, tanggapan LKPP RI tentang tanggapan konsultasi tanggal 23 Maret 2021 nomor 5776/D.4.2/03/2021 (terlampir).
- d) Notulensi LKPP RI yaitu Lanjutan konsultasi mengenai pemberian kesempatan di RSUD Puri Husada Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 24 Maret 2021
- e) Permohonan konsultasi tanggal 4 Oktober 2021 nomor 445/NON-MED/1434 dengan Notulensi Rapat tanggal 7 Oktober 2021 yaitu LKPP RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:
 - 1. PPK memastikan telah memutuskan kontrak kepada penyedia setelah tanggal 29 Juli 2021.
 - 2. Memerintahkan pencairan Jaminan Pelaksanaan kepada pihak penjamin.
 - 3. Mengusulkan pencantuman Daftar Hitam kepada PA.
 - 4. Terhadap sisa pekerjaan sampai dengan Oktober 2021 dilakukan audit oleh API.
- f) Notulensi LKPP RI membahas Lanjutan Konsultasi pembangunan RSUD Puri Husada pada tanggal 15 Oktober 2021 tentang status kontrak dan pekerjaan yang dilakukan sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal konsultasi, dan apakah Surat Edaran Menteri Keuangan bahwa pekerjaan yang berdampak covid-19 dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 15 Desember 2021. Tanggapan LKPP RI bahwa prinsipnya pembangunan rumah sakit Puri Husada telah berakhir pada tanggal 29 Juli 2021, dan SE Menteri Keuangan agar dikonsultasikan ke Kemenkeu dan Kemenkes tentang SBSN.
- g) LKPP RI yaitu Notulensi FGD Pembahasan tentang Penyelesaian pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor (Pembangunan dan Rehab RS) tanggal 21 Desember 2021 di Ruang Rapat Rumah Dinas Bupati Indragiri Hilir.
- h) Permohonan Konsultasi tentang proses pembayaran pekerjaan diluar kontrak (setelah tanggal 29 Juli 2021) pada tanggal 01 Maret 2022 nomor 445/RSUD-NONMED/431, Tanggapan dan LKPP RI konsultasi tentang proses pembayaran tanggal 02 Maret 2022 bahwa untuk pembayaran harus dilakukan audit *claim* dan hasil audit dibayarkan secara *at cost*.
- i) Permohonan Konsultasi tentang permohonan dasar dikeluarkannya audit claim tanggal 07 Maret 2022 nomor 445/RSUD-NONMED/471, Tanggapan dari LKPP RI konsultasi tentang proses pembayaran tanggal 16 Maret 2022 bahwa dalam hal sisa pekerjaan dilaksanakan oleh PT. Kiyolan Mulia Karya yang ternyata hasil pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi, hasil pekerjaan/*output*



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

dapat dipertanggungjawabkan, dan sudah berfungsi/bermanfaat maka dapat dilakukan pembayaran dengan berdasarkan audit oleh APIP.

- j) Permohonan Konsultasi tentang proses pembayaran tanggal 04 Juli 2022 nomor 445/RSUD-NONMED/1060, Tanggapan dan LKPP RI konsultasi tentang proses pembayaran tanggal 21 Juli 2022 bahwa huruf b yaitu PPK meminta APIP untuk melakukan audit kewajaran nilai/harganya.
- k) Laporan hasil audit tujuan tertentu atas sisa pekerjaan belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian Gedung kantor (pembangunan dan rehab rs) tahun anggaran 2020 oleh Inspektorat Daerah Kab. Indragiri Hilir nomor : 019/INSP-LHA/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022, sebagai berikut:
 - 1. Tidak memberikan keuntungan kepada rekanan terhadap bobot sisa pekerjaan setelah putus kontrak sebesar 9,918%.
 - 2. Memperhitungkan nilai kekurangan pekerjaan sebesar Rp946.744.983,00 sebagai koreksi pengurang dari tagihan rekanan pada saat melakukan pembayaran atas sisa pekerjaan setelah putus kontrak.
 - 3. Memerintahkan rekanan untuk melengkapi dokumen administrasi/laporan pelaksanaan kegiatan atas sisa pekerjaan setelah putus kontrak.
- l) Permohonan konsultasi ke LKPP RI tanggal 23 Agustus 2022 Nomor 445/RSUD-Nonmed tentang dasar pembayaran, pekerjaan dengan bobot 99,82% dan pekerjaan tambah berdasarkan hasil audit oleh Tim Audit APIP dan BPKP Perwakilan Prov. Riau.
- m) Laporan hasil audit tujuan tertentu atas pekerjaan tambah pekerjaan pembangunan dan rehab Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Tahun Anggaran 2020 oleh Inspektorat Daerah Kab. Indragiri Hilir nomor : 021/INSP-LHA/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022, sebagai berikut:
 - 1. Klaim yang diajukan penyedia senilai Rp4.432.153.506,00 dikoreksi menjadi senilai Rp1.487.988.017,00 dan dari nilai tersebut juga dikurangi perhitungan keuntungan yang ada didalamnya sebesar 10%.
 - 2. Memerintahkan penyedia untuk melengkapi dokumen administrasi/laporan pelaksanaan kegiatan atas pekerjaan tambah sebagai salah satu syarat pembayaran.
- n) Surat LKPP RI tanggal 12 September 2022 nomor 22822/D.4.2/09/2022 tentang dasar pembayaran sebagai berikut:
 - 1. Terhadap pekerjaan pembangunan RSUD Puri Husada yang telah dilakukan audit perhitungan hasil pekerjaan maka pembayaran pekerjaan tersebut dapat dibayarkan pada tahun 2022 dengan berpedoman pada peraturan perundangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
 - 2. Dan selanjutnya, penyedia tetap dikenakan denda keterlambatan seperti rekomendasi Tim Audit BPK, pencairan jaminan pelaksanaan dan sanksi daftar hitam.
- o) Permohonan konsultasi ke BPK tanggal 15 September 2022 nomor 445/RSUD-NONMED/1583 tentang denda keterlambatan, hasil audit APIP dan BPKP Perwakilan Prov. Riau untuk pekerjaan 9,92% dan pekerjaan tambah.
- p) Tanggapan LKPP RI tanggal 16 September 2022 nomor 23362/D.4.2/09/2022 tentang tanggapan konsultasi bahwa:



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

1. Terhadap pekerjaan pembangunan RSUD Puri Husada yang telah dilakukan audit perhitungan hasil pekerjaan maka pembayaran pekerjaan tersebut dapat dibayarkan pada tahun 2022 dengan berpedoman pada peraturan perundangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
2. Dan selanjutnya, penyedia tetap dikenakan denda keterlambatan seperti rekomendasi Tim Audit BPK, pencairan jaminan pelaksanaan dan sanksi daftar hitam.
- d. Informasi Perkara yang di tujukan kepada pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang di kuasakan Kepada Bagian Hukum Setda tahun 2024.

Tabel 6.2

Informasi Perkara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

NO.	PERKARA	PIHAK PENGGUGAT	PIHAK TERGUGAT	KLASIFIKASI GUGATAN	KETERANGAN
1.	Perkara Perdata Nomor : 6/Pdt.G/2023/Pn.Tbh	<div>1. GUNARDI (Bakal Calon Kepala Desa Kramat Jaya, Kecamatan Pulau Burung), selaku PENGGUGAT I;</div> <div>2. SUPARDI (Bakal Calon Kepala Desa Air Balui, Kecamatan Kemuning), selaku PENGGUGAT II;</div> <div>3. SAMSUL BAHRI (Bakal Calon Kepala Desa Bangun Harjo Jaya, Kecamatan Pulau Burung) selaku PENGGUGAT III;</div> <div>4. HARUNA (Bakal Calon Kepala Desa Jerambang, Kecamatan Gaung) selaku PENGGUGAT IV;</div> <div>5. ASMURI (Bakal Calon Kepala Desa Jerambang, Kecamatan Gaung) selaku PENGGUGAT V;</div> <div>6. NIMIN (Bakal Calon Kepala Desa Tunggal Rahayu Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong)</div>	<div>1. BUPATI dan WAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR selaku TERGUGAT I;</div> <div>2. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR selaku TERGUGAT II;</div> <div>3. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR selaku TERGUGAT III;</div> <div>4. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR selaku TERGUGAT IV;</div> <div>5. SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR selaku TERGUGAT V;</div> <div>6. GUBERNUR PROVINSI RIAU selaku TURUT TERGUGAT I;</div> <div>7. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA selaku</div>	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum	<div>Telah diputus dengan amar putusan sela pada tanggal 18 Januari 2024 sebagai berikut :</div> <div>DALAM EKSEPSI: - Menerima eksepsi Para Tergugat;</div> <div>DALAM POKOK PERKARA: 1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet van ontvankelijk verklaard); 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 753.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga ribu Rupiah);</div> <div>Bahwa atas putusan tersebut, PARA PENGGUGAT mengajukan Upaya Hukum Banding selaku PARA PEMBANDING.</div>



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

		<p>selaku PENGGUGAT VI;</p> <p>7. MASHUR (Bakal Calon Kepala Desa Batang Tumu, Kecamatan Mandah) selaku PENGGUGAT VII;</p> <p>8. SARBIDI (Bakal Calon Kepala Desa Teluk Kabung, Kecamatan Gaung) selaku PENGGUGAT VIII;</p> <p>9. AFRIZAL (Bakal Calon Kepala Desa Pungkat, Kecamatan Gaung) selaku PENGGUGAT IX;</p> <p>10. APRIANTO (Bakal Calon Kepala Desa Igal, Kecamatan Mandah) selaku PENGGUGAT X.</p> <p>untuk selanjutnya kesemuanya tersebut di atas disebut sebagai PARA PENGGUGAT</p>	<p>TURUT TERGUGAT II.</p>		
2.	Perkara Banding Nomor : 42/PDT/2024/PT .PBR	<p>1. GUNARDI (Bakal Calon Kepala Desa Kramat Jaya, Kecamatan Pulau Burung), selaku PEMBANDING I (sebelumnya PENGGUGAT I);</p> <p>2. SUPARDI (Bakal Calon Kepala Desa Air Balui, Kecamatan Kemuning), selaku PEMBANDING II (sebelumnya PENGGUGAT II);</p> <p>3. SAMSUL BAHRI (Bakal Calon Kepala Desa Bangun Harjo Jaya, Kecamatan</p>	<p>1. BUPATI dan WAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR selaku TERBANDING I (sebelumnya TERGUGAT I);</p> <p>2. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR selaku TERBANDING II (sebelumnya TERGUGAT II);</p> <p>3. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR selaku TERBANDING IV (sebelumnya TERGUGAT IV);</p> <p>4. KEPALA BADAN</p>		<p>Telah diputus pada tanggal 27 Maret 2024 dengan amar putusan banding sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh, tanggal 18 Januari 2024 yang dimohonkan banding;- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); <p>Bahwa atas putusan banding tersebut, PARA PEMBANDING (semula PARA PENGGUGAT)</p>



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

		<p>Pulau Burung) selaku PEMBANDIN G III (sebelumnya PENGGUGAT III);</p> <p>4. HARUNA (Bakal Calon Kepala Desa Jerambang, Kecamatan Gaung) selaku PEMBANDIN G IV (sebelumnya PENGGUGAT IV);</p> <p>5. ASMURI (Bakal Calon Kepala Desa Jerambang, Kecamatan Gaung) selaku PEMBANDIN G V (sebelumnya PENGGUGAT V);</p> <p>6. NIMIN (Bakal Calon Kepala Desa Tunggal Rahayu Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong) selaku PEMBANDING VI (sebelumnya PENGGUGAT VI);</p> <p>7. MASHUR (Bakal Calon Kepala Desa Batang Tumu, Kecamatan Mandah) selaku PEMBANDING VII (sebelumnya PENGGUGAT VII);</p> <p>8. SARBIDI (Bakal Calon Kepala Desa Teluk Kabung, Kecamatan Gaung) selaku PEMBANDING VIII (sebelumnya PENGGUGAT VIII);</p> <p>9. AFRIZAL (Bakal Calon Kepala Desa Pungkat, Kecamatan Gaung) selaku PEMBANDING XI (sebelumnya PENGGUGAT XI);</p>	<p>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR selaku TERBANDING V (sebelumnya TERGUGAT V);</p> <p>5. SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR selaku TERBANDING V (sebelumnya TERGUGAT V)</p> <p>6. GUBERNUR PROVINSI RIAU selaku TURUT TERGUGAT I (sebelumnya TURUT TERGUGAT I);</p> <p>7. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA selaku TURUT TERBANDING II (sebelumnya TURUT TERGUGAT II).</p>		<p>tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan putusan telah berkekuatan hukum tetap (<i>Inkracht</i>)</p>
--	--	---	--	--	--



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

		<p>10. APRIANTO (Bakal Calon Kepala Desa Igal, Kecamatan Mandah) selaku PEMBANDI NG X (sebelumnya PENGGUGAT X);</p> <p>untuk selanjutnya kesemuanya tersebut di atas disebut sebagai PARA PEMBANDING (sebelumnya PARA PENGGUGAT)</p>			
3.	Perkara Kasasi Nomor : 55 K/PDT/2024	<p>SAIRAH, lahir di Kuala tungkal tanggal 18 September 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jalan Tanjung Harapan Gang Tanjung Samak RT. 04 RW. 02 Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut PEMOHON KASASI/PEMOHON BANDING/TERGUGAT II</p>	<p>1. SITI FATIMAH, lahir di Tembilahan, tanggal 13 Juli 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. H. Arief Gg. Hidayat RT. 01 RW. 05 Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, No. KTP : 1404135307770002. Selanjutnya disebut TERMOHON KASASI / TERBANDING / PENGGUGAT</p> <p>2. ARSAN, lahir di Kuala tungkal tanggal 03 Februari 1967, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Tanjung Harapan Gang Tanjung Samak RT. 04 RW. 02 Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut TURUT TERMOHON KASASI/TERBANDING I/TERGUGAT I</p> <p>3. FARIDAH, lahir di Tembilahan tanggal 12 Desember 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,</p>	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum	<p>Telah diputus pada tanggal 27 Februari 2024 dengan amar putusan sebagai berikut :</p> <p>1. Menolak permohonan Pemohon Kasasi SAIRAH tersebut;</p> <p>2. Menghukum Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)</p> <p>Upaya hukum kasasi diajukan oleh SAIRAH selaku PEMOHON KASASI (sebelumnya Pemohon Banding / Tergugat II) atas putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 170/PDT/2022/PT.PBR Tanggal 6 Oktober 2022 Jo Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN.Tbh Tanggal 1 Agustus 2022. Adapun putusannya sebagai berikut :</p> <p>1. PUTUSAN NOMOR : 2/Pdt.G/2022/PN.Tbh</p> <p>Dalam Eksepsi :</p> <p>- Menolak eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;</p> <p>Dalam Pokok Perkara :</p> <p>1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;</p> <p>2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sebidang tanah yang sudah ada bangunan di atasnya, terletak di Jalan Tanjung Harapan GangTanjung Samak RT.04 RW,02 Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri</p>



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

			<p>Alamat di Jalan P. Hidayat, Gang Natuna RT. 01 RW. 04 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut TURUT TERMOHON KASASI/TURUT TERBANDING II/TERGUGAT III</p> <p>4. ARISMAN, lahir di Ujung Gading tanggal 27 Juli 1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Pensiunan), Alamat di Jalan P. Hidayat, Gang Natuna RT. 01 RW. 04 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut TURUT TERMOHON KASASI/TURUT TERBANDING III/TERGUGAT IV</p> <p>5. LURAH SUNGAI BERINGIN, yang beralamat di Kantor Kelurahan Sungai Beringin yang terletak di Jalan Sungai Beringin, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut TURUT TERMOHON KASASI/TURUT TERBANDING IV/TURUT TERGUGAT I</p> <p>6. CAMAT TEMBILAHAN, yang beralamat di Kantor Camat Tembilahan yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERMOHON KASASI/TURUT TERBANDING V/ TURUT TERGUGAT</p>	<p>Hilir seluas 360 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelah utara berbatas dengan Gang, dengan ukuran 12 m• Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan/gang Tanjung Samak, dengan ukuran 12 m• Sebelah barat berbatas dengan tanah Arsan, dengan ukuran 30 m• Sebelah timur berbatas dengan tanah Jamaruli Siringoringo, dengan ukuran 30 m <p>3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan tanggal 05 Juli 2013 surat pernyataan tanggal 26 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat III;</p> <p>4. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;</p> <p>5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 1270/XII/2019/592.23 tanggal 11 September 2019 atas nama Tergugat I dan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 1269/XII/2019/592.23 tanggal 11 September 2019 atas nama Tergugat I;</p> <p>6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan seluruh objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari harta kepemilikan milik Para Tergugat;</p> <p>7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;</p> <p>8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.510.000,00 (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);</p>
--	--	--	--	--



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

			II		<p>2. PUTUSAN NOMOR : 170/PDT/2022/PT.PB R</p> <p>Bahwa atas putusan tersebut, SAIRAH selaku TERGUGAT II mengajukan upaya hukum banding selaku PEMBANDING, dan telah diputus pada tanggal 6 Oktober 2022 dengan amar putusan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II tersebut;2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tbh tanggal 1 Agustus 2022 yang dimohonkan banding;3. Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). <p>Putusan Kasasi nomor : 55 K/PDT/2024 tersebut telah berkekuatan hukum tetap. (<i>Inkracht</i>)</p>
4.	Perkara Kasasi Nomor : 94 K/TUN/2024	<ol style="list-style-type: none">1. PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH (PERSEROD A), beralamat di Menara Dang Merdu, Jalan Jenderal Sudirman No. 462, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut PEMOHON KASASI I (sebelumnya PEMBANDIN G / TERGUGAT II INTERVENSI 3).2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berkedudukan di Jalan Kembang No. 52,	ABDUL SAMAD, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Datuk Bandar, RT. 004, RW. 003, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KASASI (sebelumnya TERBANDING / PENGGUGAT)	Gugatan Pembatalan/ Pencabutan Sertipikat	<p>Telah diputus pada tanggal 27 Februari 2024 dengan amar putusan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. PT BANK RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA), II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, III. PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, IV. DJAMILAH;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 106/B/2023/PT.TUN. MDN, tanggal 21 September 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 59/G/2022/PTUN.PB R, tanggal 15 Mei 2023;



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

		<p>Tembilahan, Provinsi Riau. selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KASASI II (sebelumnya PEMBANDING / TERGUGAT).</p> <p>3. PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berkedudukan di Jalan Akasia No. 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau 29214. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PEMBANDING / KASASI III (sebelumnya TERGUGAT II INTERVENSI 1).</p> <p>4. DJAMILAH, beralamat di Jalan Subrantas Tembilahan. Selanjutnya disebut PEMOHON KASASI IV (sebelumnya PEMBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI 2).</p>		<p>MENGADILI SENDIRI:</p> <p>Dalam Eksepsi:</p> <p>2. Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut;</p> <p>Dalam Pokok Sengketa:</p> <p>3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;</p> <p>3. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);</p> <p>Upaya hukum kasasi diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir selaku PEMOHON KASASI III (sebelumnya Pembanding / Tergugat II Intervensi 1) atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 106/B/2023/PT.TUN.MDN Tanggal 21 September 2023 Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 59/G/2022/ PTUN.Pbr tanggal 15 Mei 2023. adapun putusannya sebagai berikut :</p> <p>1. PUTUSAN NOMOR : 59/G/2022/ PTUN.PBR :</p> <p>PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN :</p> <p>Menyatakan permohonan Penggugat untuk penundaan dan pencatatan blokir seluruh objek sengketa tidak diterima;</p> <p>EKSEPSI:</p> <p>Menyatakan seluruh eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 tidak diterima;</p> <p>DALAM POKOK PERKARA:</p> <p>1. Mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya;</p> <p>2. Menyatakan batal ke-14 (empat belas) sertifikat sebagaimana</p>
--	--	--	--	--



					<div>dimaksud dalam dalam gugatan ABDUL SAMAD, termasuk 2 (dua) milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, yakni :</div> <div><div>1. Sertipikat Hak Pakai No. 76, Kel. Tembilahan Hilir, tanggal 20 Agustus 2008, Surat Ukur Nomor: 16/2003, tanggal 28-5-2003, luas 68.755 M2, atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;</div><div>2. Sertipikat Hak Pakai No. 06, Desa Tembilahan Hilir, tanggal 6 April 1990, Surat Ukur Nomor: 263/1990, tanggal 1 Maret 1990, luas 9.370 M2, atas nama Pemda Tk. II Indragiri Hilir;</div><div>3. Mewajibkan Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir) untuk mencabut ke-14 (empat belas) sertifikat sebagaimana dimaksud dalam gugatan ABDUL SAMAD, termasuk 2 (dua) milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, yakni :</div><div><div>1. Sertipikat Hak Pakai No. 76, Kel. Tembilahan Hilir, tanggal 20 Agustus 2008, Surat Ukur Nomor: 16/2003, tanggal 28-5-2003, luas 68.755 M2, atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.</div><div>2. Sertipikat Hak Pakai No. 06, Desa Tembilahan Hilir, tanggal 6 April 1990, Surat Ukur Nomor: 263/1990, tanggal 1 Maret 1990, luas 9.370 M2, atas nama Pemda Tk. II Indragiri Hilir.</div></div><div>5. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 secara bersama-</div></div>
--	--	--	--	--	---



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

					<p>sama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 8.827.500,00 (Delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).</p> <p>2. PUTUSAN BANDING NOMOR : 106/B/2023/PT.TUN.M DN</p> <p>Bahwa atas putusan tingkat pertama tersebut, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir selaku Tergugat II Intervensi 1 mengajukan Upaya Hukum Banding selaku PEMBANDING dan diputus pada tanggal 21 September 2023 dengan amar sebagai berikut :</p> <p>1. Menerima permohonan banding banding Pembanding/ Tergugat, Pembanding/Tergugat II Intervensi Pembanding/Tergugat II Intervensi 2, dan Pembanding/Tergugat II Intervensi 3;</p> <p>2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 59/G/2022/PTUN.PBR, tanggal 15 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut;</p> <p>3. Menghukum Pembanding/Tergugat, Pembanding/ Tergugat II Intervensi 1, Pembanding/Tergugat II Intervensi 2, dan Pembanding/Tergugat II Intervensi 3 secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>Putusan Kasasi Nomor : 94 K/TUN/2024 tersebut telah berkekuatan hukum tetap (<i>Inkracht</i>)</p>
5.	Perkara Perdata Nomor : 8/Pdt.G/2023	1. DRA. LES PERMANA SARI, umur 53 tahun,	1. PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI DAERAH TINGKAT II	Gugatan Perbuatan Melawan	Telah diputus pada tanggal 1 Maret 2024 dengan amar putusan sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	/PN.Tbh	<p>pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Tanah Kusir Nomor 09 RT. 011 RW. 009 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I</p> <p>2. FERI NORFATRIA, umur 53 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Prof. M. Yamin, SH Lr. Sampurna No. 25, RT. 003 RW. 008, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.</p> <p>Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II</p>	<p>HILIR, beralamat di Jalan Akasia Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I</p> <p>2. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, beralamat di Jalan Kembang No. 52 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II</p>	Hukum.	<p>DALAM EKSEPSI:</p> <p>- Menerima eksepsi Para Tergugat;</p> <p>DALAM POKOK PERKARA:</p> <p>1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet van ontvankelijk verklaard);</p> <p>2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.200,00 (dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus Rupiah);</p> <p>Bahwa atas putusan tersebut, PARA PENGGUGAT mengajukan upaya hukum banding.</p>
6.	Perkara Banding Nomor : 61/Pdt/2024/ PT PBR	<p>1. DRA. LES PERMANA SARI, umur 53 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Tanah Kusir Nomor 09 RT. 011 RW. 009 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDIN G I (sebelumnya PENGGUGAT I)</p> <p>2. FERI NORFATRIA, umur 53 tahun, pekerjaan</p>	<p>1. PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAGIRI HILIR, beralamat di Jalan Akasia Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I (sebelumnya TERGUGAT I).</p> <p>2. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, beralamat di Jalan Kembang No. 52 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II</p>		<p>Telah diputus pada tanggal 14 Agustus s2024 dengan amar putusan sebagai berikut :</p> <p>Mengadili:</p> <p>1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding, semula Para Penggugat tersebut;</p> <p>2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Tbh tanggal 1 Maret 2024 yang dimohonkan banding tersebut;</p> <p>Mengadili Sendiri;</p> <p>Dalam Konpensasi;</p> <p>Dalam Eksepsi;</p> <p>Eksepsi Kompetensi Absolut;</p> <p>1. Menyatakan Pengadilan Negeri Tembilahan berwenang mengadili perkara ini;</p> <p>2. Menerima eksepsi Terbanding I semula Tergugat I tentang</p>



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

		<p>wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Prof. M. Yamin, SH Lr. Sampurna No. 25, RT. 003 RW. 008, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDIN G II (sebelumnya PENGGUGAT II)</p>	<p>(sebelumnya TERGUGAT II).</p>		<p>Legal Standing para Pengggugat, karena kurang pihak;</p> <p>3. Menerima eksepsi Terbanding semula Tergugat tentang gugatan kabur atau tidak jelas (Obscur libel);</p> <p>Dalam pokok perkara;</p> <p>- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);</p> <p>Dalam Rekonsensi;</p> <p>- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi dari Tergugat Konpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);</p> <p>Dalam Konpensi dan Rekonsensi;</p> <p>4. Menghukum para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>Bahwa atas putusan banding tersebut, PARA PEMBANDING (semua PARA PENGGUGAT) telah mengajukan upaya hukum kasasi.</p>
7.	<p>Perkara Kasasi Nomor : 2/Pdt.G/KASASI /2024/PN TBH</p>	<p>3. DRA. LES PERMANA SARI, umur 53 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Tanah Kusir Nomor 09 RT. 011 RW. 009 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KASASI I / PEMBANDIN G I / PENGGUGAT I</p> <p>4. FERI NORFATRIA, umur 53 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat</p>	<p>3. PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAGIRI HILIR, beralamat di Jalan Akasia Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.</p> <p>4. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, beralamat di Jalan Kembang No. 52 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.</p>	<p>Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.</p>	<p>Masih dalam proses Kasasi</p>



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

		tinggal di Jl. Prof. M. Yamin, SH Lr. Sampurna No. 25, RT. 003 RW. 008, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KASASI II / PEMBANDIN G II / PENGGUGAT II			
8.	Perkara Perdata Nomor : 3/Pdt.G/2024/P N.Tbh	ABDUL SAMAD, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Datuk Bandar, RT. 004, RW. 003, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT	<div>1. BUPATI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR. Alamat Jl. Akasia, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya Disebut Sebagai :TERGUGAT I.</div> <div>2. AFLINUR, ALAMAT: JL. H. R. Soebrantas, RT.08, RW.09, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. (Ruko Di Samping Gedung Dprd Kabupaten Indragiri Hilir) disebut sebagai TERGUGAT II.</div> <div>3. MUHAMMAD HAIKAL SAPUTRA, Alamat: JL. H. R. Soebrantas, RT.08, RW.09, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. (Ruko Di Samping Gedung DPRD Kabupaten Indragiri Hilir) disebut sebagai TERGUGAT III.</div> <div>4. DJAMILAH,ALAMAT : JL. H. R. Soebrantas NO. 44 B, RT.019, RW.007, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi</div>	Gugatan Kepemilikan Tanah dan Perbuatan Melawan Hukum	Penggugat mencabut gugatan dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tembilahan menetapkan sebagai berikut : <div>1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata dari Penggugat;</div> <div>2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan untuk mencoret perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tbh dari Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2024;</div> <div>3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 852.000,00 (delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).</div>



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

			<p>Riau. Sebagai TURUT TERGUGAT IV.</p> <p>5. NURSYFA, Alamat: JL. H. R. Soebrantas, RT.08, RW.09, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. (Ruko Di Samping Gedung DPRD Kabupaten Indragiri Hilir) Disebut Sebagai TERGUGAT V.</p> <p>6. M. ILMI, Alamat: JL. H. R. SOEBRANTAS, RT.08, RW.09, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. (Ruko Di Samping Gedung DPRD Kabupaten Indragiri Hilir) disebut sebagai : TERGUGAT VI.</p> <p>7. MUHAMMAD A DAFIK, Alamat: JL. H. R. Soebrantas, RT.08, RW.09, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. (Ruko Di Samping Gedung DPRD Kabupaten Indragiri Hilir) disebut sebagai :TERGUGAT VII.</p> <p>8. MARPIUS, Alamat : JL. H. R. Soebrantas, RT.08, RW. 09, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. (Ruko Di Samping Gedung DPRD Kabupaten Indragiri Hilir) disebut sebagai :TERGUGAT VIII.</p> <p>9. SUWISNO, Alamat : JL. H. R. Soebrantas, RT.08, RW.09, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. (Ruko Di Samping Gedung DPRD</p>		
--	--	--	---	--	--



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

			<p>Kabupaten Indragiri Hilir) Disebut Sebagai TERGUGAT IX.</p> <p>10. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, Alamat: JL. Kembang NO.52, Kec.Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Disebut Sebagai :TURUT TERGUGAT I.</p> <p>11. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, Alamat JL. H. R. Soebrantas, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Disebut Sebagai TURUT TERGUGAT II.</p>		
9.	Perkara Perdata Nomor : 6/Pdt.G/2024/P N.Tbh	ABDUL SAMAD, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Datuk Bandar, RT. 004, RW. 003, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT	<p>1. BUPATI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR. Alamat Jl. Akasia, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya Disebut Sebagai :TERGUGAT I.</p> <p>2. AFLINUR, ALAMAT: JL. H. R. Soebrantas, RT.08, RW.09, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. (Ruko Di Samping Gedung Dprd Kabupaten Indragiri Hilir) disebut sebagai TERGUGAT II.</p> <p>3. MUHAMMAD HAIKAL SAPUTRA, Alamat: JL. H. R. Soebrantas, RT.08, RW.09, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. (Ruko Di Samping Gedung DPRD Kabupaten Indragiri</p>	Gugatan Kepemilikan Tanah dan Perbuatan Melawan Hukum	<p>Telah diputus pada tanggal 10 Desember 2024 dengan amar putusan sebagai berikut :</p> <p>MENGADILI :</p> <p>1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat IX, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II;</p> <p>2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tembilahan tidak berwenang mengadili perkara ini;</p> <p>3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.319.600,-(Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah);</p> <p>Bahwa atas putusan tersebut PENGGUGAT tidak ada mengajukan upaya hukum banding sehingga putusan telah berkekuatan hukum tetap (<i>inkracht</i>)</p>



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

			Hilir) disebut sebagai TERGUGAT III.		
			4. DJAMILAH,ALAMAT : JL. H. R. Soebrantas NO. 44 B, RT.019, RW.007, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.Sebagai TURUT TERGUGAT IV.		
			5. NURSYFA, Alamat: JL. H. R. Soebrantas, RT.08, RW.09, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. (Ruko Di Samping Gedung DPRD Kabupaten Indragiri Hilir) Disebut Sebagai TERGUGAT V.		
			6. M. ILMI, Alamat: JL. H. R. SOEBRANTAS, RT.08, RW.09, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. (Ruko Di Samping Gedung DPRD Kabupaten Indragiri Hilir) disebut sebagai : TERGUGAT VI.		
			7. MUHAMMAD A DAFIK, Alamat: JL. H. R. Soebrantas, RT.08, RW.09, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. (Ruko Di Samping Gedung DPRD Kabupaten Indragiri Hilir) disebut sebagai :TERGUGAT VII.		
			8. MARPIUS, Alamat : JL. H. R. Soebrantas, RT.08, RW. 09, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. (Ruko Di Samping Gedung DPRD Kabupaten Indragiri		



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

			<p>Hilir) disebut sebagai :TERGUGAT VIII.</p> <p>9. SUWISNO, Alamat : JL. H. R. Soebrantas, RT.08, RW.09, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. (Ruko Di Samping Gedung DPRD Kabupaten Indragiri Hilir) Disebut Sebagai TERGUGAT IX.</p> <p>10. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, Alamat: JL. Kembang NO.52, Kec.Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Disebut Sebagai :TURUT TERGUGAT I.</p> <p>11. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, Alamat JL. H. R. Soebrantas, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Disebut Sebagai TURUT TERGUGAT II.</p> <p>12. DIREKSI PT.BANK RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA), Alamat: Menara Dang Merdu, Jl.Jendral Sudirman NO. 462 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III.</p>		
10.	Perkara Arbitrase di BANI nomor : 47082/XI/ARB-BANI/2024	PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN - MULTI STRUCTURE JO, yang berkedudukan di Plaza PP Lt. 6, Jl. TB Simatupang No. 57, Jakarta selaku PEMOHON	Bupati Kabupaten Indragiri Hilir cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hilir, yang berkedudukan di Jl. Pangeran Diponegoro, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau selaku TERMOHON;	Arbitrase	Masih dalam proses persidangan



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

11.	Perkara Perdata Nomor : 12/Pdt.G/2024/P N.Tbh	Haizulkupli, umur 59 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Hasanuddin Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi selaku PENGGUGAT	1. PT. Kholil & Brothers, alamat HI. Utama No. 34 RT 004 RW. 002 Kelurahan Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau selaku TERGUGAT. 2. Dinas Pekerjaan Umum Sub Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir, Alamat Jl. Diponegoro No. 743 Tembilahan Kota Provinsi Riau selaku TURUT TERGUGAT.	Gugatan Wanprestasi	Masih dalam proses persidangan
12.	Perkara Perdata Nomor : 14/Pdt.G/2024/P N.Tbh	1. NURSIAH, Perempuan, Tempat/Tgl Lahir : Sungai Buluh, 31 Desember 1966, Umur : 58 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Jln Harapan Parit 8 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, NIK. 14000471126 60057, disebut PENGGUGAT I; 2. DAHLIA, Perempuan, Tempat/Tgl Lahir : Concong, 12 Desember 1976, Umur : 48 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Dusun III Paket II RT. 000 RW.000 Kelurahan/Des a Tanah Bawah, Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka	Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Cq. Bupati Kabupaten Indragiri Hilir selaku TURUT TERGUGAT.	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.	Masih dalam proses persidangan



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

		<p>Provinsi Kepulauan Bangka Belitung NIK. 1404095212760003. Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT II;</p> <p>3. DARWIS, Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir : Sungai Guntung, 18 April 1981, Umur : 43 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Jln Harapan No. 26 RT. 001 RW. 016 Kelurahan/Desa Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, NIK. 1404131804810006. Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT III;</p> <p>4. DAHLAN, Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Raya, 13 Desember 1986, Umur : 38 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama : Islam, Alamat : Paket II Dusun III RT. 000 RW. 000 Kelurahan/Desa Tanah Bawah Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, NIK. 1404191312860001. Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT IV;</p>			
--	--	---	--	--	--



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

		<p>5. SITI AISA, Perempuan, Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Raya, 12 Agustus 1988, Umur : 36 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Dusun III Paket II RT. 001 RW. 001 Kelurahan/Desa Tanah Bawah Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, NIK. 1404095208880007. Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT V</p>			
13.	<p>Perkara Perdata Nomor : 17/Pdt.G/2024/P.N.Tbh</p>	<p>ABDUL SAMAD, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Datuk Bandar, RT. 004, RW. 003, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT</p>	<p>1. BUPATI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR. Alamat Jl. Akasia, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya Disebut Sebagai :TERGUGAT I.</p> <p>2. AFLINUR, ALAMAT: JL. H. R. Soebrantas, RT.08, RW.09, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. (Ruko Di Samping Gedung DPRD Kabupaten Indragiri Hilir) disebut sebagai TERGUGAT II.</p> <p>3. MUHAMMAD HAIKAL SAPUTRA, Alamat: JL. H. R. Soebrantas, RT.08, RW.09, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. (Ruko Di Samping Gedung DPRD</p>	<p>Gugatan Kepemilikan Tanah dan Perbuatan Melawan Hukum</p>	<p>Masih dalam proses persidangan</p>



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

			<p>Kabupaten Indragiri Hilir) disebut sebagai TERGUGAT III.</p> <p>4. DJAMILAH,ALAMAT : JL. H. R. Soebrantas NO. 44 B, RT.019, RW.007, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.Sebagai TURUT TERGUGAT IV.</p> <p>5. NURSYFA, Alamat: JL. H. R. Soebrantas, RT.08, RW.09, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. (Ruko Di Samping Gedung DPRD Kabupaten Indragiri Hilir) Disebut Sebagai TERGUGAT V.</p> <p>6. M. ILMI, Alamat: JL. H. R. SOEBRANTAS, RT.08, RW.09, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. (Ruko Di Samping Gedung DPRD Kabupaten Indragiri Hilir) disebut sebagai : TERGUGAT VI.</p> <p>7. MUHAMMAD A DAFIK, Alamat: JL. H. R. Soebrantas, RT.08, RW.09, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. (Ruko Di Samping Gedung DPRD Kabupaten Indragiri Hilir) disebut sebagai :TERGUGAT VII.</p> <p>8. MARPIUS, Alamat : JL. H. R. Soebrantas, RT.08, RW. 09, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. (Ruko Di Samping Gedung DPRD</p>		
--	--	--	--	--	--



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

			Kabupaten Indragiri Hilir) disebut sebagai :TERGUGAT VIII.		
			9. SUWISNO, Alamat : JL. H. R. Soebrantas, RT.08, RW.09, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. (Ruko Di Samping Gedung DPRD Kabupaten Indragiri Hilir) Disebut Sebagai TERGUGAT IX.		
			10. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, Alamat: JL. Kembang NO.52, Kec.Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Disebut Sebagai :TURUT TERGUGAT I.		
			11. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, Alamat JL. H. R. Soebrantas, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Disebut Sebagai TURUT TERGUGAT II.		
			12. DIREKSI PT.BANK RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA), Alamat: Menara Dang Merdu, Jl.Jendral Sudirman NO. 462 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III.		

- e. Pada Tahun 2022 telah dilakukan konfirmasi kepada Bank Riau Kepri Syariah bahwa jumlah deposito atas nama jaminan reklamasi, jaminan kesungguhan dan jaminan penutupan tambang adalah sebesar Rp1.921.028.660,00. Nilai tersebut sesuai dengan surat dari Bank Riau Kepri Syariah nomor 205/BRKS-TBH/III/2022 tentang balasan konfirmasi Bank terhadap rekening deposito perusahaan tambang yang terdapat pada



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Bank Riau Kepri Syariah atas nama Bupati Inhil yang masih aktif. Adapun rincian deposito perusahaan tambang sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.3

Rincian Deposito Perusahaan Tambang per 31 Desember 2024

No	Nomor Rekening	Nama Rekening / Jenis Jaminan	Tanggal Buka	Jumlah Penempatan	Jenis Deposito	Saldo per 31 Desember 2024	Keterangan (Aktif/Tidak) Bila Tidak Berikan Alasan
1	1023000080	Bupati Inhil QQ PT. Bara Batu Ampar Prima / Jaminan Kesungguhan	02/02/2012	47.313.750,00	Deposito	87.648.533,00	Aktif
2	1023000085	Bupati Inhil QQ PT. Bara Batu Ampar Prima / Jaminan Reklamasi	20/02/2013	822.735.000,00	Deposito	1.429.611.221,00	Aktif
3	1023000086	Bupati Inhil QQ PT. Keritang Buana Mining / Jaminan Reklamasi	26/11/2014	29.034.300,00	Deposito	45.482.538,00	Aktif
4	1023000089	Bupati Inhil QQ PT. Kemuning Tambang Sentosa / Jaminan Reklamasi	18/06/2015	147.015.250,00	Deposito	222.245.347,00	Aktif
5	1023000078	Bupati Inhil QQ PT. Bara Mitra Sejahtera / Jaminan Kesungguhan	27/10/2011	291.681.000,00	Deposito	552.543.098,00	Aktif
6	1023000077	Bupati Inhil QQ PT. Kutai Tamindo Busak / Jaminan Kesungguhan	11/08/2011	280.741.500,00	Deposito	537.256.531,00	Aktif
7	1023000088	Bupati Inhil QQ PT. Keritang Buana Mining / Jaminan Reklamasi	17/06/2015	167.650.000,00	Deposito	256.176.343,00	Aktif
8	1023000084	Bupati Inhil QQ PT. Keritang Buana Mining / Jaminan Penutupan Tambang	17/06/2015	134.857.860,00	Deposito	206.068.081,00	Aktif
	TOTAL			1.921.028.660,00		3.337.031.692,00	



BAB VII

PENUTUP

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir selama Tahun 2024 dan upaya yang ditempuh dalam penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

7.1 Permasalahan

- Terbatasnya kemampuan SDM aparatur untuk mengidentifikasi tugas-tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing unit kerja untuk menata organisasi perangkat daerah yang rasional sesuai kebutuhan daerah;
- Terbatasnya SDM aparatur pengelola keuangan Daerah pada setiap SKPD terutama pada Dinas besar;
- Terlambatnya penyaluran Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat maupun Provinsi yang menyebabkan terjadinya tunda bayar terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana;
- Belum Terintegrasinya Aplikasi Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah sehingga untuk pengakuan aset tetap membutuhkan analisa kembali di akhir tahun terkait penyajian Dokumen Pendukung untuk pengakuan aset tetap;
- Belum Terakomodirnya Biaya Perolehan dalam 1 (satu) akun di Belanja Modal sehingga untuk pengakuan aset perlu dilaksanakan rekonsiliasi ulang di akhir tahun untuk mengakomodir Biaya biaya perolehan aset tetap tersebut hal ini dapat menghambat penyajian laporan keuangan tepat waktu;
- Penyesuaian Aplikasi Pengelolaan keuangan daerah menjadi 1 (satu aplikasi) belum optimal karena aplikasi SIPD masih digunakan dalam tahapan perencanaan dan pengggaran belum pada tingkatan penatausahaan perbendaharaan, penatausahaan asset dan akuntansi;
- Terdapat beberapa kegiatan fisik dengan sumber APBD maupun sumber dana dari DAK terlambat melakukan proses lelang/tender sehingga mengakibatkan proses pelaksanaannya menjadi terlambat dan terdapat kegiatan gagal lelang serta putus kontrak.

7.2 Pemecahannya

- Perlu peningkatan kualitas SDM Aparatur bagi Pengelola Keuangan Daerah melalui Pendidikan dan Pelatihan bagi PNS dibidang Pengelolaan Keuangan.
- Mengoptimalkan kontrol terhadap Penganggaran Belanja Modal pada saat asistensi pembuatan RKA, membuat aturan dan SOP yang jelas dan terarah terhadap penganggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah.
- Mengintegrasikan Sistem Pengelolaan Keuangan daerah menjadi satu sistem yang memiliki output yang sejalan mulai dari penganggaran sampai dengan pelaporan dan merekrut tenaga akuntansi terutama pada dinas-dinas besar yang berpotensi menyebabkan terlambatnya konsolidasi penyusunan LKPD Kabupaten Indragiri Hilir.
- Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait penyaluran sisa dana transfer dan pencairan Dana Bagi Hasil daerah untuk memenuhi kebutuhan utang belanja jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- Perlu dilakukan pembinaan teknis pengelolaan barang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 kepada Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah
- Melakukan kesepakatan dengan pihak ketiga apabila TKD tidak dapat disalurkan pada tahun berjalan maka akan menjadi pekerjaan tunda bayar yang akan disalurkan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam perjanjian kontrak.
- Menghimbau seluruh SKPD melalui media elektronik untuk segera menginput SPJ dan Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Instruksi Pemerintah.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

- h. Menerbitkan Surat Edaran Bupati Indragiri Hilir agar seluruh SKPD di Kabupaten Indragiri Hilir dapat segera menghitung dan merealisasikan segala pengeluaran Belanja sampai dengan batas waktu yang di tentukan.
- i. Menyiapkan aturan penyesuaian terkait regulasi baru yang telah diterbitkan oleh pemerintah Pusat baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.
- j. Mengoptimalkan penggunaan Aplikasi SIPD dalam hal penatausahaan Perbendaharaan, Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, serta optimalisasi aplikasi e-BMD terintegrasi ke SIPD RI.
- k. Menerbitkan SPD yang di sesuaikan dengan Kondisi Keuangan Daerah untuk setiap SKPD guna mengontrol pengeluaran terhadap Anggaran yang telah disesuaikan oleh SKPD pada Pergeseran Anggaran Tahun 2024.
- l. Melakukan percepatan penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan mempercepat proses lelang/tender kegiatan fisik serta melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan secara rutin setiap bulannya.

BUPATI INDRAGIRI HILIR



HERMAN

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Pajak Daerah	136.819.451.098,00	12.776.783.462,00	369.546.733,00	149.226.687.827,00
2	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Retribusi Daerah	11.595.218.952,20	0,00	0,00	11.595.218.952,20
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Piutang Retribusi Daerah	320.750.000,00	0,00	6.250.000,00	314.500.000,00
3	BLUD RSUD Puri Husada	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	10.451.986.802,00	16.193.864.501,00	10.451.986.802,00	16.193.864.501,00
	BLUD RSUD Tengku Sulung	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	172.320.200,00	547.145.200,00	172.320.200,00	547.145.200,00
	BLUD RSUD Raja Musa	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	959.747.500,00	1.046.870.800,00	959.747.500,00	1.046.870.800,00
	BLUD Puskesmas	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	2.280.000,00	159.517.000,00	2.280.000,00	159.517.000,00
	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	30.467.288.014,44	1.441.074.189,24	0,00	31.908.362.203,68
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	70.081.205,08	647.446.893,40	22.314.235,08	695.213.863,40
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	15.276.068.898,19	48.612.769.020,00	15.276.068.898,19	48.612.769.020,00
Jumlah			206.135.192.669,91	81.425.471.065,64	27.260.514.368,27	260.300.149.367,28

BUPATI INDRAGIRI HILIR



HERMAN

LAMPIRAN IX : RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Nomor : 4 Tahun 2025
Tanggal : 14 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Jenis Piutang	Jumlah Piutang	Jumlah Penyisihan	Jumlah Piutang Bersih
1	2	3	4	5=3-4
1	Piutang Pajak Daerah	149.226.687.827,00	118.265.676.845,21	30.961.010.981,79
2	Piutang Retribusi Daerah	11.909.718.952,20	11.909.718.952,20	0,00
3	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	50.550.973.568,08	24.675.304.689,96	25.875.668.878,12
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	48.612.769.020,00	243.063.845,11	48.369.705.174,89
Jumlah		260.300.149.367,28	155.093.764.332,48	105.206.385.034,80

BUPATI INDRAGIRI HILIR



HERMAN

LAMPIRAN X : RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Nomor : 4 Tahun 2025
Tanggal : 14 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama SKPD	Jumlah Dana Bergulir	Jumlah Penyisihan Dana Bergulir	Jumlah Piutang Bersih
1	2	3	4	5=3-4
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah (<i>Inhil Revolving Fund</i> di PT Bank Riau)	7.046.093.555,00	6.837.042.500,00	209.051.055,00
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah (<i>Dana Channeling</i> di BPR Gemilang)	1.131.427.376,00	1.131.427.376,00	0,00
Jumlah		8.177.520.931,00	7.968.469.876,00	209.051.055,00

BUPATI INDRAGIRI HILIR



HERMAN

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah (Perda)	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan Awal Tahun	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah Modal yang disertakan sampai dengan Akhir Tahun ini	Sisa Modal yang belum disertakan	Hasil Penyertaan Modal Daerah Tahun ini	Jumlah Modal yang diterima Kembali Tahun ini	Jumlah Sisa Modal yang disertakan sampai dengan Tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13
1	2018	PT Bank Riau Kepri	Nomor 1 Tahun 2018	Uang	67.877.200.000,00	67.877.200.000,00	0,00	67.877.200.000,00	0,00	0,00	0,00	67.877.200.000,00
2	2018	PT BPR Gemilang	Nomor 2 Tahun 2018	Uang	2.125.000.000,00	20.597.069.380,37	0,00	20.597.069.380,37	0,00	0,00	0,00	19.674.173.733,74
3	2004	PT Gemilang Citra Mandiri		Uang	0,00	4.200.000.000,00	0,00	4.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000.000,00
4	2001	PT RIAU AIRLINES (RAL)		Uang	0,00	2.429.775.000,00	0,00	2.429.775.000,00	0,00	0,00	0,00	2.429.775.000,00
5		PDAM Tirta Indragiri		Uang	0,00	13.403.161.565,59	0,00	13.403.161.565,59	0,00	0,00	0,00	13.403.161.565,59
6	2019	PT. Kelapa Indragiri Hilir Gemilang	Nomor 5 Tahun 2019	Uang	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah					72.002.200.000,00	108.507.205.945,96	0,00	108.507.205.945,96	0,00	0,00	0,00	107.584.310.299,33

RUPATI INDRAGIRI HILIR



HERMAN

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Dinas Pendidikan	1.057.517.576.280,35	93.500.842.444,19	17.146.199.958,26	1.133.872.218.766,28
2	Dinas Kesehatan	363.706.540.676,17	28.272.987.110,41	8.085.805.553,90	383.893.722.232,68
3	Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan	219.130.774.521,34	9.467.546.948,49	911.496.299,00	227.686.825.170,83
4	Rsud Puri Husada Blud	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung	50.370.374.558,29	1.765.665.531,00	34.389.111,00	52.101.650.978,29
6	Rsud Tengku Sulung Blud	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa	85.309.424.307,37	8.834.106.630,00	0,00	94.143.530.937,37
8	Rsud Raja Musa Blud	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.487.927.746.619,74	176.048.491.264,96	47.715.088.143,64	2.616.261.149.741,06
10	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	573.936.572.583,27	27.644.259.717,00	0,00	601.580.832.300,27
11	Satuan Polisi Pamong Praja	8.398.689.204,39	0,00	0,00	8.398.689.204,39
12	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	18.197.155.615,87	1.837.018.820,00	0,00	20.034.174.435,87
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27.488.485.180,67	25.701.351,00	0,00	27.514.186.531,67
14	Dinas Sosial	8.091.591.063,96	29.190.800,00	8.312.800,00	8.112.469.063,96
15	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	6.853.083.406,10	109.063.716,00	1.107.532.000,00	5.854.615.122,10
16	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	10.447.825.948,00	2.130.341.200,00	970.000,00	12.577.197.148,00
17	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	45.976.133.524,70	2.173.012.190,80	7.575.500,00	48.141.570.215,50
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	8.863.612.195,00	243.581.186,00	0,00	9.107.193.381,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	26.607.080.392,00	194.445.000,00	0,00	26.801.525.392,00
20	Dinas Perhubungan	288.177.647.951,41	6.534.179.390,00	41.018.600,00	294.670.808.741,41
21	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	8.825.841.288,01	327.859.500,00	24.377.000,00	9.129.323.788,01
22	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	3.268.094.650,00	55.987.000,00	7.630.000,00	3.316.451.650,00
23	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.565.808.938,00	0,00	60.942.000,00	4.504.866.938,00
24	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	133.623.876.045,51	8.916.209.481,00	58.760.000,00	142.481.325.526,51
25	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	30.981.114.715,61	326.141.439,00	8.889.800,00	31.298.366.354,61
26	Dinas Perikanan	21.075.802.466,19	52.922.150,00	12.453.250,00	21.116.271.366,19
27	Dinas Perkebunan	52.543.225.088,25	65.190.300,00	69.154.700,00	52.539.260.688,25
28	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan	31.869.944.718,23	11.145.943.969,89	1.958.000,00	43.013.930.688,12
29	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	78.997.537.856,81	159.908.252,00	0,00	79.157.446.108,81

No.	Nama SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
30	Sekretariat Daerah	231.036.930.125,64	611.725.974,21	1.862.024.832,00	229.786.631.267,85
31	Sekretariat DPRD	116.958.306.890,00	2.615.010.030,00	2.021.748.630,00	117.551.568.290,00
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.843.466.990,92	436.689.900,00	42.060.900,00	10.238.095.990,92
33	Badan Pendapatan Daerah	14.481.052.399,63	365.602.372,00	48.396.932,00	14.798.257.839,63
34	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	7.227.986.245,00	1.537.255.000,00	8.060.000,00	8.757.181.245,00
35	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	8.241.779.296,43	111.707.025,00	0,00	8.353.486.321,43
36	Inspektorat Daerah	6.590.773.025,43	592.062.000,00	20.385.000,00	7.162.450.025,43
37	Kecamatan Tembilahan	22.632.007.078,50	76.645.500,00	0,00	22.708.652.578,50
38	Kecamatan Tembilahan Hulu	8.235.452.189,00	8.100.000,00	193.269.080,00	8.050.283.109,00
39	Kecamatan Tempuling	14.510.135.591,00	74.372.500,00	325.000,00	14.584.183.091,00
40	Kecamatan Batang Tuaka	7.896.644.385,87	2.600.000,00	0,00	7.899.244.385,87
41	Kecamatan Concong	7.886.219.019,07	111.175.478,00	5.950.000,00	7.991.444.497,07
42	Kecamatan Enok	14.256.632.420,00	230.876.300,00	6.278.000,00	14.481.230.720,00
43	Kecamatan Gaung	7.402.765.000,00	20.000.000,00	0,00	7.422.765.000,00
44	Kecamatan Gaung Anak Serka	14.278.762.957,27	98.190.000,00	0,00	14.376.952.957,27
45	Kecamatan Kateman	9.263.681.991,00	22.200.000,00	0,00	9.285.881.991,00
46	Kecamatan Kempas	27.288.403.590,03	15.400.000,00	0,00	27.303.803.590,03
47	Kecamatan Kemuning	12.729.581.435,00	195.346.930,00	193.269.080,00	12.731.659.285,00
48	Kecamatan Keritang	5.785.183.443,00	47.936.000,00	2.604.000,00	5.830.515.443,00
49	Kecamatan Kuala Indragiri	4.615.900.145,00	68.111.300,00	18.450.000,00	4.665.561.445,00
50	Kecamatan Mandah	5.908.786.946,00	0,00	0,00	5.908.786.946,00
51	Kecamatan Pelangiran	7.670.426.983,00	23.000.000,00	15.000.000,00	7.678.426.983,00
52	Kecamatan Pulau Burung	2.488.397.891,00	0,00	0,00	2.488.397.891,00
53	Kecamatan Reteh	10.124.549.576,11	449.673.342,43	0,00	10.574.222.918,54
54	Kecamatan Sungai Batang	5.047.471.515,00	36.000.000,00	0,00	5.083.471.515,00
55	Kecamatan Tanah Merah	6.610.254.503,32	5.000.000,00	0,00	6.615.254.503,32
56	Kecamatan Teluk Belengkong	6.776.883.000,00	30.500.000,00	0,00	6.807.383.000,00
57	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4.849.395.482,91	250.324.000,00	0,00	5.099.719.482,91
58	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	201.221.811.752,80	4.524.675.327,00	5.788.117.430,00	199.958.369.649,80
TOTAL		6.454.611.201.663,17	392.420.774.370,38	85.528.491.599,80	6.761.503.484.433,75

BUPATI INDRAGIRI HILIR



HERMAN

LAMPIRAN XIII : RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Nomor : 4 Tahun 2025
Tanggal : 14 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Uraian	Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2023	Mutasi		Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2024
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Tanah	536.045.134.306,10	17.669.616.790,00	3.888.478.000,00	549.826.273.096,10
2	Peralatan dan Mesin	991.439.091.790,33	67.500.134.496,01	9.684.440.077,00	1.049.254.786.209,34
3	Gedung dan Bangunan	1.740.713.897.617,74	110.828.196.726,45	883.624.513,99	1.850.658.469.830,20
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	2.708.553.692.673,29	158.889.395.911,87	10.151.620.247,91	2.857.291.468.337,25
5	Aset Tetap Lainnya	14.589.136.193,51	5.600.208.250,00	6.551.797.600,00	13.637.546.843,51
6	Konstruksi dalam Pekerjaan	463.270.249.082,20	31.933.222.196,05	54.368.531.160,90	440.834.940.117,35
Jumlah		6.454.611.201.663,17	392.420.774.370,38	85.528.491.599,80	6.761.503.484.433,75

BUPATI INDRAGIRI HILIR



HERMAN

[illegible]

[illegible]

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI								REKLASIFIKASI/ PENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2024
			BERTAMBAH				BERKURANG					
			ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Sekretariat Dprd	580.704.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.704.116,00
35	Kecamatan Tembilahan	8.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150.000,00
36	Kecamatan Tembilahan Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kecamatan Tempuling	49.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.520.000,00
38	Kecamatan Batang Tuaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Kecamatan Concong	562.128.320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.128.320,70
40	Kecamatan Enok	32.374.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.374.130,00
41	Kecamatan Gaung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Kecamatan Gaung Anak Serka	49.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.830.000,00
43	Kecamatan Kateman	55.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.280.000,00
44	Kecamatan Kempas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Kecamatan Kemuning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Kecamatan Keritang	187.834.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.834.000,00
47	Kecamatan Kuala Indragiri	233.507.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.507.000,00
48	Kecamatan Mandah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Kecamatan Pelangiran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Kecamatan Pulau Burung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Kecamatan Reteh	62.795.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.795.500,00
52	Kecamatan Sungai Batang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Kecamatan Tanah Merah	49.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.445.000,00
54	Kecamatan Teluk Belengkong	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		463.270.249.082,20	0,00	616.398.198,00	31.316.823.998,05	0,00	0,00	16.567.281.401,72	37.752.858.759,18	0,00	48.391.000,00	440.834.940.117,35

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2024

No.	Nama SKPD	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Tagihan Penjualan Angsuran	1.106.950.000,00	0,00	390.600.000,00	716.350.000,00
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.106.950.000,00	0,00	390.600.000,00	716.350.000,00
2	Tuntutan Ganti Rugi	1.535.099.766,92	0,00	147.762.787,00	1.387.336.979,92
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.535.099.766,92	0,00	147.762.787,00	1.387.336.979,92
3	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	14.006.135.056,00	0,00	0,00	14.006.135.056,00
	Dinas Tanaman Pangan Holtikulturan dan Peternakan	9.274.187.056,00	0,00	0,00	9.274.187.056,00
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	4.731.948.000,00	0,00	0,00	4.731.948.000,00
4	Aset Tak Berwujud	4.066.987.200,00	39.620.900,00	0,00	4.106.608.100,00
	Dinas Pendidikan	51.288.000,00	0,00	0,00	51.288.000,00
	RSUD Puri Husada Tembilahan	59.750.000,00	0,00	0,00	59.750.000,00
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	441.200.000,00	34.620.900,00	0,00	475.820.900,00
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	71.570.500,00	0,00	0,00	71.570.500,00
	Sekretariat Daerah	414.577.000,00	0,00	0,00	414.577.000,00
	Badan Pendapatan Daerah	516.983.000,00	0,00	0,00	516.983.000,00
	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	110.898.000,00	0,00	0,00	110.898.000,00
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	797.772.000,00	0,00	0,00	797.772.000,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	361.219.100,00	0,00	0,00	361.219.100,00

No.	Nama SKPD	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
	Dinas Kesehatan	578.945.000,00	5.000.000,00	0,00	583.945.000,00
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	134.750.000,00	0,00	0,00	134.750.000,00
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	42.076.000,00	0,00	0,00	42.076.000,00
	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	274.260.000,00	0,00	0,00	274.260.000,00
	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	42.900.000,00	0,00	0,00	42.900.000,00
	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	69.050.000,00	0,00	0,00	69.050.000,00
	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	99.748.600,00	0,00	0,00	99.748.600,00
5	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(2.910.686.660,00)	(233.323.640,00)	0,00	(3.144.010.300,00)
	Dinas Pendidikan	(51.288.000,00)	0,00	0,00	(51.288.000,00)
	RSUD Puri Husada Tembilahan	(59.750.000,00)	0,00	0,00	(59.750.000,00)
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(63.320.500,00)	(29.693.680,00)	0,00	(93.014.180,00)
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	(71.570.500,00)	0,00	0,00	(71.570.500,00)
	Sekretariat Daerah	(392.399.200,00)	(7.392.600,00)	0,00	(399.791.800,00)
	Badan Pendapatan Daerah	(516.983.000,00)	0,00	0,00	(516.983.000,00)
	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(101.789.400,00)	(3.036.200,00)	0,00	(104.825.600,00)
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	(797.772.000,00)	0,00	0,00	(797.772.000,00)
	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(241.299.140,00)	(39.973.320,00)	0,00	(281.272.460,00)
	Dinas Kesehatan	(454.190.600,00)	(52.499.600,00)	0,00	(506.690.200,00)
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(4.207.600,00)	(841.520,00)	0,00	(5.049.120,00)
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	(13.475.000,00)	(2.695.000,00)	0,00	(16.170.000,00)
	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan	(91.722.000,00)	(54.852.000,00)	0,00	(146.574.000,00)
	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	(17.160.000,00)	(8.580.000,00)	0,00	(25.740.000,00)
	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(13.810.000,00)	(13.810.000,00)	0,00	(27.620.000,00)
	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	(19.949.720,00)	(19.949.720,00)	0,00	(39.899.440,00)
6	Aset Lain-Lain	161.224.284.478,15	1.320.652.080,00	0,00	162.544.936.558,15
	Dinas Pendidikan	73.490.363.841,76	0,00	0,00	73.490.363.841,76
	Dinas Kesehatan	2.378.441.695,00	0,00	0,00	2.378.441.695,00
	Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan	12.974.428.557,35	476.900.000,00	0,00	13.451.328.557,35

No.	Nama SKPD	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
	Rsud Puri Husada Blud	70.252.260,00	0,00	0,00	70.252.260,00
	Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung	247.489.785,00	0,00	0,00	247.489.785,00
	Rsud Tengku Sulung Blud	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa	168.411.500,00	0,00	0,00	168.411.500,00
	Rsud Raja Musa Blud	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	31.230.136.391,38	0,00	0,00	31.230.136.391,38
	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	256.997.400,00	0,00	0,00	256.997.400,00
	Satuan Polisi Pamong Praja	264.518.080,00	0,00	0,00	264.518.080,00
	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	17.354.000,00	0,00	0,00	17.354.000,00
	Dinas Sosial	343.850.083,00	0,00	0,00	343.850.083,00
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	539.461.604,00	0,00	0,00	539.461.604,00
	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	3.256.963.592,87	0,00	0,00	3.256.963.592,87
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	877.500,00	0,00	0,00	877.500,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	93.577.000,00	0,00	0,00	93.577.000,00
	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	197.378.083,33	0,00	0,00	197.378.083,33
	Dinas Perhubungan	8.769.160.315,36	0,00	0,00	8.769.160.315,36
	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan	32.100.000,00	0,00	0,00	32.100.000,00
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	104.886.500,00	7.630.000,00	0,00	112.516.500,00
	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu	149.934.250,00	60.942.000,00	0,00	210.876.250,00
	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.222.467.507,63	0,00	0,00	1.222.467.507,63
	Dinas Perikanan	3.404.917.500,00	0,00	0,00	3.404.917.500,00
	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Dan Kebudayaan	877.997.300,00	0,00	0,00	877.997.300,00
	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan	1.783.301.450,00	0,00	0,00	1.783.301.450,00
	Dinas Perkebunan	1.675.845.000,00	0,00	0,00	1.675.845.000,00
	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	303.359.000,00	0,00	0,00	303.359.000,00
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	285.176.900,00	0,00	0,00	285.176.900,00
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	978.362.216,00	538.500.000,00	0,00	1.516.862.216,00
	Badan Pendapatan Daerah	564.982.050,00	0,00	0,00	564.982.050,00
	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	91.067.087,00	0,00	0,00	91.067.087,00
	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	579.532.232,00	0,00	0,00	579.532.232,00
	Inspektorat Daerah	190.535.852,37	0,00	0,00	190.535.852,37

No.	Nama SKPD	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	351.385.300,00	0,00	0,00	351.385.300,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	415.024.202,00	0,00	0,00	415.024.202,00
	Sekretariat Daerah	1.417.665.317,00	9.961.000,00	0,00	1.427.626.317,00
	Sekretariat Dprd	5.721.821.056,00	0,00	0,00	5.721.821.056,00
	Kecamatan Tembilahan	353.990.950,00	0,00	0,00	353.990.950,00
	Kecamatan Tembilahan Hulu	465.870.250,00	193.269.080,00	0,00	659.139.330,00
	Kecamatan Tempuling	161.196.200,00	0,00	0,00	161.196.200,00
	Kecamatan Batang Tuaka	565.757.850,00	0,00	0,00	565.757.850,00
	Kecamatan Concong	363.572.207,63	0,00	0,00	363.572.207,63
	Kecamatan Enok	536.979.000,00	0,00	0,00	536.979.000,00
	Kecamatan Gaung	183.383.200,00	0,00	0,00	183.383.200,00
	Kecamatan Gaung Anak Serka	300.638.500,00	0,00	0,00	300.638.500,00
	Kecamatan Kateman	238.161.450,00	0,00	0,00	238.161.450,00
	Kecamatan Kempas	255.418.300,00	0,00	0,00	255.418.300,00
	Kecamatan Kemuning	119.988.350,00	0,00	0,00	119.988.350,00
	Kecamatan Keritang	281.112.000,00	0,00	0,00	281.112.000,00
	Kecamatan Kuala Indragiri	533.239.485,00	18.450.000,00	0,00	551.689.485,00
	Kecamatan Mandah	601.025.000,00	0,00	0,00	601.025.000,00
	Kecamatan Pelangiran	160.831.800,00	15.000.000,00	0,00	175.831.800,00
	Kecamatan Pulau Burung	537.723.750,00	0,00	0,00	537.723.750,00
	Kecamatan Reteh	331.799.300,00	0,00	0,00	331.799.300,00
	Kecamatan Sungai Batang	15.048.500,00	0,00	0,00	15.048.500,00
	Kecamatan Tanah Merah	144.722.676,47	0,00	0,00	144.722.676,47
	Kecamatan Teluk Belengkong	623.803.300,00	0,00	0,00	623.803.300,00
7	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	82.195.023.022,22	782.152.080,00	0,00	82.977.175.102,22
	Dinas Pendidikan	36.173.869.982,52	0,00	0,00	36.173.869.982,52
	Dinas Kesehatan	2.346.695.062,71	0,00	0,00	2.346.695.062,71
	Rumah Sakit Umum Puri Husada	9.972.596.355,24	476.900.000,00	0,00	10.449.496.355,24
	Rumah Sakit Umum Tengku Sulung	242.062.907,80	0,00	0,00	242.062.907,80
	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa	165.867.700,00	0,00	0,00	165.867.700,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2.010.641.200,00	0,00	0,00	2.010.641.200,00
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	59.083.705,00	0,00	0,00	59.083.705,00
	Dinas Satuan Polisi Pamong Peraja	264.518.080,00	0,00	0,00	264.518.080,00
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	17.354.000,00	0,00	0,00	17.354.000,00
	Dinas Sosial	343.552.520,50	0,00	0,00	343.552.520,50

No.	Nama SKPD	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	534.849.626,22	0,00	0,00	534.849.626,22
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	3.250.213.035,73	0,00	0,00	3.250.213.035,73
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	877.500,00	0,00	0,00	877.500,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	82.856.200,00	0,00	0,00	82.856.200,00
	Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan	192.491.683,33	0,00	0,00	192.491.683,33
	Dinas Perhubungan	4.660.540.339,63	0,00	0,00	4.660.540.339,63
	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan	32.100.000,00	0,00	0,00	32.100.000,00
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	102.554.000,00	0,00	0,00	102.554.000,00
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	141.896.650,00	7.630.000,00	0,00	149.526.650,00
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	507.536.150,00	60.942.000,00	0,00	568.478.150,00
	Dinas Perikanan	2.091.757.757,14	0,00	0,00	2.091.757.757,14
	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, dan Kebudayaan	546.495.680,00	0,00	0,00	546.495.680,00
	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultur dan Peternakan	1.485.815.782,44	0,00	0,00	1.485.815.782,44
	Dinas Perkebunan	1.675.845.000,00	0,00	0,00	1.675.845.000,00
	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	257.075.150,00	0,00	0,00	257.075.150,00
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	231.424.900,00	0,00	0,00	231.424.900,00
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.021.217.084,58	0,00	0,00	1.021.217.084,58
	Badan Pendapatan Daerah	564.982.050,00	0,00	0,00	564.982.050,00
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	570.709.988,76	0,00	0,00	570.709.988,76
	Inspektorat Daerah	177.501.865,70	0,00	0,00	177.501.865,70
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	345.550.300,00	0,00	0,00	345.550.300,00
	Kecamatan Kuala Indragiri	220.766.803,75	0,00	0,00	220.766.803,75
	Kecamatan Mandah	334.862.040,19	0,00	0,00	334.862.040,19
	Kecamatan Pelangiran	153.507.848,94	18.450.000,00	0,00	171.957.848,94
	Kecamatan Pulau Burung	519.713.150,00	0,00	0,00	519.713.150,00
	Kecamatan Reteh	284.200.322,86	15.000.000,00	0,00	299.200.322,86
	Kecamatan Sungai Batang	15.048.500,00	0,00	0,00	15.048.500,00
	Kecamatan Tanah Merah	143.382.676,47	0,00	0,00	143.382.676,47
	Kecamatan Teluk Belengkong	356.652.871,43	0,00	0,00	356.652.871,43
8	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	81.599.827.000,00	5.659.138.000,00	81.599.827.000,00	5.659.138.000,00

No.	Nama SKPD	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	81.599.827.000,00	5.659.138.000,00	81.599.827.000,00	5.659.138.000,00
	Jumlah	342.823.619.863,29	7.568.239.420,00	82.138.189.787,00	268.253.669.496,29

BUPATI INDRAGIRI HILIR



HERMAN

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2024

No.	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan	Saldo Awal	Transfer dari Kas Daerah	Transfer ke Kas Daerah	Saldo Akhir	Sisa Dana yang Belum Dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			NIHIL					

BUPATI INDRAGIRI HILIR



HERMAN

LAMPIRAN XVII : RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Nomor : 4 Tahun 2025

Tanggal : 14 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
PER 31 DESEMBER 2024

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	17.823.125,00	106.775.361.366,43	106.785.145.195,43	8.039.296,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	146.332.500,00	809.192.666,67	146.483.333,33	809.041.833,34
3	Utang Belanja	32.677.189.180,91	76.818.766.794,33	21.459.343.368,15	88.036.612.607,09
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.692.676.863,91	7.212.815,00	168.065.070,74	1.531.824.608,17
Jumlah		34.534.021.669,82	184.410.533.642,43	128.559.036.967,65	90.385.518.344,60

BUPATI INDRAGIRI HILIR



HERMAN

LAMPIRAN XVIII : RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Nomor : 4 Tahun 2025

Tanggal : 14 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DAFTAR RINCIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
PER 31 DESEMBER 2024

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6=3+4-5

BUPATI INDRAGIRI HILIR



HERMAN

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No.	BUMD Daerah	Sumber a)	Sumber b)	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11=9+10
1	PT Bank Riau Kepri	Laporan Keuangan Unaudited 2024		29.899.154.000.000,00	383.737.000.000,00	702.625.000.000,00	30.985.516.000.000,00	26.484.970.000.000,00	1.065.751.000.000,00	27.550.721.000.000,00
Sub Total (1)				29.899.154.000.000,00	383.737.000.000,00	702.625.000.000,00	30.985.516.000.000,00	26.484.970.000.000,00	1.065.751.000.000,00	27.550.721.000.000,00
2	PT BPR Gemilang	Laporan Keuangan Unaudited 2024		37.695.235.931,00	125.708.186,00	7.590.546.087,00	45.411.490.204,00	27.379.763.793,00	0,00	27.379.763.793,00
Sub Total (2)				37.695.235.931,00	125.708.186,00	7.590.546.087,00	45.411.490.204,00	27.379.763.793,00	0,00	27.379.763.793,00
3	PT Gemilang Citra Mandiri			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PT Riau Airlines (RAL)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PDAM Tirta Indragiri	Laporan Keuangan Unaudited 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total (3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PT. Kelapa Indragiri Hilir	Laporan Keuangan Unaudited 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total (4)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Seluruh Bidang Industri				29.936.849.235.931,00	383.862.708.186,00	710.215.546.087,00	31.030.927.490.204,00	26.512.349.763.793,00	1.065.751.000.000,00	27.578.100.763.793,00

Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
12	13	14	15	16	17	18	19=17x18
0,00	0,00	2.085.000.000,00	3.432.710.000.000,00	0,00	3.434.795.000.000,00	0,00	5,61%
0,00	0,00	2.085.000.000,00	3.432.710.000.000,00	0,00	3.434.795.000.000,00	0,00	5,61%
0,00	0,00	18.950.000.000,00	14.509.559,00	(932.783.148,00)	18.031.726.411,00	0,00	98,94%
0,00	0,00	18.950.000.000,00	14.509.559,00	(932.783.148,00)	18.031.726.411,00	0,00	98,94%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
0,00	0,00	21.035.000.000,00	3.432.724.509.559,00	(932.783.148,00)	3.452.826.726.411,00		

BUPATI INDRAGIRI HILIR



HERMAN

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No.	BUMD Daerah	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan di luar Usaha	Beban di luar Usaha	Laba (Rugi) Sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	9	10
1	PT Bank Riau Kepri	Laporan Keuangan Unaudited 2024		1.398.836.000.000,00	975.016.000.000,00	423.820.000.000,00	58.000.000,00	117.015.000.000,00	306.863.000.000,00
Sub Total (1)				1.398.836.000.000,00	975.016.000.000,00	423.820.000.000,00	58.000.000,00	117.015.000.000,00	306.863.000.000,00
2	PT BPR Gemilang	Laporan Keuangan Unaudited 2024		9.942.751.061,00	10.854.636.576,00	(911.885.515,00)	66.703.967,00	87.601.600,00	(932.783.148,00)
Sub Total (2)				9.942.751.061,00	10.854.636.576,00	(911.885.515,00)	66.703.967,00	87.601.600,00	(932.783.148,00)
3	PT Gemilang Citra Mandiri			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PT Riau Airlines (RAL)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PDAM Tirta Indragiri	Laporan Keuangan Audited 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total (3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PT. Kelapa Indragiri Hilir	Laporan Keuangan Unaudited 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total (4)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Seluruh Bidang Industri				1.408.778.751.061,00	985.870.636.576,00	422.908.114.485,00	124.703.967,00	117.102.601.600,00	305.930.216.852,00

BUPATI INDRAGIRI HILIR



HERMAN